



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembangunan, riset dan inovasi Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RKPD

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Badan menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. rancangan KUA serta PPAS; dan
 - c. rancangan APBD tahun anggaran 2026.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya .
- (4) Kepala Badan melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

- (2) Perumusan perubahan RKPD memperhatikan visi, misi, dan Program Bupati, serta hasil kesepakatan bersama antara Bupati dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan, perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 November 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR
34



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026



**PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 34 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perlindungan-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 dapat disusun sesuai kaidah penyusunan rencana kerja tahunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara teknis disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029. RKPD memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Substansi penting RKPD ini adalah memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2026 mengintegrasikan kebijakan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia (Asta Cita) serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025–2029 ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026.

Demikian RKPD Tahun 2026 ini disusun untuk menjadi dasar penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita dalam pengabdian, melindungi kita dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara demi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Maluku Tenggara Hebat.

Langgur, _____ November 2025
BUPATI MALUKU TENGGARA

M. THAHER HANUBUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD	6
1.5. Sistematisasi Penyajian RKPD Tahun 2026	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	9
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	9
2.1.1.1. Aspek Geografi	9
2.1.1.2. Aspek Demografi	32
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	35
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi	35
2.1.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	53
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	55
2.1.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	56
2.1.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	59
2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan	64
2.1.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	65
2.1.3.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	66
2.1.3.6. Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	67
2.1.3.7. Fokus Unsur Pemerintahan Umum	68
2.1.4. Daya Saing Daerah	68
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	70
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	74
2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi	75
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	76
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan	79
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	107

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	107
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	109
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	119
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi	119
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026	119
3.1.1.1. Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	119
3.1.1.2. Perkembangan Perekonomian	120
3.1.1.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun Berjalan (2025)	122
3.1.1.4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2026	128
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026	129
3.1.2.1. Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024	129
3.1.2.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026	130
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026	132
3.1.3.1. Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	132
3.1.3.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026	134
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	142
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	142
3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah	143
3.2.1.2. Proyeksi Pendapatan Daerah	147
3.2.1.3. Kebijakan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah	148
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	148
3.2.2.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026	148
3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026	149
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	152
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	153
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	153
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	154
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku	158
4.1.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026	158
4.1.2.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku	159
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara	159
4.1.3.1. Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 – 2029	160
4.1.3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029	161
4.1.3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025 – 2029	163
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Maluku Tenggara Tahun 2026	168

4.2.1.	Tema Pembangunan Tahun 2025	168
4.2.2.	Prioritas Daerah Tahun 2026	168
4.2.3.	Telaah Aspiratif Masyarakat	169
4.2.4.	Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD	175
4.2.5.	Sasaran Kinerja Pembangunan	177
4.2.5.1.	Sasaran Indikator Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026	177
4.2.5.2.	Sasaran Kinerja Pembangunan Tahun 2026	178
4.2.6.	Program Prioritas Maluku Tenggara Tahun 2026	179
4.2.6.1.	Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi	179
4.2.6.2.	Program dan Kegiatan Prioritas yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan	182
4.2.6.3.	Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2026	183
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		203
5.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Wajib-Mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	203
5.1.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending	203
5.1.1.1.	Bidang Pendidikan	203
5.1.1.2.	Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik	206
5.1.1.3.	Bidang Pengawasan	211
5.1.2.	Rencana Kerja dan Pendanaan SPM	212
5.1.2.1.	SPM Bidang Pendidikan	212
5.1.2.2.	SPM Bidang Kesehatan	214
5.1.2.3.	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	215
5.1.2.4.	SPM Bidang Perumahan Rakyat	216
5.1.2.5.	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	218
5.1.2.6.	SPM Bidang Sosial	219
5.1.3.	Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya	220
5.1.3.1.	Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB	220
5.1.3.2.	Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik	221
5.1.3.3.	Hasil Penerimaan Pajak Rokok	221
5.1.3.4.	Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah	221
5.2.	Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Target Pembangunan Daerah	221
5.2.1.	Pencapaian Visi dan Misi	221
5.2.2.	Pelaksanaan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2026	224
5.3.	Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional	228
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		239

6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	239
6.2.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	239
6.3.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	241
BAB VII PENUTUP		249
Lampiran		250

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penyesuaian Luas Kabupaten Maluku Tenggara	9
Tabel 2.2	Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara	10
Tabel 2.3	Jarak Tempuh Ibu Kota Kecamatan Menuju Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara	12
Tabel 2.4	Kondisi Topografi di Kabupaten Maluku Tenggara	14
Tabel 2.5	Sungai di Kabupaten Maluku Tenggara	17
Tabel 2.6	Rata-Rata Kondisi Klimatologis Kabupaten Maluku Tenggara	18
Tabel 2.7	Alokasi Penggunaan Lahan Kabupaten Maluku Tenggara	18
Tabel 2.8	Objek dan Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara	21
Tabel 2.9	Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020 s.d. 2024	23
Tabel 2.10	Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan terhadap Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024	24
Tabel 2.11	Perkembangan Jumlah Nelayan Kecil Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024	24
Tabel 2.12	Jumlah Nelayan Kecil, KUB, dan KUB Sasaran Program Pemberdayaan Tahun 2020 s.d. 2024	25
Tabel 2.13	Jumlah KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024	25
Tabel 2.14	Klaster Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	26
Tabel 2.15	Klaster Pengembangan Rumput Laut Menurut Klaster Budidaya Tahun 2024	27
Tabel 2.16	Produksi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024	27
Tabel 2.17	Kontribusi Komoditi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024	28
Tabel 2.18	Perkembangan Nilai Produksi Rumput Laut Kering Tahun 2020 s.d. 2024 ...	29
Tabel 2.19	Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2024	30
Tabel 2.20	Nilai Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2024	30
Tabel 2.21	Luas Areal dan Produksi Tanaman Palawija Tahun 2024	31
Tabel 2.22	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	31
Tabel 2.23	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	33
Tabel 2.24	IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	36
Tabel 2.25	Tingkat Kemiskinan Menurut BPS Tahun 2024	40

Tabel 2.26	Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Menurut BPS dan Bapperida Tahun 2020 s.d. 2024	41
Tabel 2.27	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	43
Tabel 2.28	PDRB ADHK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah)	44
Tabel 2.29	PDRB ADHB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah)	45
Tabel 2.30	Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	46
Tabel 2.31	PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	47
Tabel 2.32	Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2024	50
Tabel 2.33	Ratschaap/Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei	54
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024	56
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024	56
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	57
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	58
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Limnas Tahun 2024	59
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024	59
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 ...	59
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	59
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024	60
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2024	60
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024	60
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	61
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024	61
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024	61
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024 ...	61
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	62

Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024	62
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024	62
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024	63
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024	63
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024	63
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 ..	63
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024	64
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024	64
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024	64
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024 ...	65
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 ...	65
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024	65
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024	66
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024	66
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2024	66
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2024	67
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024	67
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengelolaan Perbatasan Tahun 2024	67
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun 2024	68
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024	68
Tabel 2.70	IDSD di Kabupaten Maluku Tenggara	69
Tabel 2.71	Transformasi Digital di Kabupaten Maluku Tenggara	74
Tabel 2.72	Evaluasi Program RKPD Tahun 2024	79
Tabel 3.1	Target Indikator Sasaran pebmangunan Nasional Tahun 2025	122
Tabel 3.2	Arah Kebijakan dan Indikasi Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026	141
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi PAD terhadap Target APBD Tahun 2020 s.d. 2024	144

Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer terhadap Target APBD Tahun 2020 s.d. 2024	144
Tabel 3.5	Realisasi Tahunan dari Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 s.d. 2024	145
Tabel 3.6	Total Pendapatan Daerah serta Perbandingan antara Target APBD dengan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024	145
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	146
Tabel 3.8	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026	147
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026	149
Tabel 3.10	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026	152
Tabel 4.1	Program Prioritas Presiden dan PHCT Tahun 2025 s.d. 2029	155
Tabel 4.2	Sasaran Kinerja Pembangunan Wilayah Maluku	159
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029	161
Tabel 4.4	Strategi Jangka Menengah dan Arah Kebijakan Tahun 2026	163
Tabel 4.5	Usulan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	176
Tabel 4.6	Sasaran Indikator Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026	178
Tabel 4.7	Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2026	178
Tabel 4.8	Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi	179
Tabel 4.9	Strategi Kebijakan Belanja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026	185
Tabel 4.10	Strategi Kebijakan Belanja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026	191
Tabel 5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan Tahun 2026	203
Tabel 5.2	Rencana Kerja dan Pendanaan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026	206
Tabel 5.3	Rencana Kerja dan Pendanaan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pengawasan Tahun 2026	211
Tabel 5.4	Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2026	212
Tabel 5.5	Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2026	214
Tabel 5.6	Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026	216
Tabel 5.7	Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2026	217
Tabel 5.8	Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2026	218
Tabel 5.9	Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2026	219

Tabel 5.10	Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Target Pembangunan Daerah Tahun 2026	221
Tabel 5.11	Pelaksanaan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2026	224
Tabel 5.12	Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2026	228
Tabel 6.1	IKU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026	239
Tabel 6.2	IKD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026.....	239
Tabel 6.3	IKK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026.....	241

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RKPD Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1	Luas Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan	11
Gambar 2.2	Posisi Jalur Transportasi Internasional Kabupaten Maluku Tenggara	13
Gambar 2.3	Posisi Geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Potensi Perikanan	13
Gambar 2.4	Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.....	15
Gambar 2.5	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara	20
Gambar 2.6	Tingkat Kerentanan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	20
Gambar 2.7	Tren IRB Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2015 s.d. 2024	21
Gambar 2.8	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024	23
Gambar 2.9	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Rumput Laut Tahun 2020 s.d. 2024	29
Gambar 2.10	Areal Tanam dan Produksi Kelapa di Provinsi Maluku Tahun 2024	32
Gambar 2.11	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	33
Gambar 2.12	Persebaran Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024	34
Gambar 2.13	Data Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024	35
Gambar 2.14	Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	36
Gambar 2.15	RLS dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	37
Gambar 2.16	HLS dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	38
Gambar 2.17	UHH dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	39
Gambar 2.18	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	40
Gambar 2.19	Indeks P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	41
Gambar 2.20	PDRB ADHK, PDRB ADHB dan LPE Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	44
Gambar 2.21	Lapangan Usaha Dominan Pembentuk Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	47
Gambar 2.22	PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	48
Gambar 2.23	Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara (YoY) dan Perbandingannya dengan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024	49

Gambar 2.24	Perbandingan Inflasi Bulanan (<i>MtM</i>) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	49
Gambar 2.25	Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	52
Gambar 2.26	Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	53
Gambar 2.27	Sebaran Ohoi untuk Kebutuhan SPAM di Kabupaten Maluku Tenggara	57
Gambar 2.28	Sebaran Ohoi untuk Kebutuhan SPAL di Kabupaten Maluku Tenggara	58
Gambar 2.29	Permasalahan Pilar IDSD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	69
Gambar 2.30	Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024.....	70
Gambar 2.31	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024.....	71
Gambar 2.32	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	72
Gambar 2.33	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024.....	73
Gambar 2.34	Proporsi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024.....	73
Gambar 2.35	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024.....	75
Gambar 2.36	TPAK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	76
Gambar 2.37	Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	77
Gambar 2.38	Perbandingan Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Tahun 2024	78
Gambar 2.39	Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	108
Gambar 3.1	Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	119
Gambar 3.2	Evaluasi Pencapaian Sasaran Pembangunan dan Prioritas Nasional Tahun 2024.....	120
Gambar 3.3	Kerangka Pikir Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025	124
Gambar 3.4	Capaian Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2024.....	130
Gambar 3.5	Capaian Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.....	134
Gambar 3.6	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Eknomoi Kabupaten Maluku Tenggara	140
Gambar 4.1	Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 s.d. 2029	154
Gambar 4.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026	159
Gambar 4.3	Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029	160
Gambar 4.4	Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029	161
Gambar 4.5	Program Prioritas Daerah Tahun 2026.....	168

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kedudukan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah antara lain:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, RKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai dokumen penjabaran dari RPJMD, maka RKPD disusun dalam kaidah untuk menjawab pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 adalah penjabaran tahun kesatu, dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029. Rumusan kebijakan dalam RPJMD ditujukan untuk mewujudkan Visi: **Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan, Menuju Maluku Tenggara Hebat.** Visi ini dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi RPJMD yang kemudian dielaborasi dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar penyusunan program RKPD Tahun 2026.

RKPD sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Untuk itu, substansi RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 memuat pula kesesuaian serta dukungan daerah dalam mendukung

pencapaian Asta Cita dan 8 (delapan) prioritas nasional, 17 (tujuh belas) program prioritas presiden, 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan termasuk keselarasan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif.

RKPD tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya menjadi *baseline* dan sekaligus sebagai referensi perumusan kebijakan.

RKPD Tahun 2026 mengintegrasikan berbagai masukan, usul dan saran dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Hal ini sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, serta politis.

Keseluruhan pendekatan ini, diimplementasikan dalam rangkaian tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026, dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD secara teknokratis, dibahas dalam forum-forum partisipatif, telaah dan integrasi kebijakan pusat, provinsi dan usulan masyarakat, serta mengakomodir janji kerja Kepala Daerah dan usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai manifestasi pendekatan politis.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (Perkada). Di mana dengan penetapannya melalui Peraturan Kepala Daerah, maka RKPD juga berfungsi sebagai instrument evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan, program kerja dan indikator kinerja beserta target-target yang ditetapkan, selanjutnya menjadi basis pelaksanaan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan pembangunan di Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 sangat strategis dalam kerangka pencapaian target jangka menengah daerah. RKPD ini disusun dengan muatan yang merujuk secara komprehensif pada RPJMD 2025–2029.

Cita-cita dan perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam periode pembangunan 2025–2029, dimulai dari pelaksanaan RKPD tahun 2026. Sehingga dengan demikian RKPD Tahun 2026 menjadi landasan yang menentukan pencapaian Visi dan Misi RPJMD, untuk mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan, menuju Maluku Tenggara Hebat.

1.2. Dasar Hukum

RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 disusun dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

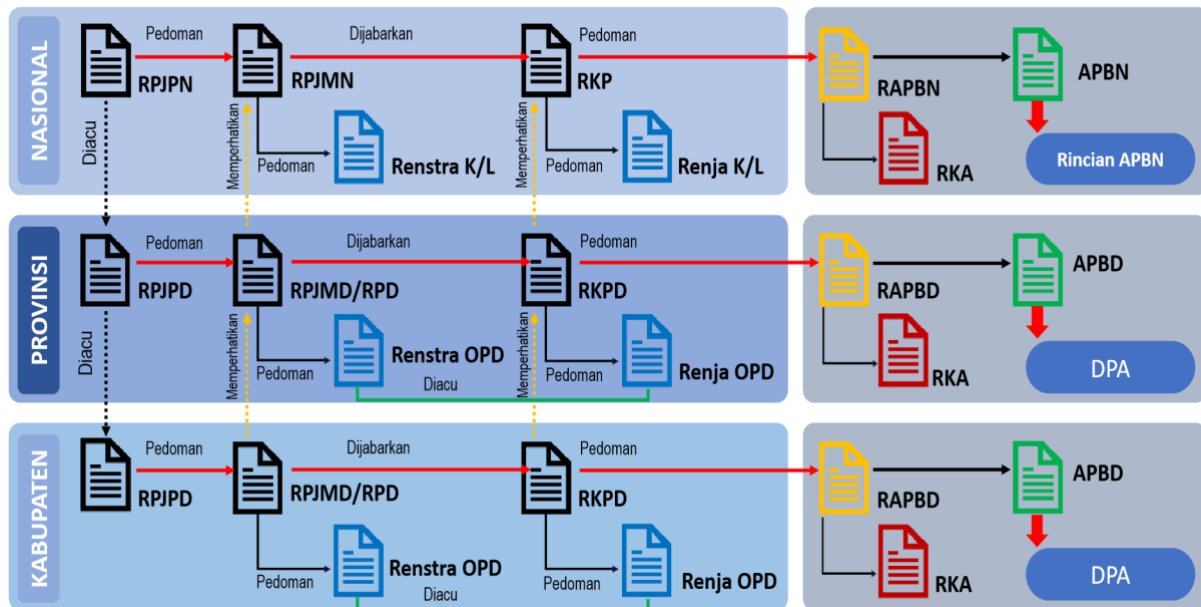
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 246);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 255);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256).
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antardokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional telah diatur dalam Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Hubungan antardokumen perencanaan pembangunan, disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Hubungan RKPD Tahun 2026 dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Penjelasan:

1. RKPD merupakan dokumen perencanaan di tingkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 adalah penjabaran tahun kesatu, dari RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029;
2. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026;
3. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan/atau menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 menjadi pedoman bagi 44 (empat puluh empat) OPD di Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyusun dan/atau menyempurnakan Rencana Kerja OPD masing-masing;
4. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, yang dimulai dari tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 guna penyusunan APBD Tahun 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RKPD sebagai berikut.

1. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
2. Sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun Renja PD Tahun 2026;
3. Sebagai instrument untuk menjamin konsistensi antara substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan substansi Rencana Pembangunan Tahunan, dalam keterkaitan dengan RKP dan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026; dan
4. Sebagai pedoman evaluasi penyelenggaraan pembangunan tahun 2026.

1.5. Sistematika Penyajian RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan Target Capaian Rencana Kerja Tahun 2026 dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

Aspek Geografi menguraikan kondisi dan karakteristik alam Kabupaten Maluku Tenggara. Bagian ini diuraikan dalam sub aspek luas dan batas wilayah administratif, letak, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan, wilayah rawan bencana dan potensi sumber daya alam.

a. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2–2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, tanggal 25 April 2025, luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara adalah 1.016,082 kilo meter persegi. Luas wilayah ini merupakan pemutakhiran atas luasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043, seluas 1.008,58 kilo meter persegi.

Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini sudah mengalami beberapa kali penyesuaian. Luas awal pada saat pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1953 adalah 1.848.575,8 kilo meter persegi. Penyesuaian ini diakibatkan adanya pemekaran daerah otonom baru serta perubahan kebijakan pemerintah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penyesuaian Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara

Uraian	Luas Wilayah	Tahun	Keterangan
1. Saat Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara	1.848.575,8 km ²	1958	Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 23 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
2. Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	119.880 km ²	1999-2003	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru	34.821km ²	2003-2007	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru
4. Pembentukan Kota Tual	4.212,51 km ²	2007-2014	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah (laut adalah kewenangan Provinsi)	1.031,81km ²	2019-2024	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan Data Wilayah Pemerintahan Tahun 2019.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	1.008,58 km ²	2024-2025	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah

Uraian	Luas Wilayah	Tahun	Keterangan
Maluku Tenggara			Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256)
7. Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau	1.016,082	2025	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2–2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Kabupaten Maluku Tenggara adalah daerah berciri kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 75 pulau. Pulau yang dihuni sebanyak 12 pulau dan 63 pulau sampai saat ini tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat menjalankan usaha. Dua pulau terbesar yang sekaligus menjadi pusat kegiatan masyarakat adalah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei kecil.

Tabel 2.2
Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara

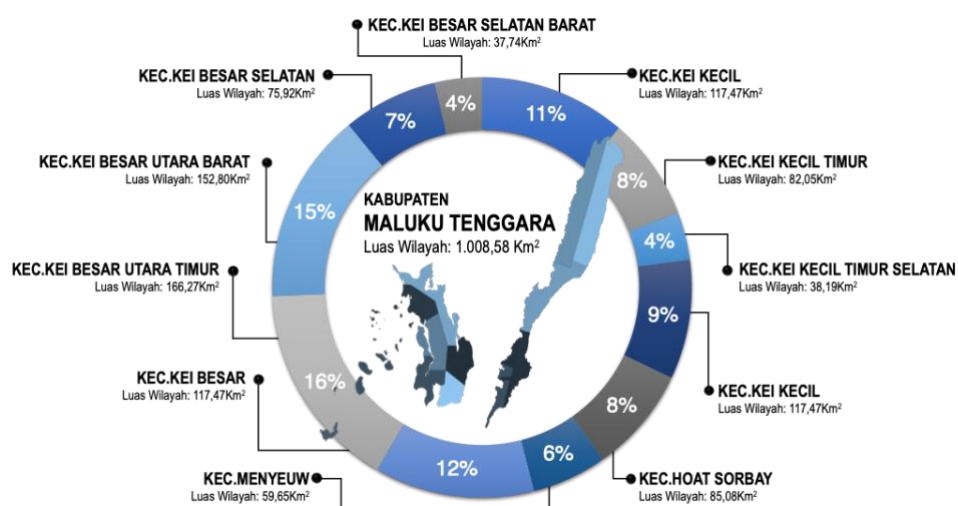
No	Nama Pulau	Keterangan	No	Nama Pulau	Keterangan
1	Pulau Akran	Tidak Berpenghuni	39	Pulau Nuhu Yuthu	Berpenghuni/PPKT
2	Pulau Amut	Tidak Berpenghuni	40	Pulau Nura	Tidak Berpenghuni
3	Pulau Anan	Tidak Berpenghuni	41	Pulau Ohoiew	Tidak Berpenghuni
4	Pulau Aran Kot	Tidak Berpenghuni	42	Pulau Ohoitir	Berpenghuni
5	Pulau Aran Laai	Tidak Berpenghuni	43	Pulau Ohoiwa	Berpenghuni
6	Pulau Daar	Tidak Berpenghuni	44	Pulau Sawyer	Tidak Berpenghuni
7	Pulau Dianpulau	Berpenghuni	45	Pulau Silaar	Tidak Berpenghuni
8	Pulau Ditanloy	Tidak Berpenghuni	46	Pulau Tangwain	Tidak Berpenghuni
9	Pulau Duvin	Tidak Berpenghuni	47	Pulau Tanimbar Kei	Berpenghuni
10	Pulau Er	Tidak Berpenghuni	48	Pulau Tarwa	Berpenghuni
11	Pulau Far	Tidak Berpenghuni	49	Pulau Ur	Berpenghuni
12	Pulau Hoat	Tidak Berpenghuni	50	Pulau Varkukur	Tidak Berpenghuni
13	Pulau Ivat	Tidak Berpenghuni	51	Pulau Vathabo	Tidak Berpenghuni
14	Pulau Karodi	Tidak Berpenghuni	52	Pulau Vatkaba	Tidak Berpenghuni
15	Pulau Kei Kecil	Berpenghuni	53	Pulau Vatkab	Tidak Berpenghuni
16	Pulau Labulin	Tidak Berpenghuni	54	Pulau Vatmanir	Tidak Berpenghuni
17	Pulau Lasmanuk	Tidak Berpenghuni	55	Pulau Vatnam	Tidak Berpenghuni
18	Pulau Lea	Tidak Berpenghuni	56	Pulau Vatnesor	Tidak Berpenghuni
19	Pulau Lesmanuk	Tidak Berpenghuni	57	Pulau Vatngaruw	Tidak Berpenghuni
20	Pulau Lik	Berpenghuni	58	Pulau Vatngerit	Tidak Berpenghuni
21	Pulau Lor An Ret	Tidak Berpenghuni	59	Pulau Vatniv	Tidak Berpenghuni
22	Pulau Manir	Berpenghuni	60	Pulau Vatroahoi	Tidak Berpenghuni
23	Pulau Mardoksarwak	Tidak Berpenghuni	61	Pulau Vatsau	Tidak Berpenghuni

No	Nama Pulau	Keterangan	No	Nama Pulau	Keterangan
24	Pulau Masular	Tidak Berpenghuni	62	Pulau Vatslom	Tidak Berpenghuni
25	Pulau Meuhu	Tidak Berpenghuni	63	Pulau Vatvangam	Tidak Berpenghuni
26	Pulau Nai	Tidak Berpenghuni	64	Pulau Vatvyah	Tidak Berpenghuni
27	Pulau Nasular	Tidak Berpenghuni	65	Pulau Vatwihian	Tidak Berpenghuni
28	Pulau Ngaf	Tidak Berpenghuni	66	Pulau Vaut Lelen	Tidak Berpenghuni
29	Pulau Ngirit	Tidak Berpenghuni	67	Pulau Vaut Vihian Koit	Tidak Berpenghuni
30	Pulau Ngiru	Tidak Berpenghuni	68	Pulau Vaut Vihian Laai	Tidak Berpenghuni
31	Pulau Ngodan	Tidak Berpenghuni	69	Pulau Waha	Tidak Berpenghuni
32	Pulau Nura	Tidak Berpenghuni	70	Pulau War	Tidak Berpenghuni
33	Pulau Nuhuru	Tidak Berpenghuni	71	Pulau Warbal	Berpenghuni
34	Pulau Nuhu Sau	Tidak Berpenghuni	72	Pulau Warhu	Tidak Berpenghuni
35	Pulau Nuhuta	Tidak Berpenghuni	73	Pulau Watlus	Tidak Berpenghuni
36	Pulau Nuhutuwau	Tidak Berpenghuni	74	Pulau Watokmas	Tidak Berpenghuni
37	Pulau Nuhu Yananhu	Berpenghuni	75	Pulau Witir	Tidak Berpenghuni
38	Pulau Nuhuyanko	Tidak Berpenghuni			

Sumber: RTRW Kab. Maluku Tenggara, Tahun 2024–2043

Secara Administratif, Kabupaten Maluku Tenggara terbagi atas 11 kecamatan, 190 Ohoi dan 1 Kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah administrasi terbesar adalah Kecamatan Kei Besar Utara Timur yaitu 16,49 persen dari total luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil adalah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, dengan porsi sebesar 3,74 persen.

Gambar 2.1
Luas Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan



Sumber: RTRW Kab. Maluku Tenggara, 2024–2043

Kecamatan dengan jumlah ohoi terbanyak adalah Kecamatan Kei Besar sebanyak 37 ohoi, diikuti Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebanyak 30 ohoi. Kecamatan dengan jumlah ohoi paling sedikit adalah Kecamatan Manyeuw, sebanyak 9 Ohoi. Di Pulau Kei Besar terdapat 115 Ohoi, di Pulau Kei

Kecil terdapat 72 ohoi, dan 3 ohoi lainnya terletak di pulau–pulau kecil, sebelah barat Pulau Kei Kecil. Dalam hal rentang kendali, Kecamatan Kei Besar Utara Timur adalah kecamatan dengan jarak tempuh paling jauh ke ibukota Kabupaten Maluku Tenggara. Jarak tempuh ibukota kecamatan menuju ibukota Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jarak Tempuh Ibu Kota Kecamatan Menuju
Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Ohoi	Jarak Tempuh Ke Langgur
1	Kei Kecil	Langgur	15	0,00
2	Kei Kecil Timur	Rumat	18	24,35
3	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ternate	11	41,62
4	Kei Kecil Barat	Ohoira	10	24,99
5	Hoat Sorbay	Tetoat	13	12,85
6	Manyeuw	Rumadian	9	11,12
7	Kei Besar	Elat	37	38,44
8	Kei Besar Utara Timur	Hollat	30	69,58
9	Kei Besar Utara Barat	Uwat	25	63,32
10	Kei Besar Selatan	Weduar	10	40,50
11	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	13	43,91

b. Letak Astronomis dan Posisi Strategis

Secara astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada 5° 12' 19,427" – 6° 06' 18,275" Lintang Selatan dan 132° 21' 39,082" – 133° 15' 31,442" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura; Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura.

Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada gugusan Kepulauan Kei, di persimpangan 2 (dua) lautan besar yaitu: Laut Banda dan Laut Arafura. Kabupaten Maluku Tenggara juga terhubung dengan Samudera Hindia di bagian Selatan.

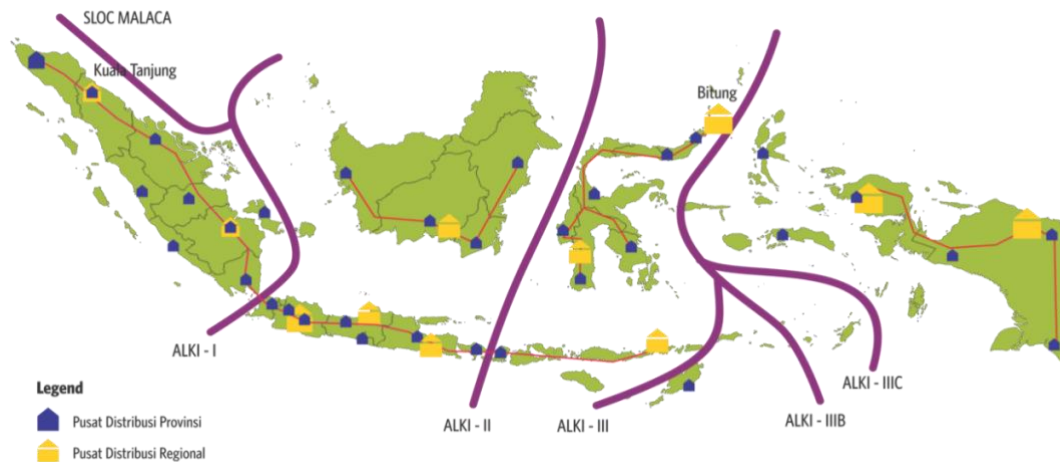
Posisi ini memperkuat aspek geopolitik dan geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Dari aspek geopolitik, sebagian wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara adalah wilayah perbatasan negara dan merupakan jalur transportasi internasional.

Posisi sebagai wilayah perbatasan negara diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, yang menempatkan Tanjung Weduar, Ohoi Weduar Fer di sebelah selatan Pulau Kei Besar sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (P3GN). Posisi strategis Perbatasan Negara kemudian diperkuat dengan penetapan 4 (empat) Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Tahun 2025–2029.

Posisi Startegis Kabupaten Maluku Tenggara juga berkaitan dengan Kabupaten Maluku Tenggara yang dilintasi jalur transportasi internasional. Sebagaimana penetapan Alur Laut Kepulauan

Indonesia (ALKI). Maluku Tenggara dilintasi ALKI III.C yang merupakan adaptasi dari ketetapan jalur transportasi internasional *Sea Lines of Communication (SLoC)*, meliputi Samudera Hindia – Laut Arafura – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudera Pasifik.

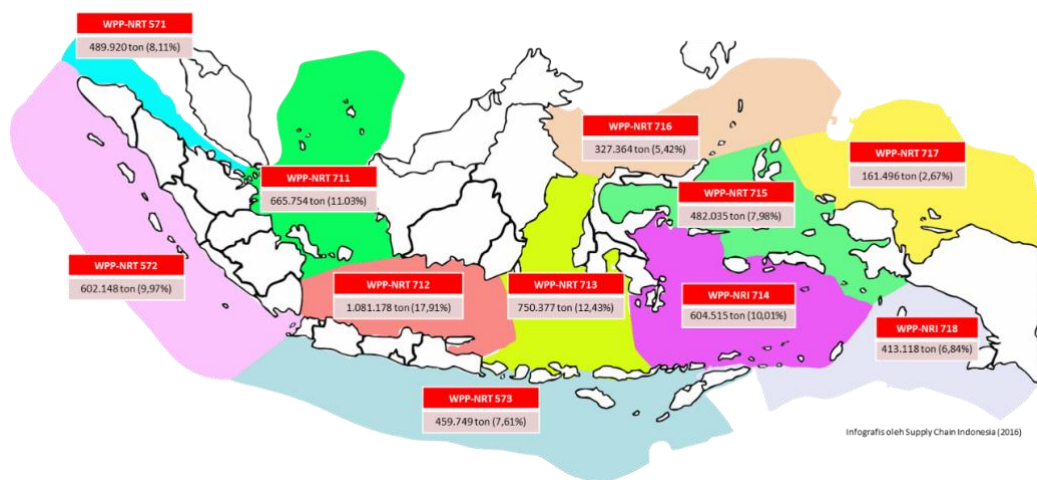
Gambar 2.2
Posisi Jalur Transportasi Internasional Kabupaten Maluku Tenggara



Secara geostrategik, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting yang cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia sehingga ke depannya perlu meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

Posisi Geoekonomi Maluku Tenggara berkaitan dengan wilayah pengelolaan potensi perikanan. Maluku Tenggara menjadi titik persimpangan 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu (WPP) 715 Laut Seram, WPP 714 Laut Banda dan WPP 718 di Laut Arafura.

Gambar 2.3
Posisi Geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Potensi Perikanan



c. Topografi

Topografi di Kabupaten Maluku Tenggara relatif beragam, khususnya antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar. Topografi Pulau Kei Kecil cenderung datar dan landai dengan ketinggian berkisar 0 s.d 100 meter di atas permukaan laut, terdapat beberapa bukit rendah di bagian tengah dan bagian utara pulau dengan ketinggian mencapai 115 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Kecil berkisar 0 – 25 derajat dengan kategori landai.

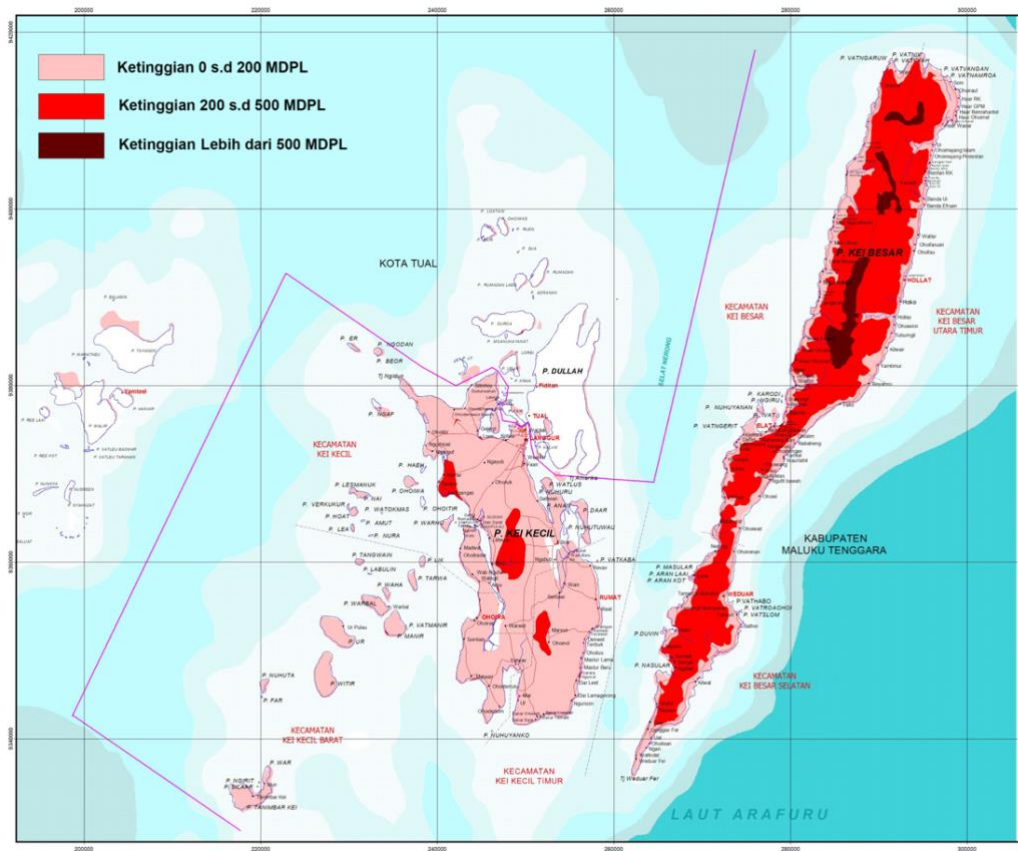
Topografi Pulau Kei Besar adalah daerah berbukit dan bergunung. Garis perbukitan membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500–800 meter. Puncak tertinggi adalah Gunung Dab, sedangkan dataran rendah hanya merupakan jalur sempit sepanjang pesisir pantai, dengan jarak rata-rata dari batas pasang tertinggi berkisar 100 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Besar dikategorikan curam dan sangat curam dengan tingkat kemiringan mencapai 15–45 derajat dan lebih dari 45 derajat pada beberapa titik.

Tabel 2.4
Kondisi Topografi di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
1	Kei Kecil	0 - 80
2	Kei Kecil Timur	0 - 80
3	Kei Kecil Timur Selatan	0 - 80
4	Kei Kecil Barat	0 - 80
5	Hoat Sorbay	0 - 110
6	Manyeuw	0 - 90
7	Kei Besar	0 - 750
8	Kei Besar Utara Timur	0 - 760
9	Kei Besar Utara Barat	0 - 710
10	Kei Besar Selatan	0 - 600
11	Kei Besar Selatan Barat	0 - 560

Peta ketinggian wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.4
Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara



d. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Indonesia (1965) Pulau/Kepulauan Kei memiliki karakteristik geologi yang terbentuk atau tersusun dari jenis tanah Podzolik, Rensina dan Lithosol. Jenis batuan di Kepulauan Kei meliputi Aluvium Undak, Terumbu Karang, Seklis Habluk, Paleogen dan Ulagan Paleozoikum.

Berdasarkan Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2006 dan Citra Landsat (2007), struktur Geologi Kabupaten Maluku Tenggara dapat dibagi dalam 8 (delapan) klaster/formasi, yaitu:

- 1) Struktur Endapan, berupa pasir, kerikil dan lumpur, di wilayah pesisir pantai dan selat;
- 2) Formasi Kai Kecil, berupa Batugamping terumbu terdiri atas coral, moluska, ganggang dan brioza yang membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan karst, dan perbukitan rendah berlerang terjal;
- 3) Formasi Ohoinol, berupa biokalkeranit yang tidak padat bersilangan dengan napal,
- 4) Formasi Elat, berupa kalkarit napal dengan sisipan napal, kalkarnit makin ke atas makin keras dengan ketebalan lapisan mencapai 1 meter, serta perlapisan bersusun;
- 5) Formasi Weduar, berupa batugamping terumbu, kapur, kalkarenit dan Napal, banyak mengandung koral, foraminifera bentos dan moluska, Napal mengandung sedikit foraminifera kecil;
- 6) Formasi Elat, berupa batugamping tersusun dari foraminifera beritos dalam matrik, makin ke atas mikritnya semakin berkurang; dan

- 7) Formasi Weryahan, berupa Napal putih kekuningan sampai kehijauan dan batugamping keabuan, berlapis baik.

Struktur dan tipologi daerah Maluku Tenggara terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu dataran pantai, yang merupakan ruang sempit di sepanjang pesisir, dengan luasan kurang lebih 1 persen dari total luas daratan; perbukitan struktural, secara umum di Pulau Kei Kecil bagian selatan dan barat, dengan luasan 44 persen dari luas daratan; serta perbukitan karst, yang terbentang di Pulau Kei Besar dan sebagian kecil dari bagian utara pulau Kei Kecil dengan luasan mencapai 55 persen dari luas daratan.

Ohoi-ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara pada umumnya terletak di wilayah pesisir pantai, tersebar di ketinggian 0–100 m. Sebaran rata-rata kedalaman (4 mil dari garis pantai di Kei Kecil (Nuhu Roa) adalah ≤ 100 m atau rata-rata slop $\leq 1,50$ yaitu di Pulau Kei Kecil Bagian Barat. Untuk Pulau Kei Besar (Nuhu Yut), sebaran rata-rata kedalaman ≤ 100 m berada di bagian Barat Laut, sedangkan bagian Barat Daya dan bagian Timur dengan rata-rata kedalaman 300 m. Tingkat kemiringan daratan pulau (island flat) di Pulau Kei Kecil berkisar antara 0-400 sedangkan untuk Pulau Kei Besar kemiringan daratan pulau adalah curam (150-400) sampai dengan sangat curam (> 400).

e. Hidrologi

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang tersebar baik di Pulau Kei Besar maupun Kei Kecil. Pulau Kei Besar dengan karakteristiknya, memiliki cukup banyak sumber mata air. Secara khusus di bagian tengah dan selatan pulau Kei Besar, serta beberapa titik di bagian utara.

Di Pulau Kei Kecil, sumber mata air terbesar adalah Sungai Nen Mas II di Kecamatan Hoat Sorbay, yang melayani sebagian besar wilayah daratan Pulau Kei Kecil. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Evav Sejahtera Maluku Tenggara dalam melayani kebutuhan air bersih di wilayah Kota Langgur, juga memanfaatkan sumber air Nen Mas II.

Tabel 2.5
Sungai di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Nama Sungai	Letak di Ohoi	Kecamatan
1	Nen Mas II	Evu	Hoat Sorbay
2	Hoar Ten	Yatwav	Kei Kecil Barat
3	Hoar Marfun	Marfun	Kei Kecil Timur Selatan
4	Hoar Manyeuw Berkat	Semawi	Kei Kecil Timur
5	Hoar Rahareng	Rahareng Atas	Kei Besar
6	Hoar Elralang	Elralang	Kei Besar
7	Hoar Tamangil	Tamangil Nuhuten	Kei Besar Selatan
8	Hoar Wear Saran	Weduar	Kei Besar Selatan
9	Hoar Aur	Ad Weraur	Kei Besar Utara Barat
10	Hoor Laai	Yerikho	Kei Besar Utara Barat
11	Hoar Vanyabeb	Dangarat	Kei Besar Utara Barat
12	Hoar Bo (Hoar Ker)	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
13	Hoar Sel	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
14	Hoar Na	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat

No	Nama Sungai	Letak di Ohoi	Kecamatan
15	Wear Tiv	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
16	Hoar Mun Kahar	Mun Kahar	Kei Besar Utara Barat
17	Hoar Sikmatan	Uwat Air	Kei Besar Utara Barat
18	Hoar Matan Niyan	Uwat Air	Kei Besar Utara Barat
19	Hoar Nahak Ohoi	Laar	Kei Besar Utara Barat
20	Hoar Lim	Wear Fravav	Kei Besar Utara Barat
21	Hoar Namun	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
22	Hoar Famdada	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
23	Hoar Laai	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
24	Hoar Lamud	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
25	Hoar Mas	Ur	Kei Besar Utara Timur
26	Hoar Vuvu	Langgiar Haar	Kei Besar Utara Timur
27	Hoar Matan	Holat Solair	Kei Besar Utara Timur
28	Hoar Raituar	Yamtimur	Kei Besar Utara Timur
29	Hoar Kok	Hoko	Kei Besar Utara Timur
30	Hoar Kilwaer	Kilwaer	Kei Besar Utara Timur
31	Hoar Holaay	Holaay	Kei Besar Utara Timur

f. Klimatologi

Iklm di kawasan Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudra Indonesia serta dibayangi Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di bagian Selatan sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Keadaan musim di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- 1) Musim Timur atau musim kemarau berlangsung dari Bulan April–Oktober.
- 2) Musim Barat atau musim hujan berlangsung berlangsung dari Bulan Oktober–Februari dengan intensitas tertinggi pada Bulan Desember dan Februari.
- 3) Musim Pancaroba berlangsung dalam Bulan Maret/April dan Oktober/November.

Angin kencang bertiup pada Bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora. Kondisi angin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- 1) Bulan April-Oktober bertiup angin Timur Tenggara.
- 2) Bulan April-September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91 persen dimana dominasi angin Tenggara sebesar 61 persen.
- 3) Bulan Oktober–Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50 persen dimana dominasi angin Barat Laut sebesar 28 persen.

Curah Hujan antara 2.000–3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil sedangkan di Pulau Kei Besar curah hujannya diatas 3.000 mm pertahun. Tahun 2011 Curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 3.121 mm per tahun atau rata–rata 260,1 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 211 hari atau rata-rata 17,58 hari hujan per bulan. Rata-rata kondisi klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1991 s.d. 2021 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.6

Rata-Rata Kondisi Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara

NO.	URAIAN	SATUAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rata-rata Temperatur	Derajat Celsius (0C)	27,00	27,00	27,00	27,00	26,90	26,10	25,50	25,30	25,90	26,80	27,40	27,30
		Derajat Farenheit (0F)	80,70	80,60	80,60	80,60	80,40	78,90	77,90	77,60	78,70	80,20	81,30	81,10
2	Temperatur Terendah	Derajat Celsius (0C)	25,90	25,90	25,80	25,80	25,90	25,30	24,90	24,70	25,20	25,80	26,10	26,00
		Derajat Farenheit (0F)	78,60	78,60	78,40	78,50	78,60	77,60	76,80	76,50	77,30	78,40	79,00	78,80
3	Temperatur Tertinggi	Derajat Celsius (0C)	27,90	27,90	27,90	28,00	27,70	26,70	26,10	26,00	26,70	27,80	28,40	28,30
		Derajat Farenheit (0F)	82,30	82,20	82,30	82,40	81,80	80,10	78,90	78,80	80,10	82,00	83,10	82,90
4	Curah Hujan (Presipitasi)	Millimeter (mm)	286,00	253,00	246,00	236,00	215,00	169,00	82,00	46,00	47,00	72,00	99,00	233,00
5	Tingkat Kelembapan Udara	Persen (%)	83,00	83,00	82,00	82,00	81,00	82,00	82,00	81,00	81,00	80,00	80,00	82,00
6	Hari Hujan	Hari (Hr)	20,00	18,00	19,00	18,00	18,00	15,00	10,00	7,00	8,00	11,00	13,00	19,00
7	Rata-rata Cahaya Matahari	Jam	8,60	8,70	8,60	8,40	8,40	8,20	8,30	8,50	8,90	9,00	9,20	8,70

Sumber: www.en.climate-data.org (diolah)

g. Penggunaan Lahan

RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023–2043 memberikan gambaran alokasi penggunaan lahan yang terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Alokasi dimaksud meliputi ruang darat, pesisir dan juga laut. Total lahan tersedia untuk berbagai aktivitas penggunaan lahan adalah 100.858,37 ha, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.7
Alokasi Penggunaan Lahan Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Kawasan	Daratan (ha)	Pesisir dan Laut (ha)	Jumlah (ha)
1	Kawasan Lindung	24.518,94	3.801,94	28.320,89
	1.1. Badan air	-	34,81	34,81
	1.2. Kawasan Perlindungan Setempat	-	3.262,16	3.262,16
	1.3. Cagar Alam	18.011,56	-	18.011,56
	1.4. Kawasan Ekosistem Mangrove	-	499,60	499,60
	1.5. Kawasan Hutan Lindung	6.326,73	-	6.326,73
	1.6. Kawasan Hutan Adat	180,66	-	180,66
	1.7. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	5,38	5,38
2	Kawasan Budidaya	72.537,48	-	72.537,48
	2.1. Hutan Produksi Tetap	5.292,70	-	5.292,70
	2.2. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	17.307,34	-	17.307,34
	2.3. Kawasan Holtikultura	7.813,28	-	7.813,28
	2.4. Kawasan Pariwisata	10,38	-	10,38
	2.5. Kawasan Perikanan Tangkap	4,63	-	4,63
	2.6. Kawasan Perkebunan	31.531,24	-	31.531,24
	2.7. Kawasan Permukiman Desa	1.727,54	-	1.727,54
	2.8. Kawasan Permukiman Perkotaan	5.836,12	-	5.836,12
	2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	117,47	-	117,47

No.	Kawasan	Daratan (ha)	Pesisir dan Laut (ha)	Jumlah (ha)
	2.10. Kawasan Peruntukan Industri	23,42	-	23,42
	2.11. Kawasan Tanaman Pangan	2.634,79	-	2.634,79
	2.12. Kawasan Transportasi	238,58	-	238,58
Total		97.056,43	3.801,94	100.858,37

Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, 2024-2043

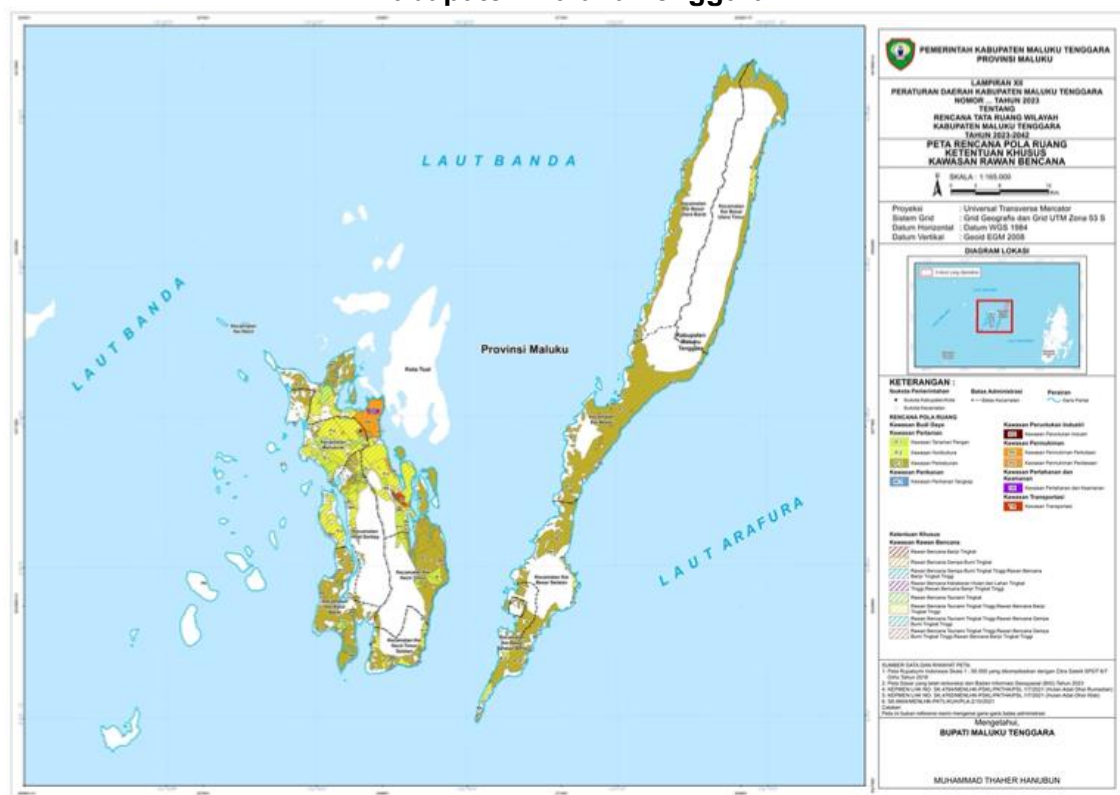
h. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis, maka dapat diidentifikasi wilayah yang menjadi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dokumen RTRW Tahun 2024–2043 meliputi:

- 1) Rawan bencana banjir bandang, tingkat tinggi;
- 2) Rawan bencana gempa bumi, tingkat tinggi;
- 3) Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, tingkat tinggi;
- 4) Rawan bencana tsunami tingkat tinggi.

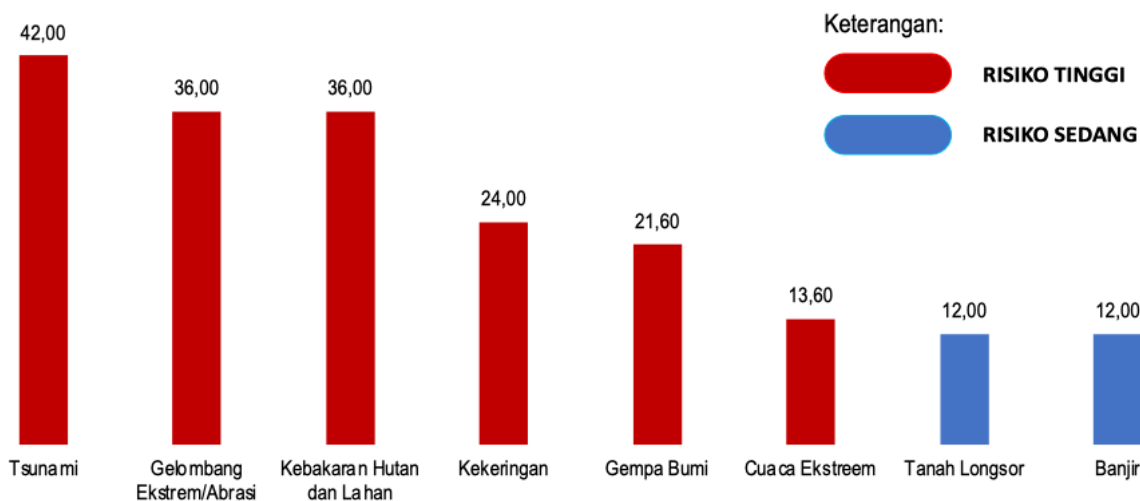
Kawasan Rawan Bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagai berikut.

Gambar 2.5
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana
Kabupaten Maluku Tenggara



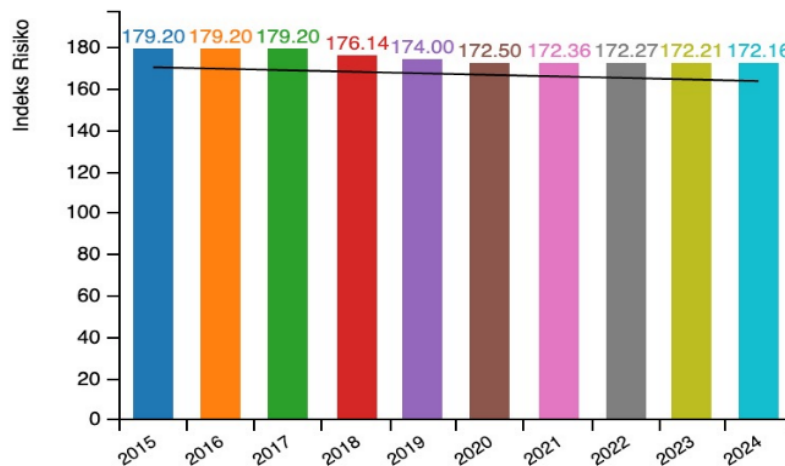
Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), potensi bencana terbesar yang berdampak pada risiko kehidupan masyarakat secara langsung adalah bencana kekeringan, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi serta cuaca ekstrem (angin kencang). Berdasarkan Indek Risiko Bencana Indonesia, tingkat kerentanan bencana menurut jenis bencana di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebagai berikut.

Gambar 2.6
Tingkat Kerentanan Bencana Menurut Jenis Bencana di
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024



BNPB merilis Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebagai gambaran resiko kebencanaan daerah yang menunjukkan tren penurunan resiko bencana di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2015-2024. Penurunan resiko bencana ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.7
Tren IRB Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2015 s.d. 2024



Tingkat kerentanan bencana menurut jenis bencana di wilayah kecamatan sebagai berikut.

i. Potensi Sumber Daya Alam

a) Pariwisata

Karakteristik wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dengan garis pantai yang panjang didukung dengan panorama alam yang indah serta tradisi, budaya dan kehidupan masyarakat yang religius menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah. Ada beberapa jenis wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata tirta, wisata religi, wisata agro, dan wisata sejarah. Potensi pariwisata disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Objek dan Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara

No	Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
I	Obyek Wisata		
1	Ngurbloat	Kecamatan Manyeuw	Wisata Bahari
2	Ngur Sarnadan	Kecamatan Manyeuw	Wisata Bahari
3	Balsorbay	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
4	Goa Hawang	Kecamatan Hoat Sorbay	Wisata Alam/Tirta
5	Pemandian Evu	Kecamatan Hoat Sorbay	Wisata Tirta
6	Dian Wakat Park	Kecamatan Hoat Sorbay	Wisata Mangrove
7	Yeer Teran Ratut	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
II	Potensi Obyek Wisata		
1	Pantai Ngjar Varat	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
2	Taman Ziarah MGR Johannes Aerts	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Religi

No	Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
3	Taman Ziarah Patung Bunda Maria Kolser	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Religi
4	Taman Ziarah Bukit Masbait	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Religi
5	Pantai Elomel	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
6	Pantai Kolser	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
7	Gua Luvat	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Alam
8	Danau Ablel	Kecamatan Manyeuw	Wisata Tirta
9	Pantai Debut	Kecamatan Manyeuw	Wisata Bahari
10	Pulai Ohoiew	Kecamatan Manyeuw	Wisata Bahari
11	Pantai Wab	Kecamatan Hoat Sorbay	Wisata Bahari
12	Makam Nen Dit Sakmas	Kecamatan Kei Kecil Timur	Wisata Budaya
13	Pantai Disuk	Kecamatan Kei Kecil Timur	Wisata Bahari
14	Monumen Kerbau Siuw	Kec.	Wisata Budaya
15	Pantai Nirun	Kec.	Wisata Bahari
16	Pantai Uf-Mar	Kec. Kei Kecil Timur Selatan	Wisata Bahari
17	Kawasan Konservasi Laut	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Bahari
18	Gua Desa Warbal	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Alam
19	Hutan Mangrove Warwut	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Mangrove
20	Desa Wisata Tanimbar Kei	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Budaya
21	Pantai Madwear	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Bahari
22	Pantai Ohoidertutu	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Bahari
23	Bukit Indah Bombay	Kecamatan Kei Besar	Wisata Alam
24	Pantai Pulau Kelapa	Kecamatan Kei Besar	Wisata Bahari
25	Desa Budaya Wulurat	Kecamatan Kei Besar	Wisata Budaya
26	Pantai Walar - Ohoiwait	Kecamatan Kei Besar	Wisata Bahari
27	Kerajinan Tembikar Elat	Kecamatan Kei Besar	Wisata Budaya
28	Kerajinan Tembikar Uat	Kecamatan Kei Besar	Wisata Budaya
29	Desa Budaya Waur	Kecamatan Kei Besar	Wisata Budaya
30	Pantai Ler Ohoilim	Kecamatan Kei Besar	Wisata Bahari
31	Tenan Bes (Nekara)	Kecamatan Kei Besar	Wisata Tirta/Bahari
32	Soinrat	Kecamatan Kei Besar	Wisata Alam
33	Bukit Kalvari Sit	Kecamatan Kei Besar	Wisata Rohani
34	Wear Baluruk Tamangil	Kecamatan Kei Besar Selatan	Wisata Tirta
35	Air Terjun Weduar	Kecamatan Kei Besar Selatan	Wisata Tirta
36	Air Terjun Ye	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Wisata Tirta
37	Pantai Weduar Feer	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Wisata Bahari
38	Air Terjun Holat	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Tirta
39	Pantai dan Air Terjun Haar	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Tirta/Bahari
40	Desa Budaya Banda Eli	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Budaya
41	Desa Wisata Wassar	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Bahari
42	Pantai Tanjung Ular	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Bahari
43	Wisata Air Terjun Ohoi AD	Kec. Kei Besar Utara Barat	Wisata Tirta

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Maluku Tenggara, 2025

b) Perikanan

Sebagai daerah berciri kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Lapangan usaha perikanan menjadi salah satu sektor primadona masyarakat untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan rerata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 22,20 persen.

Tabel 2.9

Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
• Sub Kategori Lapangan Usaha Perikanan	700.659,17	735.334,49	841.393,55	949.958,98	1.002.485,24
• PDRB ADHB	3.260.396,32	3.431.332,18	3.784.946,24	4.110.597,05	4.408.466,33
Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan	21,49	21,43	22,23	23,11	22,74

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara, 2025

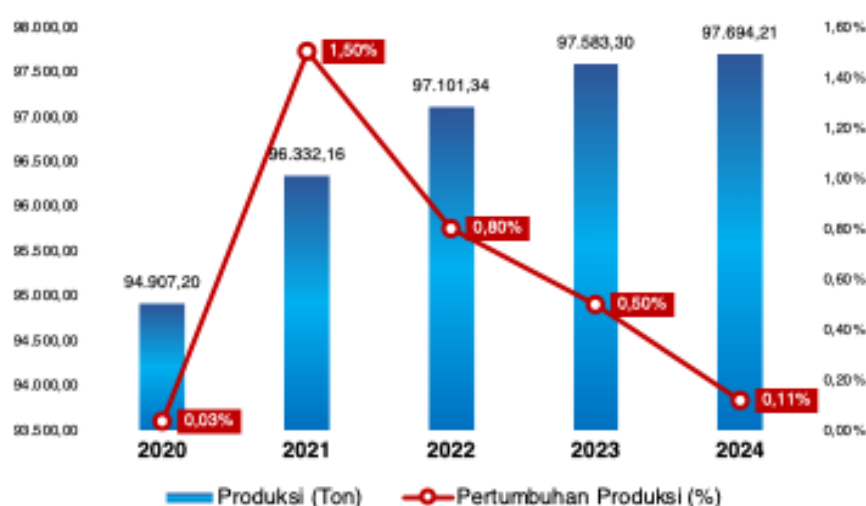
Nilai PDRB sektor perikanan terbentuk dari kontribusi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

(a) Perikanan Tangkap

Total produksi perikanan tangkap pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun sedikit melambat. Kondisi ini dapat dilihat dari besaran produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebanyak 96.332,16 ton dengan pertumbuhan 1,5 persen naik menjadi 97.694,21 ton yang tumbuh melambat 0,11 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.8

Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024



Produksi perikanan tangkap, merupakan akumulasi dari keseluruhan produksi yang dihasilkan oleh nelayan mandiri, pengusaha di sektor perikanan maupun nelayan kecil yang diberdayakan oleh pemerintah daerah. Dari total produksi setiap tahun, kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan masih sangat rendah yaitu berada pada kisaran 0,34-0,87 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa peran pengusaha perikanan skala kecil, menengah, dan besar dalam memproduksi perikanan tangkap jauh lebih

besar yaitu sekitar 99,13 persen. Kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan terhadap total produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.10
Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan terhadap
Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024

No	Uraian	Jumlah Produksi (kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi nelayan kecil sasaran pemberdayaan	318.586	309.551	319.094	721.878	852.399
2	Total produksi perikanan tangkap	94.907.200	96.332.160	97.101.340	97.583.300	97.694.210
Kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan terhadap total produksi perikanan tangkap		0,34	0,32	0,33	0,74	0,87

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara, 2025

Jumlah Nelayan Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.256 nelayan. Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat adalah kecamatan dengan jumlah nelayan terbanyak yaitu masing-masing 720 nelayan, sedangkan kecamatan dengan jumlah nelayan paling sedikit adalah Kei Kecil Timur Selatan 324 nelayan. Jumlah nelayan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Nelayan Kecil Menurut Kecamatan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kei Kecil	228	348	492	552	552
2	Manyeuw	240	276	336	348	348
3	Hoat Sorbay	288	324	336	372	372
4	Kei Kecil Barat	228	300	336	432	432
5	Kei Kecil Timur	216	276	408	444	444
6	Kei Kecil Timur Selatan	180	252	300	312	324
7	Kei Besar	300	456	540	588	648
8	Kei Besar Utara Timur	336	504	600	708	720
9	Kei Besar Utara Barat	264	480	552	672	720
10	Kei Besar Selatan	228	300	336	348	360
11	Kei Besar Selatan Barat	204	240	324	324	336
Jumlah		2.712	3.756	4.560	5.100	5.256

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara, 2025

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, maka nelayan kecil dikelompokkan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Jumlah KUB sampai dengan tahun 2024 sebanyak 438 KUB, dengan jumlah KUB yang menjadi sasaran pemberdayaan sebanyak

315 Kelompok. Jumlah Nelayan, KUB dan KUB sasaran program pemberdayaan tahun 2020–2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.12
Jumlah Nelayan Kecil, KUB, dan KUB Sasaran Program Pemberdayaan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Uraian	Jumlah Produksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KUB yang terbentuk	226	313	380	425	438
2	Jumlah KUB Sasaran Proram Pemberdayaan	59	79	73	64	40
Porsi KUB Nelayan Kecil yang diberdayakan		26,11	25,24	19,21	15,06	9,13

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Maluku Tenggara, 2025

Jumlah KUB nelayan sasaran program pemberdayaan tersebut diatas tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah KUB terbanyak yang diberdayakan berada di Kecamatan Kei Kecil, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Sebaran KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.13
Jumlah KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan
Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024

No	Kecamatan	KUB Pemberdayaan Menurut Kecamatan per tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kei Kecil	3	25	8	8	3	47
2	Kei Kecil Barat	3	3	4	4	5	19
3	Kei Kecil Timur	14	6	4	10	2	36
4	Kei Kecil Timur Selatan	-	3	7	2	-	12
5	Hoat Sorbay	4	7	8	6	3	28
6	Manyeuw	10	5	5	4	4	28
7	Kei Besar	4	5	14	5	5	33
8	Kei Besar Utara Timur	6	11	12	6	6	41
9	Kei Besar Utara Barat	7	5	5	11	3	31
10	Kei Besar Selatan	2	5	4	2	6	19
11	Kei Besar Selatan Barat	6	4	2	6	3	21
Total		59	79	73	64	40	315

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara, 2025

(b) Perikanan Budidaya (Rumput Laut)

Usaha masyarakat di bidang perikanan budidaya terus tumbuh. Luas potesial lahan budidaya perikanan secara keseluruhan adalah 14.138,86 ha. Dari luasan tersebut, lahan potensial untuk budidaya rumput laut seluas 8.662,23 ha. Sampai dengan tahun 2024, lahan potensial budidaya rumput laut termanfaatkan seluas 1.380,62 ha atau baru sebesar 15,94 persen, sedangkan yang belum dimanfaatkan 7.281,61 ha atau sebesar

84,06 persen. Luasan lahan potensial pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara menurut klaster ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Klaster Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024

Kawasan/Klaster	Luas Lahan (ha)	Kondisi Lahan (Ha)			Kecamatan
		Terpakai	Belum Terpakai (Idle)		
			Luas	%	
1) Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	503,1	96,41	406,69	80,84	Kei Kecil
2) Kawasan Teluk Kolser, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	1.681,02	134,97	1.546,05	91,97	Kei Kecil
3) Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei	2.860,02	410,49	2.449,53	85,65	Kei Kecil Barat
4) Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	396,01	18,99	377,02	95,20	Kei Kecil Timur
5) Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab	303	2,92	300,08	99,04	Kei Kecil Timur Selatan, Kecil Barat, Hoat Sorbay.
6) Kawasan Teluk Hoat Sorbay	543,01	543,0	0,01	0,00	Hoat Sorbay
7) Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir)	1.447,01	125,63	1.321,38	91,32	Manyeuw
8) Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer	233,02	11,69	221,33	94,98	Kei Besar
9) Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	140,01	16,07	123,94	88,52	Kei Besar Selatan
10) Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	462,02	16,07	445,95	96,52	Kei Besar Selatan Barat
11) Kawasan Teluk Ohoiraut, Wair	94,01	4,38	89,63	95,34	Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat
	8.662,23	1.380,62	7.281,61	84,06	

Jumlah pembudidaya rumput laut terbanyak berada di Klaster Hoat Sorbay, yaitu sebanyak 552 pembudidaya dengan rincian laki-laki sebanyak 1.562 orang dan perempuan 836 orang atau 34,86 persen. Jumlah pembudidaya rumput laut menurut klaster budidaya diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.15
Klaster Pengembangan Rumput Laut Menurut Klaster Budidaya
Tahun 2024

Kawasan / Klaster	Pembudidaya		
	L	P	T
1) Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	91	46	137
2) Kawasan Teluk Kolser, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	285	102	387
3) Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei	285	213	498
4) Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	39	15	54
5) Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab	112	60	172
6) Kawasan Teluk Hoat Sorbay	342	210	552
7) Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir)	283	138	421
8) Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer	29	11	40
9) Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	26	11	37
10) Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	50	23	73
11) Kawasan Teluk Ohoiraut, Wair	20	7	27
Total	1.562	836	2.398
Persen	65,14	34,86	100

Produksi rumput laut terbanyak pada tahun 2024 ada pada klaster Teluk Hoat Sorbay dengan jumlah produksi rumput laut basah sebanyak 18.492,74 ton, dan produksi paling sedikit ada pada klaster Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab yaitu sebanyak 89,12 ton. Tabel berikut menunjukkan produksi rumput laut menurut klaster.

Tabel 2.16
Produksi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024

Kawasan / Klaster	Jumlah Produksi (Ton)	
	Basah	Kering
1) Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	4.500,64	562,57
2) Kawasan Teluk Kolser, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	5.302,74	662,83
3) Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei	12.521,59	1.565,20
4) Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	579,29	72,41
5) Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab	89,12	11,14
6) Kawasan Teluk Hoat Sorbay	18.492,74	2.311,59
7) Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir)	3.832,23	479,03
8) Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer	356,49	44,56
9) Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	490,13	61,27
10) Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	489,22	61,27
11) Kawasan Teluk Ohoiraut, Wair	132,68	16,71
Total Produksi	46.788,86	5.848,6

Penyumbang terbesar komoditi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara menurut klaster pada tahun 2024 adalah Klaster Hoat Sorbay dengan kontribusi 39,52 persen.

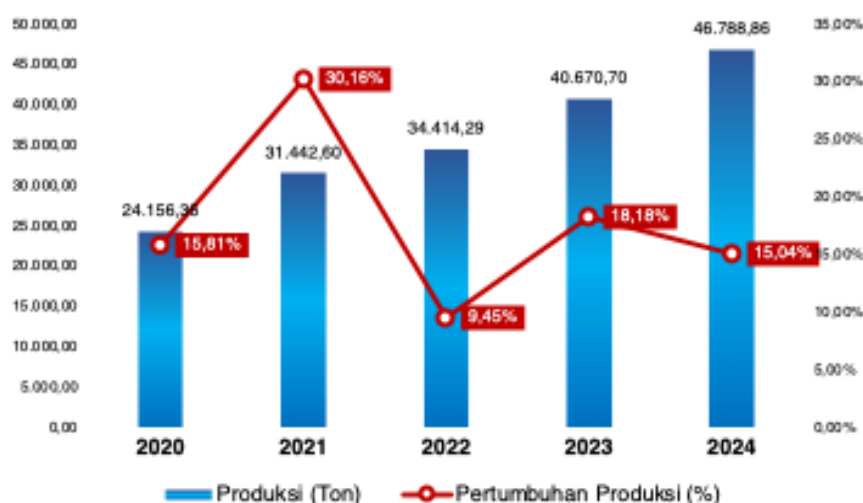
Klaster penyumbang terendah adalah Klaster Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab, yang hanya menyumbang 0,19 persen.

Tabel 2.17
Kontribusi Komoditi Rumput Laut Menurut Klaster
Tahun 2024

Kecamatan	Kawasan / Klaster	Produksi RL Basah (Ton)	Kontribusi Klaster
Kec. Kei Kecil	Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	4.500,64	9,62
	Kawasan Teluk Malingga, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	5.302,74	11,33
Kec. Kei Kecil Barat	Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei	12.521,59	26,76
Kec. Kei Kecil Timur	Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	579,29	1,24
Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kei. Kecil Barat, Kec. Hoat Sorbay.	Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab	89,12	0,19
Kec. Hoat Sorbay	Kawasan Teluk Hoat Sorbay	18.492,74	39,52
Kec. Manyeuw	Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir)	3.832,23	8,19
Kec. Kei Besar	Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer	356,49	0,76
Kec. Kei Besar Selatan	Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	490,13	1,05
Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	489,22	1,05
Kec. Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat	Kawasan Teluk Ohoiraut, Wair	132,68	0,28
Total Produksi		46.788,86	100,00

Secara keseluruhan produksi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2020–2024 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini didorong oleh pelaksanaan program pemberdayaan pembudidaya rumput laut oleh pemerintah daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana budidaya.

Gambar 2.9
Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Rumput Laut
Tahun 2020 s.d. 2024



Harga jual terendah rumput laut kering pada tahun 2024 sebesar Rp11.000 per kg dan harga jual tertinggi Rp14.000 per kg. Dengan total produksi rumput laut sebanyak 5.848.608 kg, maka nilai produksi rumput laut tahun 2024 berada pada kisaran 64,3 milyar s.d. 81,8 milyar rupiah. Harga rumput laut tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan berdampak pada nilai produksi rumput laut.

Tabel 2.18
Perkembangan Nilai Produksi Rumput Laut Kering
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi (ton)	3.019,5	3.930,2	4.301,2	5.083,0	5.848,6
2	Konversi ke kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Jumlah kg	3.019.545	3.930.200	4.301.175	5.082.988	5.848.608
4	Harga terendah per kg	10.000	10.000	16.000	10.000	11.000
5	Harga tertinggi per kg	20.000	22.000	36.000	36.000	14.000
Nilai produksi terendah (000)		30.195.450	39.302.000	68.818.800	50.829.875	64.334.682
Nilai produksi tertinggi (000)		60.390.900	86.464.400	154.842.300	182.987.550	81.880.505

Pengembangan budidaya rumput laut di Maluku Tenggara mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Terbaru pada Tahun 2023 diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai sentra pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku. Diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Modeling Budidaya Rumput Laut Tahun 2024; dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 488 Tahun 2024 tentang Lokasi Unit Produksi Bibit Rumput Laut, Kebun Starter Rumput Laut, dan Kebun Bibit Rumput Laut tahun 2024.

(c) Perikanan Budidaya (Ikan dan Non Ikan)

Produksi ikan hasil budidaya yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah jenis ikan Kerapu dan Ikan Kakap. Pada tahun 2024 produksi ikan hasil budidaya 4.622,99 Kg dengan jumlah produksi tertinggi jenis ikan Kerapu sebanyak 2,4 ton sedangkan jenis Kakap 2,1 ton. Produksi ikan budidaya di Kabupaten Maluku Tenggara ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.19
Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2024

No	Kecamatan	Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenis (Kg)		Total Produksi Ikan Budidaya
		Kerapu	Kakap	
1	Kei Kecil	1.489,20	1482,00	2.971,20
2	Kei Kecil Barat	-	-	-
3	Kei Kecil Timur	330,93	0,33	331,26
4	Kei Kecil Timur Selatan	-	-	-
5	Hoat Sorbay	82,73	82,33	165,06
6	Manyeu	496,40	494,00	990,40
7	Kei Besar	-	-	-
8	Kei Besar Utara Timur	-	-	-
9	Kei Besar Utara Barat	-	-	-
10	Kei Besar Selatan	-	-	-
11	Kei Besar Selatan Barat	82,74	82,33	165,07
Total		2.482	2.141	4.622,99

Nilai jual ikan kerapu rata-rata Rp250.000 per kg dan ikan kakap Rp50.000 per kg. Rata-rata nilai produksi ikan kerapu dan ikan kakap tahun 2024 sebesar Rp727.549.500.

Tabel 2.20
Nilai Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2024

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	Harga (Rp)	Jumlah Nilai Produksi (Rp)
1	Kerapu	2.482	250.000	620.500.000
2	Kakap	2.141	50.000	107.049.500
Total Nilai Produksi				727.549.500

c) Sektor Pertanian

(a) Palawija

Tanaman palawija merupakan tanaman utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disebabkan karena tanaman palawija merupakan sumber karbohidrat utama sebagai makanan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara. Produksi ketela pohon atau ubi kayu pada tahun 2024 sebesar 5.736 ton dengan produksi paling besar berasal dari Kecamatan Hoat Sorbay sebanyak 612 ton, sedangkan Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan produksinya paling sedikit, hanya sebesar 288 ton.

Tabel 2.21
Luas Areal dan Produksi Tanaman Palawija Tahun 2024

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)	Luasan Lahan Panen (ha)
1	Padi Ladang	88	35
2	Jagung	3.675	620
3	Ubi Kayu	5.736	478
4	Ubi Jalar	1.376	172
5	Kacang Tanah	157	48
6	Kacang Hijau	117	39
7	Kacang-kacangan lainnya	-	-
8	Umbi-umbian lainnya	768	237

(b) Perkebunan

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 3 (tiga) komoditas unggulan perkebunan yakni kelapa, kopi, dan kakao. Kelapa tersebar di seluruh kecamatan dengan total luas areal tanam sebesar 23.135 hektar. Total produksi Kelapa tahun 2024 sebesar 18.649,15 ton.

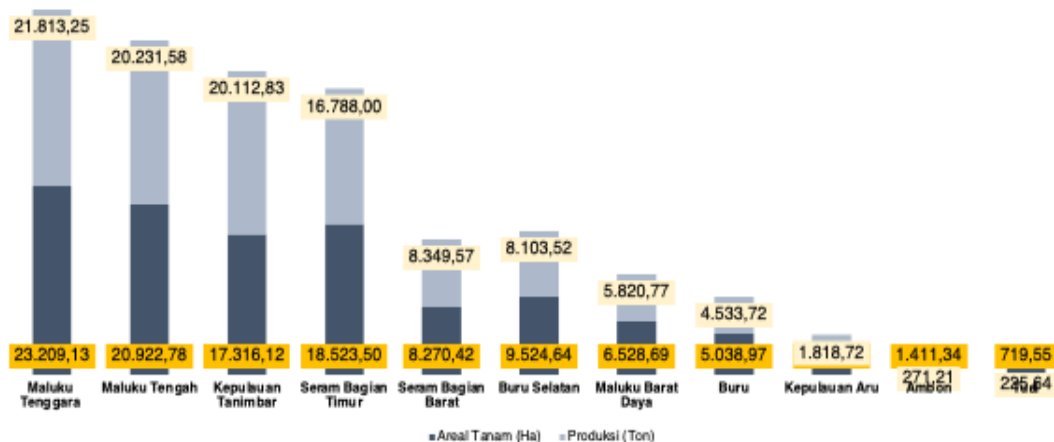
Tabel 2.22
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

No	Jenis Tanaman	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kelapa	23.209	21.813,25
2	Kopi	6,54	6,54
3	Kakao	2,08	2,08

Tanaman kelapa menjadi salah satu potensi unggulan sektor perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sesuai Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Maluku, luasan areal tanaman dan produksi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara adalah yang tertinggi di Provinsi Maluku.

Areal tanam tanaman kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara seluas 23.209,13 hektar adalah yang terluas di Provinsi Maluku. Areal tanam Kabupaten Maluku Tenggara berkontribusi sebesar 20,25 persen dari total areal tanam tanaman kelapa di Povinsi Maluku. Dari sisi produksi, total produksi kelapa Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 21.813,25 ton, adalah yang tertinggi di Provinsi Maluku. Produksi kelapa Kabupaten Maluku Tenggara berkontribusi sebesar 10,18 persen dari total produksi kelapa provinsi Maluku Tahun 2024.

Gambar 2.10
Areal Tanam dan Produksi Kelapa di Provinsi Maluku Tahun 2024



Meskipun memiliki areal tanam dan produksi yang terbesar di Provinsi Maluku, pengelolaan tanaman kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara perlu untuk mendapatkan peremajaan dan penanganan. Hal ini diperlukan guna meningkatkan produktivitas, di mana pada Tahun 2024 Produktivitas Tanaman Kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara mencapai 93,99 persen dan berada di urutan ke-4 tertinggi di Provinsi Maluku.

2.1.1.2. Aspek Demografi

Aspek demografi menggambarkan kondisi dan karakteristik penduduk di suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu. Cakupan kajian demografi antara lain, besaran, pertumbuhan, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk. Termasuk di dalamnya gambaran dinamika kependudukan yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam kajian kependudukan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama satu tahun atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama minimal satu tahun. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Terakhir sensus penduduk dilaksanakan Tahun 2020, sehingga data penduduk tahun 2020 sudah menggunakan data hasil sensus. Untuk data penduduk selain pada tahun sensus, sumber data kependudukan adalah hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS.

Selain menggunakan data BPS, uraian aspek kependudukan juga menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Basis data perhitungan jumlah penduduk menurut Dinas Dukcapil adalah penduduk terdaftar sesuai Kartu Keluarga.

Basis Data yang berbeda antara BPS dan Dinas Dukcapil menyebabkan jumlah penduduk menurut kedua instansi tersebut berbeda. BPS menghitung seluruh penduduk yang secara fisik tinggal di Maluku Tenggara selama 1 tahun terakhir dan/atau belum mencapai 1 tahun tetapi berniat tinggal untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan Dinas Dukcapil menghitung seluruh penduduk terdaftar, baik yang berdomisili di wilayah Maluku Tenggara, maupun yang sementara waktu berdomisili di luar wilayah Maluku Tenggara (contoh: anak kuliah, dan pekerja di luar daerah).

Jumlah dan Komposisi Penduduk

a. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebanyak 126.261 jiwa menurut BPS dan 129.235 jiwa menurut Dinas Dukcapil. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 122 sampai 125

jiwa per kilo meter persegi, dengan sex ratio sebesar 98 sampai 99 persen. Jumlah dan komposisi penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.23
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

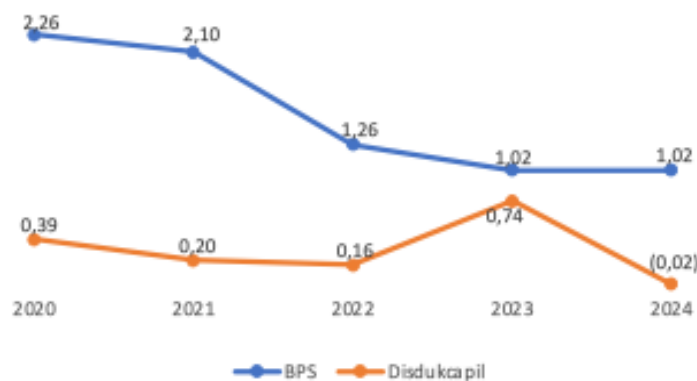
Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	BPS	Capil	BPS	Capil	BPS	Capil	BPS	Capil	BPS	Capil
Jumlah Penduduk (Jiwa)	121.511	127.843	122.640	128.101	124.199	128.305	124.968	129.257	126.261	129.235
Luas Wilayah (Km2)	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	118	124	119	124	120	124	121	125	122	125
Sex Rasio	99	96	100	98	99	98	99	98	99	98
Laki-laki	60.488	62.634	61.403	63.389	61.780	63.595	62.255	64.137	62.910	64.114
Perempuan	61.023	65.209	61.237	64.712	62.419	64.710	62.713	65.120	63.351	65.121

Sumber: BPS Kab.Maluku Tenggara (diolah)

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut BPS, laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Maluku Tenggara tahun 2020 s.d. 2024 sebesar 1,53 persen, dengan rincian tahunan sebagai berikut.

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kab.Maluku Tenggara (diolah)

c. Persebaran Penduduk

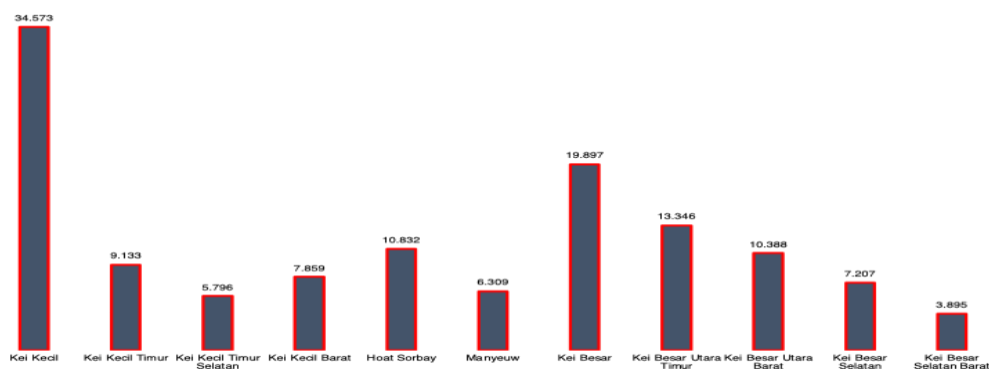
Persebaran Penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara relatif tidak merata, baik dalam lingkup kecamatan, maupun dalam lingkup perbandingan antar pulau (Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar). Pulau Kei Kecil didiami sekitar 57,65 persen penduduk, dan Pulau Kei Besar didiami 42,35 persen penduduk.

Kecamatan yang paling banyak didiami penduduk adalah kecamatan Kei Kecil. Penduduk yang mendiami Kecamatan Kei Kecil, sebesar 26,75 persen dari total penduduk Maluku Tenggara.

Kecamatan Kei Besar Selatan Barat adalah kecamatan yang didiami penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 3,01 persen dari total jumlah penduduk.

Perbandingan persebaran penduduk antara data BPS dan data Dinas Dukcapil relatif sama. Persebaran penduduk Maluku Tenggara menurut kecamatan tahun 2024 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.12
Persebaran penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024



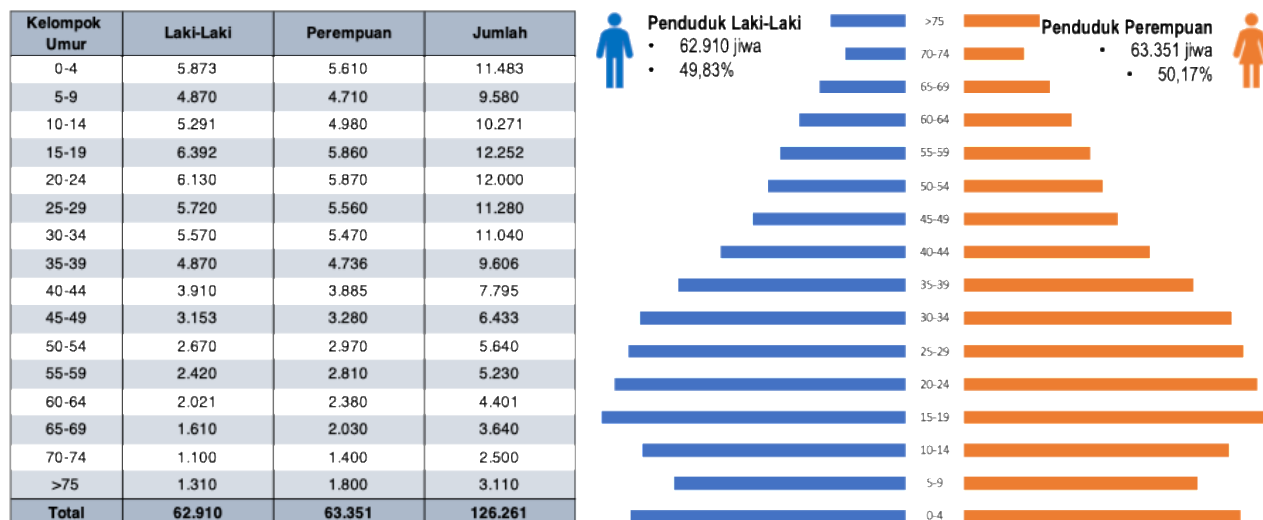
Sumber: BPS Kab.Maluku Tenggara (diolah)

d. Komposisi dan Struktur Penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Tahun 2024 kelompok umur yang paling dominan adalah pada rentang 10 s.d. 39 tahun. Penduduk yang berada di rentang umur tersebut mencapai 67.139 jiwa, atau sebesar 53,18 persen dari total penduduk.

Perbandingan yang sama juga terjadi pada kelompok umur sesuai jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, jumlah penduduk pada kelompok umur 10 s.d 39 tahun mencapai 33.449 jiwa, atau sebesar 53,18 persen. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan kelompok umur 10 s.d. 39 berjumlah 33.690 jiwa atau mencapai 53,18 persen. Gambar berikut menampilkan data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur beserta piramida penduduk Maluku Tenggara Tahun 2024.

Gambar 2.13
Data Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi

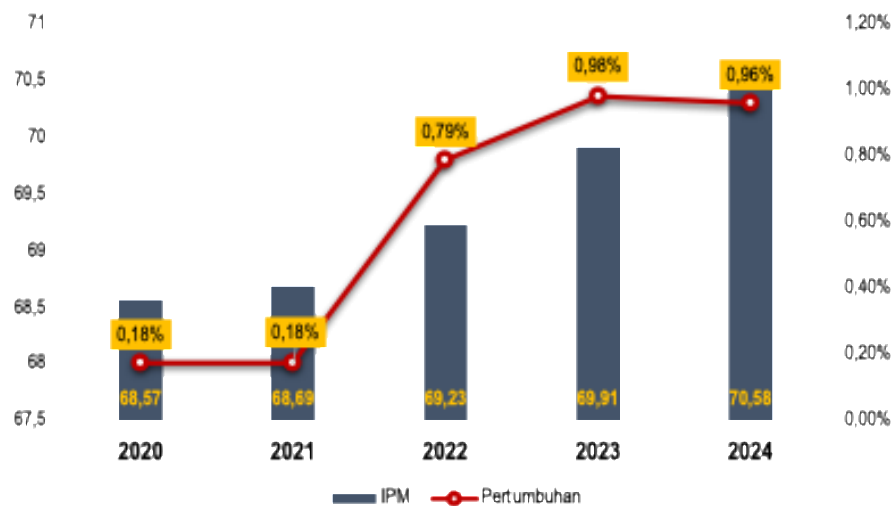
Bagian ini menguraikan kondisi daerah dari aspek kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Indikator ekonomi makro dan ukuran tingkat kesejahteraan disajikan sebagai gambaran kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semakin tinggi nilai IPM, semakin sejahtera masyarakat di suatu daerah.

IPM memiliki dimensi pembentuk yang meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi diukur dengan indikatornya masing-masing, yakni Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah untuk dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup untuk dimensi kesehatan dan Pengeluaran Riil Perkapita untuk dimensi standar hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan seperti gambar berikut.

Gambar 2.14
Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Kenaikan nilai IPM sebesar 2,01 poin dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 0,62 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja positif pembangunan manusia di Kabupaten Maluku Tenggara. Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat memberikan dampak pada naiknya IPM.

Tabel 2.24
IPM Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,81	12,82	12,89	12,9	12,91
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,73	9,76	9,78	9,79	9,84
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,08	70,14	70,43	70,71	70,93
Pengeluaran Riil Perkapita (PRP)	Rp	7.545.000	7.580.000	7.795.000	8.174.000	8.553.000
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,57	68,69	69,23	69,91	70,58

Gambaran kinerja pembangunan manusia menurut dimensi IPM, sebagai berikut.

a) Dimensi Ilmu Pengetahuan

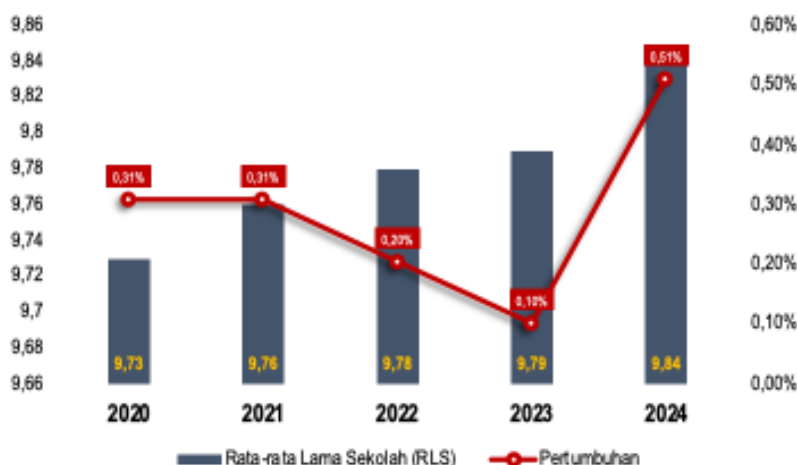
Dimensi ini diukur dengan indikator Rata–rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan ukuran rata–rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk. RLS menunjukkan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat serta modal pembangunan manusia di suatu wilayah.

HLS menggambarkan lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh seorang anak untuk menempuh pendidikan di masa mendatang. HLS menunjukkan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh anak usia tertentu di bangku sekolah, dan dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kondisi pembangunan dan kualitas sistem pendidikan suatu daerah.

(a) Rata–rata Lama Sekolah (RLS)

RLS menunjukkan tren kenaikan dalam periode tahun 2020–2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari sisi intervensi pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan akses. Berbagai program yang dilaksanakan untuk penyediaan sarana dan pra-sarana, peningkatan akses dan konektivitas, serta peningkatan ekonomi dan kesadaran keluarga, merupakan bentuk pelayanan yang memberikan dampak bagi meningkatnya RLS di Kabupaten Maluku Tenggara.

Gambar 2.15
RLS dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



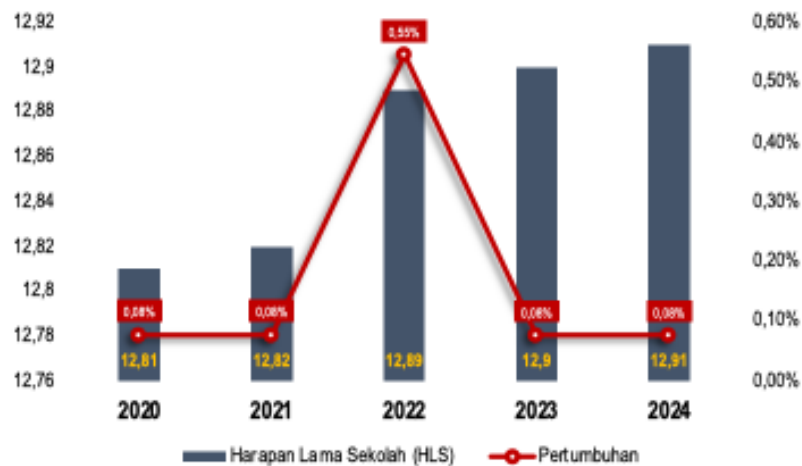
Dari sisi pertumbuhan, RLS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pengamatan mampu mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,28 persen. Meskipun relatif kecil, tetapi tren kenaikan pada Tahun 2024 sebesar 0,51 persen (pertumbuhan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir) menjadi momentum untuk percepatan pertumbuhan RLS dalam 5 (lima) tahun ke depan.

(b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS menunjukkan tren kenaikan dalam periode tahun 2020–2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari sisi intervensi pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem pendidikan di daerah. Peningkatan pada faktor ekonomi keluarga, pendapatan per kapita, faktor sosial seperti persentase penduduk miskin, serta faktor–faktor yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman masyarakat sangat berperan meningkatkan HLS di Kabupaten Maluku Tenggara.

Capaian HLS dan pertumbuhannya selama periode 2019–2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.16
HLS dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



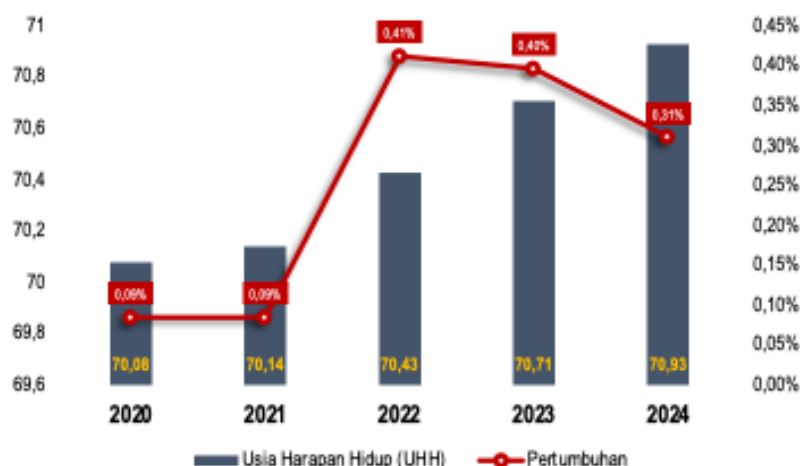
Dari sisi pertumbuhan, HLS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pengamatan mampu mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,19 persen. Masih relatif kecil, serta menunjukkan tren perlambatan pada tahun 2023 dan 2024. Diperlukan upaya konkret guna mendorong percepatan pertumbuhan HLS.

b) Dimensi Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator dari dimensi kesehatan yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi, dengan pola kematian yang dianggap tidak berubah. Semakin tinggi angka harapan hidup penduduk pada suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

UHH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar 70,71 Tahun, meningkat pada tahun 2024 menjadi 70,93 tahun. Ini bermakna, penduduk Maluku Tenggara yang lahir pada tahun 2024, diasumsikan setidaknya akan mampu menjalani hidup sampai dengan rata-rata 70,93 tahun.

Gambar 2.17
UHH dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



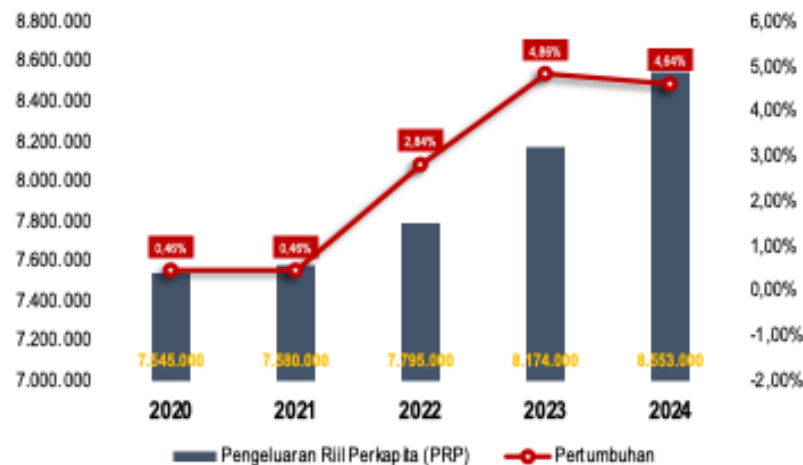
UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Hal ini mengandung arti, bahwa pelayanan kesehatan semakin baik dan derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dari sisi pertumbuhan, UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pengamatan mampu mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,30 persen. Menunjukkan tren percepatan dalam periode 2021 dan 2023, namun melambat pada tahun 2024. Diperlukan upaya konkret guna mendorong percepatan pertumbuhan UHH.

c) Dimensi Standar Hidup Layak

Pengeluaran Riil Per Kapita (PRP) merupakan indikator yang menggambarkan besaran biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. PRP menggunakan satuan nilai uang untuk periode 1 (satu) tahun.

PRP Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar Rp8.174.000, meningkat menjadi Rp8.553.000 pada Tahun 2024. Dengan nilai PRP sebesar Rp8.553.000 diasumsikan bahwa setiap penduduk Maluku Tenggara setiap tahunnya harus mengeluarkan biaya konsumsi sebesar Rp8.553.000 atau Rp712.750 per bulan. PRP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.18
Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Dari sisi pertumbuhan, PRP Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pengamatan mampu mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 3,20 persen. Menunjukkan tren percepatan dalam periode 2021 dan 2023, namun melambat pada tahun 2024. Diperlukan upaya konkret guna mendorong percepatan pertumbuhan PRP.

b. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin secara umum didefinisikan sebagai penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yang terdiri atas GK Makanan (GKM) dan GK Non-Makanan (GKNM). GK Makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

GK Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar Rp695.738,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.598 dibanding GK Tahun 2023. Dengan GK sebesar Rp695.738,00 penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 rilis BPS sebanyak 21.471 jiwa, atau sebesar 21,22 persen. Sementara menurut perhitungan mandiri oleh Bappelitbangda dengan menggunakan data yang sama pada tabel 2.26, tingkat kemiskinan Maluku Tenggara pada tahun yang sama adalah sebesar 17.01 persen. Tingkat kemiskinan menurut BPS yang tinggi didasarkan pada metode perhitungan yang menggunakan data jumlah penduduk hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebagai penyebut penduduk miskin tahun 2024 sebagai pembilang. SUPAS adalah survey yang dilakukan oleh BPS diantara 2 sensus penduduk. Perhitungan Tingkat kemiskinan menggunakan data BPS tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.25
Tingkat Kemiskinan Menurut BPS Tahun 2024

Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2015	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2024	Tingkat Kemiskinan (%) Tahun 2024
1	2	3
98.684	21.471	21.71

Tingkat kemiskinan menurut BPS dan Bapperida tersaji pada Tabel berikut.

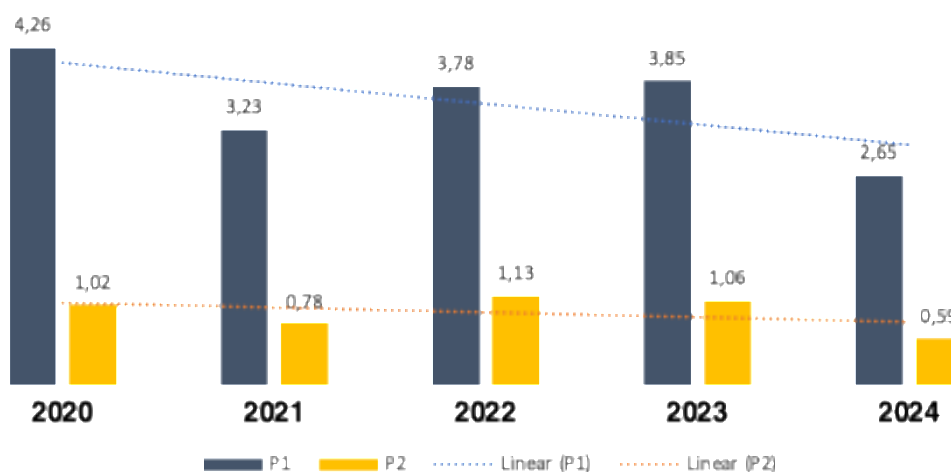
Tabel 2.26

**Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Menurut BPS dan Bapperida
Tahun 2020 s.d. 2024**

Tahun	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)	GK (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	
				BPS	Bapperida
1	2	3	4	5	6=4/2*100
2020	121.511	517.821,00	22.590	22,57	18.59
2021	122.640	549.047,00	22.890	22,73	18.66
2022	124.199	595.041,00	21.380	21,19	17.21
2023	124.968	669.140,00	22.020	21,79	17.62
2024	126.261	695.738,00	21.471	21,22	17.01

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun yang penting juga dialami untuk diintervensi adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai P1, menunjukkan semakin jauh pendapatan penduduk miskin dari GK, sebaliknya semakin kecil nilai P1, semakin dekat pendapatan masyarakat dengan GK. Dengan kata lain semakin tinggi nilai P1, semakin ekstrim penduduk miskin di daerah. Sedangkan Keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin senjang pendapatan antara penduduk miskin. Berikut ditunjukkan kondisi kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020–2024.

Gambar 2.19
Indeks P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Strategi menurunkan tingkat kemiskinan antara lain: 1) menjaga stabilitas ekonomi; 2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan; 3) meningkatkan pendapatan masyarakat; dan 4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Dalam rangka mengimplementasikan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat, maka salah satu kebijakan strategis yang diambil berupa: perluasan cakupan jaminan sosial, baik kesehatan (BPJS Kesehatan) maupun ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Cakupan pelayanan jaminan sosial sebagai berikut.

a) Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tercover JKN sebanyak 127.050 jiwa. Atau sebesar 98,31 persen dari jumlah penduduk. Dengan demikian, Kabupaten Maluku Tenggara sudah dikategorikan UHC.

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepesertaan JKN					Jumlah Penduduk Tercover	Penduduk Tidak Tercover	% JKN	Keterangan
		PBI JK	PPU	PBP	BP	PBP BP				
2020	127.843	59.084	14.876	3.194	3.077	8.354	88.585	39.258	69,29%	BELUM UHC
2021	128.002	58.735	18.035	3.449	2.958	12.772	95.949	32.053	74,96%	BELUM UHC
2022	128.503	82.965	20.583	2.495	3.018	10.032	119.093	9.410	92,68%	BELUM UHC
2023	129.034	85.846	18.892	2.622	4.580	13.930	125.870	3.164	97,55%	UHC >95%
2024	129.235	82.919	20.405	3.253	4.181	16.292	127.050	2.185	98,31%	UHC >95%

Meskipun sudah mencapai UHC, masih terdapat kendala dalam pengelolaan JKN di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu berkaitan dengan tingkat keaktifan. Dimana jumlah penduduk tercover sebanyak 127.050 pada Tahun 2024, masih diperhadapkan dengan tingkat keaktifan peserta yang masih berkisar 90 persen.

b) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Sampai dengan bulan Agustus 2025, cakupan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 56,95 persen. Sedikit mengalami penurunan dari posisi akhir tahun 2024 yang mencapai 63,72 persen.

Tahun	Jumlah Pekerja				Terdaftar				% Terdaftar			
	PU	BPU	Jakon	Total	PU	BPU	Jakon	Total	PU	BPU	Jakon	Total
2022	8.803	20.111	1.814	30.728	9.907	5.970	1.368	17.245	112,54%	29,69%	75,41%	56,12%
2023	10.681	16.342	1.837	28.860	10.946	7.381	1.473	19.800	102,48%	45,17%	80,19%	68,61%
2024	11.108	16.648	1.863	29.619	13.336	4.823	714	18.873	120,06%	28,97%	38,33%	63,72%
2025	11.108	16.648	1.863	29.619	12.459	4.208	201	16.868	112,16%	25,28%	10,79%	56,95%

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selain kemiskinan, permasalahan utama dalam pembangunan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan besaran penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja yang mau dan/atau sedang mencari pekerjaan namun belum terserap lapangan kerja.

Angkatan Kerja yang tidak bekerja dan/atau belum memperoleh pekerjaan serta yang berkeinginan untuk bekerja disebut penganggur. Angka pengangguran yang tinggi selain berdampak ekonomi antara lain menurunnya permintaan agregat, melambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita juga berdampak sosial yang dapat menimbulkan kriminalitas, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang tidak bekerja (menganggur) dan/atau sedang mencari pekerjaan. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT menunjukkan gap antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia pada satu periode tertentu di wilayah tertentu. Kondisi tenaga kerja Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.27
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
• Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	70.796	71.304	71.768	93.785	95.131
• Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	24.611	25.258	27.217	36.225	30.842
• Angkatan Kerja (Jiwa)	46.185	46.046	44.551	57.560	64.289
• Bekerja (Jiwa)	43.897	43.715	41.994	54.259	60.639
• Pengangguran (Jiwa)	2.288	2.331	2.557	3.301	3.650
Tingkat Pengangguran (TPT)	4,95%	5,06%	5,74%	5,73%	5,68%

TPT tahun 2024 sebesar 5,68 persen, turun sebesar 0,5 persen dibanding tahun 2023. Kondisi ini terjadi karena penambahan jumlah pencari kerja pada tahun 2024 sebesar 6.729 orang tidak sebanding dengan penambahan jumlah kesempatan kerja pada tahun yang sama sebesar 6.380 orang.

d. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

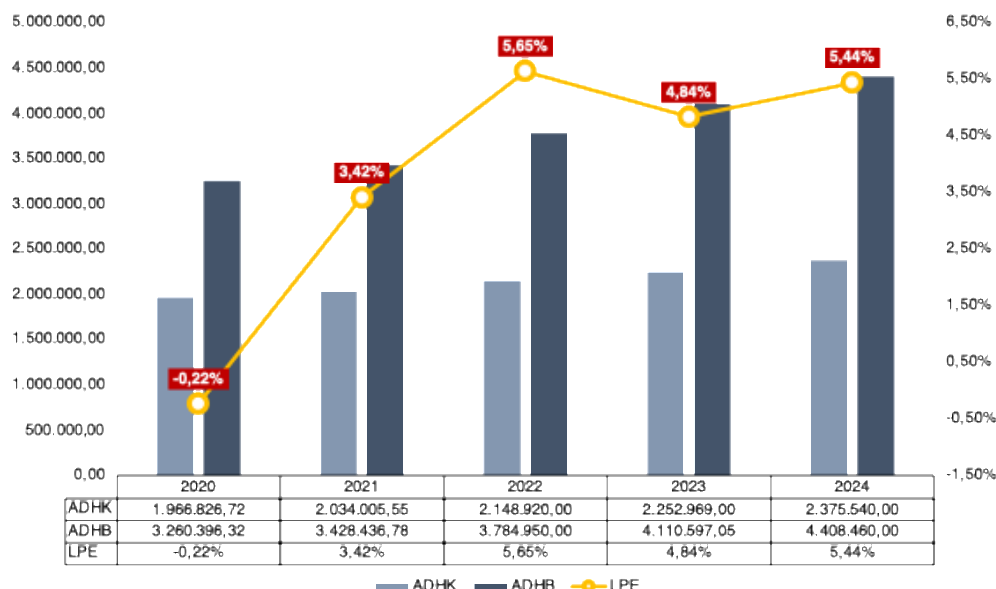
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk adalah kondisi perekonomian suatu daerah. Kondisi perekonomian tergambar dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB terbagi dua yaitu 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan 2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010).

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini laju PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2020–2024, digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.20
PDRB ADHK, PDRB ADHB dan LPE
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



PDRB ADHK tahun 2020 sebesar Rp1.966.826.720.000 meningkat menjadi Rp2.375.562.800.000 pada tahun 2024. Terjadi kenaikan sebesar 20,51 persen. PDRB ADHB menunjukkan tren peningkatan dari Rp3.260.396.320.000 pada tahun 2020 menjadi Rp4.408.466.330.000 tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 36,69 persen. Tren kenaikan pada nilai PDRB berimplikasi pada Laju Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan tren laju positif dalam empat tahun terakhir. Tahun 2021 LPE sebesar 3,42 persen, naik menjadi 4,84 persen di tahun 2023 dan mencapai angka pertumbuhan 5,44 persen di tahun 2024. Nilai PDRB (ADHK dan ADHB) menurut kategori lapangan usaha dalam periode 2020 s.d. 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.28
PDRB ADHK Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	608.211,92	623.075,76	663.438,96	709.999,85	733.138,88
B	Pertambangan dan Penggalan	9.710,07	10.020,97	10.328,40	10.816,79	11.259,48
C	Industri Pengolahan	26.326,02	26.506,17	29.074,94	29.841,59	31.125,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.082,92	2.245,52	2.368,14	2.374,76	2.414,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.491,15	7.780,23	8.247,79	8.724,92	8.571,15
F	Konstruksi	205.224,47	213.766,18	223.769,51	233.309,22	245.511,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	258.137,16	269.152,07	286.306,58	304.954,40	331.113,23

Kode	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	50.585,05	54.495,57	58.084,94	59.128,12	63.783,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40.617,17	41.494,73	43.529,68	44.770,70	46.803,17
J	Informasi dan Komunikasi	26.110,81	26.786,00	27.463,17	28.898,33	30.231,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	87.291,28	90.813,13	90.914,09	95.132,46	101.723,65
L	Real Estate	3.693,33	3.733,74	3.866,77	4.035,86	4.220,46
M,N	Jasa Perusahaan	8.031,94	8.340,11	8.799,62	9.188,04	9.637,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	437.831,50	452.870,75	479.286,23	486.347,09	516.269,93
P	Jasa Pendidikan	99.449,39	103.020,19	108.438,97	112.841,86	119.024,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.853,44	69.285,69	72.816,21	78.665,78	84.644,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	30.179,10	30.654,35	32.176,28	33.939,23	36.090,25
Produk Domestik Regional Bruto		1.966.826,72	2.034.041,15	2.148.910,28	2.252.969,02	2.375.562,80

Tabel 2.29
PDRB ADHB Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rp)

Kode	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	978.260,19	1.012.561,46	1.135.669,85	1.266.479,42	1.340.002,46
B	Pertambangan dan Penggalian	15.034,91	15.762,86	16.770,36	18.440,49	19.473,51
C	Industri Pengolahan	43.335,73	44.392,23	50.280,09	53.165,73	56.510,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.692,65	2.951,74	3.195,16	3.243,35	3.451,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.121,51	12.764,64	13.789,60	14.933,56	14.888,97
F	Konstruksi	359.326,26	381.056,65	412.746,09	449.918,36	482.821,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	393.339,69	417.946,64	464.596,46	514.030,57	569.933,27
H	Transportasi dan Pergudangan	83.804,42	95.844,55	113.581,59	124.183,34	134.490,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68.879,69	70.996,13	75.613,56	79.669,61	84.482,23
J	Informasi dan Komunikasi	35.739,67	37.443,41	39.576,33	42.858,20	44.938,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	130.284,70	143.435,69	157.700,22	167.883,16	181.092,70
L	Real Estate	5.232,53	5.335,48	5.591,27	5.930,00	6.286,38
M,N	Jasa Perusahaan	11.541,94	12.151,14	13.159,16	14.085,89	15.025,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	812.285,31	853.270,19	931.177,88	976.668,65	1.042.931,80
P	Jasa Pendidikan	161.020,78	169.486,29	181.814,64	189.747,90	203.370,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.861,93	107.931,30	117.298,54	131.854,87	145.609,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	46.634,40	48.001,77	52.385,44	57.503,95	63.156,19
Produk Domestik Regional Bruto		3.260.396,32	3.431.332,18	3.784.946,24	4.110.597,05	4.408.466,33

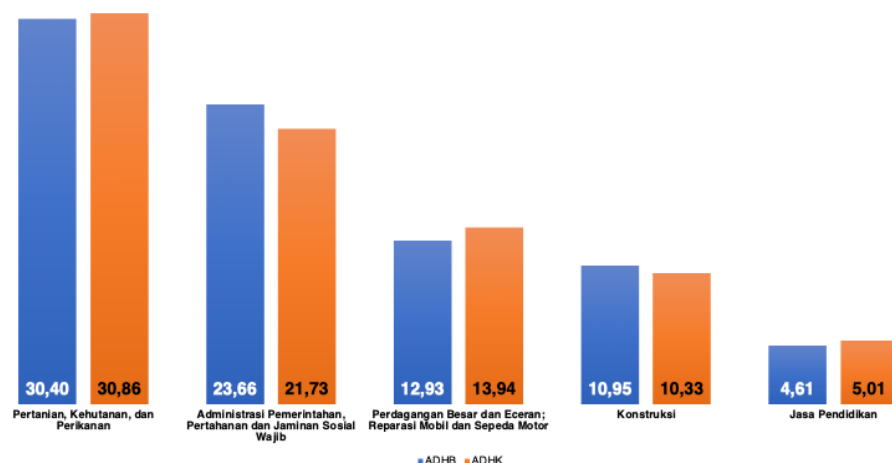
Kedua tabel di atas menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara konsisten berkontribusi pada kisaran 29 persen sampai dengan 30 persen setiap tahun. Kontribusi lapangan usaha untuk perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.30
Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN 2024	
		ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,40	30,86
B	Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,47
C	Industri Pengolahan	1,28	1,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	0,36
F	Konstruksi	10,95	10,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	13,94
H	Transportasi dan Pergudangan	3,05	2,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,92	1,97
J	Informasi dan Komunikasi	1,02	1,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,11	4,28
L	Real Estate	0,14	0,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,34	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	23,66	21,73
P	Jasa Pendidikan	4,61	5,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,30	3,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,43	1,52
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00

Lapangan usaha dominan pembentuk struktur perekonomian daerah tahun 2024 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Gambar 2.21
Lapangan Usaha Dominan Pembentuk Struktur Perekonomian Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



e. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB Per Kapita merupakan perbandingan antara total PDRB (ADHB) suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut dalam rentang waktu tertentu.

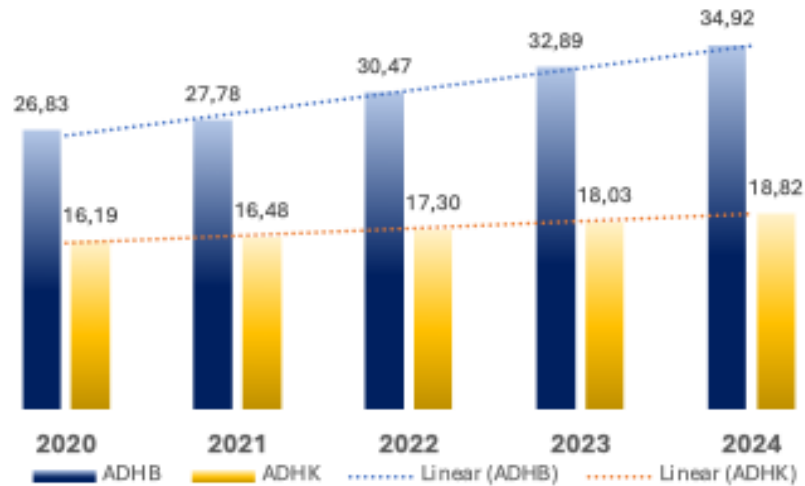
PDRB Per Kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antardaerah. Semakin tinggi PDRB Per Kapita suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduknya. Nilai PDRB Per Kapita dihitung dalam satuan waktu tahunan. Komponen dan perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.31
PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
• PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.260.396,32	3.431.332,18	3.784.946,24	4.110.597,05	4.408.466,33
• PDRB ADHK (Rp. Juta)	1.966.826,72	2.034.041,15	2.148.910,28	2.252.969,02	2.375.562,80
• Jumlah Penduduk (Jiwa)	121.511	122.453	123.701	124.968	126.245
PDRB Perkapita ADHB (Rp.Juta)	26,83	28,02	30,60	32,89	34,92
PDRB Perkapita ADHK (Rp.Juta)	16,19	16,61	17,37	18,03	18,82

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.22
PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

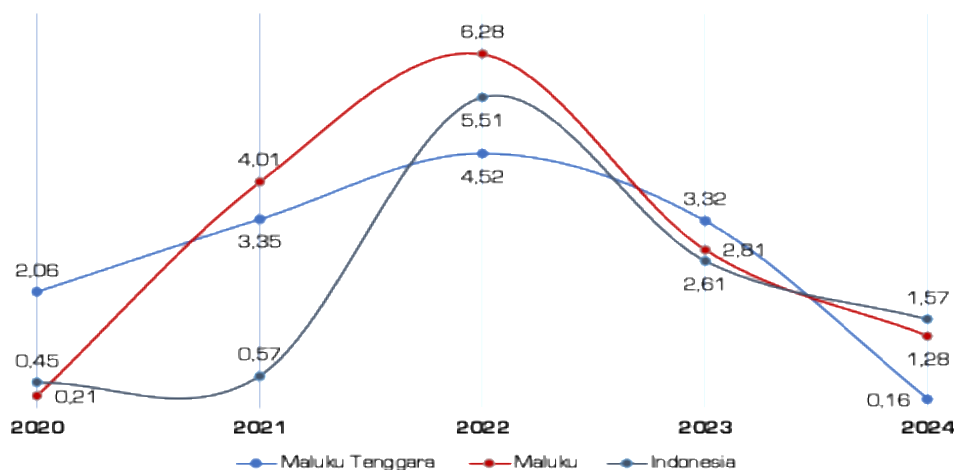


f. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk diketahui karena dampaknya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga–harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Secara umum Inflasi terjadi sebagai akibat dari 1) tarikan permintaan dan 2) dorongan penawaran. Permintaan yang tinggi melebihi penawaran (pasokan) akan mengakibatkan harga naik. Hal ini umumnya terjadi pada bulan–bulan di mana terdapat hari besar keagamaan.

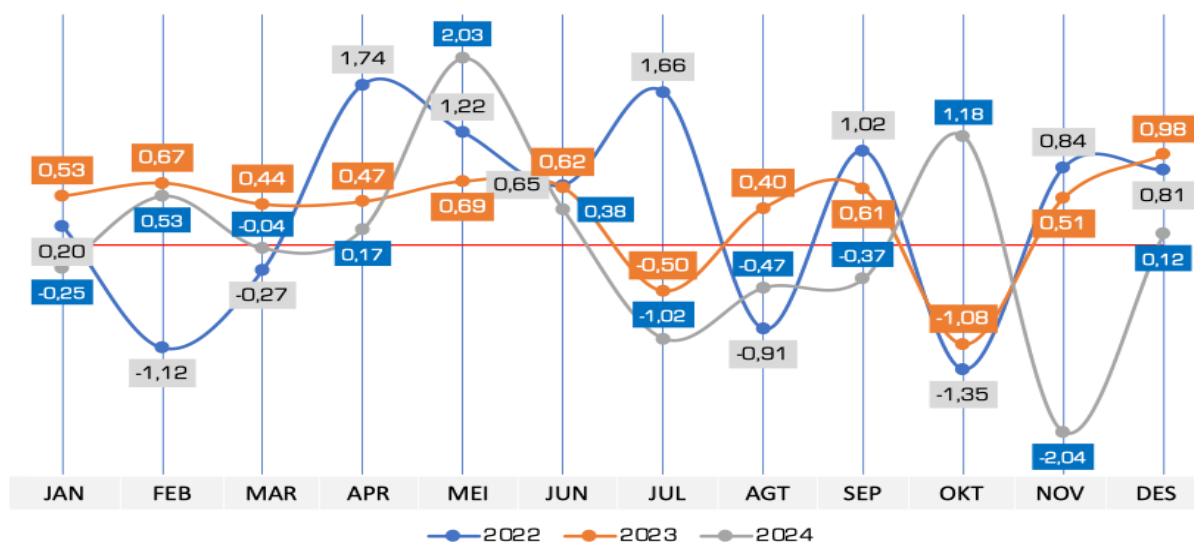
Inflasi yang tinggi berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat dalam membelanjai kebutuhan hidup. Kondisi tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas usaha, yang selanjutnya akan berdampak pada melambatnya kinerja perekonomian. Dampak langsung dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu, inflasi ini harus dikendalikan agar berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Gambar 2.23
Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara (YoY) dan Perbandingannya dengan
Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024



Laju inflasi Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 0,16 persen. Relatif rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi dalam 5 tahun terakhir. Inflasi antar bulan (*month to month*) Tahun 2024 menunjukkan bahwa inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2024, sebesar 2,03 persen. Perbandingan inflasi bulanan tahun 2022, 2023 dan 2024 ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.24
Perbandingan Inflasi Bulanan (*MtM*) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Dalam tahun 2024, jenis barang dan jasa yang paling dominan menyumbang inflasi antara lain: bahan pangan (ikan dan sayur), harga tiket angkutan udara, rokok, bahan bangunan, pakaian wanita, dan BBM. Selengkapnya, barang dan jasa penyumbang inflasi terbesar tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.32
Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang
Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2024

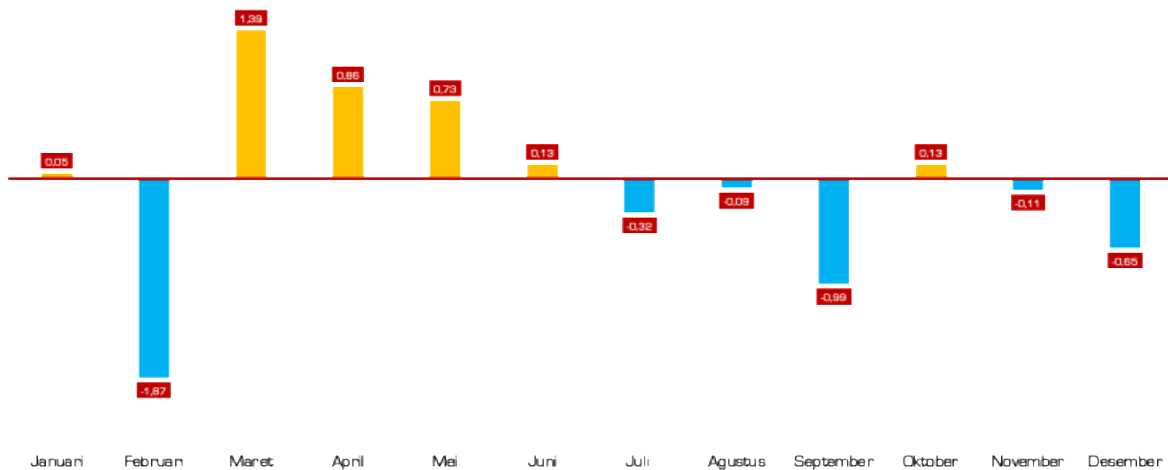
Bulan	YoY	MtM	IHK	Status MtM	Komoditas Berpengaruh Dominan
Januari	2,88	-0,25	106,06	Deflasi	angkutan udara, ikan teri, bayam, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sofa, ikan baronang, kacang panjang, kangkung, ikan sikuda/ikan lencam, daging ayam ras, ikan lolosi, ikan kakap merah, ketela pohon, ketimun, baju muslim wanita, piring, hand body lotion, terong, baju muslim pria, tempe
Februari	2,88	0,53	106,62	Inflasi	ikan tongkol, ikan layang, ikan baronang, ikan sikuda, ikan teri, bawang merah, ikan selar, ikan lolosi, bayam, daging ayam ras, biskuit, sawi hijau dan sigaret kretek mesin
Maret	2,59	-0,04	106,58	Deflasi	beras, ikan sikuda, ikan baronang, ikan teri, telur ayam ras, sawi hijau, ikan lolosi, gula pasir, ketimun, bayam, pepaya, pelumas/oli mesin, kangkung, sabun bayi, papan, sigaret kretek mesin, buncis, tahu mentah, ikan kembung dan kunyit.
April	2,29	0,17	106,76	Inflasi	ikan teri, bayam, bawang merah, tomat, kangkung, ikan tongkol, beras, bawang putih, cabai rawit, terong, pepaya, biskuit, pasta gigi, sabun mandi, gula pasir, sawi hijau, cumi-cumi, baju muslim wanita, blus wanita dan cabai merah
Mei	3,70	2,03	108,93	Inflasi	cabai rawit, ikan layang, angkutan udara, ikan tongkol, bawang merah, beras, ikan kembung, ikan sikuda, ikan selar, ikan baronang, ikan lolosi, ikan bubar, daging ayam ras, gula pasir, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, lemon, jeruk nipis, tahu mentah dan kunyit
Juni	3,39	0,38	109,34	Inflasi	ikan layang, beras, ikan lolosi, ikan baronang, sigaret kretek mesin, daun singkong, pasta gigi, biskuit, ikan kakap merah, pepaya muda, ikan tongkol, jantung pisang, jeruk nipis/limau, ikan kembung, cumi-cumi, kecap, tarif gunting rambut pria, daging ayam ras dan penyedap masakan/vetsin
Juli	2,42	-1,02	108,22	Deflasi	ikan tongkol, ikan layang, angkutan udara, enbal gepe, cabai rawit, tomat, bahan bakar rumah tangga, sawi hijau, daging ayam ras, bawang merah, sabun mandi, shampo, jeruk nipis/limau, buncis, pepaya, hand body lotion, kacang panjang dan tauge
Agustus	1,64	-0,47	107,71	Deflasi	ikan layang, ikan sikuda, tomat, ikan lolosi, bawang merah, minyak goreng, bayam, kangkung, telur ayam ras, gula pasir, ikan selar, biskuit, cumi-cumi, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol, ikan kakap merah, beras, penyedap makanan/vetsin dan ikan bubar

Bulan	YoY	MtM	IHK	Status MtM	Komoditas Berpengaruh Dominan
September	0,59	-0,37	107,31	Deflasi	ikan sikuda, ikan layang, angkutan udara, tomat, ikan selar, bensin, daun singkong, pepaya, telur ayam ras, cabai rawit dan mangga
Oktober	2,30	1,18	108,58	Inflasi	bahan bakar rumah tangga, ikan layang, ikan sikuda, ikan tongkol, ikan teri, ikan selar, jeruk nipis/limau, kontrak rumah, ikan lolosi, angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, ikan kakap merah, daun singkong dan sewa rumah
November	0,50	-2,04	106,37	Deflasi	ikan teri, ikan layang, ikan tongkol, ikan baronang, ikan lolosi, ikan sikuda, cabai rawit, jeruk nipis/limau, ikan kakap merah, ikan selar, enbal gepe, ikan bubara, bayam, daun singkong, pasir, cumi-cumi, pepaya muda, daging ayam ras, jantung pisang dan ikan kembung
Desember	0,16	0,12	106,50	Inflasi	cabai rawit, bawang merah, ikan tongkol, pepaya, bayam, jantung pisang, jeruk nipis/limau, kangkung, tomat, pepaya muda, minyak goreng, bunga pepaya, daun singkong, sewa rumah dan sigaret kretek tangan

Uraian di atas merupakan nilai Inflasi terhadap sampel hitung Kota Tual. Kabupaten Maluku Tenggara tidak termasuk daerah sampel perhitungan inflasi nasional. Meskipun kondisi sosial-ekonomi kedua daerah relatif sama, namun perhitungan terhadap kondisi perubahan harga-harga barang yang spesifik dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara perlu untuk disajikan. Pengukuran kondisi perubahan harga-harga barang di daerah selain daerah sampel hitung inflasi menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH diterbitkan/dihitung oleh BPS yang dipublikasi tiap minggu. Nilai IPH berkisar -1 s.d 1 (> -1 a.d < 1).

IPH di bawah angka 0 bermakna penurunan harga-harga, sedangkan IPH di atas angka 0 bermakna terjadi kenaikan harga. IPH yang semakin mendekati angka 1 menggambarkan kenaikan harga yang semakin tinggi. Sebaliknya, IPH yang semakin mendekati -1 menggambarkan penurunan harga yang semakin dalam. IPH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Gambar 2.25
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024



Uraian IPH tersebut menggambarkan kondisi perkembangan harga–harga barang selama 12 bulan. Kondisi kenaikan harga terjadi selama bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni dan Oktober. Sedangkan kondisi harga-harga mengalami penurunan terjadi pada bulan Februari, Juli, Agustus, September, November dan Desember.

Penurunan harga paling dalam terjadi pada Bulan Februari sebesar -1,87 persen dibanding harga-harga pada Januari. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada Bulan Maret sebesar 1,39 persen dibanding harga-harga pada bulan Februari. Tren perkembangan harga yang diuraikan di atas menunjukkan beberapa hal penting sebagai berikut.

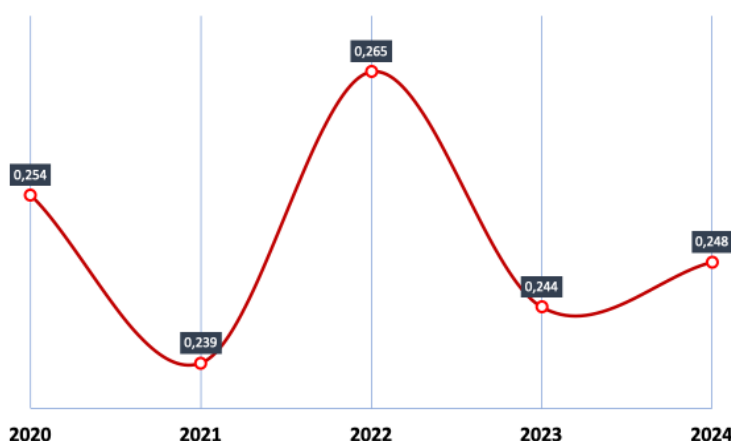
- a) Sepanjang Tahun 2024, kondisi perkembangan harga relatif terkendali. Perkembangan harga berkisar pada –0,87 persen sampai 1,39 persen. Kisaran harga tersebut masih berada dalam rentang aman di bawah 1 persen yang artinya tidak sampai membebani konsumen ataupun memberatkan produsen;
- b) Periode kenaikan harga 4 (empat) bulan berturut–turut (Maret–April–Mei–Juni) bertepatan dengan periode HBKN, antara lain: bulan puasa Ramadhan, Idul Fitri, Masa Paskah dan Idul Adha, termasuk periode tahun ajaran baru pendidikan, yang memicu naiknya permintaan barang dan jasa. Selain itu, kenaikan harga pada periode ini juga disebabkan oleh kondisi alam dan cuaca yang tidak bersahabat. Pada periode Mei–Juni tahun 2024 Indonesia dilanda badai El Nino dan La Nina. Meskipun neraca pangan dalam kategori aman, namun kondisi alam yang tidak bersahabat tersebut menyebabkan terjadinya kendala distribusi yang cukup berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah komoditi.
- c) Kenaikan harga pada Bulan Oktober didorong oleh naiknya permintaan barang dan jasa akibat terselenggaranya Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara dan bertambahnya jumlah kunjungan wisata.
- d) Upaya strategis dalam pengendalian harga di masa HBKN Natal dan Tahun Baru 2025 cukup efektif dan efisien. Dilihat dari perkembangan harga yang relatif menurun dalam periode November dan Desember 2024.

g. Indeks Gini

Indeks gini (IG) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Nilai IG berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 0 semakin merata distribusi pendapatan, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan semakin timpang distribusi pendapatan.

Nilai IG menunjukkan tren fluktuatif yang berarti ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, disparitas pembangunan antar daerah, dan pengaruh inflasi, sehingga menyebabkan tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk, relatif semakin jauh dari pemerataan. Kondisi IG Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.26
Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



2.1.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di Tanah Kei yang dikenal dengan Hukum Larwul Ngabal. Jauh sebelum lahir Hukum Positif di Negara Indonesia yang dikenal dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Hukum Adat Larwul Ngabal telah ada dalam mengatur perikehidupan masyarakat Etnis Kei.

Hukum Adat Larwul Ngabal mengatur tentang pemerintahan adat, hak ulayat adat, batas tanah, pergaulan lawan jenis, pelestarian lingkungan hidup dan menjaga batas laut dan darat serta perkawinan dan lain-lain (Bat-batang Fit Roa-Fit Nangan (J.P. Rahail, 95). Hukum adat Larwul Ngabal; sekaligus menandai eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat Kei.

Dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan, 190 ohoi pada 11 kecamatan tersebut di atas, berada di bawah kekuasaan adat 22 Ratschaap dan dipimpin oleh Rat/Raja. 22 Ratschaap ini tersebar di Pulau Kei Besar, Pulau Kei Kecil, Pulau Dullah, Pulau Kur, dan Pulau Tam. 16 Ratschaap diantaranya berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.33
Ratschaap/Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei

No	Rumpun	Ratschaap/ Pemerintahan Adat	Gelar Rat/Raja	Pusat Pemerintahan Adat	Letak Rastchaap pada Wilayah Adm. PEMDA	Keterangan
1	UR SIU	1. DANAR	FAMUR DANAR	DANAR	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		2. WAIN	NEN DIT SAKMAS	WAIN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		3. NUH FIT	MANTILUR KISUWAIT	SOMLAIN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		4. MAUR	BARVAV	WATLAAR	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		5. UTAN TEL TIMUR	SIRSOMAS	OHOITAHIT	Kota Tual	Pulau Dullah
		6. UTAN TEL VARAT	BALDU	DESA DULLAH	Kota Tual	Pulau Dullah
		7. MATWAIR	MAGRIB	MATWAIR	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		8. MER OHOINEAN	KAIT EL	OHOINANGAN	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		9. KILMAS	SUNGLAIT	KAMEAR	Kota Tual	Pulau Kur
		10. MEU UMFIT	YAM TEL	YAMTEL	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
2	LOR LIM	1. TUBAV YAM LIM	BOMAV	VEER	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		2. LO-OHOITEL	IHIBES	NERONG	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		3. UB OHOI FAKK	EL RALANG, WEER, MAAR, UAT	BERGANTIAN EL RALANG, WEER, MAAR, UAT	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		4. LOR TEL VARAT	YARBADANG	TETOAT	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		5. OHOILIM NANGAN	MANYEU	RUMADIAN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		6. OHOILIM TAHIT	YAB	FAAN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		7. TUAL	TUVLE	TUAL	Kota Tual	Pulau Dullah
		8. RUMAT	SONGLI	RUMAT	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		9. IBRA IVIT	KIRKES	IBRA	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		10. KILSOIN	SINGRA	KILSOIN	Kota Tual	Pulau Mangur
3	LOR LABAY	1. WERKA	WERKA	WERKA	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		2. TAM	TAM	TAM	Kota Tual	Pulau Tam
		3. OHOIDER BAWAH	OHOIDER BAWAH	OHOIDER BAWAH	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil

Kinerja pembangunan bidang kesenian, budaya, pemuda dan olahraga dapat diukur dengan indikator–Indikator kinerja sebagai berikut.

a) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dilakukan selama periode 2019 – 2023, sehingga terhadap indikator ini, digunakan indikator Proksi Indeks Budaya Daerah. Capaian Indeks Budaya Daerah menunjukkan tren kenaikan, yaitu:

Tahun 2020 : 68,01
Tahun 2021 : 70,10
Tahun 2022 : 72,40
Tahun 2023 : 76,04
Tahun 2024 : 78,80

Kenaikan pada capaian kinerja indikator ini didorong oleh berbagai kebijakan pembangunan bidang kebudayaan, di antaranya: pagelaran seni dan budaya, napak tilas dan peringatan hari Nen Dit Sakmas (Tokoh Pencetus Budaya Kei), serta pelibatan unsur kelembagaan adat sebagai penopang atau pilar pembangunan daerah.

b) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

IPP mengompositkan berbagai variabel pembangunan pemuda, yang mencakup Dimensi Pendidikan, Dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan, Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja, Dimensi Partisipasi dan Kepemimpinan, Dimensi Gender dan Diskriminasi. Pengukuran IPP baru akan dilaksanakan di Tahun 2025, sehingga data capaiannya belum tersedia.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum di Kabupaten Maluku Tenggara digambarkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Indeks RB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 49,28. Meningkat dibanding capaian tahun 2023 sebesar 42,39.

- Tahun 2020	:	47,65
- Tahun 2021	:	53,08
- Tahun 2022	:	Tidak Dinilai
- Tahun 2023	:	42,39
- Tahun 2024	:	49,28

Meskipun menunjukkan tren kenaikan, Indeks RB Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada Predikat C dengan kategori KURANG.

Uraian selanjutnya pada Aspek Pelayanan umum adalah capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD). Uraian pada aspek pelayanan umum mencakup fokus-fokus berikut: Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan; Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Fokus Unsur Kewilayahan; dan Fokus Unsur Pemerintahan Umum dengan uraian lengkap sebagai berikut.

2.1.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja indikator layanan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	APK SD	Persen	100,14	83,28	16,86
2	APS 7-12 Tahun	Persen	99,74	99,67	0,07
3	APK SMP	Persen	88,50	101,8	13,3
4	APS 13-15 Tahun	Persen	75,10	98,38	23,28
5	APS PAUD	Persen	80	83,46	3,46
6	Angka Partisipasi WN Usia 7-18 Tahun pada Pendidikan Kesetaraan	Persen	60	21,2	38,8
7	Kemampuan Literasi SD	Persen	1,12	40,49	100
8	Kemampuan Literasi SMP	Persen	1,12	56,9	100
9	Kemampuan Numerasi SD	Persen	1,12	29,64	100
10	Kemampuan Numerasi SMP	Persen	1,12	56,45	100
11	Rerata nilai literasi semua peserta asesmen nasional di Pendidikan kesetaraan	Nilai	6,5	N/A	N/A
12	Rerata nilai literasi semua peserta asesmen nasional di Pendidikan kesetaraan	Nilai	6,0	N/A	N/A

1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian kinerja indikator layanan kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Angka kematian bayi	Angka	≤ 3	0,9	100
2	Angka kematian ibu melahirkan	Angka	≤ 2	0,1	100
3	Angka kematian balita	Angka	≤ 2	0,2	100
4	Angka stunting	Angka	14	15,60	88
5	Angka balita gizi buruk	Angka	0,07	0,14	0
6	Angka kasus kematian penyakit menular	Angka	≤ 7	3,1	100
7	Angka kasus kematian penyakit tidak menular	Angka	≤ 10	5,1	149

1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

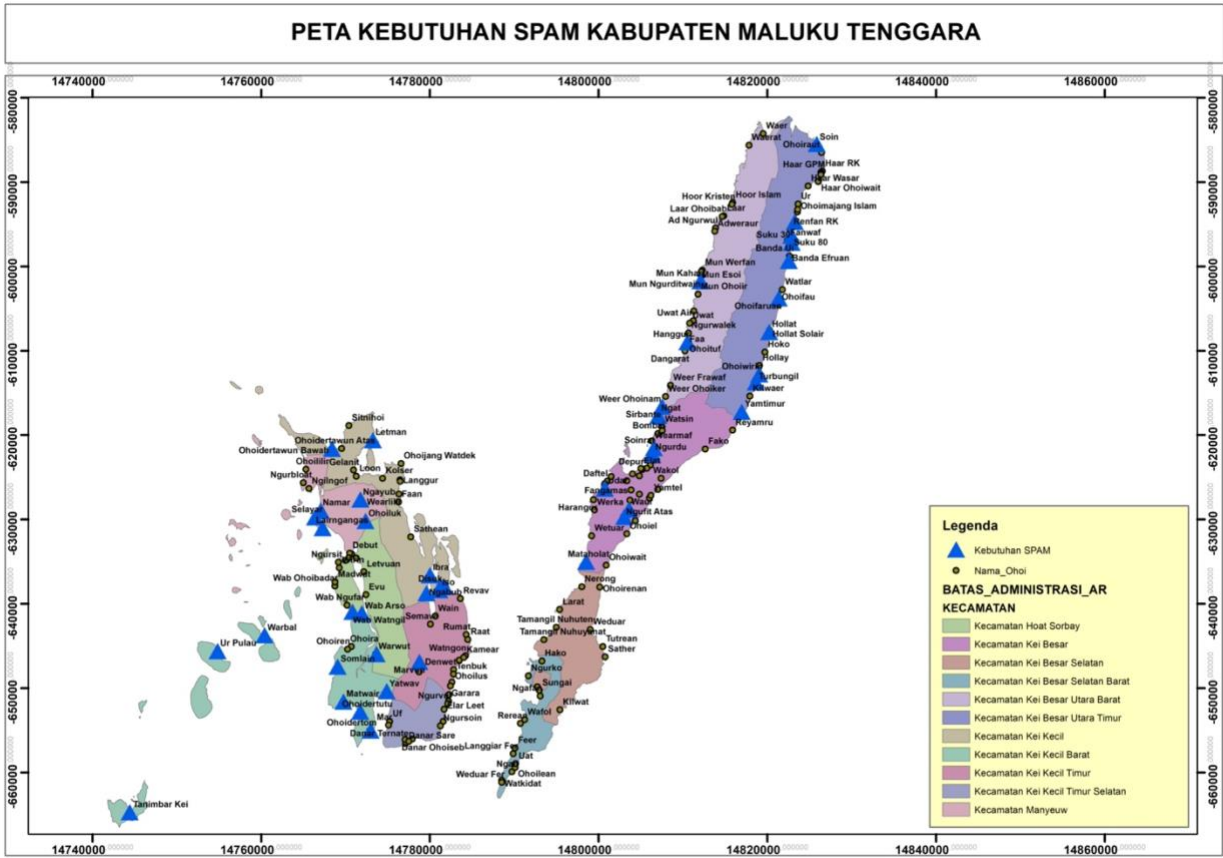
Capaian kinerja indikator layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	61,39	61,39	100
2	Persentase ohoi terhubung jalan kondisi baik ke ibu kota kecamatan/kabupaten	Persen	0,91	0,91	100
3	Persentase rumah tangga akses air bersih	Persen	71,62	71,62	100
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	79,17	79,17	100

Sebaran ohoi yang membutuhkan pelayanan Air Bersih dalam bentuk penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagai berikut.

Gambar 2.27
Sebaran Ohoi untuk Kebutuhan SPAM di Kabupaten Maluku Tenggara



Sebaran ohoi yang membutuhkan pelayanan Sanitasi dalam bentuk penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagai berikut.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Tingkat penanganan konflik sosial	Persen	100	98,7	98,7
2	Tingkat penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman, kenyamanan (K3)	Persen	100	N/A	N/A

1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Capaian kinerja indikator layanan Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks penanganan PMKS	Nilai	77,597	76,151	98

2.1.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Capaian kinerja indikator layanan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Tingkat penyerapan tenaga kerja	Persen	96	N/A	N/A

2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja indikator layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persen	40	40	100
2	Tingkat pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Persen	60	20	33,3

2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Pola pangan harapan (PPH)	Poin	80,25	71,9	89,59

2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase penyelesaian kasus tanah aset Pemda	Persen	100	100	100
2	Persentase luas tanah Pemda tersertifikasi	Persen	10	0	0

2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks kualitas air	Nilai	66	60	90,90
2	Indeks kualitas udara	Nilai	92	93,39	100
3	Indeks kualitas lahan	Niali	66	66,71	100

2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks tertib administrasi kependudukan (ITAK)	Nilai	80	80	100

2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Pesentase ohoi tertata batas administrasi desa	Persen	2	2	100
2	Indeks kualitas kelembagaan adat (IKKA)	Nilai	40	40	100
3	Persentase ohoi yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Persen	60	70	100

2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Jumlah	4	4	100

2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Perhubungan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks keselamatan transportasi (IKT)	Nilai	100	175	100

2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase perangkat daerah memanfaatkan jaringan TIK	Persen	60	60	100
2	Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persen	100	100	100

2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan usaha mikro	Persen	4,87	0,75	15,4
2	Persentase koperasi aktif	Persen	86,25	84,26	97.69

2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan nilai investasi	Persen	1,0	N/A	N/A

2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan
dan Olahraga Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks pengembangan kepemudaan (IPK)	Nilai	80	65,45	81,81
2	Indeks pengembangan olahraga (IPO)	Nilai	80	95,96	119,95

2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Statistik di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Tahun 2024

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	Data dan informasi statistik daerah	Ada	Ada	100

2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks pengembangan budaya daerah (IPBD)	Nilai	80	N/A	N/A
2	Indeks lestari budaya daerah (ILBD)	Nilai	80	N/A	N/A

2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan kunjungan pemustaka	Persen	2,0	0,427	21,35

2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Kearsipan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks pengawasan kearsipan (IPAR)	Nilai	60	68,5	100

2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	23	21,35	90
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	130.540	129.300	99,03
3	Rata-rata lama tinggal	Hari	5	5	100

3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Nilai tukar petani (NTP)	Nilai	100	105,53	100

3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Perdagangan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,5	13	100
2	Indeks harga konsumen (IHK)	Nilai	111,31	106,5	95,67

3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian kinerja indikator layanan Bidang Perindustrian di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Nilai tukar nelayan (NTN)	Nilai	100	104,10	104,10

2.1.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.01 Sekretariat Daerah

Capaian kinerja indikator layanan Sekretariat Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP pemerintah daerah	Nilai/ Kategori	63,89/B	62,80/B	98,29
2	Nilai kinerja pelayanan kesejahteraan masyarakat (NKPKM)	Nilai	100	90,57	90,57
3	Nilai kepuasan layanan kesejahteraan masyarakat (NKLM)	Persen	100	0	0
4	Tingkat ketepatan waktu penetapan kebijakan kepala daerah	Persen	100	86,34	86,34
5	Tingkat keberhasilan penanganan kasus hukum pemerintah daerah (TKPKHPemda)	Persen	100	100	100
6	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	2	3	150
7	Tingkat efektivitas kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga	Nilai	100	100	100
8	Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan	Persen	100	100	100
9	Tingkat efektivitas pelayanan pimpinan daerah	Nilai	100	99,17	99,17
10	Tingkat efektivitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persen	100	100	100
11	Tingkat implementasi kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
12	Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan	Persen	100	94,45	94,45
13	Tingkat penataan kelembagaan perangkat daerah	Persen	100	100	100

4.02 Sekretariat DPRD

Capaian kinerja indikator layanan Sekretariat DPRD di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	Persen	100	80	80

2.1.3.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.01 Perencanaan

Capaian kinerja indikator layanan Unsur Perencanaan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks perencanaan daerah	Nilai	80	N/A	N/A

5.02 Keuangan

Capaian kinerja indikator layanan Unsur Keuangan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Keuangan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP
2	Indeks pengelolaan aset	Nilai	60	N/A	N/A
3	Pertumbuhan PAD	Persen	5	N/A	N/A

5.03 Kepegawaian

Capaian kinerja indikator layanan Unsur Kepegawaian di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Kepegawaian Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks merit sistem	Nilai	250-324/Baik	0	0
2	Indeks profesionalitas ASN	Nilai	71-80/Sedang	1,29	1,81

5.05 Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja indikator layanan Unsur Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks inovasi daerah	Nilai	47	18,68	39,74

5.06 Pengelolaan Perbatasan

Capaian kinerja indikator layanan Unsur Pengelola Perbatasan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Pengelolaan Perbatasan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks pembangunan wilayah perbatasan	Nilai	0,5911	0,6738	100

2.1.3.6. Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

6.01 Inspektorat Daerah

Capaian kinerja indikator layanan Unsur Pengawasan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Inspektorat Daerah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Tingkat maturase SPIP	Level	4	2	50
2	Tingkat kapabilitas APIP	Level	4	1	25
3	Nilai temuan BPK	Persen	0	N/A	N/A

2.1.3.7. Fokus Unsur Pemerintahan Umum

8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja indikator layanan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Tingkat partisipasi pemilu	Persen	85	66,45	78,17
2	Tingkat penanganan konflik sosial	Persen	100	98,7	98,7

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pengukuran Aspek Daya Saing diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan instrumen yang menggambarkan tingkat produktivitas daerah. Dimana produktivitas daerah sendiri mencerminkan tingkat daya saing. Hal ini merujuk pada literatur yang menyatakan bahwa daya saing yang sesungguhnya itu diukur melalui produktivitas (Porter, 1990; Onsel et al., 2008).

Pengukuran IDSD mengombinasikan perspektif mikro di level industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu:

- faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*);
- faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan
- faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and sophistication factors*).

Ketiga faktor penentu daya saing ini dijabarkan ke dalam empat komponen awal pembentuk daya saing, yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Pilar daya saing meliputi 12 dimensi yang diukur dengan 64 indikator. Hasil pengukuran 64 indikator kemudian dikompilasi, menghasilkan IDSD. IDSD disajikan dalam ukuran nominal berkisar 01 s.d 05.

IDSD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 3,35. Meningkat dibanding Tahun 2022 sebesar 2,92 dan Tahun 2023 sebesar 2,98. Analisis Komponen dan Pilar IDSD menunjukkan bahwa Pilar dengan nilai tertinggi adalah Pilar Institusi, sementara Pilar dengan nilai terendah adalah Pilar Infrastruktur.

Tabel 2.70
IDSD Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024

Nomor	Komponen	Pilar	Nilai
1	Lingkungan Pendukung	Pilar 1 - Institusi	4,33
		Pilar 2 - Infrastruktur	2,37
		Pilar 3 - Adopsi TIK	3,54
		Pilar 4 - Stabilitas Ekonomi Makro	3,82
2	Sumber Daya Manusia	Pilar 5 - Kesehatan	3,40
		Pilar 6 - Keterampilan	3,73
3	Pasar	Pilar 7 - Pasar Produk	3,35
		Pilar 8 - Pasar Tenaga Kerja	2,64
		Pilar 9 - Sistem Keuangan	2,88
		Pilar 10 - Ukuran Pasar	3,44
4	Ekosistem Inovasi	Pilar 11 - Dinamisme Bisnis	4,00
		Pilar 12 - Kapabilitas Inovasi	2,69
IDSD			3,35

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan daya saing di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan pilar IDSD masih berkaitan dengan: permasalahan kapasitas infrastruktur (2,37), permasalahan pasar tenaga kerja (2,64), permasalahan kapabilitas inovasi (2,69) dan permasalahan sistem keuangan (2,88).

Gambar 2.29
Permasalahan Pilar IDSD Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024



Sumber: Buku IDSD 2024 (diolah)

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

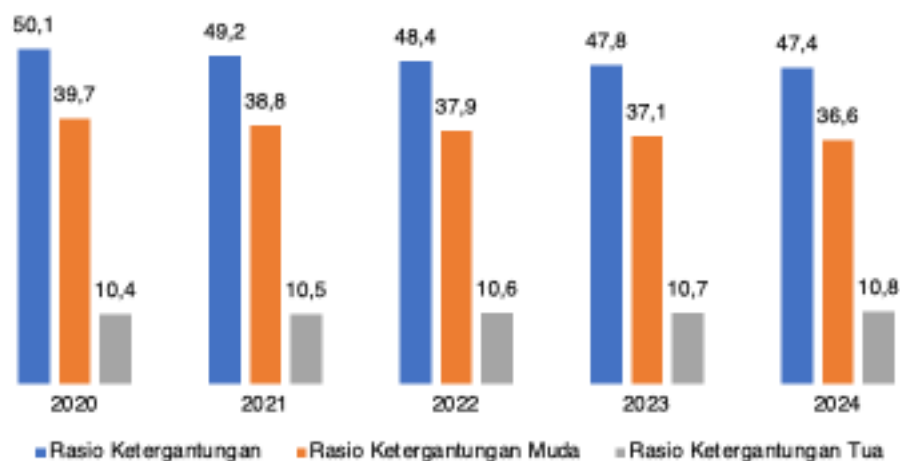
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah menguraikan kondisi daya saing daerah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi. Uraian pada bagian ini mencakup aspek-aspek yang berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi daerah, dan sumber daya manusia serta potensi ekonomi daerah.

a. Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin besar beban hidup penduduk produktif suatu daerah.

Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020 sebesar 50,1 turun menjadi 47,4 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan beban hidup usia penduduk produktif Kabupaten Maluku Tenggara semakin berkurang dari tahun ke tahun. Angka ini juga dimaknai bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Maluku Tenggara menanggung biaya hidup 47 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Rasio ini juga menunjukkan bahwa beban hidup penduduk usia produktif Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada kategori rendah (<50).

Gambar 2.30
Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



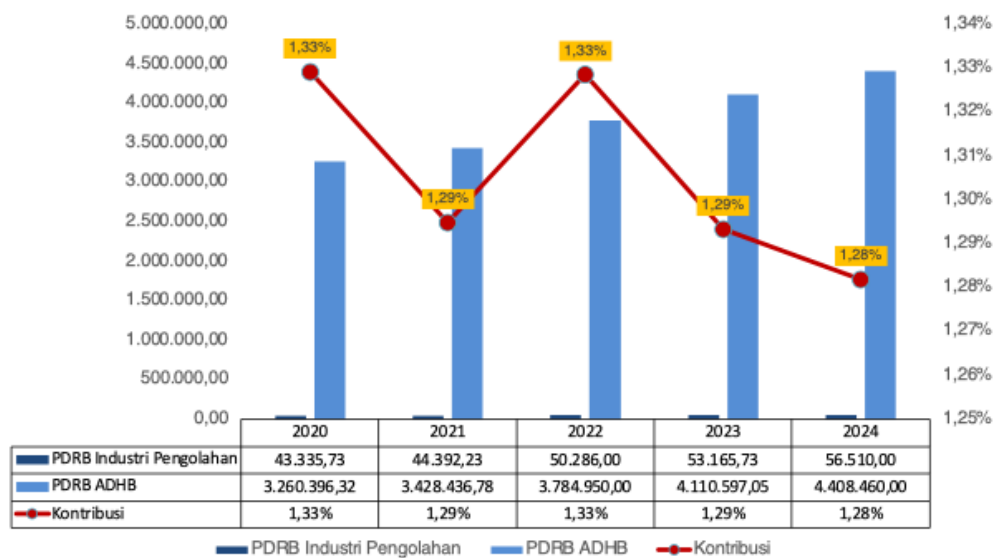
b. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri pengolahan adalah perbandingan antara lapangan usaha industri pengolahan terhadap total nilai PDRB. Semakin tinggi rasio industri pengolahan semakin besar nilai tambah produk suatu daerah.

Rasio PDRB industri pengolahan tahun 2020 sebesar 1,33 turun menjadi 1,28 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sektor Industri di Kabupaten Maluku Tenggara masih relatif terbatas. Ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di daerah, maka pengolahan hasil produksi masyarakat sudah harus ditingkatkan dalam model dan skala industri.

Gambar 2.31

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



Dari gambar di atas dapat diinterpretasikan bahwa PDRB Industri Pengolahan Mengalami Kenaikan dari yang semula di Tahun 2020 sebesar Rp43.335.730.000 menjadi Rp56.510.600.000 di Tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.174.870.000. Meskipun demikian dari Grafik tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi Kenaikan Rasio yang signifikan dan cenderung sedikit mengalami penurunan yaitu hanya berkontribusi sebesar 1,28 persen.

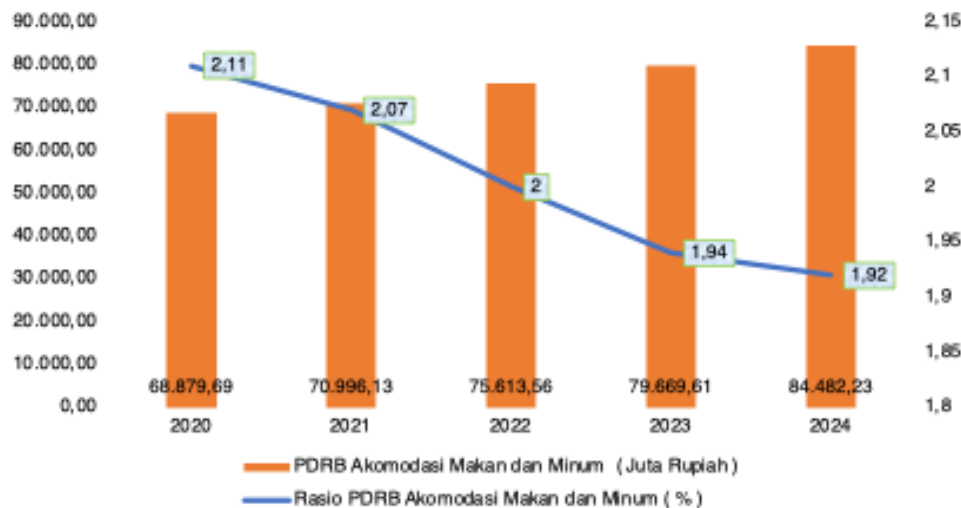
Rendahnya Kontribusi Industri Pengolahan salah satunya disebabkan karena masih kurangnya hilirisasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mana kontribusi PDRBnya sangat Tinggi di Tahun 2024 yaitu sebesar 30,4 persen dari Total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.

Di sisi lain, perlunya Kemudahan Perizinan, Promosi Potensi Sumberdaya Alam dan kemudahan Investasi pada sektor Industri Pengolahan baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modal di sektor industri pengolahan, dukungan infrastruktur, membangun rantai pasok yang kuat dan efisien untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk yang lancar, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sehingga meningkatkan produksi dan daya saing Industri Pengolahan di masa mendatang.

c. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyediaan akomodasi mencakup penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong. Penyediaan makan minum mencakup makanan dan minuman untuk konsumsi. Laju pertumbuhannya berfluktuasi seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan dan kegiatan pertemuan-pertemuan oleh pemerintah maupun swasta.

Gambar 2.32
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



Dari gambar di atas terlihat bahwa Nilai PDRB Akomodasi Makan dan Minum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 sebesar Rp68.879.690.000 menjadi Rp84.482.230.000 di tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.602.540.000. Meskipun demikian, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum cenderung mengalami penurunan yaitu yang semula di tahun 2020 sebesar 2,11 persen mengalami penurunan 1,92 persen di tahun 2024.

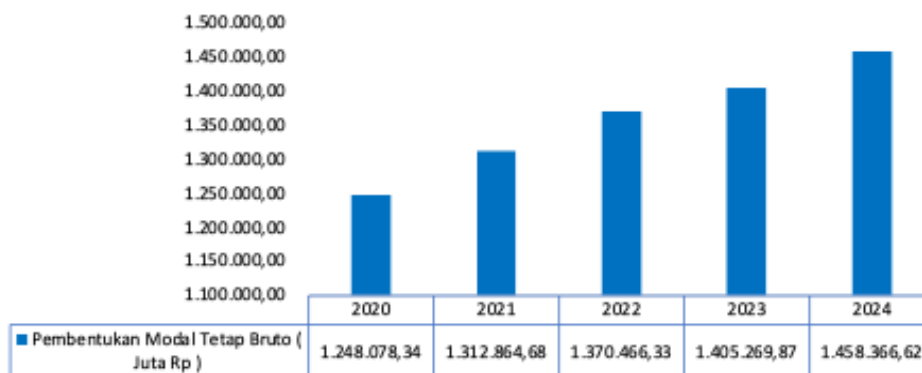
Hal ini disebabkan karena sektor-sektor pemicu pergerakan penyediaan akomodasi makan dan minum belum bergerak secara maksimal seperti ketersediaan hotel secara fisik cukup berkembang tetapi tingkat hunian hotel yang belum maksimal. Penyebab lainnya adalah adanya pergerakan ekonomi di sub lapangan usaha lainnya lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas pada penyediaan makan dan minum. Untuk itu, diperlukan optimalisasi strategi pemasaran pariwisata untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata, peningkatan infrastruktur pendukung, serta inovasi dalam layanan perhotelan dan kuliner dapat semakin memperkuat kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

d. **Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah penambahan nilai aset tetap di suatu daerah dalam periode tertentu. PMTB mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin, dan alat angkut. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 (enam) sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

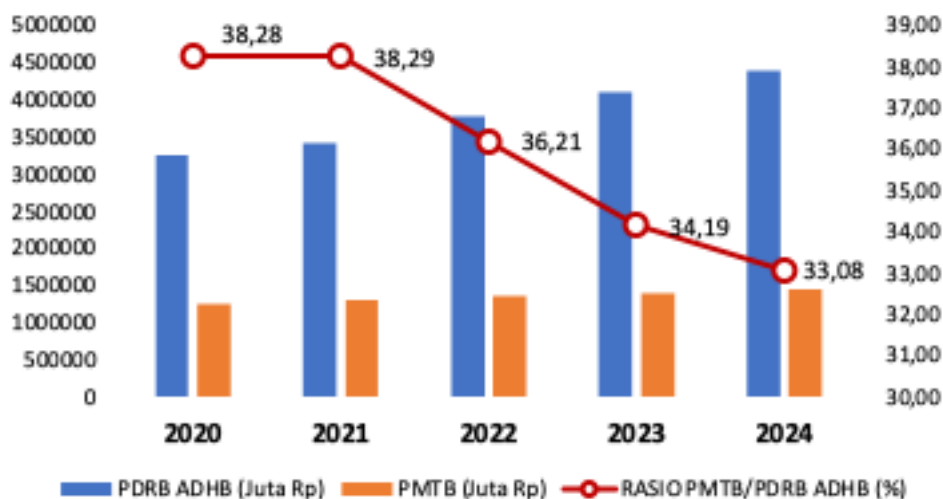
Nilai PMTB Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020-2024, dengan rata-rata peningkatan berkisar Rp40 miliar per tahun. Nilai PMTB ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.33
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



PMTB yang meningkat setiap tahun mengindikasikan peningkatan investasi dalam aset fisik yang akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta dapat menurunkan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru. Namun demikian, dalam rangka keberlanjutan maka perlu dianalisa pula Proporsi PMTB terhadap PDRB.

Gambar 2.34
Proporsi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Proporsi PMTB terhadap PDRB selama 5 (lima) tahun mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase investasi dalam aset tetap (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah telah berkurang secara signifikan. Ini dapat berarti ekonomi wilayah tersebut tidak berinvestasi secara proporsional lagi dalam aset fisik jangka panjang seperti bangunan atau mesin, yang bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dalam jangka panjang.

e. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang–Undang desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

IDM Kabupaten Maluku Tenggara untuk Desa Mandiri tahun 2020 hanya 1 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 10 ohoi pada tahun 2024, Desa Maju Tahun 2020 hanya 17 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 50 ohoi pada Tahun 2024, Desa Berkembang tahun 2020 hanya 81 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 124 ohoi pada tahun 2024 dan Desa Tertinggal tahun 2020 hanya 91 ohoi dapat ditekan sehingga hanya tersisa 6 Ohoi pada tahun 2024.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus Fasilitas Wilayah menggambarkan potensi infrastruktur wilayah yang berpengaruh bagi peningkatan kinerja pemerintahan, perekonomian dan pelayanan publik.

- a. Tingkat Aksesibilitas Daerah
- b. Cakupan Pelayanan Air Bersih
- c. Cakupan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Transformasi digital di Daerah adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan publik, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ini melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pelayanan publik.

Tabel 2.71
Trasformasi Digital di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Indikator	Jumlah Capaian	Keterangan
1	Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	8 Layanan	Website dan Aplikasi
2	Layanan Publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	10 Layanan (Aplikasi)	Aplikasi
3	Jumlah Ohoi Terkoneksi Seluler dan Internet	173 Ohoi (91%)	Jumlah Ohoi 190
4	Jumlah bantuan VSAT (Wifi Gratis Publik) Penunjang Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Publik lainnya	95 Area Coverage	Sarana Pendidikan: • 75 Sekolah Sarana Kesehatan: • 9 Puskesmas Pelayanan Publik lainnya: • 11 Lokasi

Peningkatan Teknologi digital di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki manfaat antara lain memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat sehingga dapat mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik juga dapat membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke platform digital, mendorong inovasi dalam berbagai sektor, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selain itu, Teknologi digital berperan dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas pekerjaan juga menjadi sarana literasi digital bagi Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

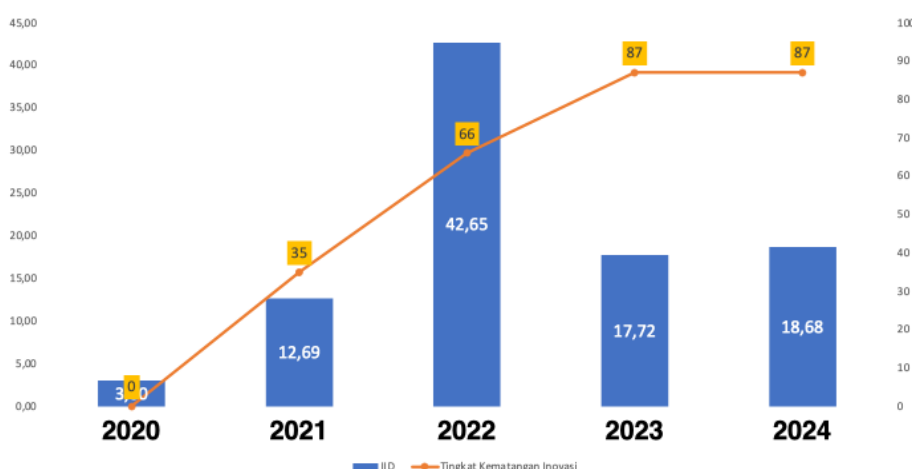
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus Iklim Investasi menggambarkan aspek potensi daerah yang dapat berperan mendukung perbaikan iklim investasi, guna menarik investasi ke daerah.

a. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan hasil pelaporan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah. IID yang dilaporkan dikemas dalam kegiatan *Innovation Government Award (IGA)*. Nilai hasil pengukuran IID dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. IID Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 sebagai berikut.

Gambar 2.35
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

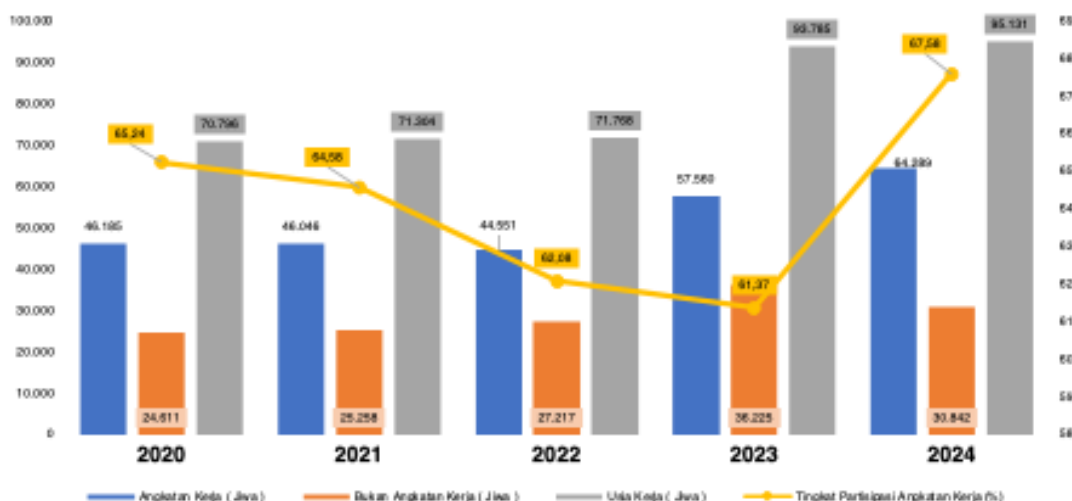


b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menjadi ukuran penting yang menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dinamika penawaran tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang substansial. Aspek potensial dari penawaran tenaga kerja, yang tercermin dalam jumlah penduduk usia kerja, yang mengalami pertumbuhan.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya preferensi yang kuat di kalangan penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dibandingkan dengan pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengambil peran sebagai pengelola rumah tangga. Pertumbuhan populasi usia produktif, khususnya dalam rentang 15-64 tahun, dipengaruhi oleh tiga komponen demografis utama: tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan pola migrasi.

Gambar 2.36
TPAK Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan rasio antara angkatan kerja dengan usia kerja. Jika angkatan kerja sama dengan usia kerja maka tingkat partisipasi mencapai 100 persen. Dari gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angkatan kerja sebanyak 46.185 jiwa dari total usia kerja sebanyak 70.796 jiwa dengan TPAK sebesar 65,24 persen. Sedangkan di tahun 2024 tingkat partisipasi mengalami peningkatan menjadi 67,58 persen.

Program pemerintah Daerah seperti pelatihan tenaga kerja, peningkatan investasi, serta stimulus ekonomi juga berperan dalam meningkatkan angka partisipasi kerja. Selain itu, faktor migrasi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah juga turut mempengaruhi fluktuasi ini. Kota dengan industri dan investasi yang berkembang lebih cepat mengalami kenaikan TPAK.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

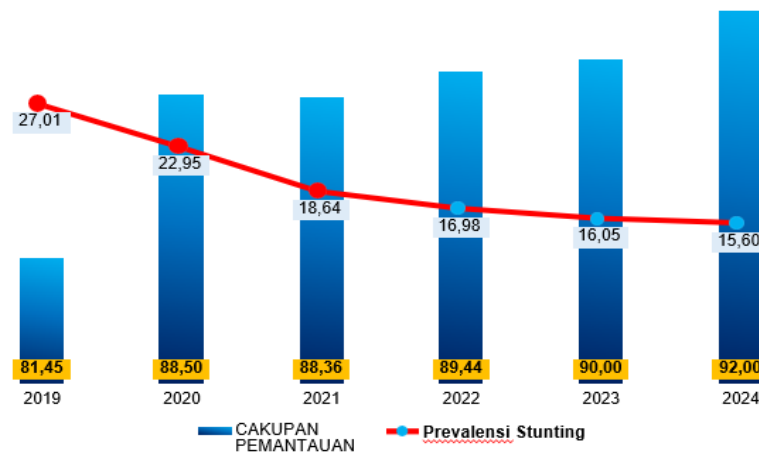
Fokus Sumber Daya Manusia menggambarkan aspek pembangunan manusia yang dapat mendorong meningkatnya produktivitas daerah.

a. Prevalensi Stunting

Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan. Percepatan penurunan stunting terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui strategi intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, dan intervensi koordinatif.

Data prevalensi stunting yang ditunjukan pada Gambar berikut merupakan data hasil pengukuran melalui elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM). Data e-PPGBM digunakan untuk memantau tumbuh kembang balita secara *real time*.

Gambar 2.37
Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



b. Rasio Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja

Sesuai data BPS berdasarkan survey Angkatan kerja nasional (Agustus 2024), jumlah angkatan kerja di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 64.289 orang, terdiri dari:

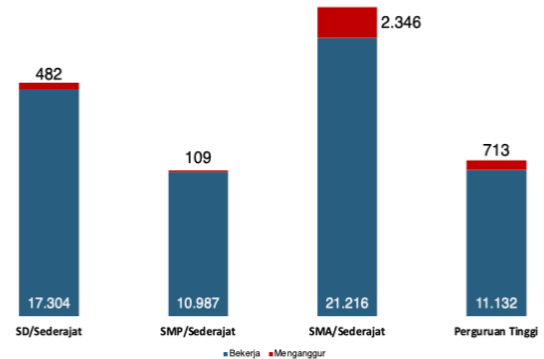
- Lulusan SD/ sederajat sebanyak 17.786 orang atau 27,67 persen;
- Lulusan SMP/ sederajat sebanyak 11.096 orang atau 17,26 persen;
- Lulusan SMA/ sederajat sebanyak 23.562 orang atau 36,65 persen;
- Lulusan Perguruan Tinggi (Diploma dan Sarjana) sebanyak 11.845 orang atau 18,42 persen.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara didominasi (meskipun tidak signifikan) oleh lulusan SMP/ sederajat sebesar 36,65 persen, diikuti lulusan SD sebesar 27,67 persen. Tenaga kerja dengan status lulusan perguruan tinggi sebesar 18,42 persen. Meskipun demikian, jumlah penganggur dari kelompok lulusan perguruan tinggi masih cukup besar mencapai 713 orang atau 6,02 persen. Jumlah penganggur terbanyak berasal dari kelompok lulusan SMA sebanyak 2.346 atau 9,96 persen.

Kondisi ini memerlukan perhatian ke depan antara lain:

- Setiap tahun perguruan tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara menghasilkan diploma dan sarjana yang tidak mampu terserap oleh pasar tenaga kerja.
- Diperlukan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menyediakan lulusan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik pasar tenaga kerja di daerah.
- Investasi swasta diperlukan guna membuka dan memperluas lapangan kerja.

Gambar 2.38
Perbandingan Tingkat Pendidikan
Tenaga Kerja Tahun 2024



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

Tabel 2.72
Evaluasi Program RKPD Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
I	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.1	PENDIDIKAN														
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pengelolaan Pendidikan	%	100	100,258.83	0	-	100	86,660.35	75	51,710.85	75	51,710.85	0.75	0.52
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum Mulok pada Dikdas, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	%	100	1,350.00	0	-	100	117.80	100	65.80	100	65.8	1.00	0.05
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Perizinan pendidikan yang terkendali	%	100	-	0	-	100	150.00	100	134.02	100	134.02	1.00	#DIV/0!
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra yang berkembang	%	100	9,088.50	0	-	100	141.22	100	141.22	100	141.22	1.00	0.02
1.2	KESEHATAN														
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan (Dinkes dan RSUD)	Indeks Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	%	90	58,770.43	0	-	90	54,434.92	90	50,227.03	90	50227.03	1.00	0.85

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tingkat Pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional	%	100	13,499.22	0	-	100	1,508.14	100	1505.03	100	1,505.03	1.00	0.11
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Tingkat Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makan minum sesuai standar kesehatan	%	100	1,515.05	0	-	100	108.72	100	107.39	100	107.39	1.00	0.07
1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Nilai	80	605.90	0	-	70	327.50	70	209.41	70	209.41	0.88	0.35
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	75	57,714.92	0	-	70	93,618.06	70	93,618.06	70	93,618.06	0.93	1.62
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Titik Genangan Air diwilayah Perkotaan Teratasi	%	87	1,514.75	0	-	75	91.00	75	90.60	75	90.6	0.86	0.06
4	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	1) Panjang bibir pantai aman dari abrasi pantai	m	1650	3,786.87	0	-	500	1,201.52	0	1,085.29	0	1,085.29	0.00	0.29
		2) Luasan lahan pertanian teririgasi	ha	18		0		5		5		5		0.28	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah tertata dengan baik	%	60	1,514.75	0	-	20	85.10	20	85.03	20	85.03	0.33	0.06

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase SR-SPAM	%	30	10,061.62	0	-	10	439.39	5	215.00	5	215.00	0.17	0.02
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga terbangun MCK	%	30	2,933.76	0	-	30	2,318.14	30	2,317.14	30	2,317.14	1.00	0.79
1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	%	66	4,931.27	0	-	62	500.00	62	320.00	62	320.00	0.94	0.06
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh perkotaan tertata	%	7.5	4,544.25	0	-	2.5	900.00	0	2.60	0	2.60	0.00	0.00
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan Perumahan sehat	%	85	4,544.25	0	-	80	457.48	80	457.15	80	457.15	0.94	0.10
1.5	TRANTIBUM LINMAS														
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	%	100	3,786.87	0	-	100	56,181.99	100	56,087.34	100	56,087.34	1.00	14.81

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
2	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	Persentase cakupan warga negara berwawasan Kewaspadaan Nasional	%	100	6,409.21	0	-	100	680.00	100	650.34	100	650.34	1.00	0.10
		Persentase Pencegahan/ Tangkal Dini Konflik	%	100		0		100		100		100		1.00	
3	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakkan PERDA tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	6,059.00	0	-	100	124.5	100	122.09	100	122.09	1.00	0.02
4	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks	70	3,635.40	0	-	60	473.74	55	377	55	377	0.79	0.10
5	Program pencegahan, pengendalian, pe- madaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Respons time rate	Nilai	80	5,577.34	-	-	60	318.80	45	197.1	45	197.1	0.56	0.04
1.6	SOSIAL														
1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang pulih dan hidup secara normal	%	85	3,022.53	0	-	85	497.90	85	481.4	85	481.4	1.00	0.16

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin mendapat fasilitas perlinsos	%	85	3,454.32	0	-	85	168.20	85	159.5	85	159.5	1.00	0.05
3	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	%	100	2,158.94	0	-	100	30.00	100	30.00	100	30	1.00	0.01
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	%	100	227.21	0	-	100	95.00	100	91.40	100	91.4	1.00	0.40
II	WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.1	TENAGA KERJA														
1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat	%	85	4,544.25	0	-	80	259.5	80	226.59	80	226.59	0.94	0.05
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	%	20	454.42	0	-	20	45	20	44.90	20	44.90	1.00	0.10
2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	85	332.03	0	-	75	152.15	75	96.58	75	96.58	0.88	0.29
2	Program Perlindungan Perempuan	Tingkat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	%	85	302.95	0	-	75	917.00	75	917.00	75	917.00	0.88	3.03

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
3	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak Terpenuhi	%	60	530.16	0	-	60	30.00	45	13.02	45	13.02	0.75	0.02
2.3	PANGAN														
1	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pertumbuhan produk Pangan Olahan untuk kemandirian pangan	%	75	1,514.75	0	-	70	-	0	-	0	-	0.00	-
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan Produksi Pangan Lokal	%	75	4,544.25	0	-	70	232.72	70	224.37	70	224.37	0.93	0.05
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan daerah	%	80	1,514.75	0	-	80	33.16	80	33.16	80	33.16	1.00	0.02
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Aman Konsumsi	%	100	454.42	0	-	100	82.00	100	68.50	100	68.5	1.00	0.15
2.4	PERTANAHAN														
1	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah Persil Tanah Pemda tersertifikasi	Persil	30	1,514.75	0	-	10	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
2.5	LINGKUNGAN HIDUP														
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Tingkat Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	454.42	0	-	100	223.74	100	124.34	100	124.34	1.00	0.27

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Tingkat Partisipasimasyarakat dalampengelolaan LingkunganHidup	%	90	454.42	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-
3	Program Perencanaan Lingkungan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan	%	100	1,990.38	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-
4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah 3 R	%	85	9,997.35	0	-	100	5592.22	100	5012.41	100	5,012.41	1.18	0.50
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau terkelola dengan baik	%	100	302.95	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-
2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Ber-KTP	%	100	3,029.50	0	-	100	665.92	100	665.92	100	665.92	1.00	0.22
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	3,029.50	0	-	100	178.72	100	178.72	100	178.72	1.00	0.06
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Adminduk berbasis SIAK	%	100	984.58	0	-	100	30.00	0	-	0	-	0.00	-
2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang dapat menata administrasi pemerintahan desa secara baik	%	80	3,029.50	0	-	60	205,391.89	20	38,805.39	20	38,805.39	0.25	12.81
2	ProgramPemberdayaanLemba gaKemasyarakatan,Lembaga Adat danMasyarakat HukumAdat	Persentase Ohoi yangmemiliki LembagaKemasyarakat an, LembagaAdat dan MasyarakatHukum Adat Aktif	%	80	450.00	0	-	75	94.43	75	72.61	75	72.61	0.94	0.16
2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
1	Program pengendalian penduduk	Persentase Ibu PUS peserta KB yang tertunda kehamilannya	%	95	1,992.87	0	-	92	60.00	92	52.50	92	52.50	0.97	0.03
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Sejahtera	%	85	1,328.58	0	-	82	3,553.60	82	3,226.44	82	3,226.44	0.96	2.43
2.9	PERHUBUNGAN														
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat keselamatan transportasi laut	%	100	3,029.50	0	-	100	2,648.85	100	2,494.32	100	2,494.32	1.00	0.82
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat Keselamatan transportasi darat	%	100	1,514.75	0	-	100	6,601.45	100	1,762.38	100	1,762.38	1.00	1.16
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terpublikasi	%	100	2,313.55	0	-	100	1084.52	100	1083.05	100	1083.05	1.00	0.47
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD Melakukan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	%	20	3,084.73	0	-	10	133.05	10	114.67	10	114.67	0.50	0.04
2.11	KOPERASI UKM														
1	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan UMKM yang meningkat Akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM	%	4	2,272.12	0	-	2.5	2,698.85	1.5	225.00	1.5	225.00	0.38	0.10
2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi/ USP yang mendapatkan rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	%	100	609.50	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	Unit	40	757.37	0	-	7	25.00	7	23.46	7	23.46	0.18	0.03
4	Program Penilaian Kesehatan KSU/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang memiliki Omzet Tahunan	Unit	27	757.37	0	-	5	30.47	5	30.47	5	30.47	0.19	0.04

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
5	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang memiliki SDM bersertifikasi kompetensi	Unit	30	2,272.12	0	-	10	294.40	10	225.90	10	225.90	0.33	0.10
2.12	PENANAMAN MODAL														
1	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Investor	3	1,514.75	0	-	1	30.00	1	13.27	1	13.27	0.33	0.01
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai Izin yang diberikan	%	100	1,363.27	0	-	100	590.20	100	469.25	100	469.25	1.00	0.34
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Nilai	85	1,514.75	0	-	80	90.00	80	87.88	80	87.88	0.94	0.06
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	%	90	1,494.66	0	-	80	1,565.00	80	685.49	80	685.49	0.89	0.46
2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah perolehan medali pada iven olahraga provinsi dan nasional	Jlh	15	996.40	0	-	5	2,800.00	5	1,605.08	5	1605.08	0.33	1.61
3	Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	Persentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan	%	100	2,272.12	0	-	100	197.00	18	36.97	18	36.97	0.18	0.02

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
2.14	STATISTIK														
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Sesuai Kebutuhan	%	90	1,514.75	0	-	85	19.78	85	19.64	85	19.64	0.94	0.01
2.15	PERSANDIAN														
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah PD yang menggunakan Sandi untuk pengamanan data dan informasi	%	15	737.37	0	-	5	23.22	5	18.64	5	18.64	0.33	0.03
2.16	KEBUDAYAAN														
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Perkembangan Kebudayaan	%	80	3,635.40	0	-	75	785.20	75	720.80	75	720.80	0.94	0.20
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Tingkat Pengembangan Kesenian Tradisional	%	80	3,029.50	0	-	75	175.20	75	174.80	75	174.80	0.94	0.06
3	Program Pelestarian pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Lestari	%	80	1,651.07	0	-	75	1,350.00	75	1,348.20	75	1,348.20	0.94	0.82
2.17	PERPUSTAKAAN														
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Pemustaka		85	3,701.68	0	-	80	857.07	80	854.70	80	854.70	0.94	0.23
2.18	KEARSIPAN														
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Daerah yang dikelola secara elektronik	%	70	1,363.27	0	-	65	29.15	65	29.15	65	29.15	0.93	0.02

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Daerah dalam Kondisi Baik	%	80	1,336.27	0	-	80	-	0	-	0	-	0.00	-
III	URUSAN PILIHAN														
3.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN														
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap yang dihasilkan nelayan sasaran pemberdayaan	%	2.5	30,263.09	0	-	1.5	6,249.97	1.5	6,080.24	1.5	6,080.24	0.60	0.20
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya yang dihasilkan pembudidaya sasaran pemberdayaan	%	7.5	23,413.56	0	-	1.5	4,627.03	1.5	4,294.28	1.5	4,294.28	0.20	0.18
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan yang dihasilkan pelaku usaha pengolahan perikanan skala mikro	%	85	2,052.20	0	-	80	649.97	80	646.90	80	646.90	0.94	0.32
3.1	PARIWISATA														
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Rata-rata Lama Tinggal	Hari	5	4,544.25	0	-	5	4,998.77	5	3,789.62	5	3,789.62	1.00	0.83
2	Program Pemasaran pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	85	2,423.60	0	-	>5	-	0	-	0	-	0.00	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Objek HAKI	Objek	3	3,022.53	0	-	3	-	0	-	0	-	0.00	-
4	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersertifikasi kompetensi Tingkat Dasar	%	5	2,423.60	0	-	5	1,151.02	0	1,110.46	0	1,110.46	0.00	0.46
3.2	PERTANIAN														
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	%	1.7	4,544.25	0	-	2.6	450.90	2.6	449.40	2.6	449.40	1.53	0.10
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luasan Lahan Pertanian Produktif	Ha	7.5	3,029.50	0	-	2880.4	6,520.30	2880.4	6,520.10	2880.4	6,520.10	384.05	2.15
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luasan Lahan pertanian terserang bencana hama teratasi	Ha	960	908.85	0	-	200	455.15	200	455.09	200	455.09	0.21	0.50
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan yang meningkat produksi pertaniannya	%	15	3,029.50	0	-	10	140.00	10	139.90	10	139.90	0.67	0.05
3.3	PERDAGANGAN														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
1	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Tingkat Efektifitas Distribusi Perdagangan	%	85	300.00	0	-	80	-	0	-	0	-	0.00	-
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Angka Kasus Laporan Konsumen	< / >	5	150.00	0	-	<10	65.00	15	63.81	15	63.81	3.00	0.43
3	Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	85	2,272.12	0	-	80	536.10	80	534.03	80	534.03	0.94	0.24
3.4	PERINDUSTRIAN														
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Unit Usaha Industri	Unit	117	750.00	0	-	110	2,790.29	110	2,561.34	110	2,561.34	0.94	3.42
2	Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Penerbitan Izin dan TDP	%	100	996.43	0	-	100	16.79	100	16.71	100	16.71	1.00	0.02
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data terinput pada SIINAS	%	100	302.95	0	-	100	20.00	100	20.00	100	20.00	1.00	0.07
IV	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG														
4.1	PERENCANAAN														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
1	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	100	11,103.25	0	-	100	2,025.00	100	1,731.12	100	1,731.12	1.00	0.16
2	Program Koordinasidan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerah	Tingkat Capaian KinerjaSasaran PD	%	90	9,838.50	0	-	80	999.99	80	850.26	80	850.26	0.89	0.09
		Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas PD	%	90		0		80		80		80		0.89	
4.2	KEUANGAN														
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Penyampaian LKPD ke BPK Tepat Waktu	%	100	12,338.95	0	-	100	3,366.95	100	3,062.49	100	3,062.49	1.00	0.25
		Tingkat Penyampaian KUAPPAS dan RAPBD ke DPRD Tepat Waktu	%	100		0		100		100		100		1.00	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD terkeloa sesuai standar Pengelolaan BMD	%	78	2,164.49	0	-	70	940.00	70	670.32	70	670.32	0.90	0.31
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	3 - 5	3,084.73	0	-	3 - 5	1,676.90	3	1,127.07	3	1,127.07	0.60	0.37
4.3	KEPEGAWAIAN														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	13,632.75	0	0.00	100	1,996.00	100	1,927.00	100	1,927.00	1.00	0.14
4.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah PD Sangat Inovatif dan Inovatif	PD	15	3,029.50	0	0.00	5	1,075.00	2	954.88	2	954.88	0.13	0.32
V	URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA														
5.1	PENGAWASAN														
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	%	90	6,625.79	0	-	80	1,393.99	80	675.96	80	675.96	0.89	0.10
2	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan daerah yang direviu APIP	%	100	764.75	0	-	100	422.24	50	184.10	50	184.10	0.50	0.24
5.2	SEKRETARIAT DPRD														
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terfasilitasi	%	85	33,932.11	0	0.00	80	17,122.29	80	14,851.59	80	14,851.59	0.94	0.44
5.3	SEKRETARIAT DAERAH														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	4,487.67	0	0.00	100	17,081.56	100	11,474.49	100	11,474.49	1.00	2.56
		Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan	%	100	2,395.07	0	0.00	100	3,077.06	100	2,647.02	100	2,647.02	1.00	1.11
		Persentase pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah bidang hukum	%	100		0		100		100		100		1.00	
		Persentase pelaksanaan kebijakan bidang keprotokoleran dan humas	%	100		0		100		100		100		1.00	
		Persentase pelaksanaan kebijakan Bidang kelembagaan	%	100		0		100		100		100		1.00	
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Administrasi Kegiatan Pembangunan daerah yang dikendalikan	%	100	2,294.25	0	-	100	1,869.99	100	1,793.32	100	1,793.32	1.00	0.78

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
		Persentase pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Perekonomian dan Sumberdaya alam	%	100		0		100		100		100		1.00	
		Persentase pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Administrasi Pembangunan	%	100		0		100		100		100		1.00	
		Persentase Penyediaan Barang dan jasa Tepat Waktu	%	100		0		100		100		100		1.00	
5.4	KECAMATAN														
	KEC. KEI KECIL														
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Kei Kecil	Nilai	90	185.08	0	0.00	80	64.99	80	64.31	80	64.31	0.89	0.35
2	ProgramPemberdayaanMasya rakat Desa danKelurahan	Persentase Desa Majudan Mandiri	%	70	370.16	0	0.00	70	241.14	70	223.18	70	223.18	1.00	0.60
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	148.06	0	0.00	100	20.00	100	16.83	100	16.83	1.00	0.11

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	370.16	0	0.00	100	55.22	100	54.59	100	54.59	1.00	0.15
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	308.47	0	0.00	100	75.00	100	74.73	100	74.73	1.00	0.24
	KEC. KEI KECIL TIMUR														
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	246.77	0	0.00	80	53.93	80	53.93	80	53.93	0.89	0.22
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	416.43	0	0.00	70	45.85	70	45.84	70	45.84	1.00	0.11
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	166.57	0	0.00	100	39.70	100	39.70	100	39.70	1.00	0.24

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	416.43	0	0.00	100	34.69	100	34.69	100	34.69	1.00	0.08
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	308.47	0	0.00	100	50.26	100	50.26	100	50.26	1.00	0.16
KEC. KEI KECIL TIMUR SELATAN															
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	92.54	0	0.00	80	60.19	80	60.19	80	60.19	0.89	0.65
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	254.49	0	0.00	70	33.83	70	33.55	70	33.55	1.00	0.13
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	101.79	0	0.00	100	25.70	100	23.60	100	23.60	1.00	0.23

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	254.49	0	0.00	100	73.15	100	73.15	100	73.15	1.00	0.29
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum diwilayah kecamatan	%	100	246.77	0	0.00	100	63.71	100	63.71	100	63.71	1.00	0.26
	KEC. KEI KECIL BARAT														
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	220.00	0	0.00	80	65.99	80	64.49	80	64.49	0.89	0.29
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	170.00	0	0.00	70	52.00	70	51.98	70	51.98	1.00	0.31
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	70.00	0	0.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	1.00	0.21

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu	%	100	170.00	0	0.00	100	70.00	100	69.99	100	69.99	1.00	0.41
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	401.00	0	0.00	100	30.00	100	39.00	100	39.00	1.00	0.10
	KEC.HOAT SORBAY														
1	Programpenyelenggaraan pemerintahan danpelayanan publik	Nilai survey pelayananpublik di kecamatan	Nilai	90	200.50	0	0.00	80	76.52	80	67.18	80	67.18	0.89	0.34
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	339.32	0	0.00	70	55.00	0	-	0	-	0.00	-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	169.66	0	0.00	100	50.00	100	49.85	100	49.85	1.00	0.29

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	339.32	0	0.00	100	62.00	100	61.95	100	61.95	1.00	0.18
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	308.47	0	0.00	100	84.60	100	84.59	100	84.59	1.00	0.27
	KEC. MANYEUW														
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	107.96	0	0.00	80	80.00	75	71.70	75	71.70	0.83	0.66
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	227.62	0	0.00	70	55.00	70	25.00	70	25.00	1.00	0.11
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	138.81	0	0.00	100	20.00	100	14.40	100	14.40	1.00	0.10

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	277.62	0	0.00	100	46.50	100	45.00	100	45.00	1.00	0.16
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	308.47	0	0.00	100	35.00	100	34.33	100	34.33	1.00	0.11
	KEC. KEI BESAR														
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	231.35	0	0.00	80	277.27	80	108.30	80	108.30	0.89	0.47
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	370.16	0	0.00	70	90.45	25	22.00	25	22.00	0.36	0.06
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	231.35	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0.00	-
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	616.94	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0.00	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	539.82	0	0.00	100	125.00	1	1.80	1	1.80	0.01	0.00
6	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan Sampah kota Elat	%	100	231.35	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0.00	-
	KEC. KEI BESAR SELATAN														
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	154.23	0	0.00	80	71.00	80	71.00	80	71.00	0.89	0.46
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	308.47	0	0.00	70	60.00	70	60.00	70	60.00	1.00	0.19
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	154.23	0	0.00	100	25.00	100	25.00	100	25.00	1.00	0.16
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	308.47	0	0.00	100	105.00	100	105.00	100	105.00	1.00	0.34

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	308.47	0	0.00	100	122.58	100	122.58	100	122.58	1.00	0.40
	KEC. KEI BESAR SELATAN BARAT														
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	154.50	0	0.00	80	199.22	80	161.34	80	161.34	0.89	1.04
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	403.00	0	0.00	70	110.00	70	109.20	70	109.20	1.00	0.27
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	208.00	0	0.00	100	34.36	100	12.39	100	12.39	1.00	0.06
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	403.00	0	0.00	100	-	0	-	0	-	0.00	-
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	450.00	0	0.00	100	157.40	100	152.60	100	152.60	1.00	0.34
	KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	200.50	0	0.00	80	110.00	100	110.00	100	110.00	1.11	0.55
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	339.32	0	0.00	70	70.00	70	70.00	70	70.00	1.00	0.21
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselesaikan dengan baik	%	100	231.36	0	0.00	100	40.00	100	40.00	100	40.00	1.00	0.17
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	462.71	0	0.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	1.00	0.22
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	370.16	0	0.00	100	150.00	100	150.00	100	150.00	1.00	0.41
	KEC. KEI BESAR UTARA BARAT														
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	90	200.50	0	-	75	157.64	75	157.38	75	157.38	0.83	0.78

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9 / 5 x 100%	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Berkembang	%	70	339.32	0	-	50	40.00	50	40.00	50	40.00	0.71	0.12
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	231.35	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggara n Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	462.71	0	-	100	91.11	100	90.61	100	90.61	1.00	0.20
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	370.16	0	-	100	160.35	100	160.35	100	160.35	1.00	0.43
5.5	WILAYAH PERBATASAN														
1	Program pengelolaan perbatasan	Pertumbuhan Pembangunan wilayah perbatasan	%	89	4,058.43	0	-	85	285.21	85	269.42	85	269.42	0.96	0.07
5.6	PROGRAM UMUM SEKRETARIAT PD														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rerata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	%	100	827,757.32	0	-	100	358,429.23	100	331,157.71	100	331,157.71	1.00	0.40

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain.

(1) Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Hal ini ditandai dengan rendahnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, rasio lulusan yang masih didominasi jenjang SD (30,96%) dan SMA (36,23%), serta rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja (43,42%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi (5,73%) dengan kecenderungan meningkat.

(2) Rendahnya akselerasi pertumbuhan, serta distribusi ekonomi yang tidak merata

Hal ini ditandai dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (Tahun 2024: 5,44%, lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku Tenggara selama 20 tahun), daya saing ekonomi relatif rendah karena aktivitas ekonomi belum memiliki nilai tambah yang optimal, disebabkan kurangnya investasi.

(3) Belum optimalnya kinerja tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Hal ini ditandai dengan beberapa capaian kinerja yang tergolong rendah, antara lain: kepatuhan standar pelayanan publik sebesar 60,80 dengan kategori C, pada Zona Kuning dengan Kualitas Sedang, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 62,75 pada kategori B, Indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai angka 42,39, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebesar 2,42 dengan Kategori Rendah, Indeks Daya Saing Daerah sebesar 2,98, 6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 1,94 dengan kategori Cukup, serta Indeks Inovasi Daerah sebesar 17,72 dengan predikat Kurang Inovatif.

(4) Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan

Sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), secara keseluruhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 51.61 poin pada tahun 2021 menjadi 74,99 poin tahun 2024. Hal ini menunjukkan keseluruhan upaya dan kebijakan yang diimplementasikan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi seperti degradasi hutan, pengelolaan air yang lebih baik dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk pengelolaan lahan pertanian yang perlu dioptimalkan karena dikategorikan sudah melampaui daya dukung dan daya tampung.

(5) Stabilitas politik dan keamanan yang cenderung menurun.

Hal ini ditandai dengan tingginya angka kriminalitas (554 kasus dalam empat tahun terakhir), di mana 63,54 persen kasus kriminal terjadi di wilayah kerja Polsek Kei Kecil yang membawahi 3 (tiga) kecamatan di sekitar wilayah Ibu Kota Langgur.

(6) Rendahnya ketahanan sosial dan budaya yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

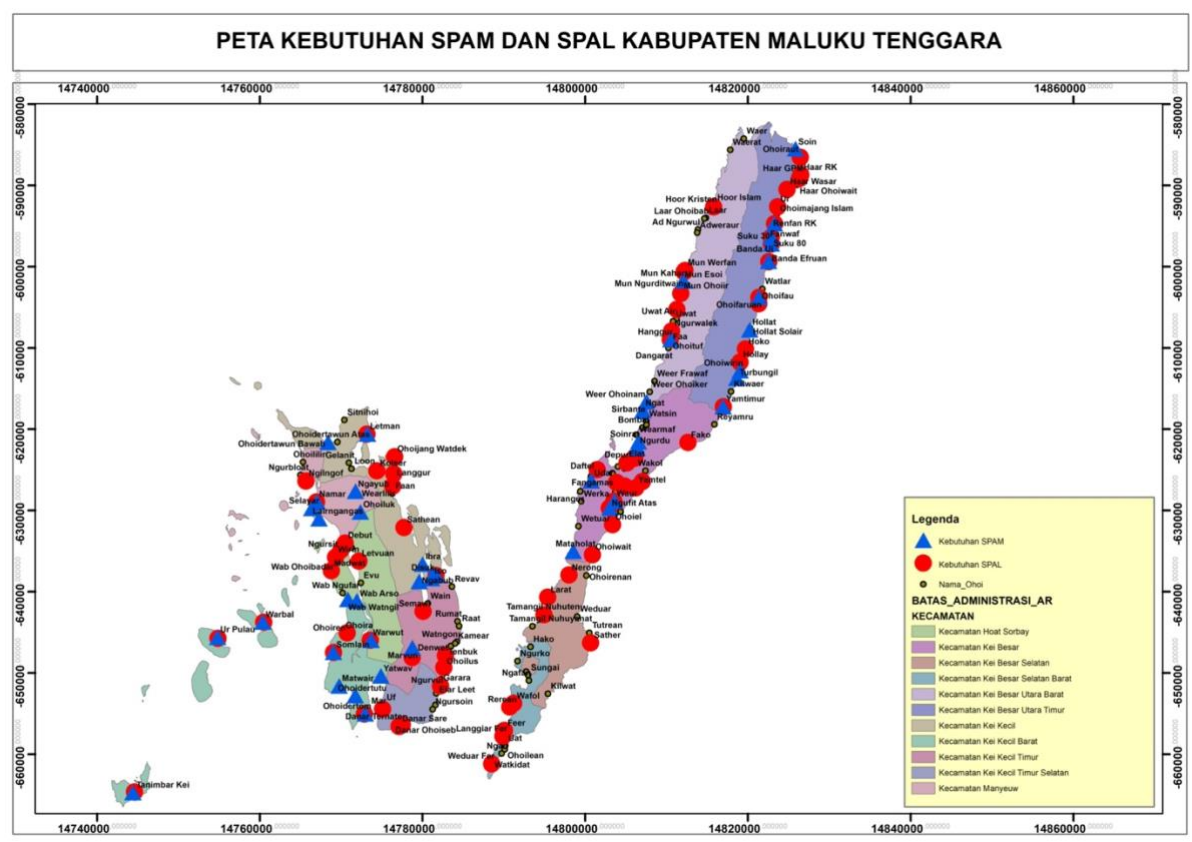
Hal ini ditandai dengan tergerusnya nilai-nilai budaya masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Tergambar dari Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2024 sebesar 21,22 persen masih lebih tinggi dibanding Kemiskinan Maluku (16,05%) dan Nasional (8,57%). Tingkat Kemiskinan Maluku Tenggara pada Tahun 2023 berada pada urutan ke-5 tertinggi di Provinsi Maluku dan masih lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

(7) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur

Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya kapasitas infrastruktur, antara lain masalah konektivitas dan aksesibilitas (akses keterhubungan wilayah sebesar 71,12% dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 41,63%), akses rumah layak huni (35,98% Rumah Tidak Layak Huni, Akses Air Minum 71,62% dan Akses Sanitasi 79,17%) dan kawasan permukiman (Kawasan Pemukiman Kumuh Watdek–Ohoijang–Langgur dan Elat), fasilitas bangunan gedung (10 Kantor Pemerintah Daerah masih menumpang di bangunan lain), dan infrastruktur kawasan termasuk infrastruktur di wilayah perbatasan negara, di Pulau Kei Besar.

Kebutuhan Pelayanan Akses Air Minum (SPAM) dan Sanitasi (SPAL) di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut.

Gambar 2.39
Peta Kebutuhan SPAM dan SPAL Kabupaten Maluku Tenggara



2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan Bidang Pendidikan yaitu masih rendahnya Akses, mutu, tatakelola dan partisipasi masyarakat.

- 1) Akses pendidikan masih rendah yang ditandai dengan:
 - (1) Angka Partisipasi Sekolah Paud sebesar 83,46 persen, dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 6.469 jiwa, maka diasumsikan terdapat 1.070 anak usia 5-6 Tahun yang tidak berpartisipasi pada jenjang Paud.
 - (2) Angka Partisipasi Sekolah SD sebesar 99,67 persen, dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 14.525 jiwa, maka masih terdapat penduduk Maluku Tenggara yang tidak berpartisipasi di jenjang pendidikan SD.
 - (3) Angka putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih cukup tinggi. Tahun 2023 sesuai data Pusdatin Kementerian Pendidikan, terjadi 84 kasus siswa putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara.
- 2) Mutu pendidikan masih rendah yang ditandai dengan.
 - (1) Rata-rata nilai kelulusan SD dalam empat tahun terakhir sebesar 66,68.
 - (2) Rata-rata nilai kelulusan SMP dalam empat tahun terakhir sebesar 76,11.
 - (3) Angka Literasi dan Numerasi masih rendah. Indeks Pembangunan Literasi Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 29,41. Lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (43,03). Indeks Pembangunan Literasi Maluku Tenggara adalah yang terendah di Provinsi Maluku.
 - (4) Kurangnya pelatihan dan peningkatan kualitas guru, mengakibatkan transformasi pendidikan tidak optimal.
- 3) Manajemen dan tata Kelola pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara belum optimal. Salah satunya disebabkan manajemen dan pengelolaan satuan pendidikan yang kurang optimal.
- 4) Masih terdapat tenaga pendidik pada satuan pendidikan Paud, SD, SMP dan Non Formal yang tidak Sesuai Standar:
 - (1) Distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata. Masih terjadi kelangkaan guru (guru kelas maupun guru mata pelajaran) di sejumlah sekolah, namun di sisi lain, terdapat penumpukkan guru di sejumlah sekolah lainnya.
 - (2) Masih terdapat tenaga pendidik pada satuan Paud, SD, SMP dan Non Formal tidak bersertifikasi.
 - (3) Penerapan bidang studi muatan lokal tidak dilaksanakan karena tidak tersedia kurikulum Lokal dan terbatasnya tenaga pengajar yang berkompeten untuk mengampuh bidang studi muatan lokal.
 - (4) Partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan bidang Pendidikan masih rendah, yang ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi Komite Sekolah dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah.
 - (5) Minat dan daya baca masyarakat masih rendah dilihat dari masih rendahnya kunjungan perpustakaan. Tahun 2024 rata-rata kunjungan perpustakaan 2,22 persen.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan antara lain.

- 1) Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih rendah, ditandai dengan.
 - (1) Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas pada Tahun 2024 baru mencapai 60,86 persen. Di mana 7 puskesmas atau 33,3 persen, belum mencapai standar keterpenuhan minimal 60 persen.
 - (2) Keterpenuhan sarana, pra-sarana dan alat kesehatan di RSUD pada Tahun 2024 baru mencapai 62,77 persen. Keterpenuhan Alat Kesehatan di RSUD masih sangat rendah di angka 33,13 persen dari standar minimal 60 persen.
 - (3) Kondisi Bangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah. 12 unit Bangunan Puskesmas mengalami kerusakan dari total 21 Puskesmas. Bangunan Pustu dari total 34 unit, terdapat 28 unit yang mengalami kerusakan, termasuk 15 unit yang dalam kondisi rusak berat.
 - (4) Keterpenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan belum memadai. Di RSUD, dari total kebutuhan sebanyak 670 baru terpenuhi sebanyak 307 atau sebesar 45,82 persen. Di Puskesmas, dari total 21 unit, Dokter Gigi hanya tersedia di 1 puskesmas.
 - (5) Sebaran tenaga kesehatan di Puskesmas relatif tidak merata. Terjadi kelangkaan/kekosongan di sejumlah Puskesmas, tetapi terjadi penumpukan di sejumlah puskesmas lainnya.
 - (6) Pelayanan rujukan belum memadai, disebabkan masalah akses dan konektivitas wilayah, khususnya di wilayah Pulau Kei Besar dan pulau-pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat.
- 2) Masih terjadi kasus kematian Ibu melahirkan, tahun 2024 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 0,1 per 1.000 Kelahiran Hidup.
- 3) Masih terjadi kasus Kematian bayi dan balita, tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 0,9 per 100.000 Kelahiran Hidup.
- 4) Masih terjadi kasus Balita gizi buruk, tahun 2024 Prevalensi Balita Gizi Buruk sebesar 0,14 persen.
- 5) Penduduk masih BAB sembarangan. Cakupan Desa Bebas BAB sembarangan (Desa ODF) sebanyak 50 Desa dari total 190 Desa di Kabupaten Maluku Tenggara.
- 6) Pola hidup masyarakat yang tidak sehat yang mengakibatkan masih banyak angka kasus kematian pasien penyakit tidak menular.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan dengan tujuan menyediakan air bersih untuk rumah tangga, penyediaan sanitasi, jaringan irigasi, koordinasi penyediaan listrik rumah tangga, penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan penataan ruang. Sampai dengan tahun 2023 pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari.

- 1) Masih terdapat 28,38 persen rumah tangga tidak memiliki akses air bersih layak.
- 2) Masih terdapat 20,88 persen Rumah tangga tidak memiliki akses sanitasi layak.
- 3) Masih ada 9 ohoi atau sebesar 5 persen yang belum teraliri listrik.
- 4) Masih terdapat 54 ohoi di pulau Kei Besar yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik.

- 5) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan masih lemah. Ditemukan 26,5 persen bangunan baru tidak memiliki IMB atau melanggar Perda tentang RTRW.
- 6) Pelayanan publik tidak berjalan optimal karena minimnya prasarana dan sarana kantor, masih terdapat sejumlah OPD yang belum memiliki gedung kantor.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diantaranya adalah.

- 1) Masih terdapat rumah tidak layak huni khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 18,98 persen.
- 2) Kawasan kumuh perkotaan yang belum tertata sebesar 81,37 persen dari total luasan kumuh kawasan perkotaan Langgur dan Elat

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditandai ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan, hal ini disebabkan oleh.

- 1) Masih terjadi konflik antarwarga, pertikaian antarpemuda dan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan.
- 2) Potensi korban bencana alam masih tinggi disisi lain rendahnya upaya pencegahan dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola resiko dan mitigasi bencana yang didukung sistem peringatan dini kebencanaan.
- 3) Penanganan kebakaran masih lambat serta mitigasi dan kesadaran warga terhadap potensi kebakaran masih rendah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan Urusan Bidang Sosial antara lain.

- 1) Penduduk miskin masih banyak termasuk penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sedangkan sumberdaya penanganannya masih terbatas.
- 2) Validitas data sasaran kemiskinan masih rendah.
- 3) Jenis bantuan penduduk miskin masih bersifat konsumtif, tidak untuk memberdayakan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan Urusan Bidang Tenaga kerja yaitu.

- 1) Kualifikasi maupun ketrampilan para pencari kerja belum menjawab kebutuhan pasar kerja (tidak link and match);
- 2) Terbatasnya akses pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- 3) Informasi lapangan kerja yang disediakan melalui aplikasi sistim informasi masih terbatas dan sulit diakses oleh para pencari kerja.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat beberapa permasalahan pada Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu.

- 1) Disparitas gender;
- 2) Masih terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan;

- 3) Pemenuhan hak anak belum memadai, termasuk kategori daerah layak anak yang masih rendah. Tahun 2024 kategori Purnama dengan Nilai 550.
- 4) Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, baru mencapai 20 persen pada Tahun 2024.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pangan. Ada tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (*stability*) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Ketiga pilar ketahanan pangan tersebut harus dapat terwujud secara bersama-sama dan seimbang. Pilar ketersediaan dapat dipenuhi baik dari hasil produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Pilar keterjangkauan dapat dilihat dari keberadaan pangan yang secara fisik berada di dekat konsumen dengan kemampuan ekonomi konsumen untuk dapat membelinya (memperolehnya). Sedangkan pilar stabilitas dapat dilihat dari kontinuitas pasokan dan stabilitas harga yang dapat diharapkan rumah tangga setiap saat dan di setiap tempat. Berdasarkan penekanan diatas, maka beberapa permasalahan Urusan Bidang Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- 1) Pilar Ketersediaan
 - (1) Ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga masih didominasi komoditas pangan non lokal terutama beras.
 - (2) Produksi komoditas pangan lokal untuk memenuhi konsumsi pangan keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih terbatas.
- 2) Pilar Keterjangkauan
 - (1) Harga-harga pangan terutama pangan non lokal yang berfluktuasi dan cenderung naik pada musim tertentu dan pada saat hari-hari besar keagamaan.
 - (2) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan bahan pangan keluarga pada waktu tertentu karena kelangkaan komoditas pangan terutama komoditas pangan produksi luar daerah.
- 3) Pilar Stabilitas
 - (1) Sistem logistik pangan masih terpusat di wilayah perkotaan sedangkan kondisi geografis ohoi rentan rawan pangan yang berbukit dan pulau-pulau berdampak pada kesulitan distribusi sehingga terganggunya kontinuitas pasokan bahan pangan.
 - (2) Lahan tidur yang luas namun tidak dimanfaatkan untuk memproduksi bahan pangan.
 - (3) Tidak dimanfaatkannya pekarangan rumah guna pembudidayaan tanaman pangan dan hewan ternak untuk pemenuhan kebutuhan nabati dan hewani.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Permasalahan Urusan Bidang Pertanahan antara lain.

- 1) Konflik kepemilikan tanah hak ulayat yang menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan.
- 2) Penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan belum terselenggara secara optimal.
- 3) Pendataan, penataan dan pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah belum dikelola dengan baik.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan Urusan Bidang Lingkungan hidup antara lain:

- 1) Kualitas Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan. Khususnya peningkatan kualitas lahan dan air.
- 2) Pengelolaan sampah belum berorientasi hulu ke hilir.
- 3) Cakupan pelayanan sampah masih rendah, Tahun 2024 mencapai 20 persen.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan Urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain.

- 1) Penduduk Wajib KTP yang belum ber-KTP sebanyak 11.263 jiwa atau sebesar 12,29 persen pada tahun 2024.
- 2) Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk masih perlu ditingkatkan.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain.

- 1) Pemerintah ohoi tidak mampu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan serta penataan administrasi pemerintahan ohoi secara mandiri.
- 2) Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) yang tidak melaksanakan bisnis bumo secara mandiri, masih diintervensi kepala ohoi dan tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Ohoi.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah.

- 1) Jumlah PUS banyak sementara angka kepesertaan KB masih rendah.
- 2) Angka Unmeed Need masih tinggi.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan Urusan Bidang Perhubungan antara lain.

- 1) Masih terjadi kecelakaan transportasi perairan dan ketidaknyamanan selama penyeberangan.
- 2) Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan uji kelaikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan mengantisipasi potensi kejadian kecelakaan.
- 3) Masih terjadi kecelakaan lalu lintas angkutan darat, yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan di satu sisi, di sisi lain ketersediaan prasarana perhubungan seperti pengaman jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan penerangan jalan yang tidak memadai. Selain itu, kurangnya pengawasan dan uji kelaikan serta kepatuhan pengendara dalam berkendara yang masih rendah.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika antara lain.

- 1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal dilaksanakan, karena pengelolaan data dan informasi berbasis IT belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- 2) Masih terdapat 26 Ohoi dari 190 ohoi yang belum memiliki akses jaringan telekomunikasi berbasis data.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Permasalahan Urusan Bidang Koperasi dan UMKM antara lain.

- 1) Kinerja pengelolaan koperasi rendah, dengan tingkat keaktifan koperasi 84,26 persen dan jumlah koperasi mandiri hanya sebanyak 9 unit pada Tahun 2024.
- 2) Literasi dan akses modal perbankan untuk Koperasi dan usaha mikro masih rendah.
- 3) Ketergantungan modal usaha dari pemerintah masih tinggi.
- 4) Pertumbuhan UMKM cenderung melambat dengan permasalahan utama menyangkut akses pemasaran.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan Urusan Bidang Penanaman Modal terlihat dari rendahnya investasi di Daerah karena pengaruh beberapa hal antara lain kemudahan investasi masih rendah terutama pada aspek ruang dan lahan, iklim investasi dan penanaman modal belum kondusif, belum tersedianya digitalisasi sistem perijinan yang terintegrasi, dan belum tersedianya rencana investasi daerah.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain.

- 1) Tidak ada Pemuda Pelopor, yang disebabkan oleh.
 - (1) Tidak ada pembinaan pemuda.
 - (2) Masih Rendahnya Pembinaan mental dan disiplin serta Pembentukan Karakter Pemuda.
 - (3) Kurangnya Wirausaha Pemuda.
- 2) Pemuda Prestasi di bidang olahraga masih langka, yang disebabkan oleh.
 - (1) Perencanaan Pembinaan Olahraga prestasi tidak ada.
 - (2) Event olahraga berprestasi sangat terbatas bahkan cabor tertentu tidak ada.
 - (3) Sarana dan Prasarana Keolahragaan tidak memadai.
- 3) Banyak kasus kematian akibat penyakit tidak menular sebagai salah satu akibat dari tidak diterapkannya pola hidup sehat melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan Urusan Bidang Statistik adalah.

- 1) Pengelolaan Data statistik sektoral dan statistik wilayah kecamatan yang tidak tersedia sebagai bahan analisis perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- 2) Data Statistik Sektoral yang disiapkan Perangkat Daerah tidak memadai.
- 3) Pengelolaan Statistik Sektoral belum terintegrasi.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan Urusan Bidang Persandian adalah penerapan sistem persandian untuk keamanan informasi publik belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Permasalahan Urusan Bidang Kebudayaan terlihat dari nilai dan kearifan lokal budaya mengalami degradasi akibat gencarnya penetrasi budaya luar dan lemahnya penanaman nilai budaya dan adat istiadat ke dalam kehidupan generasi muda.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan Urusan Bidang Perpustakaan adalah rendahnya minat dan daya baca masyarakat yang ditunjukkan melalui rendahnya kunjungan perpustakaan. Rata-rata capaian kunjungan perpustakaan 2,22 persen pada tahun 2024.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Permasalahan Urusan Bidang Kearsipan adalah sistem pengelolaan dan penyelamatan arsip masih lemah. Sistem kearsipan tidak memadai dan tidak terintegrasi dengan kearsipan perangkat daerah sehingga tindakan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah tidak dilaksanakan dengan baik.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Permasalahan Urusan Bidang Pariwisata antara lain.

- 1) Kunjungan wisatawan masih rendah baik domestik maupun manca negara.
- 2) Rata-Rata Lama Tinggal wisatawan cukup singkat yaitu 3-4 hari.
- 3) Konflik kepemilikan Tanah hak ulayat di lokasi rencana pengembangan kawasan pariwisata eksklusif.
- 4) Pengembangan objek wisata yang tidak fokus pada kawasan yang ditetapkan di dalam dokumen Rencana Tata Ruang wilayah.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan Urusan Bidang Pertanian adalah.

- 1) Pendapatan keluarga petani per tahun rata-rata masih dibawah garis kemiskinan.
- 2) Produktivitas petani masih rendah.
- 3) Ketergantungan terhadap dukungan pemerintah masih tinggi.
- 4) Kelembagaan petani tidak efektif.
- 5) Adanya anomali iklim, bencana alam (kekeringan), serangan OPT dan turunnya kualitas lahan pertanian yang tidak diikuti dengan teknologi budidaya pertanian modern.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Permasalahan Urusan Bidang Perdagangan antara lain.

- 1) Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang diekspor masih berupa bahan baku.
- 2) Penjualan bahan makanan kadaluarsa masih terjadi.
- 3) Pergerakan harga bahan pangan tidak stabil.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Permasalahan Urusan Bidang Perindustrian antara lain.

- 1) Bahan baku industri rumahan masih terbatas.
- 2) Produktivitas industri rumahan masih rendah.
- 3) Tingkat penyerapan produk hasil industri masih rendah.
- 4) Inovasi dan pengembangan produk industri masih rendah.
- 5) Kasus hubungan industrial masih terjadi.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain.

- 1) Pendapatan keluarga nelayan/pembudidaya per tahun rata-rata masih dibawah garis kemiskinan.
- 2) Produktivitas nelayan /pembudidaya masih rendah.
- 3) Ketergantungan terhadap dukungan pemerintah masih tinggi.
- 4) Kelembagaan nelayan/pembudidaya yang dibentuk tidak efektif.

30. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan pada unsur perencanaan pembangunan yaitu.

- 1) Kualitas Perencanaan pembangunan daerah masih rendah.
- 2) Kualitas Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah masih rendah.
- 3) Kualitas Pengendalian perencanaan pembangunan daerah masih rendah.

31. Keuangan

Permasalahan pada unsur keuangan antara lain.

- 1) Kebijakan alokasi anggaran pembangunan tidak berorientasi pencapaian target kinerja (money follow target).
- 2) Kesesuaian dokumen keuangan dan perencanaan masih rendah.
- 3) Kualitas anggaran belanja dalam APBD masih rendah.
- 4) Transparansi pengelolaan keuangan daerah masih rendah.
- 5) Penyerapan anggaran daerah masih rendah terutama pada triwulan pertama dan kedua.
- 6) Tatakelola Barang Milik Daerah masih rendah.
- 7) Kinerja Pendapatan Asli Daerah masih rendah.

32. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada unsur Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan adalah Profesionalitas ASN yang masih rendah, yang disebabkan oleh.

- 1) Kualifikasi Pendidikan ASN yang masih banyak tamatan pendidikan SMA dan D3.
- 2) Kompetensi rendah karena tidak diikutsertakan dalam kegiatan diklat/seminar/workshop.
- 3) Kinerja dan penilaian perilaku ASN yang rendah.
- 4) Tingkat kedisiplinan ASN yang masih rendah.

33. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada unsur Penelitian dan Pengembangan adalah.

- 1) Rendahnya inovasi daerah.
- 2) Hasil penelitian dan pengkajian tidak sepenuhnya digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah.
- 3) Penelitian dan pengkajian tidak dilakukan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

34. Sekretariat DPRD

Permasalahan Unsur Sekretariat Dewan antara lain.

- 1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD tidak optimal.
- 2) Kinerja pengelolaan administrasi keuangan masih rendah.

35. Sekretariat Daerah

Permasalahan unsur Sekretariat Daerah antara lain.

- 1) Kualitas penyajian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Maluku Tenggara masih rendah karena tidak disertai data dan informasi Perangkat Daerah yang memadai.
- 2) Kinerja hasil koordinasi penyelenggaraan standar kepatuhan pelayanan publik masih rendah.
- 3) Masih terjadi beberapa kasus produk hukum daerah mendapat gugatan masyarakat dan berakhir di pengadilan.
- 4) Proses Pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah masih sering terlambat.
- 5) Kualitas penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah masih rendah karena tidak disertai data dan informasi Perangkat Daerah yang memadai.
- 6) Kinerja hasil koordinasi penyelenggaraan pembangunan bidang perekonomian dan sumberdaya alam masih rendah.
- 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat masih rendah.

36. Pengelolaan Perbatasan

Permasalahan unsur Pengelolaan Perbatasan adalah rendahnya pertumbuhan pembangunan wilayah perbatasan sebagai akibat dari minimnya ketersediaan infrastruktur dasar serta infrastruktur pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

37. Pengawasan

Permasalahan Unsur Pengawasan adalah masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pengawasan internal yang disebabkan oleh.

- 1) Implementasi SPIP tidak optimal, disebabkan oleh.
 - (1) Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP masih rendah.
 - (2) Perbandingan jumlah APIP dengan obyek pengawasan jauh dari kondisi ideal.
- 2) Manajemen risiko tidak diterapkan secara optimal, disebabkan oleh.
 - (1) Rendahnya pemahaman aparatur terhadap urgensi penerapan manajemen risiko.
 - (2) Tidak ada regulasi daerah untuk penerapan manajemen risiko.

38. Kecamatan

Permasalahan unsur kecamatan secara umum adalah.

- 1) Masih terjadi konflik antarwarga.
- 2) Tidak ada Kerjasama Antar Ohoi yang diinisiasi kecamatan untuk ikut mendorong kemajuan pembangunan di wilayah kecamatan.
- 3) Kualitas administrasi pemerintahan ohoi masih rendah.
- 4) Tidak ada Inovasi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.

39. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pada Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik adalah.

- 1) Konflik antarwarga, gangguan keamanan dan ketertiban umum serta tindakan kriminal.
- 2) Nilai-nilai kebangsaan masih rendah.

- 3) Kesadaran hidup bersama dalam suasana aman dan damai dalam bingkai kekeluargaan sesuai falsafah ain ni ain (satu keluarga) masih rendah.
- 4) Nilai-nilai toleransi dalam kehidupan generasi muda semakin tergerus dan mudah terprovokasi berita tidak benar.
- 5) Literasi politik dan demokrasi substansial masih rendah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Analisis terhadap asumsi kebijakan ekonomi nasional diperlukan sebagai referensi atau gambaran dari keseluruhan pembangunan nasional yang merupakan landasan bagi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di lingkup daerah. Sesuai amanat Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

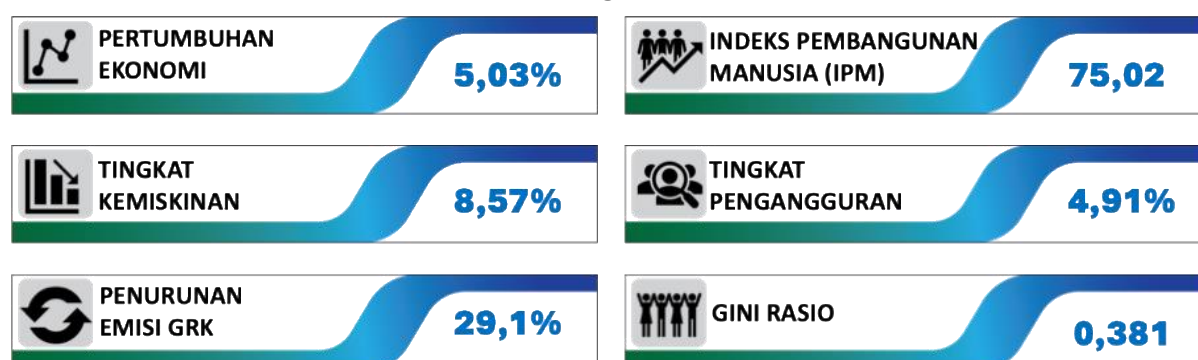
Asumsi kebijakan ekonomi nasional diuraikan dalam tiga tahapan, yaitu evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prakiraan kinerja tahun berjalan, dan perencanaan untuk tahun mendatang. Asumsi kebijakan ekonomi makro nasional sebagaimana dimaksud diuraikan dalam sejumlah indikator yang diuraikan sebagai berikut.

3.1.1.1. Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Kinerja pembangunan tahun 2024 telah menunjukkan perbaikan positif dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan peningkatan capaian dari tahun ke tahun dan ketercapaian target pembangunan pada akhir tahun 2024.

Gambar 3.1

Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024



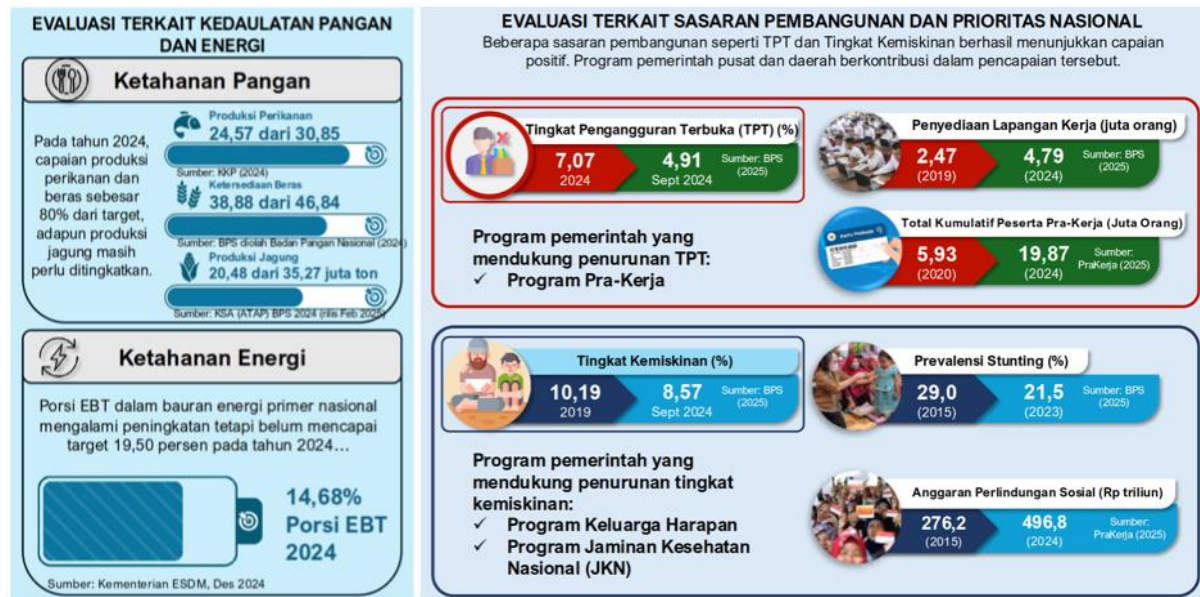
Pencapaian sasaran pembangunan dipengaruhi oleh kinerja berbagai program, kegiatan, dan proyek pembangunan terkait pembangunan ekonomi, kewilayahan, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup, serta stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Evaluasi terkait pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas nasional tahun 2024 tergambar dari sasaran pembangunan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan yang berhasil menunjukkan capaian positif. Termasuk dalam hal ini penyediaan lapangan kerja yang menunjukkan kenaikan, total kumulatif Peserta Pra-Kerja

yang meningkat mencapai 19,87 juta orang, dan prevalensi stunting turun menjadi 21,5 persen.

Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kinerja ketahanan energi dan pangan merupakan indikator kinerja yang masih perlu diperhatikan.

Gambar 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran Pembangunan dan Prioritas Nasional Tahun 2024



3.1.1.2. Perkembangan Perekonomian

Perekonomian global tahun 2024 tumbuh melambat dibanding tahun 2023. Tren perlambatan perekonomian global diproyeksikan berlanjut dan semakin dalam pada tahun 2025, utamanya disebabkan oleh risiko perang dagang seiring kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Di tengah perlambatan ekonomi global tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tangguh di atas lima persen. Namun demikian, ke depan perlu diantisipasi risiko ke bawah dari perang dagang terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan 2026.

1. Perkembangan Ekonomi Global

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Pada tahun 2025 dan 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen.

Perlambatan cukup dalam pada tahun 2025 dipicu oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Ekonomi global masih menghadapi tantangan, utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi.

2. Perkembangan Ekonomi Domestik

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, Gross National Income (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US\$4.810 pada tahun 2023 menjadi US\$4.930 pada tahun 2024, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring meningkatnya belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tahun 2024 mencapai 4,61 persen. Pertumbuhan investasi ini didorong oleh peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp1.714,24 triliun atau tumbuh hingga 20,80 persen. Pertumbuhan tinggi PMA sebesar 21,00 persen didorong oleh peningkatan kinerja investasi hilirisasi utamanya untuk subsektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Sementara itu, pertumbuhan tinggi PMDN sebesar 20,60 persen didorong oleh peningkatan investasi untuk subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi.

Dari sisi kewilayahan, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) tercatat meningkat menjadi 5,97 persen dari tahun 2023 yang sebesar 5,74 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan hilirisasi industri, seperti pengolahan nikel, serta peningkatan produksi Liquefied Natural Gas (LNG), sehingga memperkuat kinerja sektor industri pengolahan di wilayah tersebut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada tahun 2024 mengalami perlambatan menjadi 4,80

persen, turun dari 4,89 persen pada tahun 2023. Perlambatan ini dipengaruhi oleh moderasi permintaan domestik, tecermin dalam penurunan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta melemahnya kinerja sektor pertambangan.

Pertumbuhan tertinggi berada di Wilayah Maluku yang tumbuh 10,19 persen, melambat dari capaian 2023 yang tumbuh 13,54 persen. Pertumbuhan Wilayah Maluku tetap terjaga ditopang kinerja industri pengolahan yang tumbuh 21,82 persen seiring dengan peningkatan produksi ferronickel, MHP, dan nickel matte. Selain itu, sektor pertambangan juga meningkat seiring dengan tingginya produksi pertambangan bahan baku industri. Perdagangan juga turut menopang perekonomian Wilayah Maluku dengan tumbuh sebesar 11,34 persen seiring dengan masih tingginya ekspor untuk komoditas industri pertambangan. Pada tahun 2024, investasi di Wilayah Maluku juga masih terus berjalan, terutama nilai PMA di Maluku yang mencapai US\$4,51 miliar yang tecermin pada peningkatan kinerja investasi dan konstruksi yang masing-masing tumbuh 7,69 persen dan 6,40 persen.

3.1.1.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun Berjalan (2025)

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025, maka kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2025 sebagai berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kineda pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan nasional kemudian dielaborasi ke dalam sejumlah sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 yang diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi					Sasaran 2025	Outlook 2025
		2020	2021	2022	2023	2024		
SASARAN PEMBANGUNAN								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03	5,3 - 5,6	5,30
2	Tingkat Pengangguran (%)	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0
3	Rasio Gini (Indeks)	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381	0,379 - 0,382	0,379 - 0,382
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57	7,0 - 8,0	7,0 - 8,0
	Kemiskinan Ekstreem (%)	n.a	2,16	1,52	1,12	0,83	0,00	0,00

No.	Indikator	Realisasi					Sasaran 2025	Outlook 2025
		2020	2021	2022	2023	2024		
5	IPM (Indeks)	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02	IMM= 0,56	IMM= 0,56
6	Penurunan Emisi GRK (%)	24,46	27,07	27,82	27,02	29,14	38,60	35,53
INDIKATOR PEMBANGUNAN								
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	104,64	107,33	112,46	119,61	115 - 120	115 - 120
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22	104,69	106,45	105,42	101,76	105 - 108	105 - 108
INDIKATOR EKONOMI MAKRO								
9	Laju Inflasi (%)	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
10	Nilai Tukar Rupiah	14.543	14.296	14.847	15.235	16.095	15.300 - 15.900	16.900
11	Kontribusi PDB Industri (%)	19,87	19,24	18,34	18,67	18,98	20,80	20,80
12	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	2,24	2,30	3,60	4,10	4,10	4,60	4,2 - 4,3

Pencapaian sasaran pembangunan dilaksanakan melalui penetapan Prioritas Nasional. Di mana, wujud prioritas pembangunan adalah manifestasi dari upaya pencapaian Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden Asta Cita yang dituangkan ke dalam Prioritas Nasional selama periode 2025-2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 yang setiap tahunnya dituangkan ke dalam RKP. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 yang setiap tahunnya dituangkan ke dalam RKP.

Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025–2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam operasionalisasi Asta Cita, disusun strategi prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang meliputi:

1. pertumbuhan tinggi berkelanjutan;
2. penurunan kemiskinan;
3. peningkatan kualitas SDM, serta didukung dengan
4. fondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, dan reformasi birokrasi dengan berprinsip pada Pancasila dan asas demokrasi.

Strategi tersebut dituangkan ke dalam Prioritas Nasional, yang kemudian menjadi landasan perumusan strategi di tingkat wilayah dalam menyatukan arah pembangunan nasional (pusat dan daerah). Untuk menjaga pencapaian hasil pembangunan, dilaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, visualisasi kerangka pikir pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2025 disampaikan pada gambar berikut.



Penurunan Kemiskinan

Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

1. Urgensi Menurunkan Angka Kemiskinan

- 1) Penurunan tingkat kemiskinan cenderung stagnan di angka 9 persen selama periode 2018–2023;
- 2) Pada tahun 2024, penerima bantuan sosial yang tepat sasaran hanya 41,56 persen;
- 3) Tanpa upaya dan komitmen yang kuat, kemiskinan menjadi ancaman bagi masa depan kemajuan Bangsa Indonesia;
- 4) Disparitas kemiskinan wilayah masih menjadi tantangan, tercermin dari persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 11,34 persen pada September 2024, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,66 persen);

- 5) Masih terdapat 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas nasional.
2. Strategi Menurunkan Angka Kemiskinan
 - 1) Pembentukan Data Tunggal melalui pengembangan Data T\nggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
 - 2) Digitalisasi penyaluran bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan; dan
 - 3) Peningkatan pendapatan.
3. Sasaran yang dituju
Keadaan yang ingin diwujudkan adalah menekan angka kemiskinan hingga mencapai 7,0 – 8,0 persen pada tahun 2025.
4. Mitigasi dalam Penurunan Angka Kemiskinan
Dalam melaksanakan strategi kebdakan Penurunan Tingkat Kemiskinan diperlukan upaya mitigasi risiko di antaranya
 - 1) penguatan sinergi antar instansi yang diarahkan pada kolaborasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program;
 - 2) tata kelola dan pemanfaatan Data T\nggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penargetan dan perencanaan program; dan
 - 3) penguatan mekanisme graduasi penerima bantuan sosial agar penduduk miskin dan rentan dapat bertransisi secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih mandiri dan sejahtera.

Penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui kegiatan konkret dan prioritas sebagai berikut:

1. Kartu Kesejahteraan, dengan fokus sasaran:
 - 1) Persentase keluarga miskin–rentan menerima bantuan sosial non–tunai sebesar 65 persen;
 - 2) Persentase korban bencana mendapat bansos kebencanaan sebesar 8 persen;
 - 3) Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera sebanyak 400.000 keluarga.
2. Kartu Usaha Afirmatif, dengan fokus sasaran:
 - 1) Memberikan penguatan kapasitas, pendampingan motivasi, akses terhadap sumber daya produktif, serta pendampingan dan kemudahan dalam mengembangkan wirausaha bagi kelompok miskin dan rentan yang telah menerima bantuan sosial melalui Kartu Kesejahteraan.
 - 2) Mengakses peluang kerja dan kewirausahaan yang lebih mandiri.

Peningkatan kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan penerima kartu yang tergambarkan melalui indikator penerima Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha/ bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 1 juta jiwa pada tahun 2025.
3. Kartu Usaha Produktif, dengan fokus sasaran:

Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah yang tergambar oleh proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap target tahun 2025 mencapai 4,1 persen.

Meningkatkan Kualitas SDM

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 73,55 (berdasarkan proyeksi sensus 2010) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi sensus 2020).

Berbagai pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

1. Urgensi Peningkatan Kualitas SDM

- 1) Satu dari lima balita Indonesia mengalami stunting yang dapat menghambat tumbuh kembang (2023);
- 2) Tingginya kasus dan risiko penyakit:
 - (1) Insidensi TB Indonesia 387 kasus per 100.000 penduduk, peringkat ke-2 tertinggi di dunia (2023)
 - (2) Prevalensi obesitas dewasa meningkat dari 21,7 persen (2018) menjadi 23,4 persen (2023)
 - (3) Beban ganda penyakit, di mana penyakit menular (infeksius) masih ada, sementara penyakit tidak menular (degeneratif dan kronis) seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan ginjal mengalami peningkatan
 - (4) Peringkat PISA naik, namun pencapaian skor masih di bawah rata-rata negara OECD. Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022, sebesar 368,99.
 - Membaca : peringkat 71
 - Matematika : peringkat 70
 - Sains : peringkat 67
 - (5) Masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi, terutama jenjang pendidikan menengah
 - (6) Partisipasi pendidikan anak usia dini masih rendah (APK PAUD 2024 = 36,03 persen, Persentase Anak Kelas 1 SD Pemah PAVD 2024 = 63,81). Padahal usia 0-6 tahun merupakan usia optimal perkembangan otak manusia.
 - (7) Tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan menengah masih belum optimal (APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat 86,34 persen).

2. Strategi yang Dilakukan

- 1) Pemberian Makan Bergizi Gratis;

- 2) Pencegahan dan penurunan stunting;
 - 3) Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
 - 4) Penuntasan tuberkulosis (TBC);
 - 5) Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota;
 - 6) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah berkualitas;
 - 7) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
3. Keadaan yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 (2023) menjadi 0,56 pada tahun 2025.

Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan tinggi lebih dari 8,0 persen pada lima tahun yang berbeda, yaitu tahun 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995. Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19 pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara lain. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8,0 persen.

3. Strategi yang dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan tinggi berkelanjutan meliputi.
 - 1) Pengembangan hilirisasi dan industrialisasi di sektor padat karya, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
 - 2) Percepatan transformasi digital melalui penguatan ekonomi digital, dan peningkatan konektivitas digital, serta perwujudan pemerintahan digital yang transparan, inklusif dan efisien;
 - 3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/lumbung pangan, pengembangan pangan akuatik blue food; pengembangan pangan hewani; serta pengembangan pangan lokal dan nabati;
 - 4) Mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta penguatan implementasi transisi energi berkeadilan;
 - 5) Mewujudkan ketahanan air melalui konservasi sumber daya air, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir; penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS; serta pengembangan terpadu pesisir utara Jawa;
 - 6) Pembangunan 3 juta rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman, akses konektivitas, kesesuaian terhadap tata ruang, serta keamanan bermukim dan sensitif terhadap bencana dan iklim.
4. Keadaan yang Ingin Diwujudkan

- 1) Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,30 persen
- 2) *Trajectory* pertumbuhan ekonomi dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 sebagai upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8,00 persen
- 3) Peningkatan *Gross National Income* per kapita (*Aflas Method*) menjadi US\$5.410 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025.

3.1.1.4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2026

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, menguraikan kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2026 sebagai berikut.

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh di atas lima persen pada tahun 2024. Di tengah gejolak dan tingginya ketidakpastian perekonomian global, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diperkirakan tetap baik sehingga mampu bertahan sebagai negara berpendapatan menengah atas (*upper middle-income country*).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80–6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.
2. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 juga didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan.
3. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat

memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

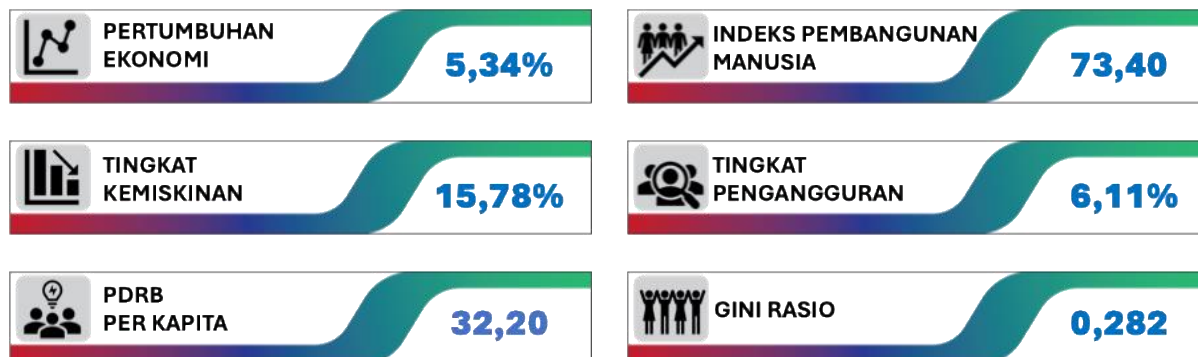
4. PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun.
5. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30–205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026

3.1.2.1. Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024

Capaian sasaran pembangunan ekonomi makro Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut.

Gambar 3.4
Capaian Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro
Provinsi Maluku Tahun 2024



3.1.2.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029, kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku dilaksanakan melalui Misi: **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah;**

Misi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di wilayah kepulauan dengan memperkuat basis ekonomi lokal melalui pengembangan nilai tambah komoditas unggulan, mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, memperluas akses pasar, serta menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Karakteristik wilayah kepulauan yang tersebar, memiliki keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta tingginya ketergantungan pada sektor primer, menuntut strategi pembangunan ekonomi yang adaptif dan kontekstual.

Tujuan dari pelaksanaan Misi ini adalah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dengan sasaran meliputi:

- Terciptanya iklim investasi yang kondusif
- Berkembangnya kawasan Ekonomi Khusus
- Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Perekonomian Daerah
- Meningkatnya Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat
- Stabilitas Ekonomi Daerah
- Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Untuk menjawab tujuan dan sasaran pembangunan tersebut di atas, maka dilaksanakan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku sebagai berikut:

Rumusan strategi pembangunan **“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Kemudahan Investasi, Hilirisasi Industri, Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Lokal dan UMKM, serta Kedaulatan Pangan, Air dan Energi”**.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini mencakup kemudahan investasi melalui:

- perbaikan iklim usaha dan infrastruktur,
- hilirisasi sektor unggulan agar menghasilkan nilai tambah yang tinggi,
- penguatan ekonomi lokal dan UMKM sebagai motor penggerak daerah.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, arah kebijakan disusun secara komprehensif dan terintegrasi, dimulai dari peningkatan kepastian hukum dan infrastruktur investasi, pengembangan kawasan industri yang terhubung dengan pelaku usaha lokal, hingga dukungan teknologi dan kemitraan dalam hilirisasi sektor unggulan.

Untuk memastikan hilirisasi sektor unggulan berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal, arah kebijakan harus mencakup intervensi strategis pada peningkatan produksi dan penguatan riset dan inovasi. Hilirisasi bukan hanya tentang pengolahan, tetapi juga tentang memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan adanya inovasi produk yang berkelanjutan.

Arah kebijakan ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan baku perikanan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung industri hilirisasi, dengan fokus spesifik pada komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster. Selain itu, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, akses pasar, dan pembiayaan inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Kebijakan ini juga mencakup pengembangan pariwisata berkelanjutan, salah satunya adalah Pengembangan Pariwisata Berbasis Sejarah dan Bahari: Memperkuat promosi dan pengelolaan situs-situs bersejarah di Pulau Banda, seperti Benteng Belgica dan rumah-rumah kolonial, serta mengembangkan potensi wisata bahari berkelanjutan, termasuk diving dan snorkeling di perairan sekitar yang kaya keanekaragaman hayati laut. Ini akan melibatkan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan pemandu wisata lokal yang terlatih.

Sisi lain perlunya upaya Pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti UMKM, koperasi, dan BUMD yang telah dimiliki maupun pendirian BUMD yang mampu mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan (BUMD Perikanan, Pariwisata, Mineral Logam, Galian C, Pangan dan Pengelolaan Aset Daerah) serta pemberdayaan masyarakat. Strategi ini memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif tetapi juga resilien dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026

3.1.3.1. Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 diarahkan dengan Tema: **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan, Berbasis Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Keandalan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Tema pembangunan ini dielaborasi ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah yaitu: 1) penurunan angka kemiskinan; 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) peningkatan ekonomi dan daya saing daerah; 4) peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas; 5) peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik; 6) peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 7) peningkatan stabilitas politik dan keamanan.

RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, sesuai Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023. Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara dalam konteks penguatan ekonomi daerah diproyeksikan untuk mengatasi beberapa isu aktual ekonomi daerah, yaitu:

1. Pemerataan Pembangunan

Pemerataan Pembangunan yang diukur dengan Indeks Williamson dan Indeks Gini menunjukkan kondisi pemerataan pembangunan Maluku Tenggara berada di kategori sedang. Nilai Indeks Williamson Tahun 2023 sebesar 0,29 dan Nilai Indeks Gini 0,244 menunjukkan bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan pembangunan lebih didominasi kesenjangan antara wilayah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil di samping kesenjangan pendapatan antarwarga.

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, Wilayah Pulau Kei Besar didorong untuk tumbuh lebih cepat, di samping tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Pulau Kei Kecil. Pertumbuhan Wilayah Kei Besar didorong melalui peningkatan alokasi belanja infrastruktur wilayah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, sarana transportasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

2. Tingkat Pengangguran

Aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren negatif dalam 3 (tiga) Tahun terakhir. Pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dalam periode 2020 s.d 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan keterampilan dan kapasitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Tingkat pendidikan secara umum masih rendah rendah, tingkat urbanisasi yang cukup tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak/tenaga harian lepas, dan faktor pemutusan hubungan kerja terjadi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020–2021.

3. Pengendalian Inflasi

Inflasi adalah momok bagi perekonomian di masa pasca pandemi Covid-19. Di Kabupaten Maluku Tenggara tingkat inflasi tahun 2023 mencapai 3,32 persen, dan turun menjadi 0,16

persen Tahun 2024. Tingkat inflasi relatif terkendali, namun kondisi ketidakpastian global, gejolak dan tensi geopolitik yang meningkat memberi risiko yang harus terus diantisipasi.

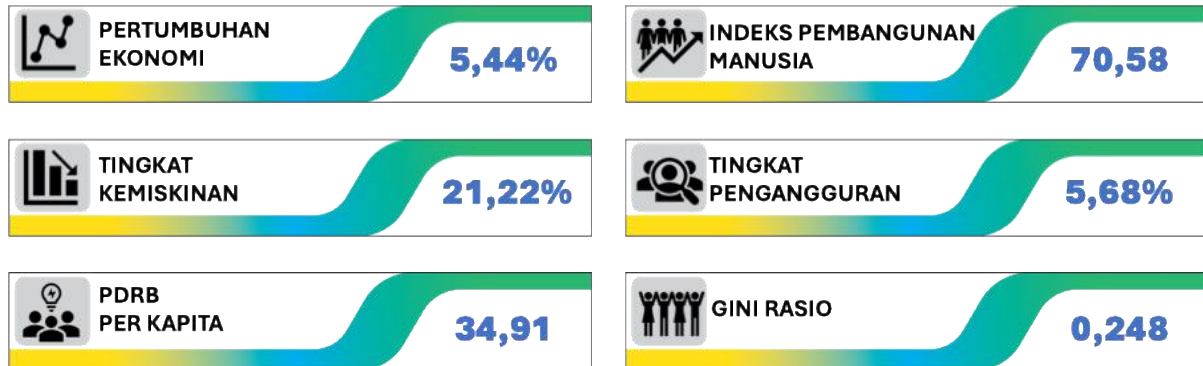
Di Kabupaten Maluku Tenggara, komponen yang paling berpengaruh terhadap perubahan harga-harga barang adalah Bahan Pangan. Terbatasnya pasokan bahan pangan pada waktu-waktu tertentu tidak mampu memenuhi permintaan pasar, sehingga mendorong kenaikan harga. Penawaran terhadap komponen bahan pangan di Kab. Maluku Tenggara sangat dipengaruhi oleh faktor produksi yang sangat bergantung dengan kondisi alam di samping aspek pasokan yang terjadi karena sebagian besar bahan pangan dipasok dari luar daerah. Selain bahan pangan, komponen transportasi juga menjadi pemicu inflasi. Harga tiket pesawat yang melonjak adalah salah satu yang paling berdampak pada kenaikan harga.

Prospek pembangunan daerah yang dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah di tahun 2024 antara lain:

1. Kinerja perekonomian yang semakin pulih dan membaik di tahun 2022–2023 menjadi landasan bagi akselerasi kinerja perekonomian di tahun 2024;
2. Kinerja sektor produktif perikanan dan pertanian yang semakin membaik di tahun 2023 didorong untuk tumbuh semakin cepat melalui penguatan aspek penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan dan pertanian;
3. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan stunting yang dilaksanakan di seluruh daerah sampai ke desa, memberikan ruang yang sangat besar untuk perbaikan dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial. Hal ini dapat memberikan dampak bagi perekonomian karena dengan sumber pendanaan yang lebih bervariasi akan memberikan keleluasan intervensi yang langsung dirasakan masyarakat;
4. Geliat sektor pariwisata yang semakin meningkat di tahun 2022–2023, memberikan ruang untuk berkembangnya usaha pariwisata di tahun 2024. Jumlah kunjungan wisata tahun 2023 sebanyak 136.075 kunjungan mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 60.502 kunjungan. Kenaikan ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan dari sisi aktivitas kepariwisataan, sehingga peluang ini perlu didorong dari sisi kebijakan.

Intervensi Program kerja yang berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi daerah membuahkan hasil dengan pencapaian positif pada indikator ekonomi makro daerah pada Tahun 2024, sebagai berikut.

Gambar 3.5
Capaian Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024



Kinerja yang relatif belum optimal adalah penurunan angka kemiskinan, dan termasuk kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka yang sangat berkaitan dengan investasi di daerah, serta pertumbuhan ekonomi, yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.

3.1.3.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026

1. Landasan Analisis Perumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Kinerja ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara dalam 4 (empat) tahun terakhir mampu mencapai pertumbuhan positif. Setelah mengalami kontraksi pada Tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara berangsur tumbuh positif. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,42 persen, Tahun 2022 sebesar 5,65 persen, Tahun 2023 sebesar 4,84 persen dan Tahun 2024 sebesar 5,44 persen.

Kinerja positif pertumbuhan ekonomi didorong oleh kebijakan strategis bidang perekonomian di antaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Termasuk kebijakan pengembangan pariwisata yang semakin bergeliat dengan jumlah kunjungan wisata yang berangsur membaik.

Kinerja positif juga ditunjukkan pada kinerja pengendalian harga-harga barang pokok dan penting. Laju inflasi secara konsisten mampu dikendalikan. Tahun 2020 Laju Inflasi sebesar 2,06 persen; Tahun 2021 sebesar 3,35 persen, Tahun 2022 sebesar 4,52 persen, Tahun 2023 sebesar 3,32 persen dan Tahun 2024 sebesar 0,16 persen.

Meskipun demikian, kinerja perekonomian daerah masih menyisahkan satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu Daya Beli Masyarakat yang cenderung mengalami penurunan. Beberapa asumsi terhadap hal ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Sektor ekonomi yang dominan terhadap perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren perlambatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - a) Sektor/Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 30 persen, mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya, yaitu: Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 12,16 persen, turun

pada tahun 2023 menjadi 11,52 persen, dan turun menjadi 5,81 persen pada Tahun 2024.

- b) Sektor/Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 23,66 persen. Menunjukkan tren perlambatan jika dibandingkan Tahun 2022. Fluktuasinya sebagai berikut: Tahun 2022 bertumbuh sebesar 9,13 persen, dan Tahun 2024 bertumbuh sebesar 6,79 persen.
- c) Sektor/Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 12,93 persen, menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung melambat. Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 11,20 persen, mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 10,84 persen.

Pertumbuhan yang cenderung melambat pada sektor–sektor dominan tersebut mengakibatkan:

- a) Meningkatnya tingkat pengangguran karena perusahaan cenderung mengurangi biaya produksi termasuk tenaga kerja, yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesenjangan ekonomi.
 - b) Berkurangnya penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya permintaan mengakibatkan pengusaha cenderung mengurangi produksi dan termasuk mengurangi investasi dan ekspansi usaha. Sehingga meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan atau lapangan kerja menjadi terbatas.
 - c) Meningkatnya kemiskinan, penurunan standar hidup masyarakat dan potensi peningkatan masalah sosial seperti kriminalitas.
- b. Pengetatan anggaran belanja pemerintah, menyebabkan uang beredar relatif terbatas. Hal ini kemudian mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa, di mana dengan penawaran yang relatif tidak berubah, maka kecendrungan yang terjadi adalah laju inflasi yang rendah.
 - c. Faktor psikologis: Ketidakpastian ekonomi mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi.

Kualitas sumber daya manusia terus didorong untuk meningkat dari waktu ke waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara menunjukkan tren meningkat secara konsisten. IPM Tahun 2020 sebesar 66,20 meningkat menjadi 69,91 pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 70,58. Kenaikan juga terjadi pada indkes komposit IPM, yang meliputi Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan.

Catatan perbaikan yang masih mendapatkan perhatian ke depan adalah masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Angka kemiskinan meskipun secara tren menunjukkan penurunan, namun persentase penduduk miskin sebesar 21,22 persen tahun 2024 masih relatif tinggi.

Di samping itu, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara masih perlu untuk terus ditekan. Data P3KE Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan sampai Tahun 2023, jumlah keluarga miskin ekstrim di Kabupaten

Maluku Tenggara masih sebanyak 4.571 KK dengan jumlah individu yang tingkat pengeluaran perkapita lebih rendah dari Rp351.957 masih sebanyak 28.803 jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 5,68 persen. TPT Maluku Tenggara menunjukkan tren kenaikan pada periode tahun 2020–2023, dan mengalami penurunan di Tahun 2024. Dampak Pandemi Covid–19 masih mempengaruhi tingkat serapan tenaga kerja yang rendah karena kurangnya investasi dan ekspansi usaha.

Selain itu, hal yang juga sangat mempengaruhi TPT di Maluku Tenggara adalah rendahnya kualitas, kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja. Upaya strategis dalam bentuk perbaikan iklim investasi, peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha serta upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja melalui pelatihan, magang, dan diklat, menjadi sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja.

2. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2026

Kondisi perekonomian Tahun 2026 meskipun masih dibayangi dengan ketidakpastian global, namun diperkirakan akan semakin membaik, sejalan dengan perekonomian nasional yang semakin tangguh dan tumbuh positif. Indikator perekonomian yang perlu mendapatkan perhatian, guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan akselerasi pertumbuhan di tahun 2026 adalah upaya mendorong pemerataan pembangunan, menekan tingkat pengangguran, serta daya beli. Aspek–aspek ini yang menjadi tantangan pembangunan sektor perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1) Pemerataan Pembangunan

Pemerataan Pembangunan yang diukur dengan Indeks Williamson dan Indeks Gini menunjukkan kondisi pemerataan pembangunan Maluku Tenggara berada di kategori sedang. Nilai Indeks Williamson Tahun 2023 sebesar 0,29 dan Nilai Indeks Gini Tahun 2024 sebesar 0,248 menunjukkan bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan pembangunan lebih didominasi kesenjangan antara wilayah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil di samping kesenjangan pendapatan antarwarga.

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, Wilayah Pulau Kei Besar didorong untuk tumbuh lebih cepat, di samping tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Pulau Kei Kecil. Pertumbuhan Wilayah Kei Besar didorong melalui peningkatan alokasi belanja infrastruktur wilayah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, sarana transportasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

2) Tingkat Pengangguran

Aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren fluktuatif dalam 4 (empat) Tahun terakhir. Pandemi Covid–19 mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dalam periode 2020 s.d 2023, dan baru menunjukkan penurunan di Tahun 2024.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran di Kab.Maluku Tenggara antara lain:

- (1) faktor kualitas kependudukan, jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan keterampilan dan kapasitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024 sebesar 67,58 persen.
- (2) tingkat pendidikan secara umum masih rendah. Sesuai data Registrasi Sosial Ekonomi (BPS), Tahun 2023 tingkat pendidikan tenaga kerja (yang bekerja) di Kabupaten Maluku Tenggara didominasi lulusan SMA ke bawah, mencapai 76%, terdiri dari: SD sederajat, sebesar 24 persen, SMP sederajat, 17 persen dan SMA sederajat, 35 persen.
- (3) tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, penduduk usia produktif meninggalkan desa dan memilih mencari pekerjaan di wilayah perkotaan. Sedangkan lapangan kerja di perkotaan relatif terbatas, dan penduduk pelaku urbanisasi tersebut tidak memiliki kecakapan dan keterampilan serta dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- (4) faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, disebabkan investasi di sektor publik rendah.
- (5) faktor tenaga kerja kontrak/tenaga harian lepas, dan faktor pemutusan hubungan kerja terjadi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020–2021.

Kebijakan untuk Tahun 2026 perlu mendorong peningkatan aspek ketenagakerjaan, meliputi: a) peningkatan kualitas tenaga kerja, antara lain, bimbingan dan pelatihan, magang, serta pendampingan dan fasilitasi; b) perluasan lapangan kerja, berupa pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta ekspansi usaha, perbaikan iklim investasi, mendorong pengembangan sektor potensial daerah, termasuk mendorong perluasan akses pemodal bagi wirasusaha pemuda dan pemula.

3) Daya Beli Masyarakat

Fenomena secara nasional menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat dalam satu tahun terakhir. Uang beredar yang terbatas serta dengan kinerja perekonomian cenderung stagnan mengakibatkan tingkat permintaan akan barang dan jasa mengalami penurunan. Dalam konteks Maluku Tenggara, hal ini tergambar dari nilai Inflasi Tahun 2024 yang berada di angka 0,16 persen. Hal ini menggambarkan tren ekonomi yang melemah, dan jika tidak diantisipasi secara baik, berpotensi mengganggu pertumbuhan secara berkelanjutan.

Prospek pembangunan daerah yang dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah di tahun 2025 antara lain:

- 4) Kinerja perekonomian yang semakin pulih dan membaik di tahun 2022–2024 menjadi landasan bagi akselerasi kinerja perekonomian di tahun 2026;
- 5) Kinerja sektor produktif, perikanan dan pertanian yang semakin membaik di tahun 2024 didorong untuk tumbuh semakin cepat melalui penguatan aspek penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan dan pertanian;
- 6) Akselerasi dan dukungan fasilitasi kemudahan investasi di sektor perikanan budidaya;
- 7) Pelaksanaan program nasional, yang berpotensi menyerap tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja serta mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan, antara lain:

- (1) Program Makan Bergizi Gratis
- (2) Program Koperasi Merah Putih
- (3) Program Sekolah Rakyat
- (4) Program Swasembada Pangan

Geliat sektor pariwisata yang semakin meningkat di tahun 2022–2024, memberikan ruang untuk berkembangnya usaha pariwisata di tahun 2026. Jumlah kunjungan wisata tahun 2024 sebanyak 129.300 kunjungan, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 60.502 kunjungan. Kenaikan ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan dari sisi aktivitas kepariwisataan, sehingga peluang ini perlu didorong dari sisi kebijakan.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2026

Sesuai RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029, Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026, sebagai berikut:

Kebijakan pengembangan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi aktual bahwa Kabupaten Maluku Tenggara masih diperhadapkan dengan permasalahan belum optimalnya kinerja perekonomian daerah yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun demikian dari sisi pertumbuhan sektoral lapangan usaha, beberapa sektor lapangan usahan dominan seperti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 30,40 persen bagi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 3,26 persen, berada pada urutan ke-15 dari 17 lapangan usaha.

Kinerja perekonomian daerah yang belum optimal juga tergambar dari permasalahan:

- 1) Produktivitas daerah yang masih rendah, yaitu PDRB Perkapita yang baru mencapai 34,92 juta rupiah. Dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang relatif lambat dengan kisaran pertumbuhan 6,82 persen. Adapun perbandingan dengan Kabupaten dan Kota Lainnya di Provinsi Maluku, tingkat PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara masih berada di urutan ke-5 di antara 11 Kabupaten/Kota.
- 2) Usaha Industri pengolahan masih sangat terbatas di Kabupaten Maluku Tenggara. Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Industri Pengolahan pada Tahun 2024 sebesar 1,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Industri Pengolahan belum optimal dilaksanakan, sehingga asumsinya, produk hasil pengelolaan SDA di Maluku Tenggara diperdagangan dalam bentuk bahan mentah yang bernilai ekonomi rendah.
- 3) Kinerja Usaha Mikro belum optimal dalam kerangka mendorong pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 8.027 usaha mikro.
- 4) Usaha Sektor Pariwisata yang potensial di Kabupaten Maluku Tenggara belum secara optimal memberikan manfaat ekonomi bagi pendapatan masyarakat dan termasuk kontribusi bagi perekonomian daerah serta penerimaan daerah.
- 5) Perubahan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang rentan terjadi karena ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah masih sangat tinggi.

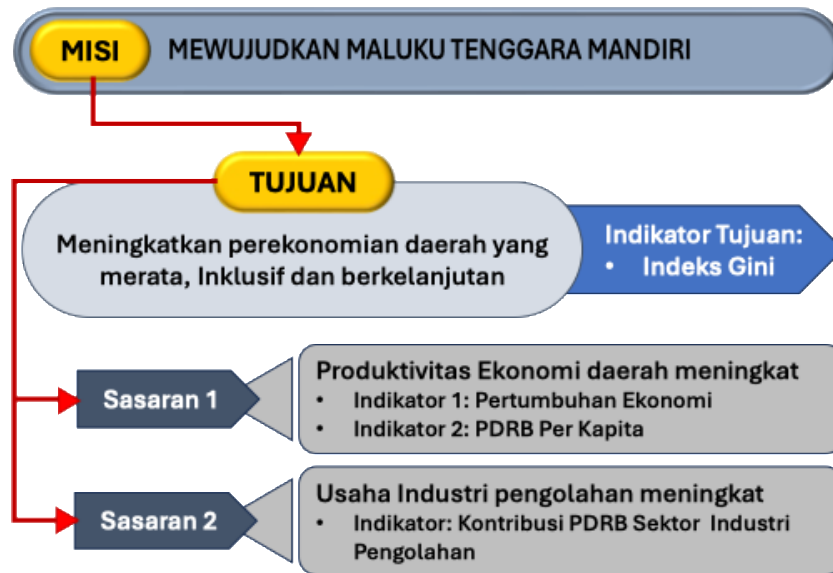
- 6) Realisasi Investasi masih relatif belum memberikan dampak optimal untuk penyerapan tenaga kerja, dan termasuk untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Meskipun dari sisi jumlah dan nilai investasi menunjukka kenaikan, namun investasi yang terealisasi belum menyentuh sektor potensial perikanan dan pariwisata yang dapat dikembangkan dalam skema padat karya, guna menurunkan angka pengangguran.
- 7) Penduduk Miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 menurut data BPS masih sebesar 22,19 persen. Di samping itu, Menurut Data Satgas P3KE Kemenko PMK Tahun 2024, masih terdapat pula penduduk miskin ekstrim sebesar 1,85 persen atau sebanyak 2.336 jiwa.
- 8) Pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren kenaikan dalam periode 2020–2023, tahun 2024 menunjukkan penurunan tipis menjadi 5,68 persen dari sebelumnya 5,73 persen (2023). Meskipun menunjukkan penurunan, namun dari sisi penduduk menganggur menaunjukkan adanya kenaikan dari 3.301 penganggur pada Tahun 2023, naik menjadi 3.650 penganggur di Tahun 2024.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara

Memperhatikan kondisi faktual yang ada, maka RPJMD merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dalam menjawab Rumusan Misi ke–1, Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri, yang dimaksudkan untuk mendorong pembangunan bidang ekonomi dengan mewujudkan kemandirian masyarakat, ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

Misi Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri kemudian diterjemahkan ke dalam Tujuan Pembangunan: Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan, dengan 2 (dua) sasaran, yaitu: 1) Produktivitas Ekonomi daerah meningkat dan 2) Usaha Industri pengolahan meningkat yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara



Strategi Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah

Untuk mencapai Sasaran 1.1: Produktivitas Ekonomi daerah meningkat, strategi yang digunakan adalah.

- 1) Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat;
- 2) Membangun simpul-simpul ekonomi baru, di antaranya pengembangan Landmark sebagai Griya UMKM, dan Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur;
- 3) Memfasilitasi Usaha Mikro dan penguatan Koperasi Merah Putih;
- 4) Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenities dan aktivitas dan mendukung penataan objek wisata eksisting.

Untuk mencapai Sasaran 1.2. Usaha Industri pengolahan meningkat, strategi yang digunakan adalah.

- 1) Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut;
- 2) Memberikan kemudahan berinvestasi.

Arah Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah

Arah kebijakan dan indikasi kegiatan prioritas peningkatan perekonomian daerah Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Arah Kebijakan dan Indikasi Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026

URAIAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025–2029	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2026
1. Penguatan daya saing ekonomi, melalui pengembangan pusat–pusat pertumbuhan eksisting dan pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru,	- Penataan kawasan Landmark Langgur untuk Indonesia - Penataan Pasar Langgur dan Terminal Langgur
2. Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran,	- Kemudahan penyaluran kredit usaha - Pemberian Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: ▪ Nelayan, sebanyak paket ▪ Pembudidaya, , sebanyak paket ▪ Petani, , sebanyak paket dan ▪ Peternak, , sebanyak paket - Peremajaan Tanaman Kelapa di Pulau Kei Besar
3. Penerapan teknologi dan kemitraan usaha,	
4. Peningkatan kapasitas koperasi sebagai Lembaga ekonomi rakyat yang bergerak di sektor industri pengolahan komoditas unggulan daerah termasuk peningkatan akses dan inklusi keuangan koperasi,	- Pelatihan pengelola koperasi merah putih; - Pelatihan kepada Pengeola UMKM - Kerja sama pelatihan kepada pencari kerja sesuai pasar tenaga kerja lokal
5. Pembangunan Objek Wisata baru dan pengembangan objek wisata eksisting, yang memenuhi kriteria kemudahan akses, atraksi, amenitas, akomodasi dan aktivitas,	Pembangunan Pantai Ngjar Varat, di Kecamatan Kei Kecil, meliputi: - Penataan kawasan (Portal, Jalan dan Parkiran, serta Rambu Lalu Lintas) - Pos Informasi - Fasilitas Jasa Pelayanan Wisata (kedai kuliner, gazebo, dan jasa lainnya) - Jaringan Air Bersih - Jaringan Pengelolaan sampah dan limbah - Fasilitas Jamban dan Kamar Mandi - Ampitheater dan Panggung Budaya.
6. Pengembangan Industri rumput laut,	Pembangunan Gudang Penyimpanan dan Penyediaan Pusat Pelelangan Rumput Laut di Kelurahan Ohoijang–Watdek

URAIAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025–2029	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2026
7. Pemberian kemudahan investasi	- Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak - Pemberian Layanan Informasi dan Pendampingan Pemanfaatan teknologi informasi di bidang investasi dan perizinan - Penyediaan prasarana pendukung investasi pada kawasan industri.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Komponen Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD terdiri dari 4 (empat) Sub Komponen yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sub Komponen PAD diuraikan sebagai berikut.

- a) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b) Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah lain yang sah diantaranya Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro, pendapatan bunga; Keuntungan

selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Sub Komponen pendapatan transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
- b) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah komponen penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Di dalamnya terdapat sub komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah menurut komponen pendapatan daerah Tahun 2020–2024, diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi PAD

Realisasi PAD selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi PAD yang berfluktuatif disebabkan antara lain, Tahun 2020 dan 2021 yang berada pada kisaran 44 milyar adalah dampak dari perlambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya kenaikan Realisasi PAD pada Tahun 2022 dan 2023 mencapai 54 dan 73 milyar, adalah hasil dari pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid–19, namun demikian pada Tahun 2024 realisasi PAD kembali menunjukkan penurunan mencapai 44 milyar, yang disebabkan kurangnya aktivitas ekonomi yang terjadi akibat alokasi anggaran belanja publik yang relatif menurun akibat dari pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Pilkada yang cukup besar. Perbandingan Realisasi PAD terhadap target APBD diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi PAD terhadap Target APBD
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI	%
2020	45.847.921.693,32	44.258.115.564,63	96,53%
2021	69.129.070.872,00	44.965.456.930,23	65,05%
2022	68.361.158.477,00	54.893.896.521,42	80,30%
2023	92.477.624.904,00	73.801.232.072,00	79,80%
2024	88.011.165.336,00	44.363.146.116,53	50,41%

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih cukup kecil. Selama periode 2020–2024, kontribusi PAD rata-rata sebesar 5,87 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian anggaran Daerah yang masih sangat rendah. Diperlukan upaya – upaya percepatan untuk peningkatan PAD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian daerah.

b. Realisasi Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Faktor yang dominan memengaruhi fluktuasi Pendapatan Transfer adalah komponen DAK Fisik.

Prosedur pengusulan DAK Fisik yang dilakukan dengan mekanisme usulan daerah sangat rentan terhadap jumlah alokasi. Ketika DAK Fisik yang dialokasikan memadai, maka akan mendongkrak Pendapatan Transfer. Sebaliknya, Ketika komponen DAK Fisik mengalami penurunan, maka Pendapatan Transfer juga menurun. Hal ini disebabkan karena komponen DBH, DAU, DID, dan Dana Desa relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer terhadap target dalam APBD sebagai berikut.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer terhadap Target APBD
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	854.662.930.116,36	849.294.885.194,00	99,37%
2021	864.276.388.529,00	856.287.855.062,00	99,08%
2022	864.183.018.937,00	827.374.566.189,00	95,74%
2023	978.517.251.464,00	925.415.160.817,62	94,57%
2024	863.491.713.937,00	849.734.992.525,32	98,41%

Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah rata–rata mencapai 93,15 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam periode 2020–2024, menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi tahunan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Tahunan dari Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	9.334.600.000,00	12.137.961.801,77	130,03%
2021	9.258.300.000,00	14.548.743.173,56	157,14%
2022	0,00	10.884.428.450,11	100,00%
2023	0,00	0,00	0,00%
2024	6.694.317.488,00	6.686.409.157,00	99,88%

Berdasarkan uraian komponen pendapatan di atas maka secara akumulatif, total pendapatan daerah dalam periode 2020–2024, menunjukkan tren fluktuatif. Uraian total pendapatan daerah, perbandingan antara target APBD dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.6
Total Pendapatan Daerah serta Perbandingan antara
Target APBD dengan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	909.845.451.809,68	905.690.962.560,40	99,54%
2021	942.663.759.401,00	915.802.055.165,79	97,15%
2022	932.544.177.414,00	893.152.891.160,53	95,78%
2023	1.070.994.876.368,00	999.216.392.889,62	93,30%
2024	958.197.196.761,00	900.784.547.798,85	94,01%

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RERATA PERTUMBUHAN
4	PENDAPATAN	905.690.962.560,40	915.802.055.165,79	893.152.891.160,53	999.216.392.889,62	900.784.547.798,85	0,17%
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.258.115.564,63	44.965.456.930,23	54.893.896.521,42	73.801.232.072,00	44.363.146.116,53	4,56%
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	7.553.025.419,90	7.490.230.183,20	12.056.543.681,00	11.190.143.473,00	11.506.612.827,43	13,94%
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.554.173.300,00	2.882.508.600,00	2.559.104.600,00	1.992.498.500,00	1.776.743.272,00	-7,83%
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.631.954.413,00	5.292.090.245,12	3.211.782.587,06	6.446.735.017,00	5.390.778.458,00	14,82%
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	29.518.962.431,73	29.300.627.901,91	37.066.465.653,36	54.171.855.082,00	25.689.011.559,10	4,83%
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	849.294.885.194,00	856.287.855.062,00	827.374.566.189,00	925.415.160.817,62	849.734.992.525,32	0,28%
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.598.532.157,00	842.304.078.776,00	810.826.028.947,00	907.994.277.141,62	831.199.338.677,32	0,21%
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	678.193.764.157,00	657.257.884.776,00	667.514.392.947,00	753.216.996.141,62	683.377.699.677,32	0,51%
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	38.020.028.000,00	5.805.126.000,00	6.207.486.000,00	0,00	-44,45%
4 . 2 . 1 . 3	Dana Desa	155.404.768.000,00	147.026.166.000,00	137.506.510.000,00	148.569.795.000,00	147.821.639.000,00	-1,08%
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.696.353.037,00	13.983.776.286,00	16.548.537.242,00	17.420.883.676,00	18.535.653.848,00	4,78%
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.351.033.037,00	13.983.776.286,00	16.121.937.242,00	17.420.883.676,00	18.535.653.848,00	6,80%
4 . 2 . 3 . 2	Bantuan Keuangan	1.345.320.000,00	0,00	426.600.000,00	0,00	0,00	-50,00%
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.137.961.801,77	14.548.743.173,56	10.884.428.450,11	0,00	6.686.409.157,00	-26,33%
4 . 3 . 3	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 . 3 . 4	Lain-lain Pendapatan	12.137.961.801,77	14548743173,56	10.884.428.450,11	0,00	6686409157,00	-26,33%
JUMLAH PENDAPATAN		905.690.962.560,40	915.802.055.165,79	893.152.891.160,53	999.216.392.889,62	900.784.547.798,85	0,17%

3.2.1.2. Proyeksi Pendapatan Daerah

Kerangka pendanaan menguraikan proyeksi keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerangka pendanaan menjadi ukuran indikatif pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan, guna pelaksanaan urusan pemerintahan, dalam rangka menjawab arah pembangunan serta Visi dan Misi.

Dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah pada periode 2020–2024 yang tumbuh dengan rata–rata 0,17 persen per tahun, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta dengan memperhatikan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

KODE	URAIAN	BASLINE 2024 (Realisasi)	APBD 2025 (Hasil Efisiensi)	PROYEKSI 2026
4	PENDAPATAN	900.784.547.798	826.691.727.776	768.309.236.599
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.363.146.116	62.778.221.347	56.386.706.177
4.1.1	Pajak Daerah	11.506.612.827	30.972.445.150	14.602.146.358
4.1.2	Retribusi Daerah	1.776.743.272	3.603.063.000	3.687.059.830
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.390.778.458	6.737.713.197	6.063.585.288
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	25.689.011.559	21.465.000.000	32.033.914.699
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	849.734.992.525	757.219.188.873	711.922.530.422
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	831.199.338.677	745.196.882.000	691.839.206.000
	- Dana Perimbangan	683.377.699.677	605.694.492.000	570.153.647.000
	- Dana Desa	147.821.639.000	139.502.390.000	121.685.559.000
4.2.3	Transfer Antar Daerah	18.535.653.848	12.022.306.873	20.083.324.422
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.535.653.848	12.022.306.873,00	20.083.324.422
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.686.409.157	6.694.317.556,00	0,00
4.3.4	Lain-lain Pendapatan	6.686.409.157,	6.694.317.556	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		900.784.547.798	826.691.727.776	768.309.236.599

Sumber: RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029; Rincian Alokasi TKKD 2026 dan BKAD Kab.Maluku Tenggara Tahun 2025.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan sejak tahun 2025 dan berlanjut ke tahun 2026 berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Alokasi TKKD Tahun 2026 berdasarkan informasi keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan pengurangan TKKD Tahun 2026 sebesar Rp53.357.676.000,00 di banding TKDD Tahun 2025. Hal ini kemudian memberi dampak pada proyeksi PAD yang harus disesuaikan dengan asumsi bahwa kinerja perekonomian kemungkinan sedikit melambat, mengakibatkan penerimaan dari pajak daerah diproyeksikan menurun pada Tahun 2026.

3.2.1.3. Kebijakan Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didorong untuk meningkat dari waktu ke waktu. Dengan adanya perubahan kebijakan alokasi TKDD, maka strategi dan inovasi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.

Beberapa kebijakan strategis yang perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah di Tahun 2026, anatara lain:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD di antaranya:
 - a) memperbaiki dan memutakhirkan sistem database pajak dan restirbusi;
 - b) melakukan pendataan dan penagihan terhadap piutang pajak dan retribusi;
 - c) mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dimanfaatkan;
- b. Optimalisasi penagihan yaitu dengan penerapan teknologi informasi, transaksi digital, dan uang elektronik, yaitu:
 - a) penerapan portal digital pada lokasi strategis daerah;
 - b) meningkatkan pelayanan non tunai dalam berbagai transaksi maupun pembayaran pajak dan retribusi; dan
 - c) meningkatkan pengawasan untuk menghilangkan potensi kebocoran;
- c. Sosialisasi dan peningkatan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- d. Membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penagihan pajak dan retribusi, yaitu antara lain kerjasama dengan Samsat Provinsi Maluku, Pemerintah Ohoi untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Maluku Tenggara dalam penagihan piutang daerah, serta kerjasama dengan Perbankan dalam rangka menyediakan fasilitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- e. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD, yaitu penghapusan peralatan dan mesin melalui mekanisme pelelangan kerja sama pemerinatah daerah dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Lelang Negara.
- f. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026

Memperhatikan tren realisasi belanja daerah periode 2020-2024, dan dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, maka diproyeksikan belanja daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut.

- a. Total Belanja Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp771.741.159.119,42, mengalami pengurangan sebesar Rp63.038.730.124,70 dibanding Total Belanja APBD 2025 (Hasil Efisiensi);

- b. Pengurangan belanja selain disebabkan oleh pengurangan dari sisi pendapatan, juga dalam rangka mendorong efektivitas belanja daerah dalam pencapaian target kinerja RPJMD secara lebih fokus dan tepat sasaran.
- c. Porsi belanja Tahun 2026 didominasi oleh belanja Operasi sebesar 72,75 persen, diikuti Belanja Transfer sebesar 23,19 persen, Belanja Modal sebesar 3,68 persen dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,39 persen.

Uraian proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 menurut komponen belanja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.9
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026

KODE	URAIAN	BASELINE 2024 (Realisasi)	APBD 2025 (Hasil Efisiensi)	PROYEKSI 2026
5	BELANJA	926.952.905.748,06	834.779.889.244,12	771.741.159.119,42
5.1	Belanja Operasi	632.963.813.616,56	572.896.940.242,00	561.430.417.049,66
5.2	Belanja Modal	104.472.673.226,50	49.060.172.815,12	28.380.855.550,87
5.3	Belanja Tak Terduga	2.134.852.200,00	2.400.000.000,00	3.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	187.381.566.705,00	210.422.776.187,00	178.929.886.518,89
	JUMLAH BELANJA	926.952.905.748,06	834.779.889.244,12	771.741.159.119,42

Sumber: RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029; Rincian Alokasi TKKD 2026 dan BKAD Kab.Maluku Tenggara Tahun 2025.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026

Kebijakan belanja daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Uraian kebijakan makro belanja daerah tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk memenuhi Mandatory Spending, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu.
 - 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
 - 2) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

sebesar 10 persen dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- 4) Kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja bidang pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja bidang pengembangan Pasukan Pengibar Bendera sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022.
2. Ketentuan teknis pengalokasian belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan sebagai berikut:

Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:

- 1) Pengalokasian Anggaran dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor untuk penanganan jalan dan jembatan;
 - 2) Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) yang meliputi:
 - (a) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU;
 - (b) Pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk PJU.
 - 3) Pengalokasian Anggaran dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok, untuk mendanai Jaminan Kesehatan.
3. Penganggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah guna perwujudan Visi dan Misi, dengan memperhatikan tematik pembangunan antara lain:
- 1) Pelaksanaan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - (1) Bidang Pendidikan dengan fokus kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi, meningkatkan pemerataan kualitas hasil belajar, pemenuhan tenaga pendidik (kuantitas dan kualitas) dengan tujuan khusus untuk peningkatan literasi dan numerasi;
 - (2) Bidang Kesehatan dengan fokus kebijakan untuk:
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana.
- (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fokus kebijakan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan spasial menyasar lokus stunting dan kemiskinan ekstrem.
- (4) Ketentraman dan Ketertiban Umum, fokus intervensi untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan korban bencana serta pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran;
- (5) Sosial, fokus kebijakan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial serta Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai pohon kinerja RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 guna perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi.
- 3) Melaksanakan Tematik Pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, antara lain:
- (1) Penurunan Stunting
 - (2) Penghapusan Kemiskinan Ekstreem
 - (3) Pengendalian Inflasi
 - (4) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

4. Mendukung Implementasi Program Prioritas Nasional antara lain:

- 1) Program Makan Bergizi Gratis
- 2) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 3) Sekolah Rakyat
- 4) Cek Kesehatan Gratis

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memberikan gambaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas komponen dan sub komponen pembiayaan sebagai berikut.

- a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari proyeksi penerimaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran dan penerimaan dari pinjaman daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari proyeksi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah periode 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.10
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

KODE	URAIAN	BASELINE 2024 (Realisasi)	APBD 2025 (Hasil Efisiensi)	PROYEKSI 2026
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.264.901.219	9.088.161.468	4.931.922.519
6.1.1	Penggunaan SiLPA	36.264.901.219	9.088.161.468	4.931.922.519
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1.000.000.000	1.500.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000	1.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	36.264.901.219	8.088.161.468	3.431.922.519

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas dan urusan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029; hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024; Prioritas Nasional dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun; dan Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Penentuan tujuan ini paling tidak harus mencakup empat kriteria yaitu.

- 1) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;
- 2) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- 3) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah; dan
- 4) Tujuan harus menjadi arah perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi pemerintah daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara Spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan bersifat kontekstual. Lima Kriteria sasaran strategis ini secara umum disebut dengan SMART-C yaitu.

1. *Specific*. Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. *Measurable*. Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
3. *Achievable*. Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
4. *Relevant*. Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
5. *Time Bond*. Waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.

6. *Contextual*. Sasaran harus sesuai dengan konteks dan situasi organisasi

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, program prioritas presiden, dan sasaran prioritas nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029.

a. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Gambar 4.1

Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 s.d. 2029



b. Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Terdapat 17 (tujuh belas) program prioritas Presiden tahun 2025-2029 dan PHTC diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Program Prioritas Presiden dan PHCT Tahun 2025 s.d. 2029

PRIORITAS PRESIDEN	PHCT
1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba	6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9. Penguatan pertanahan dan keamanan negara pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup	
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	
13. Menjamin hunian berkualitas, terjangkau, bersantitas baik untuk masyarakat yang membutuhkan	
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara	
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah	
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	

c. Sasaran Prioritas Nasional

Asta cita sebagai misi presiden telah ditetapkan menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas nasional tersebut dilengkapi dengan sasaran utama yang meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM, dengan sasaran utama yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi, syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dengan sasaran utama sebagai berikut.
 - (1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
 - (2) Terbangunnya eco-region sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal
 - (3) Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan serta pemanfaatan energi bersih
 - (4) Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi
 - (5) Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran utama sebagai berikut.
 - (1) Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan;
 - (2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB;
 - (3) Meningkatnya nilai tambah pariwisata;
 - (4) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;
 - (5) Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dengan sasaran utama sebagai berikut.
 - (1) Pendidikan berkualitas yang merata
 - (2) Kesehatan untuk semua
 - (3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
 - (4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi

- (5) Peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan sasaran utama sebagai berikut.
- (1) Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan
 - (2) Menguatnya kinerja layanan konektivitas backbone dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global
 - (3) Integrasi ekonomi domestik dan global
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan ekonomi dengan sasaran utama sebagai berikut.
- (1) Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
 - (2) Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
 - (3) Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendiring pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
 - (4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan dengan sasaran utama sebagai berikut.
- (1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi
 - (2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
 - (3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
 - (4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan
 - (5) Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan
 - (6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi
 - (7) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan sasaran utama sebagai berikut.
- (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
 - (2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku

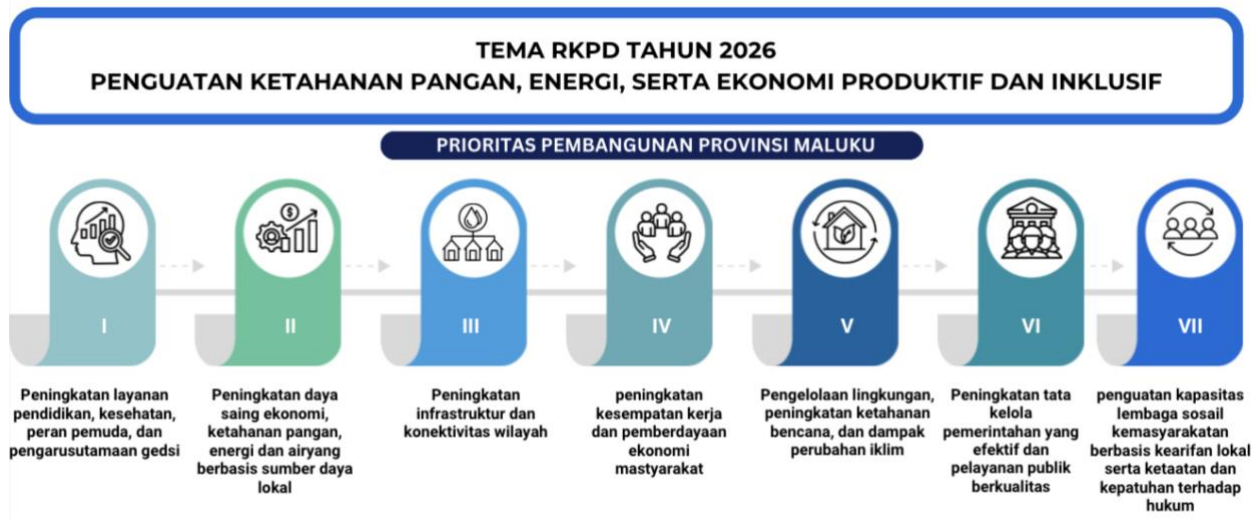
RKPD Kabupaten Maluku Tenggara disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku, sehingga ada keselerasan baik dalam hal strategi dan arah kebijakan maupun dalam penetapan target sasaran.

4.1.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026

Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah "**Penguatan Ketahanan Pangan, energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif**" dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarusutamaan geds;
2. Peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi dan air yang berbasis sumber daya lokal;
3. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
4. Peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas; dan
7. Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Gambar 4.2
Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026



4.1.2.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku (Data RPJMD Provinsi Maluku)

Sasaran Kinerja Pembangunan Wilayah Maluku

Tabel 4.2
Sasaran Kinerja Pembangunan Wilayah Maluku

INDIKATOR MAKRO	REALISASI 2024	TARGET 2026	
		RKP	RKPD
• Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,34	6,2 - 6,6	6,07
• PDRB Perkapita (Rp.Juta)	32,20	36,3 - 37,3	38,73
• Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,28	0,3	0,28
• Tingkat Kemiskinan (%)	15,78	14,0 - 14,5	14,54
• Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,11	5,54 - 6,06	5,92
• Rasio Gini (Indeks)	0,288	0,269 - 0,282	0,271-0,276
• Indeks Modal Manusia (Indeks)	n.a	0,5	0,49
• Penurunan Emisi-GRK (%)	n.a	49,38 - 67,87	49,38
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,71	82,59	82,59

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2029 dirancang dengan mengacu pada:

1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045, yaitu prioritas tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah;
3. Isu aktual dan strategis daerah.

4.1.3.1. Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029

Sesuai RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 – 2029, berikut diuraikan Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 – 2029.



Makna Visi sebagai berikut:

1. **Maluku Tenggara Mandiri.** Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.
2. **Maluku Tenggara Cerdas.** Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas, dan memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup serta berbudaya.
3. **Maluku Tenggara Demokratis.** Masyarakat Maluku Tenggara yang hidup dalam suasana aman, damai, harmonis, demokratis serta saling menghargai dan penuh toleransi. Masyarakat yang hidup rukun dan damai dalam bingkai Vu'ut Ain Mehe Ni Ngifun, Manut Ain Mehe Ni Tilur (satu orang punya anak cucu).
4. **Maluku Tenggara Berkeadilan.** Pembangunan yang bersifat inklusif, yang hasilnya dinikmati secara adil dan merata bagi semua orang. Kondisi yang diharapkan dari pembangunan yang berkeadilan adalah meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat.
5. **Maluku Tenggara Hebat** adalah kondisi Kabupaten Maluku Tenggara yang diharapkan

terwujud sesuai visi yang ditetapkan, sebagai hasil pelaksanaan misi dan program unggulan. Kondisi Maluku Tenggara Hebat ditandai dengan tercapainya kinerja indikator tujuan pembangunan >90 persen.

Visi dilaksanakan dengan 5 (lima) Misi, yang diuraikan sebagai berikut.

Gambar 4.4

Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029



4.1.3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 4.3

**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2025 s.d. 2029**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
VISI Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat				
1	Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri	Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan		Indeks Gini
			Produktivitas Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
			daerah meningkat	PDRB Perkapita (juta)
			Usaha Industri pengolahan meningkat	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
2	Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya		IPM
			Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat	Indeks Pendidikan
			Kualitas Kesehatan Meningkat	Indeks Kesehatan
			Daya Beli Masyarakat meningkat	Indeks Pengeluaran Rill perkapita
			Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat	Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah
3	Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis		Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum
			Kerukunan Hidup masyarakat meningkat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama
			Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat	Indeks, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan	Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan		Tingkat Kemiskinan
			Penduduk miskin menurun	Persentase penurunan penduduk miskin
			Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat	Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Ketahanan Pangan Daerah meningkat	Indeks Ketahanan Pangan
			Pengangguran Menurun	Tingkat Pengangguran Terbuka
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing	Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi
			Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)
			Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
				Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

4.1.3.3. Strategi Jangka Menengah dan Arah Kebijakan Tahun 2026

Tabel 4.4
Strategi Jangka Menengah dan Arah Kebijakan Tahun 2026

NO.	SASARAN DAN STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026
SASARAN 1.1: Produktivitas Ekonomi daerah meningkat		
1	Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat	- Penataan Pasar Langgur dan Terminal Langgur
2	Membangun simpul-simpul ekonomi baru, di antaranya: - Pengembangan landmark sebagai Griya UMKM, dan - Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur	- Penataan Landmark Kota Langgur sebagai Pusat Gerai UMKM
3	Memfasilitasi usaha mikro, pemberdayaan usaha dan penguatan Koperasi Merah Putih	- Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal. - Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak - Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar - Penguatan kapasitas SDM pengelola koperasi merah putih dan pelaku UMKM serta peningkatan kualitas pencari kerja sesuai pasar tenaga kerja lokal
4	Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenitas dan aktivitas serta mendukung penataan objek wisata eksisting. Membangun Ekosistem Pariwisata.	Pembangunan Pantai Ngir Varat sebagai obyek wisata baru yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan daya tarik wisata obyek wisata eksisting
SASARAN 1.2: Usaha Industri pengolahan meningkat		
1	Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut	Pembangunan Pusat Pelelangan Rumput Laut yang didukung fasilitas Gudang Penyimpanan yang memadai di Kelurahan Ohoijang-Watdek
2	Memberikan kemudahan berinvestasi.	
SASARAN 2.1: Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat		
1	Mengembangkan kompetensi guru	Pelatihan, Pendidikan lanjutan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan
2	Memperluas Jangkauan Layanan Pendidikan gratis termasuk pendidikan Kejar Paket	- Peningkatan kualitas dan akses Pendidikan melalui pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana Pendidikan - Peningkatan angka partisipasi sekolah, mendorong penyelesaian Anak Tidak Sekolah dengan berbagai program yang bersinergi dengan

NO.	SASARAN DAN STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026
		stakeholders. Berkolaborasi dalam penyediaan sekolah rakyat untuk mencapai partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun. Perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan pelayanan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat
3	Menempatkan guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah	- Penataan Distribusi guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan - Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah
4	Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	
SASARAN 2.2: Kualitas Kesehatan Meningkat		
1	Memperkuat promosi dan pencegahan	Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis pada masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat
2	Menambah dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu
3	Memperluas layanan kesehatan yang berkualitas	peningkatan keselamatan ibu dan anak menuju kematian ibu dan bayi yang semakin menurun,
4	Memfasilitasi penyediaan jaringan IT untuk pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh
5	Melakukan pencegahan dan penanganan penyakit TB, DBD, Malaria, dan penyakit menular serta tidak menular	Peningkatan kualitas lingkungan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular menuju eliminasi yang ditetapkan
6	Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis.
7	Kolaborasi pencegahan dan penanganan stunting	Pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting.
8	Memberikan Asupan Gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, Bayi dan anak Baduta	Melaksanakan koordinasi penanganan stunting: - Intervensi Gizi Spesifik - Intervensi Gizi Sensitif
9	Memperluas pemanfaatan Jaminan Kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda).	Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
SASARAN 2.3: Daya Beli Masyarakat meningkat		
1	Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok	- Operasi pasar dan pasar murah pada hari-hari besar keagamaan, peringatan hari nasional, dan pada kondisi terjadi kenaikan harga. - Gerakan Pangan Murah pada momen hari-hari besar keagamaan.

NO.	SASARAN DAN STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026
		- Pemeriksaan ketersediaan dan koordinasi pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang penting.
SASARAN 2.4: Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat		
1	Menyelenggarakan Festival Budaya Kei	Festival Budaya dan Pagelaran Seni Tradisional
2	Kolaborasi penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar serta Merawat Situs Warisan Leluhur	Lokakarya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei
3	Membangun Harmoni ain ni ain melalui gelar Tea Bel (Pela)	
4	Melestarikan Khasana Budaya Kei	- Berbahasa Kei Setiap Hari Jumat. - Penggunaan Pakaian Adat pada setiap hari jumat, dan pada hari-hari yang ditentukan
SASARAN 3.1: Kerukunan Hidup masyarakat meningkat		
1	Memfasilitasi urusan keagamaan	- Dukungan Pendanaan operasional Organisasi Keagamaan (MUI – Wilayah Perwakilan Keuskupan – Klasis) - Pembinaan Keagamaan - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (MTQ-Pesparani-Pesparawi) - Bantuan Sarana Peribadatan
SASARAN 3.2: Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat		
1	Antisipasi dan cegah dini potensi konflik	Komunitas Intelijen Daerah dan Satuan Linmas
2	Membina masyarakat untuk memiliki karakter dan jati diri kebangsaan	Pembinaan Kelompok Masyarakat/Pemuda
3	Memantapkan peran partai politik dalam pembangunan	Bantuan Parpol
4	Kolaborasi AKA-TNI-POLRI dalam Penanganan Konflik	- Koordinasi Forkopimda - Koordinasi FKUB - Koordinasi Dewan Adat
5	Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif.	Penegakkan Peraturan Daerah
SASARAN 4.1: Penduduk miskin menurun		
1	Memberikan bantuan sosial adaptif	
2	Menangani PMKS secara adaptif	Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
3	Menyediakan rumah layak huni	Pembangunan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana alam
4	Memberdayakan Nelayan kecil dan Pembudidaya	Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Pemberdayaan Nelayan,

NO.	SASARAN DAN STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026
5	Memberdayakan Petani dan Peternak	Pembudidaya, Petani dan Peternak
6	Meremajakan kelapa dan Pala.	Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar
SASARAN 4.2: Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat		
1	Membangun dan memelihara Infrastruktur dasar, Infrastruktur pemerintah dan infrastruktur ekonomi secara merata sesuai kebutuhan	- Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan kepada ohoi yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik - Pembangunan taman kawasan pemerintahan daerah (Bundaran dan Gapura Kawasan)
2	Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dokumen penataan ruang.	Penyiapan Peta Dasar RDTR Kota Langgur
SASARAN 4.3: Ketahanan Pangan Daerah meningkat		
1	Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal	Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui: - penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, - pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan - penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan;
2	Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air	Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air, terutama sumber air kebutuhan masyarakat seperti air Evu dan lainnya
3	Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve'e Kesyang)	Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve'e Kesyang) sesuai potensi ohoi melalui kolaborasi dengan ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal
4	Menjaga kualitas lingkungan hidup	Menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan lokal. Kualitas air, udara dan tutupan lahan yang baik akan mendorong peningkatan kesuburan lahan pertanian dan dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian
SASARAN 4.4: Pengangguran Menurun		
1	Memberikan pelatihan vokasional bagi pencari kerja	- Kerja sama pelatihan Vokasional Pencari Kerja - Pelatihan Wirausahaan Pemuda
2	Memperluas cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Koordinasi pelaksanaan perluasan cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan
SASARAN 5.1: Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat		
1	Melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif	Penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif
2	Membangun Infrastruktur TIK yang memadai	Peningkatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik
3	Meningkatkan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik	Peningkatan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik

NO.	SASARAN DAN STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026
4	Memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem Jemput Bola	Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui sistem Jemput Bola
5	Mendorong PD berinovasi.	Peningkatan daya inovasi perangkat daerah
SASARAN 5.2: Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat		
1	Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Nasional dan Provinsi. Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2	Mengelola informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	Pengelolaan informasi keuangan melalui portal SIPD Penganggaran dan Penatausahaan
3	Mempertahankan Opini BPK WTP	- Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Asistensi dan Pendampingan - Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4	Memantapkan tatakelola anggaran, perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	Penguatan keuangan daerah yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat sinergitas pembangunan Nasional dan Provinsi
6	Membangun Kemitraan pembangunan daerah	
7	Membangun kemitraan pembiayaan pembangunan	Peningkatan Kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan
8	Membangun Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Peningkatan Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Maluku Tenggara Tahun 2026

4.2.1. Tema Pembangunan Tahun 2026

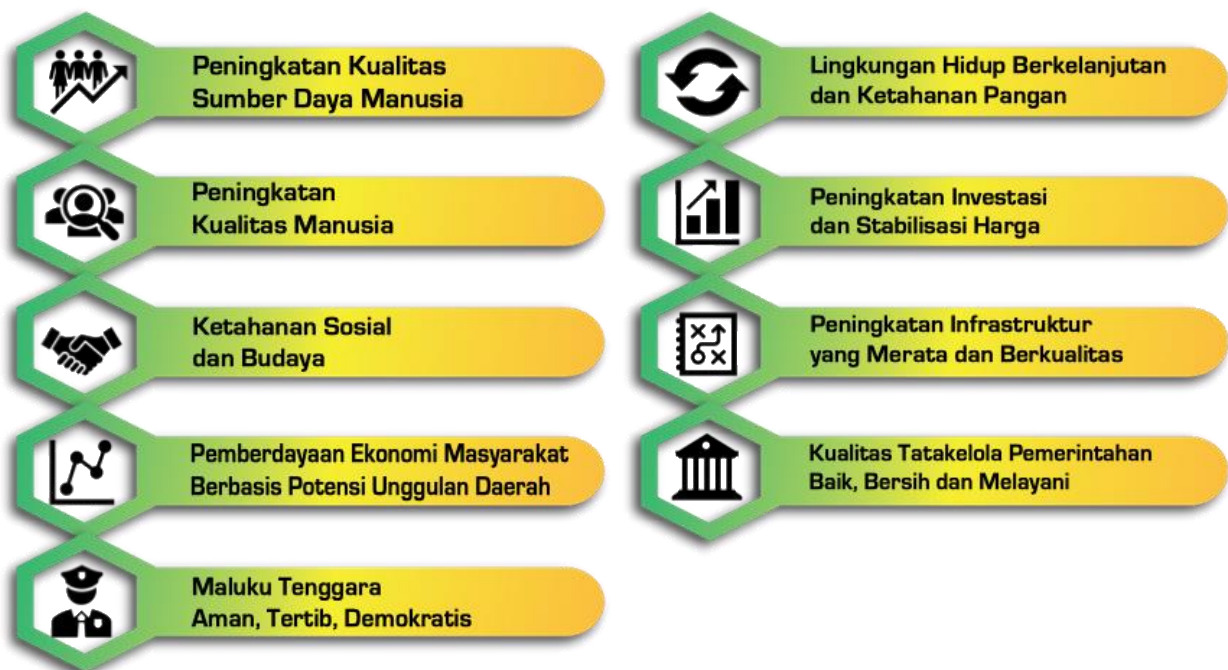
RKPD Tahun 2026 mengarahkan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara di bawah sorotan Tema: **Perekonomian Daerah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, serta Manusia Berkualitas dan Ketahanan Pangan berbasis potensi lokal**

Tema ini, memberikan fokus–fokus Tahun 2026 mencakup: upaya–upaya kolaboratif dan integratif meningkatkan kinerja perekonomian daerah, khususnya pada sektor–sektor produktif yang digeluti oleh masyarakat, yaitu perikanan, pertanian dan pariwisata. Meningkatkan kualitas manusia Maluku Tenggara melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, pelayanan budaya dan keagamaan, serta pelayanan dan jaminan sosial.

4.2.2. Prioritas Daerah Tahun 2026

Prioritas Daerah Tahun 2026 mencakup 9 (sembilan) isu aktual yang disesuaikan dari 9 (sembilan) Program Prioritas Kepala Daerah, sebagai berikut.

Gambar 4.5
Program Prioritas Daerah Tahun 2026



4.2.3. Telaah Aspiratif Masyarakat

Penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dimulai dari Musrenbang Desa, dilanjutkan ke Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tingkat Kecamatan, dan selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilakukan sesuai Surat Edaran Bupati Maluku Tenggara tentang Mekanisme Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026 di Tingkat Kecamatan, yang menyebutkan seluruh kecamatan melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di kecamatan masing-masing dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilakukan secara serentak di tiap kecamatan pada hari Selasa, 15 April 2025;
2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilakukan secara efektif dan efisien, menghasilkan daftar usulan yang dibahas berdasarkan sistem (by-system) dengan menggunakan SIPD – RI dan disepakati, dituangkan dalam berita acara hasil musrenbang RKPD di kecamatan;

Daftar usulan yang telah disepakati, kemudian diinput ke dalam SIPD-Republik Indonesia untuk diverifikasi secara berjenjang, di antaranya:

1. Verifikasi oleh Mitra Bappelitbangda;
2. Verifikasi oleh Kecamatan;
3. Verifikasi oleh Perangkat Daerah; dan
4. Verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Berdasarkan proses dan tahapan usulan masyarakat tersebut, telah dilakukan pengecekan dan validasi sehingga diperoleh hasil kesepakatan berupa jumlah usulan masyarakat Tahun 2026 sebanyak 292 usulan ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui 13 Perangkat Daerah. Adapun uraian hasil kesepakatan usulan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Usulan ke Dinas Pendidikan

- 1) Terdapat 1 usulan Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa Guru Beserta Sanitasinya Yang Berlokasi di desa/ohoi Elaar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
- 2) Terdapat 4 usulan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Guru Beserta Sanitasinya.
- 3) Terdapat 10 usulan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya.
- 4) Terdapat 3 usulan Pembangunan Ruang Kelas Baru.
- 5) Terdapat 9 usulan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya.
- 6) Terdapat 3 usulan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya.
- 7) Terdapat 4 usulan Pembangunan Laboratorium Computer Beserta Perabotnya.

- 8) Terdapat 1 usulan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya yang berlokasi di desa/ohoi Sather Kecamatan Kei Besar Selatan.
- 9) Terdapat 1 usulan Kebutuhan Gedung Paud – Pembangunan Gedung yang berlokasi di desa/ohoi Larat Kecamatan Kei Besar Selatan.
- 10) Terdapat 1 usulan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya yang berlokasi di desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil.

2. Usulan ke Dinas Kesehatan

- 1) Terdapat 6 usulan Rehabilitasi Gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu, yaitu:
 - (1) Desa/ohoi Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil;
 - (2) Desa/ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil;
 - (3) Desa/ohoi Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (4) Desa/ohoi Sather Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - (5) Desa/ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - (6) Desa/ohoi Tanimbar Kei Kecamatan Kei Kecil Barat.
- 2) Terdapat 2 usulan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
 - (2) Desa/ohoi Ngurwul Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
- 3) Terdapat 4 usulan Pembangunan Rumah Dinas Dokter/Tenaga Medis yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Mun Werfan Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - (2) Desa/ohoi Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - (3) Desa/ohoi Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay;
 - (4) Desa/ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay.

3. Usulan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 1) Terdapat 25 usulan Pembangunan Jalan.
- 2) Terdapat 1 usulan Rehabilitasi jalan rutin yang berlokasi di desa/ohoi Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
- 3) Terdapat 2 usulan Pembukaan Badan Jalan yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Tamangil Nuhuyanat Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - (2) Desa/ohoi Tamangil Nuhuten Kecamatan Kei Besar Selatan.
- 4) Terdapat 4 usulan Pembangunan Bronjong.
- 5) Terdapat 9 usulan Pembangunan Sarana Air Bersih yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
 - (2) Desa/ohoi Ngayub Kecamatan Manyeuw;
 - (3) Desa/ohoi Ohoiluk Kecamatan Manyeuw;

- (4) Desa/ohoi Rumadian Kecamatan Manyeuw;
 - (5) Desa/ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (6) Desa/ohoi Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (7) Desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (8) Desa/ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar Utara Timur.
- 6) Terdapat 1 usulan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Distribusi Air Bersih yang berlokasi di desa/ohoi Ohoirenang Kecamatan Kei Besar Selatan.
- 7) Terdapat 2 usulan Pembangunan Jembatan.
- 8) Terdapat 1 usulan Pergantian jembatan di desa/ohoi Debut Kecamatan Manyeuw.
- 9) Terdapat 1 usulan Rehabilitasi Jembatan rutin di desa/ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan.
- 10) Terdapat 6 usulan Pembangunan MCK Individual (KK) yang berlokasi di:
- (1) Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
 - (2) Desa/ohoi Uwat Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - (3) Desa/ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay;
 - (4) Desa/ohoi Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (5) Desa/ohoi Uat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (6) Desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
- 11) Terdapat 2 usulan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berlokasi di:
- (1) Desa/ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay;
 - (2) Desa/ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan.
- 12) Terdapat 15 usulan Penyediaan Penerangan Jalan Umum.
- 13) Terdapat 2 usulan Pembangunan Jaringan Irigasi yang berlokasi di:
- (1) Desa/ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (2) Desa/ohoi Wain Kecamatan Kei Kecil Timur.
- 14) Terdapat 2 usulan Peningkatan Jaringan Irigasi di:
- (1) Desa/ohoi Hangur Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - (2) Desa/ohoi Waerat Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
- 15) Terdapat 5 usulan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Di Wilayah Perkotaan.

4. Usulan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- 1) Terdapat 9 usulan Pembangunan Backlog Rumah Layak Huni.
- 2) Terdapat 22 usulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Mun Ohoir Kecamatan Kei Besar Utara Barat;

- (2) Desa/ohoi Ad Ohoiwaf Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - (3) Desa/ohoi Laar Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - (4) Desa/ohoi Ngayub Kecamatan Manyeuw;
 - (5) Desa/ohoi Elaar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (6) Desa/ohoi Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (7) Desa/ohoi Sare Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (8) Desa/ohoi Kilwat Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - (9) Desa/ohoi Sather Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - (10) Desa/ohoi Tanimbar Kei Kecamatan Kei Kecil Barat;
 - (11) Desa/ohoi Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (12) Desa/ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (13) Desa/ohoi Rahangiar Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (14) Desa/ohoi Uat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (15) Desa/ohoi Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (16) Desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (17) Desa/ohoi Ohoifaruan Kecamatan Kei Besar UtaraTimur;
 - (18) Desa/ohoi Haar Ohoiwait Kecamatan Kei Besar UtaraTimur;
 - (19) Desa/ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar UtaraTimur;
 - (20) Desa/ohoi Ibra Kecamatan Kei Kecil;
 - (21) Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
 - (22) Desa/ohoi Ngabub Kecamatan Kei Kecil.
- 3) Terdapat 7 usulan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan – Wilayah Perkotaan.
- 4) Terdapat 1 usulan Pembangunan Jaringan Air Bersih Untuk Masyarakat Kurang Mampu – Kawasan Kumuh di desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan.

5. Usulan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Terdapat 6 usulan Bangunan Pengaman Pantai yang berlokasi di :
 - (1) Desa/ohoi Elaar Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (2) Desa/ohoi Dangarat Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - (3) Desa/ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - (4) Desa/ohoi Ohoirenai Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - (5) Desa/ohoi Wirin Kecamatan Hoat Sorbay; dan
 - (6) Desa/ohoi Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

6. Usulan ke Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Terdapat 2 usulan Pembuatan TPS yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
 - (2) Desa/ohoi Wearlilir Kecamatan Kei Kecil.
- 2) Terdapat 2 usulan Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah di desa/ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil.

7. Usulan ke Dinas Pariwisata

- 1) Terdapat 4 usulan Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata yang berlokasi di :
 - (1) Desa/ohoi Ngilngof Kecamatan Manyeuw;
 - (2) Desa/ohoi Rumadian Kecamatan Manyeuw;
 - (3) Desa/ohoi Wab Kecamatan Hoat Sorbay.
 - (4) Terdapat 1 usulan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton Di Destinasi Wisata di desa/ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan.

8. Usulan ke Dinas Perikanan

- 1) Terdapat 3 usulan Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Perikanan yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Arso Kecamatan Hoat Sorbay;
 - (2) Desa/ohoi Ohoider Atas Kecamatan Kei Kecil;
 - (3) Desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
- 2) Terdapat 6 usulan Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (2) Desa/ohoi Haar Ohoiwait Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - (3) Desa/ohoi Hollat Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - (4) Desa/ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - (5) Desa/ohoi Uat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- 3) Terdapat 2 usulan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan.
- 4) Terdapat 3 usulan Pembangunan Jalan Produksi yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
 - (2) Desa/ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil;
 - (3) Desa/ohoi Namar Kecamatan Manyeuw;

9. Usulan ke Dinas Pertanian

- 1) Terdapat 17 usulan Pembangunan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di :
 - (1) Desa/ohoi Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil;
 - (2) Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
 - (3) Desa/ohoi Ngabub Kecamatan Kei Kecil;
 - (4) Desa/ohoi Ohoider Atas Kecamatan Kei Kecil;

- (5) Desa/ohoi Ngurwul Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (6) Desa/ohoi Danar Lumefar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (7) Desa/ohoi Elaar Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (8) Desa/ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (9) Desa/ohoi Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (10) Desa/ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (11) Desa/ohoi Uf Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (12) Desa/ohoi Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (13) Desa/ohoi Sare Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (14) Desa/ohoi Tamangil Nuhuten Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - (15) Desa/ohoi Rerean Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - (16) Desa/ohoi Hollay Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - (17) Desa/ohoi Warwut Kecamatan Hoat Sorbay.
- 2) Terdapat 1 usulan Pembangunan Jalan Produksi di desa/ohoi Ohoirenan;
 - 3) Terdapat 9 usulan Penyediaan Sarana Pertanian.

10. Usulan ke Dinas Pemuda dan Olahraga

- 1) Terdapat 2 usulan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi yang berlokasi di:
 - (1) Desa/ohoi Elaar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - (2) Desa/ohoi Elaar Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

11. Usulan ke Dinas Perhubungan

- 1) Terdapat 5 usulan Pembangunan Tambatan Perahu – Dikoordinasikan Ke Provinsi.
- 2) Terdapat 2 usulan Pengadaan Moda Transportasi di desa/ohoi Hoko Kecamatan Kei Besar Utara Timur.
- 3) Terdapat 1 usulan Rehabilitasi/Peningkatan prasarana transportasi perairan di desa/ohoi Tamangil Nuhuten Kecamatan Kei Besar Selatan.

12. Usulan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

- 1) Terdapat 1 usulan Pembangunan/Revitalisasi Prasarana Perdagangan (Pasar) di desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil.

13. Usulan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Terdapat 1 usulan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa di desa/ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

4.2.4. Telaah Pokok – pokok Pikiran DPRD

Salah satu pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Pendekatan Politis. Pendekatan ini diimplemetasikan sekurang-kurangnya dalam dua bentuk, yaitu: 1) penerjemahan visi dan misi kepala daerah, dan 2) aspiratif DPRD dalam bentuk Pokok-pokok Pikiran.

Ketentuan mengenai Pokok-pokok Pikiran DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pasal 78 Ayat (2) menyebutkan Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya, terkait mekanisme penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD diatur dalam Pasal 178, yang mengatur:

1. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
2. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
3. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam *e-planning* bagi Daerah yang sudah memiliki SIPD.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Surat Sekretaris Daerah menginformasikan jadwal penginputan Pokok-pokok Pikiran DPRD ke dalam SIPD, dengan melampirkan kamus usulan Pokok-pokok Pikiran yang menjadi rujukan Anggota DPRD dalam mengusulkan Pokok Pikiran masing-masing.
2. Waktu penginputan dimulai pada tanggal 13 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 23 Mei 2025.
3. Hasil inputan Pokok-pokok pikiran terdokumentasi sebanyak 313 usulan.
4. Berdasarkan hasil Verifikasi berjenjang maka diperoleh sebanyak 313 usulan yang diteruskan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Hasil penginputan dan verifikasi terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD menunjukkan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan daerah, dan sudah melewati pembahasan Musrenbang RKPD Tahun 2026, sebagai berikut.

Tabel 4.5
Usulan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

OPD TUJUAN	JENIS USULAN	VOLUME
Dinas Pendidikan	Bantuan Sarana Dan Prasarana Pendidikan	8 paket
	Penyediaan Sarana Utilitas (PSU) Sekolah	2 paket
	Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Guru/ Kantor/ UKS/ Toilet/ Lanoratorium	3 paket
Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota	3 paket
	Pembangunan Puskesmas Pembantu	2 unit
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	15 paket
	Pembangunan Talud Pengaman Pantai (seawall)	13 paket
	Pembangunan Jalan	1 paket
	Rehabilitasi Jalan	5 paket
	Penyediaan MCK – Lokasi Prioritas Stunting	35 unit
	Penyediaan SPAM	9 paket
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	258 unit
	Pembangunan Jalan Lingkungan–Kawasan Permukiman di Wilayah Perkotaan	7 paket
	Portal Permukiman	11 unit
Dinas Sosial	Bantuan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS (Terdaftar)	500 paket
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Talud Penahan Tanah	9 paket
Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Pembuangan Sampah Di Lingkungan Permukiman	3 unit
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan anak	Bantuan Keuangan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan	1 paket
	Bantuan Sarana Dan Prasarana Desa	3 paket
Dinas Pemuda dan Olahraga	Bantuan Sarana Dan Prasarana Olahraga	7 paket
	Aktivitas Produktif Bagi Pemuda Dalam Membina Minat Dan Bakat Di Bidang Olahraga	2 paket
Dinas Perhubungan	Pengadaan Moda Transportasi Darat	29 unit
	Penyediaan Moda Transportasi Perairan	21 unit
Dinas Pariwisata	Bantuan Keuangan Untuk Atraksi Wisata	2 paket
	Penyediaan Amenitas Destinasi Wisata	1 paket
Dinas Perikanan	Sarana Penangkapan	201 paket
	Sarana Budidaya	2 paket
Dinas Pertanian	Bantuan Bibit Ternak	174 anakan
	Pengembangan Usaha Perkebunan – Lokasi	100 pohon

OPD TUJUAN	JENIS USULAN	VOLUME
	Klaster	
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Lokasi Klaster)	9 paket
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9 paket
	Penyediaan Sarana Pengolahan Pasca Panen	40 unit
	Kelangkaan Bibit Tanaman Dan Pupuk Bagi Usaha Pertanian	2 paket
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Bantuan Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil	193 paket
	Bantuan Perkuatan Usaha	67 paket
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Fasilitasi Pelatihan Berdasarkan Unit Usaha, Minat Dan Kompetensi Pencari Kerja	25 orang
	Fasilitasi Pengembangan Industri Skala Mikro	1 paket
Sekretariat Daerah	Bantuan Keuangan Untuk Kegiatan Keagamaan	16 paket
	Hibah Sarana Dan Prasarana Keagamaan/Peribadatan	35 paket
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian Dan Pengembangan Daerah Oleh Tim Peneliti/Tim Kajian Berbadan Hukum	2 paket

4.2.5. Sasaran Kinerja Pembangunan

4.2.5.1. Sasaran Indikator Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026

Dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran ekonomi makro tahun–tahun sebelumnya, prioritas daerah dan upaya pencapaian Visi dan Misi, maka Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Sasaran Indikator Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026

INDIKATOR MAKRO	REALISASI					OUTLOOK 2025	TARGET 2026
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Pembangunan Manusia	68,57	68,69	69,23	69,91	70,58	70,70	71,59
Pertumbuhan Ekonomi	-0,22	3,42	5,65	4,84	5,44	6,00	5,75
Tingkat Kemiskinan	22,57	22,73	21,19	21,79	21,22	19,70	19,11
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,95	5,06	5,74	5,73	5,68	4,25	4,68
Laju Inflasi	2,06	3,35	4,52	3,32	0,16	2,00	2,00
Indeks Gini	0,376	0,239	0,265	0,244	0,248	0,220	0,246
PDRB Perkapita	26,83	27,78	30,47	32,89	34,91	36,80	38,16

4.2.5.2. Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2026

Sasaran kinerja untuk pencapaian Visi dan Misi RPJMD sebagai berikut.

Tabel 4.7
Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target 2026
VISI				
Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat				
MISI 1: Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri				
1.	Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, inklusif dan berkelanjutan	Indeks Gini	0,248	0,246
	1.1. Produktivitas Ekonomi daerah meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,75
		PDRB Perkapita (juta)	34,91	38,16
	1.2. Usaha Industri pengolahan meningkat	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,28	1,66
MISI 2: Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas				
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya	IPM	70,58	71,59
	1.1. Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat	Indeks Pendidikan	0,686	0,693
	1.2. Kualitas Kesehatan Meningkat	Indeks Kesehatan	0,783	0,7901
	1.3. Daya Beli Masyarakat meningkat	Indeks Pengeluaran Ril perkapita	0,303	0,292
	1.4. Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat	Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah	n.a	65,0
MISI 3: Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis				
3.	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai,	Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum	n.a	75,00

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target 2026
	harmonis, demokratis			
	3.1. Kerukunan Hidup masyarakat meningkat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	n.a	100
	3.2. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat	Indeks, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	n.a	69,0
MISI 4: Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan				
4.	Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Tingkat Kemiskinan	21,22	19,11
	4.1. Penduduk miskin menurun	Persentase penurunan penduduk miskin	1,51	5,23
	4.2. Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat	Indeks Pembangunan Infrastruktur	n.a	64,00
	4.3. Ketahanan Pangan Daerah meningkat	Indeks Ketahanan Pangan	n.a	49,63
	4.4. Pengangguran Menurun	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,68	4,68
MISI 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing				
5.	Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	49,28	55,15/CC
	5.1. Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	n.a	76,00
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	n.a	3,25/B-
	5.2. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	68,87	74,12
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	n.a	3,75

4.2.6. Program Prioritas Maluku Tenggara Tahun 2026

4.2.6.1. Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi

Untuk pencapaian Visi dan Misi, maka ditetapkan Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara Bidang Urusan Pemerintahan, sebagai berikut.

Tabel 4.8
Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi

Misi dan Tujuan	Sasaran	Program Prioritas
Visi: Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat		
Misi 1: Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri		
Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan	Produktivitas Ekonomi daerah meningkat	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Misi dan Tujuan	Sasaran	Program Prioritas
berkelanjutan		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata
	Usaha Industri pengolahan meningkat	Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Misi 2: Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas		
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya	Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Pengelolaan Pendidikan
	Kualitas Kesehatan Meningkat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pengendalian penduduk
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Daya Beli Masyarakat meningkat	Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Kabupaten/Kota
	Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat	Pengembangan Kebudayaan
		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Misi 3: Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis		
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis	Kerukunan Hidup masyarakat meningkat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Misi 4: Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan		
Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Penduduk miskin menurun	Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Rehabilitasi Sosial
		Pengembangan Perumahan

Misi dan Tujuan	Sasaran	Program Prioritas
		Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
		Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat	Penyelenggaraan Jalan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Penataan Bangunan Gedung
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Pengelolaan Perairan
		Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Ketahanan Pangan Daerah meningkat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	Pengangguran Menurun	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing		
Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat	Aplikasi Informatika
		Pencatatan Sipil
		Pendaftaran Penduduk
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Pelayanan Penanaman Modal
	1) Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan

4.2.6.2. Program dan Kegiatan Prioritas yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan, terdapat sejumlah Program dan Kegiatan Prioritas yang diamanatkan untuk dilaksanakan di daerah, yaitu:

1. Belanja Daerah yang diamanatkan dan dimandatkan (*Mandatory Spending*)

1) *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Alokasi belanja paling sedikit 20 persen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi belanja penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

3) Belanja Pegawai

Alokasi belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja, termasuk belanja untuk ASN, Kepala Daerah dan DPRD, serta tidak termasuk TPG, TKG, Tambahan Penghasilan Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD, yang tidak ditentukan penggunaannya.

4) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya.

(1) Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB

Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha.

(3) Hasil Penerimaan Pajak Rokok

Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling rendah 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.

2. Belanja Daerah untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Pengalokasian anggaran belanja untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Urusan Pendidikan, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 32 Tahun 2022;
- 2) Urusan Kesehatan, berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024;
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023;
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023;
- 5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - (1) Bidang Urusan Bencana, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 101 tahun 2018.
 - (2) Bidang Urusan Kebakaran, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018.
 - (3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018.
- 6) Urusan Sosial, berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018.

4.2.6.3. Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2026

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2026, diuraikan sebagai berikut.

1. Pengentasan Kemiskinan

Strategi penurunan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan lintas sektor, hal ini membutuhkan beberapa prasyarat yaitu: a) Integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat; b) Penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial; c) Optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan meningkatkan akses terhadap pasar serta teknologi dan d) Komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan.

- 4) Penanggulangan Kemiskinan

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam tahun 2026 sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan sosial
- (3) Meningkatkan rumah layak huni bagi penduduk miskin/korban bencana/terkena relokasi program pemda
- (4) Meningkatkan aspek pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin dan rentan:
 - Produksi Perikanan Budidaya
 - Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
 - Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian
- 5) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Upaya menurunkan kemiskinan yang signifikan, RPJMN 2025–2029 menetapkan 4 (empat) strategi penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, yaitu:

- (1) **Memastikan stabilitas ekonomi makro** melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.
- (2) **Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan** melalui pelaksanaan kartu kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam penargetan yang secara terus menerus dimutakhirkan dan berbagi pakai melalui sistem registrasi sosial ekonomi serta diperkuat melalui teknologi digital dalam penyaluran.
- (3) **Meningkatkan pendapatan masyarakat** dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui kartu usaha untuk mendukung graduasi dari kemiskinan. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif dan penerapan prinsip afirmatif. Strategi kartu usaha menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta.
- (4) **Memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.** Strategi ini difokuskan pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Intervensi dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.

Secara spesifik, kebijakan belanja Tahun 2026 untuk pengentasan kemiskinan ekstrim meliputi:

- (1) mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutahiran data penerima manfaat, yaitu dengan melaksanakan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem

Tabel 4.9
Strategi Kebijakan Belanja
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026

STRATEGI	URAIAN KEGIATAN
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui:
	- bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras
	- bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bansos reguler, dan bantuan beras
	- bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia)
	- subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik, dan subsidi elpiji
	- pemberian bantuan iuran JKN
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui
	- peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, melalui program padat karya dan bantuan subsidi/kelompok seperti program padat karya tunai/pkt (desa dan sektor)
	- peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu pra kerja, program vokasi
	- peningkatan kapasitas umkm, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha
	- peningkatan akses pembiayaan umkm, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, seperti kredit usaha rakyat (KUR)
Menurunkan Jumlah Kantong Kemiskinan	diselenggarakan dalam bentuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fasilitas dan pra sarana wilayah
	- Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak
	- Peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan

- (2) melakukan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

6) Sekolah Rakyat

Dalam rangka mendukung implementasi Program Sekolah Rakyat untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan dukungan berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik sesuai dengan kewenangannya dengan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pembangunan 3 Juta Rumah

Memberikan dukungan anggaran untuk percepatan pelaksanaan Pembangunan 3 Juta Rumah di Kabupaten Maluku Tenggara melalui:

- (1) menyediakan alokasi anggaran untuk rehabilitasi/pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) menyiapkan data sasaran penerima program pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang dilakukan secara akuntabel dengan mengacu pada ketepatan data yang bersumber dari DTSEN.
- (3) melakukan monitoring dan evaluasi terkait rehabilitasi/pembangunan perumahan di tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) menyediakan alokasi anggaran untuk penyediaan rumah tapak dan rumah susun untuk MBR.

2. Ketahanan Pangan

1) Swasembada Pangan

Intervensi kebijakan swasembada pangan antara lain:

- (1) Penguatan cadangan pangan
- (2) Pengembangan pangan akuatik, pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati
- (3) Penganekaragaman konsumsi pangan
- (4) Pengendalian penyakit ternak
- (5) Penjaminan mutu dan keamanan pangan
- (6) Penanganan kerawanan pangan

2) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian

3) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

4) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

3. Kesehatan Untuk Semua

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa/daerah, terutama melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang Kesehatan, yang dilakukan melalui:

1) Penurunan Stunting

Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peningkatan cakupan dan kualitas, serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing-masing kelompok sasaran intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

2) Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sesuai ketentuan, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui, deteksi dini, peningkatan kesadaran dan investasi kesehatan jangka panjang. Sasaran PKG sesuai yang diamanatkan: 1) PKG Ulang Tahun (Kado): Pemeriksaan kesehatan gratis yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat pada hari ulang tahun atau hingga 30 hari setelahnya; 2) PKG Sekolah: Pemeriksaan kesehatan untuk siswa usia sekolah guna mengidentifikasi faktor risiko dan mendeteksi dini masalah kesehatan fisik dan mental dan 3) CKG Ibu Hamil dan Balita: Skrining untuk bayi baru lahir, balita, dan ibu hamil yang bertujuan mendeteksi masalah kesehatan seperti penyakit jantung bawaan, stunting, dan anemia.

3) Jaminan Kesehatan Nasional

Koordinasi dan dukungan penganggaran daerah untuk perluasan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

4) Penuntasan TBC

5) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Fokus penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dan Rumah Sakit Pratama Elat.

4. Perluasan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa/daerah, terutama melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang Pendidikan, yang dilakukan melalui:

- 1) Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
- 2) Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar
- 3) Makan Bergizi Gratis

Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi diarahkan untuk membangun generasi sehat, cerdas dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Dengan akses pada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam perbaikan gizi, melalui pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi. Dukungan pemerintah daerah dalam menyelesaikan program MBG meliputi:

- a. Pemberian makan bergizi gratis
 - a) Data penerima manfaat
 - b) Dukungan lahan
 - c) Dukungan dapur mandiri
- b. Penguatan ekosistem pendukung program MBG
 - a) Pertanian
 - b) Dana desa
 - c) Perhubungan
 - d) Jalan dan jembatan
 - e) Air bersih

Dukungan konkret Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pelaksanaan MBG Tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2026 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) menyediakan tanah bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- 3) mendorong dan mengembangkan secara optimal potensi sumber daya lokal.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan. Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis.

Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetap juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat. Secara konkret terdapat 8 (delapan) strategi kunci RPJMN 2025–2029 untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, yaitu:

1) Pengendalian Inflasi

Sesuai amanat RPJMN 2025–2029, pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi harga bergejolak melalui strategi 4K, yaitu:

- (1) keterjangkauan harga,
- (2) ketersediaan pasokan,
- (3) kelancaran distribusi, dan
- (4) komunikasi efektif

2) Percepatan Pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Beberapa upaya strategis yang dilaksanakan untuk percepatan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Maluku Tenggara, antara lain:

- (1) melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi.
- (2) mendorong dan memfasilitasi SKPD yang melaksanakan urusan di bidang koperasi dan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

3) Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- (1) upaya konkret meningkatkan pendapatan daerah. Khususnya, pada komponen PAD, melalui perbaikan data base pajak dan retribusi, serta digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- (2) meningkatkan efektivitas belanja daerah melalui pengalokasian belanja secara proporsional terhadap belanja prioritas pencapaian visi dan misi.
- (3) pengelolaan pembiayaan daerah secara efektif dan efisien untuk memberikan dampak optimal bagi pembiayaan daerah yang produktif.

4) Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)

Melakukan hilirisasi pada produk unggulan rumput laut, utamanya melalui pembangunan gudang penyimpanan dan pusat lelang Rumput Laut sebagai cikal bakal pembangunan industri rumput laut Maluku Tenggara.

5) Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Pelestarian lingkungan hidup melalui promosi, edukasi dan penghijauan, serta dengan mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah.

Tabel 4.10

Program dan Kegiatan Prioritas untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Rumah Sakit
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
				3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa				
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,		Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
				Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		ruang		
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan
					Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
					Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	LINGKUNGAN HIDUP		KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan sampah melalui pengangkutan
					Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
					Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
					Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
					Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra Produksi melalui peran aktif koperasi			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
					Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
					Pelayanan Informasi Publik
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
					Penyediaan Akses Internet
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi
					Dalam Pengembangan Ekonomi
					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENANAMAN MODAL		PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Seleksi Atlet Daerah
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya
					Pengembangan Cagar Budaya
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
					Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
24	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
					Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
					Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
					Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
					Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
					Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
					Pengembangan Pendidikan
					Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
					Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
					Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
					Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
					Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang Nasional
					Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	negeri.			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
					Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan mengelaborasi aspek kebijakan berdasarkan uraian permasalahan di Bab II, kerangka ekonomi dan keuangan di Bab III serta tujuan dan sasaran pembangunan di Bab IV. Rencana kerja dan pendanaan menguraikan secara konkret berupa program dan kegiatan disertai indikasi anggaran dan lokasi kegiatan.

Sesuai analisis kerangka ekonomi makro, gambaran keuangan daerah, serta prioritas belanja pada Bab III maka, rencana kerja dan pendanaan daerah untuk tahun 2026 dapat diuraikan dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu: 1) belanja wajib dan mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan; 2) belanja untuk pencapaian target pembangunan daerah, 3) belanja untuk pencapaian kinerja isu aktual dan 4) alternatif pembiayaan lainnya.

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Wajib-Mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

5.1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan *Mandatory Spending*

Pemerintah Daerah diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka mendanai belanja wajib dan prioritas. Pengalokasian anggaran dimaksud yaitu untuk mendanai: 1) sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja; 2) sektor kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja (di luar gaji); dan 3) belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari total belanja APBD (di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa). Pengalokasian anggaran sesuai ketentuan tersebut, diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp190.142.189.184,00. Aloaksi ini mencapai 24,64 persen dari total belanja Tahun 2026. Sehingga dengan demikian, untuk Tahun 2026, RKPD sudah mampu memenuhi kewajiban penganggaran Fungsi Pendidikan sebesar minimal 20 persen sesuai ketentuan, UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan • UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Tabel 5.1
Rencana Kerja dan Pendanaan *Mandatory Spending*
Bidang Pendidikan Tahun 2026

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	INDIKASI ANGGARAN
Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000,00
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.600.000.000,00
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.000.000,00
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.000.000,00
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.000.000,00
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.000.000,00
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.000.000,00

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	INDIKASI ANGGARAN
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.377.295.000,00
	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.492.733.587,00
	- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.050.000.000,00
	- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.250.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
	- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	487.500.000,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.500.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
	- Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	507.000.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.714.547.976,00
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.725.089,00
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.000.000,00
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.126.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
	- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
	- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
	- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.326.750,00
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.369.711.632,00
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.000.000,00
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	475.000.000,00
	- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	INDIKASI ANGGARAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000,00
	- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
	- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	350.000.000,00
	- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi	55.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	0,00
Dinas Kebudayaan Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	415.000.000,00
	- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000,00
	- Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	488.800.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
	- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
	- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	175.000.000,00
	- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	726.423.150,00
JUMLAH BELANJA BIDANG PENDIDIKAN		190.142.189.184,00
JUMLAH BELANJA		771.741.159.119,42
PERSENTASE BELANJA BIDANG PENDIDIKAN		24,64%

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar minimal 20 persen dari alokasi belanja daerah dilakukan termasuk dengan penganggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Hal dijelaskan sebagai berikut.

1. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan: Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008: Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai frase gaji pendidik **BERTENTANGAN** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena itu pemerintah wajib memasukkan gaji pendidik dalam anggaran Pendidikan 20 persen.
3. Tindak lanjut dari putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008, maka pedoman umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri), tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD merumuskan perhitungan anggaran mandatory spending bidang Pendidikan termasuk dengan anggaran gaji (belanja pegawai)

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka RKPD Tahun 2026 merumuskan perhitungan anggaran mandatory spending **Bidang Pendidikan termasuk dengan anggaran gaji (belanja pegawai).**

5.1.1.2. Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dianggarkan paling rendah 40 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke Desa.

Tabel 5.2
Rencana Kerja dan Pendanaan *Mandatory Spending*
Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PENDIDIKAN	31.949.460.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.949.460.000,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	15.776.795.000,00
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.862.000.000,00
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	585.900.000,00
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000,00
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.888.525.000,00
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	872.440.000,00
- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.055.450.000,00
- Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.312.480.000,00
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	800.000.000,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.972.665.000,00
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4.500.000.000,00
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000,00
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah	300.000.000,00
- Pembangunan Laboratorium	1.500.000.000,00
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.411.125.000,00
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000,00
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.280.000.000,00
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.000.000.000,00
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	900.000.000,00
- Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.531.540.000,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.200.000.000,00
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.200.000.000,00
DINAS KESEHATAN	13.228.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.228.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.228.000.000,00
- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	6.350.000.000,00
- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.650.000.000,00
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.850.000.000,00
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.378.000.000,00
RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR	3.307.652.248,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.307.652.248,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.307.652.248,00
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.304.469.998,00
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	328.710.250,00
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	674.472.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	16.265.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.800.000.000,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000,00
- Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	300.000.000,00
- Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.500.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.840.000.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.840.000.000,00
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00
- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	700.000.000,00
- Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	70.000.000,00
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.250.000.000,00
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000,00
- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	520.000.000,00
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	200.000.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.160.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.160.000.000,00
- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	1.160.000.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.680.000.000,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.680.000.000,00
- Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00
- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	276.000.000,00
- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	144.000.000,00
- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	160.000.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.650.000.000,00
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000,00
- Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00
- Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	1.585.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.935.000.000,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.935.000.000,00
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	600.000.000,00
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan	160.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin Jalan	200.000.000,00
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	100.000.000,00
- Pembangunan Jalan	2.325.000.000,00
- Pemeliharaan Berkala Jalan	1.500.000.000,00
- Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	150.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin Jembatan	100.000.000,00
- Pembangunan Jembatan	1.800.000.000,00
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.755.705.875,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.070.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.070.000.000,00
- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000,00
- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	185.000.000,00
- Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	685.000.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	630.000.000,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	630.000.000,00
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	630.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	424.999.875,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	424.999.875,00
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	424.999.875,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	630.706.000,00
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	630.706.000,00
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	630.706.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	410.000.000,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	410.000.000,00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	410.000.000,00
- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	275.000.000,00
- Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	65.000.000,00
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	70.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	640.400.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	640.400.000,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	187.500.000,00
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	187.500.000,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	452.900.000,00
- Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	52.900.000,00
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	400.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.943.600.000,00
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.943.600.000,00
- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.642.800.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	504.600.000,00
- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.796.200.000,00
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH	901.423.150,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	901.423.150,00
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	175.000.000,00
- Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100.000.000,00
- Penetapan Cagar Budaya	75.000.000,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	726.423.150,00
- Pelindungan Cagar Budaya	650.000.000,00
- Pemanfaatan Cagar Budaya	76.423.150,00
DINAS PERIKANAN	1.622.500.750,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	420.000.000,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	420.000.000,00
- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	80.000.000,00
- Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	85.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	255.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.202.500.750,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	422.500.750,00
- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000,00
- Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	72.500.750,00
- Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	75.000.000,00
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	175.000.000,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	780.000.000,00
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000,00
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00
DINAS PARIWISATA	225.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	225.000.000,00
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	225.000.000,00
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	225.000.000,00
DINAS PERTANIAN	300.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	150.000.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	150.000.000,00
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	150.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	150.000.000,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	150.000.000,00
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	150.000.000,00
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	600.000.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	600.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	600.000.000,00
- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	600.000.000,00
BAGIAN UMUM	1.300.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.300.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.000.000,00
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750.000.000,00
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000,00
JUMLAH BELANJA PENYEDIAAN IN FRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK	73.505.142.023,00
JUMLAH ANGGARAN BELANJA DIPERHITUNGKAN	592.811.272.600,54
RASIO BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK	12,40%

Kewajiban alokasi belanja untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen dari total belanja daerah yang diperhitungkan tahun 2026 sebesar Rp592.811.272.600,54 adalah Rp237.124.509.040,22. Alokasi belanja yang sudah tercatat dalam RKPD tahun 2026 sebesar Rp73.505.142.023,00. Artinya dari total belanja yang diperhitungkan, baru terpenuhi 12,40 persen, sedangkan dari sisi pemenuhan target belanja Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik baru mencapai 31,00 persen.

5.1.1.3. Bidang Pengawasan

Tabel 5.3
Rencana Kerja dan Pendanaan *Mandatory Spending*
Bidang Pengawasan Tahun 2026

6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.554.203.250,00
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	5.554.203.250,00
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.302.771.705,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.721.500,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	489.192.955,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.857.250,00

6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.554.203.250,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000,00
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.337.084.795,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.336.661.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	423.795,00
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	914.346.750,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	200.000.000,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	714.346.750,00
JUMLAH BELANJA FUNGSI PENGAWASAN		5.554.203.250,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		771.741.159.119,42
PERSENTASE ANGGARAN FUNGSI PENGAWASAN		0,72%

5.1.2. Rencana Kerja dan Pendanaan SPM

5.1.2.1. Bidang Pendidikan

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 32 Tahun 2022, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.4
Rencana Kerja dan Pendanaan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2026

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN				
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	350 Orang	27.816.157.284,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	375 Orang	3.592.695.000,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	388 Orang	6.200.000.000,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	142 Orang	169.868.500,00
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	96.295.500,00

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1.01.02.2. 01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	142 Konten Digital	70.461.750,00
1.01.02.2. 01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	284 Orang	152.413.500,00
1.01.02.2. 01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	284 Orang	464.740.250,00
1.01.02.2. 01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	319.347.000,00
1.01.02.2. 01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	142 Dokumen	504.299.250,00
1.01.02.2. 01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	3.096.825.790,00
1.01.02.2. 01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	2.232.242.441,00
1.01.02.2. 02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.628.875.438,00
1.01.02.2. 02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	15 Satuan Pendidikan	86.243.250,00
1.01.02.2. 02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	103.472.500,00
1.01.02.2. 02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	15 Konten Digital	50.841.250,00
1.01.02.2. 02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	49 Konten Digital	55.251.000,00
1.01.02.2. 02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	414.344.000,00
1.01.02.2. 02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen	360.140.000,00
1.01.02.2. 03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	27.900.000,00
1.01.02.2. 03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	218 Satuan Pendidikan	66.187.500,00
1.01.02.2. 03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	219 Satuan Pendidikan	87.096.500,00
1.01.02.2. 03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	103.763.500,00
1.01.02.2. 03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	192.457.750,00

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1.01.02.2. 03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	454.848.500,00
1.01.02.2. 03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	54.309.250,00
1.01.02.2. 03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Dokumen	126.995.000,00
1.01.02.2. 03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	213.145.000,00
1.01.02.2. 03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	128.656.500,00
1.01.02.2. 04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	39.000.000,00
1.01.04.2. 01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	34.643.671.000,00

Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026.

5.1.2.2. Bidang Kesehatan

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.5
Rencana Kerja dan Pendanaan SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2026

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
DINAS KESEHATAN				
1.02.02.2. 02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	57.937.000,00
1.02.02.2. 02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	90.823.750,00
1.02.02.2. 02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	20.000.000,00
1.02.02.2. 02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	47.215.000,00
1.02.02.2. 02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	17.500.000,00

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1.02.02.2. 02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	19.625.000,00
1.02.02.2. 02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	17.863.000,00
1.02.02.2. 02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	8.337.500,00
1.02.02.2. 02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	15.481.250,00
1.02.02.2. 02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	15.000.000,00
1.02.02.2. 02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	13.400.000,00
1.02.02.2. 02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	25.062.250,00
1.02.02.2. 02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	28.098.000,00
1.02.02.2. 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	21.625.000,00
1.02.02.2. 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	11.087.500,00

Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026.

5.1.2.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.6
Rencana Kerja dan Pendanaan SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	35.000.000,00
1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	545.000.000,00
1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	60 Liter/Detik	2.849.515.000,00
1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik	74.391.575,00
1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	60 Liter/Detik	1.247.769.000,00
1.03.03.2.0 1.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	330.000.000,00
1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	493 SR	5.565.297.005,00
1.03.05.2.0 1.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5 M ³ /Hari	381.700.000,00
1.03.05.2.0 1.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	12 Rumah Tangga	43.000.000,00
1.03.05.2.0 1.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	30 Rumah Tangga	24.000.000,00
1.03.05.2.0 1.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	50.000.000,00

Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026.

5.1.2.4. Bidang Perumahan dan Permukiman

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.7
Rencana Kerja dan Pendanaan SPM
Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2026

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1.04.02.2.0 1.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	12.495.250,00
1.04.02.2.0 1.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	23.100.000,00
1.04.02.2.0 1.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	12.495.500,00
1.04.02.2.0 1.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	21.000.000,00
1.04.02.2.0 3.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	205.900.000,00
1.04.02.2.0 3.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18 Unit Rumah	380.000.000,00
1.04.02.2.0 3.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	666.500.000,00
1.04.02.2.0 1.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	12.495.250,00
1.04.02.2.0 1.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	23.100.000,00
1.04.02.2.0 1.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	12.495.500,00
1.04.02.2.0 1.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	21.000.000,00
1.04.02.2.0 3.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	205.900.000,00
1.04.02.2.0 3.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18 Unit Rumah	380.000.000,00
1.04.02.2.0 3.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	666.500.000,00

Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026

5.1.2.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 101,114,dan 121 Tahun 2018, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.8
Rencana Kerja dan Pendanaan SPM
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2026

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.05.03.2.0 2.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	50.000.000,00
1.05.03.2.0 3.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	150 Orang	139.980.000,00
1.05.03.2.0 3.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	75 Orang	56.239.250,00
1.05.03.2.0 3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	54.200.000,00
1.05.03.2.0 3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75 Orang	22.685.000,00
1.05.03.2.0 3.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.200.500,00
1.05.03.2.0 2.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	22.201.000,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1.05.04.2.0 1.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10 Dokumen	8.035.000,00
1.05.04.2.0 1.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	50.000.000,00
1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	20.827.875,00
1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket	1 Laporan	50.473.750,00

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
		dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.05.04.2.0 1.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	29.521.000,00
1.05.04.2.0 1.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.250.000,00
1.05.04.2.0 4.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	1.341.582.500,00

Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026

5.1.2.6. Bidang Sosial

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.9
Rencana Kerja dan Pendanaan SPM
Bidang Sosial Tahun 2026

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
DINAS SOSIAL				
1.06.04.2.0 1.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50.906.750,00
1.06.04.2.0 1.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.616.750,00
1.06.04.2.0 1.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	167.999.500,00
1.06.04.2.0 1.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.375.000,00
1.06.04.2.0 1.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	230.000.000,00
1.06.04.2.0 1.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	12.918.500,00
1.06.04.2.0 1.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	100 Orang	13.193.750,00

NOMOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.04.2.0 1.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	90.000.000,00
1.06.04.2.0 1.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.256.000,00
1.06.04.2.0 1.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9.145.000,00
1.06.04.2.0 1.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang Orang	7.300.000,00
1.06.04.2.0 1.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	5.540.500,00
1.06.04.2.0 1.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.048.500,00
1.06.04.2.0 1.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	14.329.250,00
1.06.06.2.0 1.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000,00
1.06.06.2.0 1.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	35.297.250,00

Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026

5.1.3. Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya.

5.1.3.1. Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB

Estimasi Penerimaan Opsen PKB Tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00. Sesuai ketentuan hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Sehingga dari sumber Penerimaan Opsen PKB, dialokasikan sebesar Rp500.000.000,00 untuk penanganan jalan.

5.1.3.2. Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Estimasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Tahun 2026 sebesar Rp4.275.342.062,00. Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU), termasuk pembayaran ketersediaan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha.

Sehingga dari sumber Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Tahun 2026 sebesar Rp4.275.342.062,00 dialokasikan sebesar Rp427.534.206,20 untuk penyediaan atau pemeliharaan Infrastruktur PJU.

5.1.3.3. Hasil Penerimaan Pajak Rokok

Estimasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2026 sebesar Rp7.433.427.937,00. Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling rendah 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.

Sehingga untuk Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp743.342.793,70 dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk untuk mendukung perluasan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan.

5.1.3.4. Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

Estimasi Penerimaan PAT Tahun 2026 sebesar Rp50.000.000,00. Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan PAT dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu dialokasikan minimal Rp5.000.000,00 dari sumber Penerimaan PAT untuk pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Target Pembangunan Daerah

5.2.1. Pencapaian Visi dan Misi

Alokasi Anggaran Program Prioritas untuk pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025 – 2029 dalam tahun pelaksanaan 2026, diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.10
Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Target Pembangunan Daerah
Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Pagu Anggaran 2026
Visi: Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat			
Misi 1: Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri			
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.650.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Pagu Anggaran 2026
Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan	Produktivitas Ekonomi daerah meningkat	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	141.373.750,00
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	0,00
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	549.319.750,00
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.510.035.000,00
		Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	360.000.000,00
	Usaha Industri pengolahan meningkat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	120.000.000,00
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	150.000.000,00
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25.000.000,00
Misi 2: Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas			
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya	Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.500.000.000,00
		Pengelolaan Pendidikan	61.170.028.587,00
	Kualitas Kesehatan Meningkat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	34.399.965.250,00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	615.000.000,00
		Pengendalian penduduk	77.027.500,00
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	56.366.250,00
	Daya Beli Masyarakat meningkat	Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Kabupaten/Kota	610.000.000,00
	Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat	Pengembangan Kebudayaan	1.128.800.000,00
		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	901.423.150,00
	Misi 3: Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis		
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis	Kerukunan Hidup masyarakat meningkat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	600.000.000,00
	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	235.698.500,00
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	125.611.000,00
Misi 4: Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan			
Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Penduduk miskin menurun	Perlindungan dan Jaminan Sosial	58.851.250,00
		Rehabilitasi Sosial	223.183.500,00
		Pengembangan Perumahan	1.116.305.000,00
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.510.035.000,00

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Pagu Anggaran 2026
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	549.319.750,00
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.200.000.000,00
	Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat	Penyelenggaraan Jalan	6.935.000.000,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.840.000.000,00
		Penataan Bangunan Gedung	1.680.000.000,00
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	759.437.500,00
		Pengelolaan Pelayaran	3.943.600.000,00
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.000.000,00
	Ketahanan Pangan Daerah meningkat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	230.000.000,00
		Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	180.000.000,00
	Pengangguran Menurun	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	402.075.625,00
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing			
Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat	Aplikasi Informatika	74.850.000,00
		Pencatatan Sipil	73.600.000,00
		Pendaftaran Penduduk	173.362.000,00
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.019.050.000,00
		Pelayanan Penanaman Modal	101.600.000,00
	1) Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.844.623.000,00
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	777.329.500,00
		Pengelolaan Keuangan Daerah	8.249.725.250,00
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	641.682.500,00
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	943.354.500,00
		Penyelenggaraan Pengawasan	2.337.084.795,00

5.2.2. Pelaksanaan Arah Kebijakan Daerah

Tabel 5.11
Pelaksanaan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2026

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat	- Penataan Pasar Langgur dan Terminal Langgur	
Membangun simpul-simpul ekonomi baru, di antaranya: - Pengembangan landmark sebagai Griya UMKM, dan - Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur	- Penataan Landmark Kota Langgur sebagai Pusat Gerai UMKM	
Memfasilitasi usaha mikro, pemberdayaan usaha dan penguatan Koperasi Merah Putih	- Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal. - Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak - Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar - Penguatan kapasitas SDM pengelola koperasi merah putih dan pelaku UMKM serta peningkatan kualitas pencari kerja sesuai pasar tenaga kerja lokal	
Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenitas dan aktivitas serta mendukung penataan objek wisata eksisting.	Pembangunan Pantai Ngjar Varat sebagai obyek wisata baru yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan daya tarik wisata obyek wisata eksisting	
Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut	Pembangunan Pusat Pelelangan Rumput Laut yang didukung fasilitas Gudang Penyimpanan yang memadai di Kelurahan Ohoijang-Watdek	
Memberikan kemudahan berinvestasi.	- Peningkatan Pelayanan Perizinan - Promosi dan Insentif Penanaman Modal	
Mengembangkan kompetensi guru	Pelatihan, Pendidikan lanjutan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan	
Memperluas Jangkauan Layanan Pendidikan gratis termasuk pendidikan Kejar Paket	- Peningkatan kualitas dan akses Pendidikan melalui pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana Pendidikan - Peningkatan angka partisipasi sekolah, mendorong penyelesaian Anak Tidak Sekolah dengan berbagai program yang bersinergi dengan stakeholders. Berkolaborasi dalam penyediaan sekolah rakyat untuk mencapai partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun. Perbaiki sistem pendidikan dan peningkatan pelayanan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat	
Menempatkan guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga	- Penataan Distribusi guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah	- Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah	
Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Pengelolaan Kurikulum Pendidikan	
Memperkuat promosi dan pencegahan	Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis pada masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat	
Menambah dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu	
Memperluas layanan kesehatan yang berkualitas	peningkatan keselamatan ibu dan anak menuju kematian ibu dan bayi yang semakin menurun,	
Memfasilitasi penyediaan jaringan IT untuk pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh	
Melakukan pencegahan dan penanganan penyakit TB, DBD, Malaria, dan penyakit menular serta tidak menular	Peningkatan kualitas lingkungan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular menuju eliminasi yang ditetapkan	
Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis.	
Kolaborasi pencegahan dan penanganan stunting	Pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting	
Memberikan Asupan Gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, Bayi dan anak Baduta		
Memperluas pemanfaatan Jaminan Kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda).	Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);	
Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok	Operasi Pasar dan Pasar Murah	
Menyelenggarakan Festival Budaya Kei	Festival Budaya dan Pagelaran Seni Tradisional	
Kolaborasi penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar serta Merawat Situs Warisan Leluhur	Lokakarya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei	
Membangun Harmoni ain ni ain melalui gelar Tea Bel (Pela)		
Melestarikan Khasana Budaya Kei	- Berbahasa Kei Setiap Hari Jumat. - Penggunaan Pakaian Adat pada setiap hari jumat, dan pada hari-hari yang ditentukan	
Memfasilitasi urusan keagamaan	Bantuan keagamaan, fasilitasi pembinaan umat.	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
Antisipasi dan cegah dini potensi konflik	Koordinasi cegah dini konflik (Kominda)	
Membina masyarakat untuk memiliki karakter dan jati diri kebangsaan	Pembangunan karakter pemuda	
Memantapkan peran partai politik dalam pembangunan	Fasilitas Peran Partai Politik	
Kolaborasi AKA-TNI-POLRI dalam Penanganan Konflik	Koordinasi Forkopimda	
Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif.	Pelayanan Penegakkan Peraturan Daerah	
Memberikan bantuan sosial adaptif	Koordinasi dan dukungan pendanaan untuk perluasan bantuan sosial	
Menangani PMKS secara adaptif	Perbaiki sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)	
Menyediakan rumah layak huni	Pembangunan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana alam	
Memberdayakan Nelayan kecil dan Pembudidaya	Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak	
Memberdayakan Petani dan Peternak		
Meremajakan kelapa dan Pala.	Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar	
Membangun dan memelihara Infrastruktur dasar, Infrastruktur pemerintah dan infrastruktur ekonomi secara merata sesuai kebutuhan	- Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan kepada ohoi yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik - Pembangunan taman kawasan pemerintahan daerah (Bundaran dan Gapura Kawasan)	
Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dokumen penataan ruang.	Penyiapan Peta Dasar RDTR Kota Langgur	
Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal	Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui: - penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, - pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan - penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan;	
Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air	Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air, terutama sumber air kebutuhan masyarakat seperti air Evu dan lainnya	
Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve'e Kesyang)	Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve'e Kesyang) sesuai potensi ohoi melalui kolaborasi dengan ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal	
Menjaga kualitas lingkungan hidup	Menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan lokal. Kualitas air, udara dan tutupan lahan yang baik akan mendorong	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
	peningkatan kesuburan lahan pertanian dan dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian	
Memberikan pelatihan vokasional bagi pencari kerja	Kerja sama pelatihan kepada pencari kerja	
Memperluas cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Koordinasi antarpihak untuk perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan	
Melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif	Penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif	
Membangun Infrastruktur TIK yang memadai	Peningkatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik	
Meningkatkan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik	Peningkatan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik	
Memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem Jemput Bola	Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui sistem Jemput Bola	
Mendorong PD berinovasi.	Peningkatan daya inovasi perangkat daerah	
Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Nasional dan Provinsi. Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	
Mengelola informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
Mempertahankan Opini BPK WTP	Melaksanakan tertib administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah	
Memantapkan tatakelola anggaran, perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah	Pelaksanaan perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah	
Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	Penguatan keuangan daerah yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat sinergitas pembangunan Nasional dan Provinsi	
Membangun Kemitraan pembangunan daerah		
Membangun kemitraan pembiayaan pembangunan	Peningkatan Kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan	
Membangun Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Peningkatan Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	

5.3. Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional

Tabel 5.12
Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2026

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150.000.000,00
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	7.362.000.000,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	0,00
KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit	6.350.000.000,00
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.000.000.000,00
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	350.000.000,00
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	789.694.590,00
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	602.000.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	300.000.000,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa	1.250.000.000,00
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	520.000.000,00

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	450.000.000,00
			Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000,00
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	685.000.000,00
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	630.000.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	0,00
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	424.999.875,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	65.524.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	75.000.000,00
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan	105.698.500,00
			Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0,00
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	0,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0,00

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	28.813.750,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	17.512.500,00
TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
			Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
		Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data	Program Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada	

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
	kependudukan berbasis digital		Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Program Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
	Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Pelayaran	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			Penyediaan Akses Internet	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi	
			Dalam Pengembangan Ekonomi	
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UmkM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
			UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Pengawasan Penanaman Modal	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Seleksi Atlet Daerah	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi	Program Penyelenggaraan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
	lingkungan Pemerintah Daerah	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	
			Pengembangan Cagar Budaya	
PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Program Pengelolaan Arsip	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Pengawasan Ekstraksi Garam	
PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
			Pengembangan Pendidikan	
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
			Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
		Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026
			yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diukur melalui seperangkat indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Pembangunan yang ditetapkan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD, maka ditetapkan indikator kinerja tujuan RPJMD sebagai IKU dengan target Tahun 2026, sebagai berikut.

Tabel 6.1
IKU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026

No	IKU	Satuan	Realisasi 2024	2026
1	Indeks Gini	Nilai	0,248	0,246
2	IPM	Nilai	70,58	71,59
3	Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum	Nilai	n.a	68,00
4	Tingkat Kemiskinan	%	21,22	19,11
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Kategori	49,28/C	55,15/CC

6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah sesuai RPJMD untuk Tahun pelaksanaan 2026 sebagai berikut.

Tabel 6.2
IKD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	2026
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	49,63
2	Persentase Ohoi Akses Listrik	%	96
3	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum	Persen	96
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	78,26
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	72,00
6	Indeks Risiko Bencana	Nilai	172,06
7	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,62
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.03
9	Kepadatan penduduk	Orang/km ²	125
10	Indeks Pembangunan Wilayah Perbatasan	Nilai	0,5979
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Persentase Penurunan Penduduk Miskin	%	5,23
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	57,79
3	Indeks Pendidikan	Nilai	0,6930
4	Indeks Kesehatan	Nilai	0,7901
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,36
6	Prevalensi Stunting	%	13,57

No	Indikator	Satuan	2026
7	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	1
8	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	%	100
9	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Succes Rate</i>)	%	82,50
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,97
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98
13	Kemampuan Literasi SD/MI	Nilai	48,71
14	Kemampuan Numerasi SD/MI	Nilai	47,00
15	Kemampuan Literasi SMP/MTS	Nilai	63,67
16	Kemampuan Numerasi SMP/MTS	Nilai	59,29
17	Tingkat Kemiskinan	%	19,11
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,68
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	%	54,68
20	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	65,50
21	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96,84
22	Indeks Kabupaten Layak Anak	Nilai	627,8
23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	64,0
24	Indeks Literasi Digital	Nilai	68
25	Persentase pekerja informal	%	58,00
26	Indeks Kerukunan Hidup antarumat beragama	Nilai	100
27	Indeks Pembangunan Budaya	Nilai	65,0
28	Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah	Nilai	65,0
29	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	64,0
30	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	64,00
31	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,495
32	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Nilai	62,0
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka Ketergantungan	%	47,01
2	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,66
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,02
4	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	6,94
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Angka	1.120
6	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	2,10
7	PDRB Perkapita (Juta)	Rp	38,16
8	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,75
9	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,00
10	Proporsi PDRB sektor Sekunder dan tersier terhadap Total Nilai PDRB (%)	%	70,50
11	Tingkat Inflasi	%	2,0-2,5
12	Indeks Daya Saing Daerah	%	3,47
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	55,15/CC
14	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	64,00
15	Luasan Kawasan Pemukiman Sehat	Ha	12,00
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,00
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	26,50
19	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	40,18

No	Indikator	Satuan	2026
20	Persentase Ohoi Akses Telepon Seluler/Internet	Nilai	84
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Triliun Rp	1,87
22	Persentase Desa Mandiri	%	7,89
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,29
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	%	46,00
25	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	> 100
26	NTPi	Nilai	> 100
27	NTOP	Nilai	> 100
28	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	> 100
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Tingkat Penataan Hukum Daerah	%	80
2	Indeks SPBE	Nilai	2,50
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,25/ B-
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	74,12
5	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Nilai	3,75
6	Persentase Penegakan Perda	%	100
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%	65,00
8	Indeks Rasa Aman	Nilai	63,00
9	Indeks Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	69,00
10	Opini BPK	Kategori	WTP
12	Nilai LPPD	Nilai	2,75/S
13	Nilai AKIP	Nilai	71,45/ BB
14	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Nilai	76,00

6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK menurut Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 6.3
IKK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
A	PENDIDIKAN		
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	74,89
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,60
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	32,85
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	48,71
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	47,00
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,67
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	59,29
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	69,46
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	43,66
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	%	67,30
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	%	71,92

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	%	70,29
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	%	75,96
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	%	56,97
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	%	61,76
B	KESEHATAN		
1	Jumlah Kematian Ibu	Angka	2
2	Prevalensi Stunting	%	13
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	100
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	100
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	10
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	40
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	15
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	85
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	65
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	10
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	2
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	10
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	4,35
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100
E7	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Angka	2
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	30
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
F	SOSIAL		
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	25
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	20
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	10
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	15

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	70
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Bulan	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
A	TENAGA KERJA		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,5
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	50
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	3,27
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	3,09
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,84
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,4950
3	Persentase ARG Daerah	%	3,0
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100
C	PANGAN		
1	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	0
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai (0-100)	73
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	14,58

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	87,50
D	PERTANAHAN		
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	ha	-
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	ha	-
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Ha	-
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Ha	-
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi		-
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Ha	-
7	Ditetapkan Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Ha	-
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	-
E	LINGKUNGAN HIDUP		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	78,26
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Nilai	50,01
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Nilai	100
F	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	83
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	100
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Angka	-
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	100
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	-
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	-
3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	-
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga emasyarakatatan Desa	%	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	-
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	3,00
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	-
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	-
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	-
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	65,50
I	PERHUBUNGAN		
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	100
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	85
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100
J	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100
K	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	6
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	34.86
5	Pertumbuhan Wirausaha		3,0
L	PENANAMAN MODAL		
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	2
M	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	15
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	12
N	STATISTIK		
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	%	2,01
O	PERSANDIAN		
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	60
P	Kebudayaan		
3	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	90
4	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	30
5	Persentase Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	20
Q	Perpustakaan		
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	75

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0,37
R	KEARSIPAN		
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70
S	Pariwisata		
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	2,5
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	3,8
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	2,5
T	PERTANIAN		
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	4.5
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	4.5
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1.7
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	1.5
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	100
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100
T	PERDAGANGAN		
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	7
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	40
U	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Produksi Perikanan Tangkap	Nilai	99.120,78
2	Produksi Perikanan Budidaya	Nilai	51.592,98
V	Perindustrian		
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: (1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota)		1,66
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	2,5
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan.	%	4,08
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik'	%	63,33
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini		70
V	Perencanaan		
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100
W	Keuangan		
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	30
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	7,0

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	-
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	-
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-
X	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	-
Y	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	100
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah		50
Z	FUNGSI PENGAWASAN		
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
3	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	1,5
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	100
AA	Fungsi Pengadaan		
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	100
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	%	100
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3
AB	Sekretariat DPRD		
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Kategori	Tepat
3	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	80
AC	Pelayanan Publik		
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	83

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2029. RKPD Tahun 2026 adalah penjabaran Tahun kedua, pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029. Hal ini berarti, RKPD Tahun 2026 merupakan tahun strategis mengakselerasi kebijakan pembangunan tahunan guna mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Tahun 2025–2029.

Sebagai penjabaran RPJMD, RKPD Tahun 2026 disusun dengan menetapkan prioritas daerah. Prioritas pembangunan dirumuskan sesuai dengan analisis permasalahan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, telaah terhadap kebijakan pusat dan provinsi serta dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah.

Implementasi prioritas daerah adalah program pembangunan daerah beserta kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Termasuk dalam hal ini, agenda kerja prioritas yang mengimplementasikan peta jalan pembangunan jangka menengah.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026, dalam hubungan dengan pencapaian target kinerja dan perwujudan visi dan misi sesuai RPJMD Tahun 2025–2029, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu:

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antarperangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai kebermanfaatan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan beserta penyerapan anggaran berdasarkan kaidah dan pendekatan **Good Governance** yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat serta akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara guna mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis dan berkeadilan.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

REKAPITULASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. MALUKU TENGGARA TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
	DINAS PENDIDIKAN			182.429.528.587,00		143.770.000.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			182.429.528.587,00		143.770.000.000,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			182.429.528.587,00		143.770.000.000,00	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	116.765.000.000,00		117.570.000.000,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	500.000.000,00		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	113.600.000.000,00		114.125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1405 Orang/bulan	113.500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	85.000.000,00		95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	201 Laporan	85.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	350.000.000,00		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	260	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	7 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	900.000.000,00		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	380.000.000,00		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	180.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	550.000.000,00		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	400.000.000,00		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		-	61.170.028.587,00		22.700.000.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		-	32.377.295.000,00		22.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2.862.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	585.900.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	400.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	1.888.525.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	872.440.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Pertengkapan Sekolah	Jumlah Pertengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	700.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	145 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	580 Orang	2.600.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	145 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	145 Satuan Pendidikan	11.000.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	145 Orang	350.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	2.055.450.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.158.222.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	145 Orang	350.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	145 Konten Digital	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	145 Orang	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	33 Komunitas	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17 Ruang	6.312.480.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.628.104.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	800.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	23.492.733.587,00		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	4.500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.725.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1.411.125.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.481.681.250,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.280.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.344.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	900.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	945.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	350.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	51 Satuan Pendidikan	76.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan	6.653.568.587,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.986.247.016,35	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	51 Orang	147.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	51 Orang	76.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	51 Orang	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	255.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	51 Komunitas	85.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	76.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	3.531.540.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.708.117.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		-	4.050.000.000,00		4.252.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	30 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	214 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	249 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	187 Orang	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	187 Orang	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	219 Peserta didik	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	187 Orang	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	1.250.000.000,00		1.312.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	31 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	130 Orang	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	13 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		-	487.500.000,00		511.875.000,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		-	487.500.000,00		511.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2500 Buku	337.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		-	3.500.000.000,00		3.675.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	3.500.000.000,00		3.675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	3.500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		-	507.000.000,00		532.350.000,00	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	507.000.000,00		532.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06.2.01.0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	357 Orang	357.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	DINAS KESEHATAN			120.370.665.366,00		126.389.198.634,30	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			120.370.665.366,00		126.389.198.634,30	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			120.370.665.366,00		126.389.198.634,30	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	84.620.000.000,00		88.851.000.000,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	300.000.000,00		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	80.100.000.000,00		84.105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000	80.000.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	150.000.000,00		157.500.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	100.000.000,00		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	800.000.000,00		840.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	1.870.000.000,00		1.963.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	950.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	997.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	920.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	966.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	300.000.000,00		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	1.000.000.000,00		1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	550.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.500.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	34.399.965.250,00		36.119.963.512,50	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	15.347.442.000,00		16.114.814.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit	6.350.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Elat	6.667.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	1.650.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.732.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	1.850.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.942.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Unit	3.378.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.546.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	21 Unit	794.442.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.164.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	21 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	200 Keluarga	125.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	10.977.523.250,00		11.526.399.412,50	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	312.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63 Orang	290.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	130.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21 Orang	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	90.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	140.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	280.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	315.523.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.299.412,50	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	6.050.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.352.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	21 Orang	130.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	100 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	1.300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.365.000.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	375.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	65.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	200.000.000,00		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	7.875.000.000,00		8.268.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21 Unit	7.625.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.006.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	DINAS KESEHATAN
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		-	615.000.000,00		645.750.000,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		-	565.000.000,00		593.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		-	325.000.000,00		341.250.000,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		-	275.000.000,00		288.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 Dokumen	275.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	410.700.116,00		431.235.121,80	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	275.000.000,00		288.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	275.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	135.700.116,00		142.485.121,80	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	135.700.116,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.485.121,80	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK			1.682.938.590,00		1.767.085.519,50	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.682.938.590,00		1.767.085.519,50	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.682.938.590,00		1.767.085.519,50	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.682.938.590,00		1.767.085.519,50	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.682.938.590,00		1.767.085.519,50	PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	789.694.590,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	829.179.319,50	PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	893.244.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	937.906.200,00	PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK
	PUSKESMAS KOLSER			1.416.502.935,00		1.487.328.081,75	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.416.502.935,00		1.487.328.081,75	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.416.502.935,00		1.487.328.081,75	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.416.502.935,00		1.487.328.081,75	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.416.502.935,00		1.487.328.081,75	PUSKESMAS KOLSER
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	527.404.234,50	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	553.774.446,23	PUSKESMAS KOLSER
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	889.098.700,50	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	933.553.635,53	PUSKESMAS KOLSER
	PUSKESMAS IBRA			1.008.550.250,00		1.058.977.762,50	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.008.550.250,00		1.058.977.762,50	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.008.550.250,00		1.058.977.762,50	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.008.550.250,00		1.058.977.762,50	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.008.550.250,00		1.058.977.762,50	PUSKESMAS IBRA
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	260.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	273.000.000,00	PUSKESMAS IBRA
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	748.550.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	785.977.762,50	PUSKESMAS IBRA
	PUSKESMAS DEBUT			1.252.723.082,00		1.315.359.236,10	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.252.723.082,00		1.315.359.236,10	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.252.723.082,00		1.315.359.236,10	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.252.723.082,00		1.315.359.236,10	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.252.723.082,00		1.315.359.236,10	PUSKESMAS DEBUT
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	422.999.582,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	444.149.561,10	PUSKESMAS DEBUT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	829.723.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	871.209.675,00	PUSKESMAS DEBUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
	PUSKESMAS RUMAT			1.668.102.000,00		1.751.507.100,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.668.102.000,00		1.751.507.100,00	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.668.102.000,00		1.751.507.100,00	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.668.102.000,00		1.751.507.100,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.668.102.000,00		1.751.507.100,00	PUSKESMAS RUMAT
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	518.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	543.900.000,00	PUSKESMAS RUMAT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.150.102.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.207.607.100,00	PUSKESMAS RUMAT
	PUSKESMAS DANAR			1.292.224.000,00		1.356.835.200,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.292.224.000,00		1.356.835.200,00	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.292.224.000,00		1.356.835.200,00	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.292.224.000,00		1.356.835.200,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.292.224.000,00		1.356.835.200,00	PUSKESMAS DANAR
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	351.782.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	369.371.100,00	PUSKESMAS DANAR
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	940.442.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	987.464.100,00	PUSKESMAS DANAR
	PUSKESMAS OHOIRA			1.474.239.364,00		1.547.951.332,20	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.474.239.364,00		1.547.951.332,20	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.474.239.364,00		1.547.951.332,20	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.474.239.364,00		1.547.951.332,20	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.474.239.364,00		1.547.951.332,20	PUSKESMAS OHOIRA
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	359.049.364,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Semua Kel/Desa	377.001.832,20	PUSKESMAS OHOIRA
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	1.115.190.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Semua Kel/Desa	1.170.949.500,00	PUSKESMAS OHOIRA
	PUSKESMAS ELAT			2.016.857.375,00		2.117.700.243,75	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.016.857.375,00		2.117.700.243,75	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.016.857.375,00		2.117.700.243,75	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	2.016.857.375,00		2.117.700.243,75	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	2.016.857.375,00		2.117.700.243,75	PUSKESMAS ELAT
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	507.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	532.350.000,00	PUSKESMAS ELAT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.509.857.375,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	1.585.350.243,75	PUSKESMAS ELAT
	PUSKESMAS WATSIN			1.727.279.325,00		1.813.643.291,25	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.727.279.325,00		1.813.643.291,25	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.727.279.325,00		1.813.643.291,25	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.727.279.325,00		1.813.643.291,25	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.727.279.325,00		1.813.643.291,25	PUSKESMAS WATSIN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	428.057.950,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	449.460.847,50	PUSKESMAS WATSIN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.299.221.375,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	1.364.182.443,75	PUSKESMAS WATSIN
	PUSKESMAS OHOIEL			1.097.435.816,00		1.152.307.606,80	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.097.435.816,00		1.152.307.606,80	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.097.435.816,00		1.152.307.606,80	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.097.435.816,00		1.152.307.606,80	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.097.435.816,00		1.152.307.606,80	PUSKESMAS OHOIEL
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	208.428.191,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	218.849.600,55	PUSKESMAS OHOIEL
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	889.007.625,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	933.458.006,25	PUSKESMAS OHOIEL
	PUSKESMAS MATAHOLAT			950.694.807,00		998.229.547,35	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			950.694.807,00		998.229.547,35	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			950.694.807,00		998.229.547,35	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	950.694.807,00		998.229.547,35	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	950.694.807,00		998.229.547,35	PUSKESMAS MATAHOLAT
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	102.293.057,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	107.407.709,85	PUSKESMAS MATAHOLAT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	848.401.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	890.821.837,50	PUSKESMAS MATAHOLAT
	PUSKESMAS MUN			1.615.406.092,00		1.696.176.396,60	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.615.406.092,00		1.696.176.396,60	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.615.406.092,00		1.696.176.396,60	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.615.406.092,00		1.696.176.396,60	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.615.406.092,00		1.696.176.396,60	PUSKESMAS MUN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	329.022.092,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Barat, Semua Kel/Desa	345.473.196,60	PUSKESMAS MUN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.286.384.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Barat, Semua Kel/Desa	1.350.703.200,00	PUSKESMAS MUN
	PUSKESMAS HOOR			1.273.465.662,50		1.337.138.945,63	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.273.465.662,50		1.337.138.945,63	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.273.465.662,50		1.337.138.945,63	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.273.465.662,50		1.337.138.945,63	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.273.465.662,50		1.337.138.945,63	PUSKESMAS HOOR
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	104.783.600,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Barat, Semua Kel/Desa	110.022.780,00	PUSKESMAS HOOR
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.168.682.062,50	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Barat, Semua Kel/Desa	1.227.116.165,63	PUSKESMAS HOOR
	PUSKESMAS WEDUAR			1.504.163.068,00		1.579.371.221,40	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.504.163.068,00		1.579.371.221,40	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.504.163.068,00		1.579.371.221,40	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.504.163.068,00		1.579.371.221,40	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.504.163.068,00		1.579.371.221,40	PUSKESMAS WEDUAR
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	301.776.068,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	316.864.871,40	PUSKESMAS WEDUAR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.202.387.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	1.262.506.350,00	PUSKESMAS WEDUAR
PUSKESMAS LARAT KEI				1.157.926.240,00		1.215.822.552,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.157.926.240,00		1.215.822.552,00	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.157.926.240,00		1.215.822.552,00	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.157.926.240,00		1.215.822.552,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.157.926.240,00		1.215.822.552,00	PUSKESMAS LARAT KEI
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	188.455.115,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	197.877.870,75	PUSKESMAS LARAT KEI
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	969.471.125,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	1.017.944.681,25	PUSKESMAS LARAT KEI
PUSKESMAS FER				1.398.035.000,00		1.467.936.750,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.398.035.000,00		1.467.936.750,00	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.398.035.000,00		1.467.936.750,00	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.398.035.000,00		1.467.936.750,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.398.035.000,00		1.467.936.750,00	PUSKESMAS FER
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	129.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	135.660.000,00	PUSKESMAS FER
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.268.835.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	1.332.276.750,00	PUSKESMAS FER
PUSKESMAS HOLLAT				1.532.945.614,50		1.609.592.895,23	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.532.945.614,50		1.609.592.895,23	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.532.945.614,50		1.609.592.895,23	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.532.945.614,50		1.609.592.895,23	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.532.945.614,50		1.609.592.895,23	PUSKESMAS HOLLAT
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	370.759.302,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	389.297.267,10	PUSKESMAS HOLLAT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.162.186.312,50	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	1.220.295.628,13	PUSKESMAS HOLLAT
PUSKESMAS BANDA ELY				1.737.434.000,00		1.824.305.700,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.737.434.000,00		1.824.305.700,00	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.737.434.000,00		1.824.305.700,00	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.737.434.000,00		1.824.305.700,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.737.434.000,00		1.824.305.700,00	PUSKESMAS BANDA ELY
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	392.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	412.125.000,00	PUSKESMAS BANDA ELY
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	1.344.934.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	1.412.180.700,00	PUSKESMAS BANDA ELY
	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR			21.272.411.000,00		22.336.031.550,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.272.411.000,00		22.336.031.550,00	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			21.272.411.000,00		22.336.031.550,00	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	5.440.588.000,00		5.712.617.400,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	427.484.000,00		448.858.200,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	18.844.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	19.786.200,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	18.844.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	19.786.200,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.076.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	78.829.800,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18.844.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	19.786.200,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	295.876.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	310.669.800,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	3.490.844.000,00		3.665.386.200,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.472.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	3.645.600.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.844.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	19.786.200,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	60.000.000,00		63.000.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	63.000.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	1.135.860.000,00		1.192.653.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.135.860.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	1.192.653.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	326.400.000,00		342.720.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	326.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	342.720.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	15.831.823.000,00		16.623.414.150,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	14.104.823.000,00		14.810.064.150,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	9 Unit	2.304.469.998,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	2.419.693.497,90	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	328.710.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	345.145.762,50	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5 Unit	674.472.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	708.195.600,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	2.093.958.392,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	2.198.656.311,60	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	10 Unit	510.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	535.500.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					0,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	8.193.212.360,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	8.602.872.978,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.727.000.000,00		1.813.350.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	28.350.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	1.050.000.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	700.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	735.000.000,00	RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR
	PUSKESMAS NGILNGOF			1.123.920.125,00		1.180.116.131,25	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.123.920.125,00		1.180.116.131,25	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.123.920.125,00		1.180.116.131,25	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.123.920.125,00		1.180.116.131,25	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.123.920.125,00		1.180.116.131,25	PUSKESMAS NGILNGOF
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	189.000.000,00	PUSKESMAS NGILNGOF
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	943.920.125,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Ngilngof	991.116.131,25	PUSKESMAS NGILNGOF
	PUSKESMAS WAB			1.319.581.500,00		1.385.560.575,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.319.581.500,00		1.385.560.575,00	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.319.581.500,00		1.385.560.575,00	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.319.581.500,00		1.385.560.575,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	1.319.581.500,00		1.385.560.575,00	PUSKESMAS WAB
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	223.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Semua Kel/Desa	234.150.000,00	PUSKESMAS WAB

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	1.096.581.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Semua Kel/Desa	1.151.410.575,00	PUSKESMAS WAB
	PUSKESMAS WAIN			860.232.750,00		903.244.387,50	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			860.232.750,00		903.244.387,50	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			860.232.750,00		903.244.387,50	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	860.232.750,00		903.244.387,50	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	860.232.750,00		903.244.387,50	PUSKESMAS WAIN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	860.232.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	903.244.387,50	PUSKESMAS WAIN
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			21.811.660.358,00		22.902.243.375,90	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.811.660.358,00		22.902.243.375,90	
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			21.811.660.358,00		22.902.243.375,90	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	4.533.660.358,00		4.760.343.375,90	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	76.000.000,00		79.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	56.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	3.702.500.000,00		3.887.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	3.615.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.795.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	75.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.275.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	336.160.358,00		352.968.375,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	6 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	45.960.358,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.258.375,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	10.600.000,00		11.130.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.130.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	200.400.000,00		210.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	155.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	208.000.000,00		218.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	42.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	98.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-	2.040.000.000,00		2.142.000.000,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	2.040.000.000,00		2.142.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,05 KM	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,30 KM	1.500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	3 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		-	2.840.000.000,00		2.982.000.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		-	2.840.000.000,00		2.982.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	60 Liter/Detik	700.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Desa	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	60 Liter/Detik	1.250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.312.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03.2.01.0032	Pertuasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh pertuasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	70 SR	520.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	546.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	143.000.000,00		150.150.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	143.000.000,00		150.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	20 Rumah Tangga	59.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		-	200.000.000,00		210.000.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	200.000.000,00		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	100 M	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		-	1.160.000.000,00		1.218.000.000,00	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		-	1.160.000.000,00		1.218.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	70 Rumah Tangga	1.160.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.218.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		-	1.680.000.000,00		1.764.000.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		-	1.680.000.000,00		1.764.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	276.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	144.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		-	1.650.000.000,00		1.732.500.000,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		-	1.650.000.000,00		1.732.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	1.585.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.664.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		-	6.935.000.000,00		7.281.750.000,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		-	6.935.000.000,00		7.281.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	5 KM	160.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1,5 KM	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0,75 KM	2.325.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.441.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,75 KM	1.500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	1,5 KM	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	7 Meter	1.800.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.890.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		-	130.000.000,00		136.500.000,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		-	90.000.000,00		94.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	90.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		-	40.000.000,00		42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	8 Paket Pekerjaan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		-	500.000.000,00		525.000.000,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	450.000.000,00		472.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	450.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			5.475.838.520,00		5.749.630.446,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.685.732.520,00		4.920.019.146,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			4.685.732.520,00		4.920.019.146,00	
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.474.427.645,00		2.598.149.027,25	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	45.082.500,00		47.336.625,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.310.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	17.125.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	23.772.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.961.125,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.970.346.620,00		2.068.863.951,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	1.911.566.620,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	2.007.144.951,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.280.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	52.794.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	8.925.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	4.800.000,00		5.040.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	5.040.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	170.016.275,00		178.517.088,75	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.280.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	5.544.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.987.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	50.386.875,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.510.025,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	43.585.526,25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	75.238.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.687,50	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	63.143.750,00		66.300.937,50	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	9.843.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	10.335.937,50	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	53.300.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	55.965.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	120.857.500,00		126.900.375,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.670.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	5.953.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	70.560.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.987.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	50.386.875,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100.181.000,00		105.190.050,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	63.900.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	67.095.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	15.880.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	16.674.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.401.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	21.421.050,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	1.116.305.000,00		1.172.120.250,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	46.305.000,00		48.620.250,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	24.255.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.467.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	22.050.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.152.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	1.070.000.000,00		1.123.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18 Unit Rumah	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	185.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Rumadian	194.250.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah	685.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	719.250.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		-	630.000.000,00		661.500.000,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	630.000.000,00		661.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	630.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		-	464.999.875,00		488.249.868,75	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		-	464.999.875,00		488.249.868,75	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Wakol	21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Lokasi	424.999.875,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Wakol	446.249.868,75	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			790.106.000,00		829.611.300,00	
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			790.106.000,00		829.611.300,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-	630.706.000,00		662.241.300,00	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	630.706.000,00		662.241.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	630.706.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	662.241.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		-	159.400.000,00		167.370.000,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		-	159.400.000,00		167.370.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	159.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.370.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			3.983.028.758,00		4.182.180.195,90	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.983.028.758,00		4.182.180.195,90	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.983.028.758,00		4.182.180.195,90	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	3.747.330.258,00		3.934.696.770,90	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	3.460.398.758,00		3.633.418.695,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	3.441.511.008,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.613.586.558,40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	18.887.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.832.137,50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	21.000.000,00		22.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	108.481.500,00		113.905.575,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.721.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.007.575,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.700.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.285.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	51.060.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.613.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	40.000.000,00		42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	77.450.000,00		81.322.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	22.450.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.572.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	55.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	40.000.000,00		42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	235.698.500,00		247.483.425,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	190.698.500,00		200.233.425,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	20 Orang	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	10 laporan	105.698.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.983.425,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	8 Laporan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		-	45.000.000,00		47.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 laporan	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			2.588.361.822,00		2.717.779.913,10	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.588.361.822,00		2.717.779.913,10	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.588.361.822,00		2.717.779.913,10	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.703.361.822,00		1.788.529.913,10	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.058.109.282,00		1.111.014.746,10	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	1.009.509.282,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	1.059.984.746,10	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	48.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	51.030.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	22.620.540,00		23.751.567,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.620.540,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	23.751.567,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	353.500.000,00		371.175.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	3.675.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	65.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	68.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	42.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	245.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	30.000.000,00		31.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	15.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	15.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	95.000.000,00		99.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	31.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	65.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	68.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	144.132.000,00		151.338.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.022.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	80.873.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	37.110.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	38.965.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	31.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		-	885.000.000,00		929.250.000,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	215.000.000,00		225.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0022	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		-	80.000.000,00		84.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02.0005	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran		-	30.000.000,00		31.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		-	60.000.000,00		63.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.0006	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	100 Orang	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		-	500.000.000,00		525.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	525.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.209.488.868,00		4.419.963.311,40	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.209.488.868,00		4.419.963.311,40	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.209.488.868,00		4.419.963.311,40	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	3.313.214.618,00		3.478.875.348,90	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.651.443.918,00		2.784.016.113,90	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	2.607.643.918,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	2.738.026.113,90	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	43.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	45.990.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	274.483.200,00		288.207.360,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.693.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	5.978.437,50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	46.302.450,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	48.617.572,50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	37.004.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	38.854.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	185.483.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.757.150,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	138.750.000,00		145.687.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	83.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	87.937.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	55.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	57.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	85.240.000,00		89.502.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	57.960.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.040.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	31.542.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	163.297.500,00		171.462.375,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	123.325.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	129.491.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27.992.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	29.392.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	11.980.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	12.579.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		-	896.274.250,00		941.087.962,50	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		-	55.000.000,00		57.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	75 Orang	55.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		-	176.274.250,00		185.087.962,50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau	1 Kawasan	55.000.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.262,50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	65.524.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	68.800.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	55.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.537.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		-	255.000.000,00		267.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	75 Orang	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75 Orang	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		-	410.000.000,00		430.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	275.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	35 Lembaga	65.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	68.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	73.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL DAERAH			3.062.338.682,00		3.215.455.616,10	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.062.338.682,00		3.215.455.616,10	
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3.062.338.682,00		3.215.455.616,10	
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.676.192.932,00		2.810.002.578,60	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	4.181.000,00		4.390.050,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.181.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.390.050,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.216.917.732,00		2.327.763.618,60	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2.159.733.732,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.267.720.418,60	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.384.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.603.200,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.440.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	168.121.950,00		176.528.047,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.200.700,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.310.735,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.987.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.736.350,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.375.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.893.750,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.559.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.337.212,50	DINAS SOSIAL DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	20.000.000,00		21.000.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	138.187.500,00		145.096.875,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.075.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66.687.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.021.875,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	88.653.500,00		93.086.175,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.995.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.995.275,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.999.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.049.475,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	7.658.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.041.425,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi		-	40.131.250,00		42.137.812,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	40.131.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.137.812,50	DINAS SOSIAL DAERAH
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		-	28.813.750,00		30.254.437,50	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		-	28.813.750,00		30.254.437,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5565	28.813.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.254.437,50	DINAS SOSIAL DAERAH
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		-	223.183.500,00		234.342.675,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		-	111.668.500,00		117.251.925,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50.906.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.452.087,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.616.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.447.587,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9.145.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.602.250,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		-	111.515.000,00		117.090.750,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	975 Orang	86.106.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.411.300,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20.409.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.429.450,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		-	58.851.250,00		61.793.812,50	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		-	16.252.750,00		17.065.387,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	16.252.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.065.387,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	42.598.500,00		44.728.425,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	78.046	25.086.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.340.300,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.075 Orang	17.512.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.388.125,00	DINAS SOSIAL DAERAH
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		-	35.297.250,00		37.062.112,50	
1.06.06.2.01	Pertindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		-	35.297.250,00		37.062.112,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	35.297.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.062.112,50	DINAS SOSIAL DAERAH
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		-	40.000.000,00		42.000.000,00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	40.000.000,00		42.000.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			212.755.056.173,00		223.392.808.981,65	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			212.755.056.173,00		223.392.808.981,65	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.908.364.486,00		3.053.782.710,30	
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.113.080.986,00		2.218.735.035,30	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.113.080.986,00		2.218.735.035,30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 org/bln	2.113.080.986,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	2.218.735.035,30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		-	523.498.750,00		549.673.687,50	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		-	23.498.750,00		24.673.687,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	23.498.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	24.673.687,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	500.000.000,00		525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		-	114.495.000,00		120.219.750,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-	70.000.000,00		73.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50 Lembaga	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		-	44.495.000,00		46.719.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	44.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.719.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		-	129.310.750,00		135.776.287,50	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		-	34.188.500,00		35.897.925,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	34.188.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	35.897.925,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-	95.122.250,00		99.878.362,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	20 Lembaga	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	95.122.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	99.878.362,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		-	27.979.000,00		29.377.950,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	27.979.000,00		29.377.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	27.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.377.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			209.846.691.687,00		220.339.026.271,35	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
02.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	475.320.000,00		499.086.000,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	277.352.500,00		291.220.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	3.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	31.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.987.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	32.536.875,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	49.832.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	52.323.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	163.533.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Langgur	171.709.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	142.937.500,00		150.084.375,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	16.380.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.337.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	133.704.375,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	55.030.000,00		57.781.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	47.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.030.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	10.531.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		-	209.190.057.437,00		219.649.560.308,85	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		-	209.190.057.437,00		219.649.560.308,85	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 Dokumen	1.860.432.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.953.453.862,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	34.664.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.397.462,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	11 Dokumen	24.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.856.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	50 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen	64.667.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.900.875,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	192 Dokumen	207.041.510.937,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.393.586.483,85	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	11 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	192 Dokumen	54.157.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.865.375,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		-	181.314.250,00		190.379.962,50	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	181.314.250,00		190.379.962,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	24.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	36.814.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	38.654.962,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	120.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS KETAHANAN PANGAN				2.127.775.178,00		2.234.163.936,90	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.127.775.178,00		2.234.163.936,90	
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.127.775.178,00		2.234.163.936,90	
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.809.807.928,00		1.900.298.324,40	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.424.732.678,00		1.495.969.311,90	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	1.366.772.678,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.435.111.311,90	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	57.960.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.858.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	134.350.250,00		141.067.762,50	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.372.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.190.862,50	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.625.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.478.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.251.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	78.125.000,00		82.031.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	63.125.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.281.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	77.600.000,00		81.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.760.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.620.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	95.000.000,00		99.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		-	20.000.000,00		21.000.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	20.000.000,00		21.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		-	230.000.000,00		241.500.000,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		-	185.000.000,00		194.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 laporan	95.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		-	45.000.000,00		47.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		-	15.000.000,00		15.750.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		-	15.000.000,00		15.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		-	52.967.250,00		55.615.612,50	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		-	52.967.250,00		55.615.612,50	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	30.967.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.515.612,50	DINAS KETAHANAN PANGAN
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			8.337.672.356,00		8.754.555.973,80	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.337.672.356,00		8.754.555.973,80	
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			8.337.672.356,00		8.754.555.973,80	
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.712.672.356,00		2.848.305.973,80	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	80.000.000,00		84.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.932.000.000,00		2.028.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	1.920.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.016.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	232.000.000,00		243.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	34.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	130.000.000,00		136.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	90.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	142.000.000,00		149.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	196.672.356,00		206.505.973,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	55.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	91.672.356,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.255.973,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		-	95.000.000,00		99.750.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		-	45.000.000,00		47.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	5 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		-	180.000.000,00		189.000.000,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		-	180.000.000,00		189.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	8 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	11 Laporan	55.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		-	20.000.000,00		21.000.000,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		-	20.000.000,00		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		-	5.330.000.000,00		5.596.500.000,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		-	5.330.000.000,00		5.596.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	230.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	550.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0 Ton	4.550.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.777.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.498.354.721,00		2.623.272.457,05	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.498.354.721,00		2.623.272.457,05	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2.498.354.721,00		2.623.272.457,05	
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	2.246.211.068,00	2.358.521.621,40	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	1.850.764.568,00	1.943.302.796,40	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	1.850.764.568,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.943.302.796,40	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	123.696.500,00	129.881.325,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	63.382.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.551.625,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.426.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.647.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	52.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.532.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	0,00	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	120.000.000,00	126.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	151.750.000,00		159.337.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	105.070.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.323.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.050.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.202.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.976.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	4.605.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.835.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		-	173.362.000,00		182.030.100,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		-	173.362.000,00		182.030.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	9.825.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.316.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	159.687.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.671.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	3.850.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.042.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		-	73.600.000,00		77.280.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		-	73.600.000,00		77.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	73.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		-	4.650.403,00		4.882.923,15	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		-	4.650.403,00		4.882.923,15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8 Dokumen	4.650.403,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.882.923,15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		-	531.250,00		557.812,50	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan		-	531.250,00		557.812,50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	531.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.812,50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			470.089.750,00		493.594.237,50	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			470.089.750,00		493.594.237,50	
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			470.089.750,00		493.594.237,50	
02.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	305.860.500,00		321.153.525,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	118.716.750,00		124.652.587,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.443.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.715.937,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.860.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.103.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.175.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	74.913.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.658.650,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	112.200.000,00		117.810.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	74.943.750,00		78.690.937,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	59.943.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.940.937,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		-	77.027.500,00		80.878.875,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		-	77.027.500,00		80.878.875,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	77.027.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.878.875,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		-	56.366.250,00		59.184.562,50	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		-	56.366.250,00		59.184.562,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	56.366.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.184.562,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		-	30.835.500,00		32.377.275,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-	30.835.500,00		32.377.275,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	4 Kelompok	30.835.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.377.275,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PERHUBUNGAN				8.049.096.966,00		8.451.551.814,30	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.049.096.966,00		8.451.551.814,30	
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			8.049.096.966,00		8.451.551.814,30	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	3.346.059.466,00		3.513.362.439,30	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	76.268.000,00		80.081.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	76.268.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.081.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.297.814.466,00		2.412.705.189,30	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2.244.064.466,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.356.267.689,30	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.437.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	137.487.500,00		144.361.875,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	110.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	115.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	50 Orang	27.487.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.861.875,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	377.279.500,00		396.143.475,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.275.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.638.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46.962.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.310.625,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.787.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	266.292.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.606.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	121.250.000,00		127.312.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	53.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.437.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	67.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	125.100.000,00		131.355.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.100.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.955.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	210.860.000,00		221.403.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	143.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.990.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	17.060.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.913.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		-	759.437.500,00		797.409.375,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		-	187.500.000,00		196.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	187.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		-	452.900.000,00		475.545.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	52.900.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	55.545.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	400.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		-	85.660.000,00		89.943.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	85.660.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.943.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	0,00		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	33.377.500,00		35.046.375,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	33.377.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.046.375,00	DINAS PERHUBUNGAN
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		-	3.943.600.000,00		4.140.780.000,00	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		-	3.943.600.000,00		4.140.780.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2 Unit	1.642.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.724.940.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	504.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	529.830.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	1.796.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.886.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.346.687.512,00		3.514.021.887,60	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.346.687.512,00		3.514.021.887,60	
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.326.457.012,00		3.492.779.862,60	
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.232.557.012,00		2.344.184.862,60	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.995.425.762,00		2.095.197.050,10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	1.995.425.762,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	2.095.197.050,10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	147.516.250,00		154.892.062,50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.996.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	3.146.062,50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.330.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	32.896.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	23.625.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	75.165.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.923.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.525.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.301.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	45.400.000,00		47.670.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	15.120.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	31.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	32.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	44.215.000,00		46.425.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.705.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	36.440.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9.510.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	9.985.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		-	1.019.050.000,00		1.070.002.500,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	1.019.050.000,00		1.070.002.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10	934.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	980.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	25.050.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.302.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		-	74.850.000,00		78.592.500,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	74.850.000,00		78.592.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2 Perangkat Daerah	74.850.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	78.592.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			7.543.500,00		7.920.675,00	
02.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	7.543.500,00		7.920.675,00	
2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	7.543.500,00		7.920.675,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	7.543.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.920.675,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			12.687.000,00		13.321.350,00	
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-	12.687.000,00		13.321.350,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	12.687.000,00		13.321.350,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	12.687.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.321.350,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			2.518.721.878,00		2.644.657.971,90	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.518.721.878,00		2.644.657.971,90	
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.518.721.878,00		2.644.657.971,90	
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.985.541.378,00		2.084.818.446,90	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	7.785.000,00		8.174.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.785.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	8.174.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.600.799.378,00		1.680.839.346,90	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	1.593.299.378,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.672.964.346,90	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	7.875.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	195.559.500,00		205.337.475,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	5.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.457.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	39.330.375,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.153.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	22.211.175,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131.948.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	138.545.925,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	27.750.000,00		29.137.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	27.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	29.137.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	99.737.500,00		104.724.375,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	56.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.737.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	48.024.375,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	53.910.000,00		56.605.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.830.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	48.121.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8.080.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	8.484.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		-	270.926.250,00		284.472.562,50	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		-	270.926.250,00		284.472.562,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	270.926.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.472.562,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		-	20.880.750,00		21.924.787,50	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	20.880.750,00		21.924.787,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	5 Unit Usaha	20.880.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.924.787,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		-	99.999.750,00		104.999.737,50	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	99.999.750,00		104.999.737,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	99.999.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.999.737,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		-	141.373.750,00		148.442.437,50	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		-	141.373.750,00		148.442.437,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	9.914.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.410.225,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	25 Unit Usaha	20.839.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.881.737,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	43.077.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.231.375,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100 Unit Usaha	21.050.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.103.287,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	40 Orang	46.491.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.815.812,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				3.088.786.670,00		3.243.226.003,50	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.696.773.670,00		2.831.612.353,50	
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.696.773.670,00		2.831.612.353,50	
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.520.173.670,00		2.646.182.353,50	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.520.173.670,00		2.646.182.353,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	2.520.173.670,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.646.182.353,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		-	25.000.000,00		26.250.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	25.000.000,00		26.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		-	25.000.000,00 -		26.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		-	20.000.000,00		21.000.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	20.000.000,00		21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		-	101.600.000,00		106.680.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		-	101.600.000,00		106.680.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	31.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		-	30.000.000,00		31.500.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	30.000.000,00		31.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal		0	30 0	30.000.000,00 -	31.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	NON URUSAN			392.013.000,00		411.613.650,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			392.013.000,00		411.613.650,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	392.013.000,00		411.613.650,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	182.717.250,00		191.853.112,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.120.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.276.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.597.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.677.112,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	111.300.000,00		116.865.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	54.900.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.645.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	56.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.220.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	62.995.750,00		66.145.537,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	28.995.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.445.537,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi		-	35.000.000,00		36.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH			2.980.038.382,00		3.129.040.301,10	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.955.038.382,00		3.102.790.301,10	
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.955.038.382,00		3.102.790.301,10	
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.880.038.382,00		1.974.040.301,10	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	17.326.750,00		18.193.087,50	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	12.326.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.943.087,50	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.369.711.632,00		1.438.197.213,60	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	1.323.711.632,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.389.897.213,60	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	46.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	302.000.000,00		317.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	0,00		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	105.000.000,00		110.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	86.000.000,00		90.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		-	500.000.000,00		525.000.000,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		-	475.000.000,00		498.750.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	6 Orang	350.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	0 Orang	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	30 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	25.000.000,00		26.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Organisasi	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		-	575.000.000,00		603.750.000,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	110.000.000,00		115.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	16 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	60.000.000,00		63.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		-	350.000.000,00		367.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		-	55.000.000,00		57.750.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	25.000.000,00		26.250.000,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	25.000.000,00		26.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH			2.230.223.150,00		2.341.734.307,50	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.230.223.150,00		2.341.734.307,50	
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.230.223.150,00		2.341.734.307,50	
02.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	0,00		0,00	
2.22.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		-	0,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	0,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		-	1.128.800.000,00		1.185.240.000,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	415.000.000,00		435.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek	400.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15 Orang	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	225.000.000,00		236.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	225.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	236.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	488.800.000,00		513.240.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 Objek	388.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	408.240.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	12 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		-	50.000.000,00		52.500.000,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		-	150.000.000,00		157.500.000,00	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	150.000.000,00		157.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		-	901.423.150,00		946.494.307,50	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		-	175.000.000,00		183.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	50 Objek	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		-	726.423.150,00		762.744.307,50	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	50 Objek	650.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	682.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	50 Objek	76.423.150,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	80.244.307,50	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
X	NON URUSAN			0,00		0,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			0,00		0,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	0,00		0,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			2.567.399.065,00		2.695.769.018,25	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			390.000.000,00		409.500.000,00	
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			350.000.000,00		367.500.000,00	
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		-	300.000.000,00		315.000.000,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	200.000.000,00		210.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	9 Perpustakaan	70.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan Barat, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	150	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	100.000.000,00		105.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	6 Orang	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	8 Orang	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	3 Lokus	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		-	50.000.000,00		52.500.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			40.000.000,00		42.000.000,00	
2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	30 Instansi	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X	NON URUSAN			2.177.399.065,00		2.286.269.018,25	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.177.399.065,00		2.286.269.018,25	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.177.399.065,00		2.286.269.018,25	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	5.000.000,00		5.250.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Berita Acara	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.714.547.976,00		1.800.275.374,80	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	1.709.002.476,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.794.452.599,80	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 Dokumen	5.545.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.822.775,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	208.725.089,00		219.161.343,45	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.725.089,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	6.011.343,45	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	125.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	131.250.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	177.000.000,00		185.850.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	38.850.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	72.126.000,00		75.732.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	4.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	28.126.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	29.532.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	DINAS PERIKANAN			7.662.495.686,00		8.045.620.470,30	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.662.495.686,00		8.045.620.470,30	
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.662.495.686,00		8.045.620.470,30	
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	5.453.140.936,00		5.725.797.982,80	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	19.362.500,00		20.330.625,00	DINAS PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.350.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12.362.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.980.625,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	4.521.440.186,00		4.747.512.195,30	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82	4.460.335.186,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.683.351.945,30	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.105.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.160.250,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	389.248.750,00		408.711.187,50	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.887.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.181.875,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	77.690.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.574.762,50	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.959.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.956.950,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.395.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.664.750,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	280.317.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.332.850,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	201.125.000,00		211.181.250,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	43.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.937.500,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	157.375.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.243.750,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	177.412.500,00		186.283.125,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	128.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.400.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.412.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.883.125,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	144.552.000,00		151.779.600,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	82.300.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.415.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	13.126.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.782.300,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.126.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.582.300,00	DINAS PERIKANAN
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		-	549.319.750,00		576.785.737,50	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		-	80.000.000,00		84.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	420.000.000,00		441.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	80.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	22 Kelompok	85.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.250.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3 Unit	255.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.750.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		-	49.319.750,00		51.785.737,50	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	49.319.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.785.737,50	DINAS PERIKANAN
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		-	1.510.035.000,00		1.585.536.750,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		-	422.500.750,00		443.625.787,50	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	30 Kelompok	72.500.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.125.787,50	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	50 Kelompok	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	175.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.750.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Rekomendasi	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		-	1.037.534.250,00		1.089.410.962,50	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	180.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	600.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50 Unit	157.534.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.410.962,50	DINAS PERIKANAN
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		-	150.000.000,00		157.500.000,00	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		-	100.000.000,00		105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	4 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	DINAS PARIWISATA			3.730.285.845,00		3.916.800.137,25	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.730.285.845,00		3.916.800.137,25	
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.730.285.845,00		3.916.800.137,25	
03.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.512.985.845,00		2.638.635.137,25	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	45.000.000,00		47.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	47.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.000.085.845,00		2.100.090.137,25	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	2.000.085.845,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.090.137,25	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	25.000.000,00		26.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	238.400.000,00		250.320.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	36.750.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	33.600.000,00	DINAS PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.520.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	10.500.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	159.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.950.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	40.000.000,00		42.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	119.500.000,00		125.475.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	65.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.225.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	45.000.000,00		47.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	36.750.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	DINAS PARIWISATA
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		-	360.000.000,00		378.000.000,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		-	285.000.000,00		299.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	225.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	236.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-	75.000.000,00		78.750.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	DINAS PARIWISATA
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		-	415.000.000,00		435.750.000,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya		-	415.000.000,00		435.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	375.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.750.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PARIWISATA
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		-	117.300.000,00		123.165.000,00	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		-	117.300.000,00		123.165.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	67.300.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	70.665.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PARIWISATA
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		-	325.000.000,00		341.250.000,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		-	225.000.000,00		236.250.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	15 Orang	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		-	100.000.000,00		105.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PARIWISATA
DINAS PERTANIAN				6.771.679.232,00		7.110.263.193,60	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.771.679.232,00		7.110.263.193,60	
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			6.771.679.232,00		7.110.263.193,60	
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	5.121.679.232,00		5.377.763.193,60	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	4.051.679.232,00		4.254.263.193,60	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	4.001.679.232,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.201.763.193,60	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	125.000.000,00		131.250.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.250.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	170.000.000,00		178.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	100.000.000,00		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	180.000.000,00		189.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	295.000.000,00		309.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		-	150.000.000,00		157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		-	1.200.000.000,00		1.260.000.000,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		-	950.000.000,00		997.500.000,00	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	15000 Ton	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0004	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	50000 Setek	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	10000	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	10000	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	200.000.000,00		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2000 Ekor	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	150.000.000,00		157.500.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		-	150.000.000,00		157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		-	0,00		0,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		-	0,00		0,00	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PERTANIAN
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		-	200.000.000,00		210.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		-	200.000.000,00		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		-	100.000.000,00		105.000.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		-	100.000.000,00		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	8 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN			4.089.155.646,00		4.293.613.428,30	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.851.608.646,00		2.994.189.078,30	
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			2.851.608.646,00		2.994.189.078,30	
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.369.533.021,00		2.488.009.672,05	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	10.575.000,00		11.103.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.575.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.103.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.358.958.021,00		2.476.905.922,05	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.345.183.021,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	2.462.442.172,05	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.775.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	14.463.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		-	402.075.625,00		422.179.406,25	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		-	402.075.625,00		422.179.406,25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	5 Orang	402.075.625,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.179.406,25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		-	20.000.000,00		21.000.000,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		-	20.000.000,00		21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	15 Orang	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		-	60.000.000,00		63.000.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		-	10.000.000,00		10.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.237.547.000,00		1.299.424.350,00	
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.107.547.000,00		1.162.924.350,00	
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	357.547.000,00		375.424.350,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	194.697.000,00		204.431.850,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.575.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	3.753.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.920.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	27.216.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.202.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	26.462.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	140.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	30.500.000,00		32.025.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.025.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	79.900.000,00		83.895.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	24.675.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4/12 Laporan	56.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	59.220.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	52.450.000,00		55.072.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	7.450.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	7.822.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur	5.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		-	25.000.000,00		26.250.000,00	
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		-	25.000.000,00		26.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		-	50.000.000,00		52.500.000,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	24 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		-	610.000.000,00		640.500.000,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		-	50.000.000,00		52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Elat	52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		-	560.000.000,00		588.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		-	65.000.000,00		68.250.000,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		-	65.000.000,00		68.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pertengkapian Ditera Ulang	300 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 Orang	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			130.000.000,00		136.500.000,00	
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		-	120.000.000,00		126.000.000,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		-	120.000.000,00		126.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		-	10.000.000,00		10.500.000,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	10.000.000,00		10.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.000.000.000,00		1.050.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.000.000.000,00		1.050.000.000,00	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.000.000.000,00		1.050.000.000,00	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	200.000.000,00		210.000.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	200.000.000,00		210.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		-	600.000.000,00		630.000.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		-	600.000.000,00		630.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	630.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-	200.000.000,00		210.000.000,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		-	200.000.000,00		210.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	11 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			750.000.000,00		787.500.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			750.000.000,00		787.500.000,00	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			750.000.000,00		787.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	750.000.000,00		787.500.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	17.000.000,00		17.850.000,00	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.850.000,00	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		-	733.000.000,00		769.650.000,00	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	358.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.900.000,00	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			500.000.000,00		525.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			500.000.000,00		525.000.000,00	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			500.000.000,00		525.000.000,00	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-	500.000.000,00		525.000.000,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		-	500.000.000,00		525.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	11 Laporan	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			536.000.000,00		562.800.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			536.000.000,00		562.800.000,00	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			536.000.000,00		562.800.000,00	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-	536.000.000,00		562.800.000,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		-	536.000.000,00		562.800.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	206.368.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.687.187,50	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	287.017.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.368.637,50	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	42.613.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.744.175,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				500.000.000,00		525.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			500.000.000,00		525.000.000,00	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			500.000.000,00		525.000.000,00	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			-	500.000.000,00	525.000.000,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		-	400.000.000,00		420.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Dokumen Laporan	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		-	100.000.000,00		105.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN HUKUM				599.460.373,00		629.433.391,65	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			599.460.373,00		629.433.391,65	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			599.460.373,00		629.433.391,65	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			-	599.460.373,00	629.433.391,65	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		-	426.088.250,00		447.392.662,50	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	45 Dokumen	211.972.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.570.862,50	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	101.406.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.476.300,00	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100%	112.710.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.345.500,00	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		-	173.372.123,00		182.040.729,15	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100%	173.372.123,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.040.729,15	BAGIAN HUKUM
BAGIAN ORGANISASI				600.000.000,00		630.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			600.000.000,00		630.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			600.000.000,00		630.000.000,00	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	600.000.000,00		630.000.000,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi		-	600.000.000,00		630.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	13 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	BAGIAN UMUM			4.965.000.000,00		5.213.250.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4.965.000.000,00		5.213.250.000,00	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			4.965.000.000,00		5.213.250.000,00	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	4.965.000.000,00		5.213.250.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	600.000.000,00		630.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	550.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	577.500.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	3.265.000.000,00		3.428.250.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	965.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.013.250.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	750.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	787.500.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	550.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	577.500.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	550.000.000,00		577.500.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	577.500.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	550.000.000,00		577.500.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	550.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	577.500.000,00	BAGIAN UMUM
	BAGIAN PEMERINTAHAN			435.097.961,00		456.852.859,05	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			435.097.961,00		456.852.859,05	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			435.097.961,00		456.852.859,05	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		-	435.097.961,00		456.852.859,05	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		-	435.097.961,00		456.852.859,05	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	122.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.097.500,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	252.147.961,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.755.359,05	BAGIAN PEMERINTAHAN
	SEKDA MALUKU TENGGARA			21.134.280.014,00		22.190.994.014,70	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			21.134.280.014,00		22.190.994.014,70	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			21.134.280.014,00		22.190.994.014,70	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	21.134.280.014,00		22.190.994.014,70	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	8.686.766.950,00		9.121.105.297,50	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	8.686.766.950,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	9.121.105.297,50	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	114.118.000,00		119.823.900,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	42.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	44.887.500,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	3 Orang	71.368.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	74.936.400,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	4.252.002.395,00		4.464.602.514,75	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	7 Paket	35.097.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	36.852.375,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	430.083.145,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	451.587.302,25	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket	305.501.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	320.776.312,50	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	125.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	131.775.000,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	1.155.820.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.213.611.525,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	2.200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	2.310.000.000,00	SEKDA MALUKU TENGGARA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	3.342.552.500,00		3.509.680.125,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	8.925.000,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.952.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	2.050.125.000,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.381.552.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.450.630.125,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	993.218.150,00		1.042.879.057,50	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	377.667.900,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	396.551.295,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	365.550.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	383.827.762,50	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	1.025.861.519,00		1.077.154.594,95	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	479.011.519,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	502.962.094,95	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	28 Paket	346.850.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	364.192.500,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		-	2.719.760.500,00		2.855.748.525,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.458.690.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.531.624.500,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	1.076.450.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.130.272.500,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	184.620.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	193.851.525,00	SEKDA MALUKU TENGGARA
SEKRETARIAT DPRD				38.341.273.721,00		40.258.337.407,05	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			38.341.273.721,00		40.258.337.407,05	
04.02	SEKRETARIAT DPRD			38.341.273.721,00		40.258.337.407,05	
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	26.120.998.221,00		27.427.048.132,05	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.947.983.608,00		3.095.382.788,40	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	2.847.983.608,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	2.990.382.788,40	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	600.000.000,00		630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	500.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	4 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	554.259.000,00		581.971.950,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	210.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	220.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	70.259.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.771.950,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	950.000.000,00		997.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	950.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	997.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	1.439.200.000,00		1.511.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	536.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	562.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	903.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	948.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	722.999.700,00		759.149.685,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	255.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	267.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	447.999.700,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	470.399.685,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		-	15.826.555.913,00		16.617.883.708,65	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25	15.030.191.913,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	15.781.701.508,65	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	796.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	836.182.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		-	3.080.000.000,00		3.234.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	1.080.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.134.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	2.000.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		-	12.220.275.500,00		12.831.289.275,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		-	978.800.000,00		1.027.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	978.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.027.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		-	5.774.725.500,00		6.063.461.775,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	100	5.774.725.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.063.461.775,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		-	5.316.750.000,00		5.582.587.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	800.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	4.366.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.585.087.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	1498 Orang	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		-	150.000.000,00		157.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			7.062.530.832,00		7.415.657.373,60	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.062.530.832,00		7.415.657.373,60	
05.01	PERENCANAAN			6.500.607.582,00		6.825.637.961,10	
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	3.878.655.082,00		4.072.587.836,10	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	56.821.000,00		59.662.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	36.091.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.895.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	20.730.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.766.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	3.044.315.082,00		3.196.530.836,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	2.920.200.082,00 -		3.066.210.086,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	124.115.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.320.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	128.879.000,00		135.322.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	128.879.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.322.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	309.985.000,00		325.484.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	6.706.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.041.562,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	59.660.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.643.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	7.978.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.377.687,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100% Paket	33.096.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.750.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	66.856.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.198.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	37.008.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.858.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	98.680.000,00 -		103.614.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	220.800.000,00		231.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	168.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	52.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.440.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	117.855.000,00		123.747.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	103.145.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.302.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.710.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.195.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		-	1.844.623.000,00		1.936.854.150,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		-	1.389.651.500,00		1.459.134.075,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	57.799.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.689.737,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dokumen	196.337.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.154.112,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	63.197.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.357.375,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	10 Berita Acara	201.657.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.739.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	243.942.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.139.625,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	110 Usulan	28.615.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.045.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	598.102.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	628.007.625,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		-	62.924.750,00		66.070.987,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	16.113.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.919.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	46.811.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.151.812,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		-	363.046.750,00		381.199.087,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	11 Laporan	186.024.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.325.462,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Laporan	177.022.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.873.625,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		-	29.000.000,00		30.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	45 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		-	777.329.500,00		816.195.975,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		-	363.746.250,00		381.933.562,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	8.366.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.784.562,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	50.237.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.749.375,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	17.580.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.459.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	48.980.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.429.787,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	8.421.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.842.312,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	56.400.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.220.262,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	106.620.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.951.262,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	67.140.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.497.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		-	223.945.250,00		235.142.512,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	5.139.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.396.737,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	39.179.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.138.737,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.002.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.502.887,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	64.552.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.780.387,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	5.083.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.337.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	34.778.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.517.687,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	8.874.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.317.962,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	56.334.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.150.962,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		-	189.638.000,00		199.119.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	6.474.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.798.487,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	29.371.000,00 -		30.839.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan	14.181.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.890.312,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	65.862.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.155.362,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	3.190.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.350.025,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8 Laporan	18.262.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.175.887,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	3.917.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.113.112,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	48.378.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.797.162,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			561.923.250,00		590.019.412,50	
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		-	561.923.250,00		590.019.412,50	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		-	387.334.750,00		406.701.487,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5 Laporan	288.370.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.789.287,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	98.964.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.912.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		-	61.193.500,00		64.253.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	61.193.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.253.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		-	113.395.000,00		119.064.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	113.395.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.064.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				12.844.308.476,00		13.486.523.899,80	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			12.844.308.476,00		13.486.523.899,80	
05.02	KEUANGAN			12.844.308.476,00		13.486.523.899,80	
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	3.952.900.726,00	4.150.545.762,30	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	2.490.195.851,00	2.614.705.643,55	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2.483.260.851,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.607.423.893,55	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.743.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.930.937,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.191.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.350.812,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	738.507.375,00		775.432.743,75	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.755.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.942.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	108.746.875,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.184.218,75	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	168.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.187.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	165.753.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.040.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	291.502.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.077.625,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	141.375.000,00		148.443.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	34.375.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.093.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	107.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.350.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	506.512.500,00		531.838.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	482.512.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.638.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	76.310.000,00		80.125.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21.310.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.375.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-	8.249.725.250,00		8.662.211.512,50	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		-	1.969.965.500,00		2.068.463.775,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	237.620.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.501.525,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	218.448.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.371.187,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	54.682.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.416.625,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	58.382.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.301.887,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	636.563.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.391.412,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	719.729.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	755.716.237,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	44.538.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.764.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		-	179.407.250,00		188.377.612,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	56.894.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.738.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	38.712.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.647.862,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	46.501.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.826.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	37.300.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.165.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		-	700.352.500,00		735.370.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	26.232.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.544.387,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	116.224.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.035.987,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	495.958.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.756.425,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	19.782.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.771.362,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	23.804.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.994.462,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	18.350.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.267.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-	5.400.000.000,00		5.670.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.400.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.520.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	3.000.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		-	641.682.500,00		673.766.625,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	641.682.500,00		673.766.625,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	132.050.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.652.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	43.284.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.448.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	122.778.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.916.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	127.443.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.815.937,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	27.436.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.808.587,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	80.413.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.433.912,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	52 Dokumen	79.929.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.925.712,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	52 Laporan	28.347.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.764.875,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			4.840.466.307,00		5.082.489.622,35	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.840.466.307,00		5.082.489.622,35	
05.02	KEUANGAN			4.840.466.307,00		5.082.489.622,35	
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	3.897.111.807,00		4.091.967.397,35	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	3.056.037.307,00		3.208.839.172,35	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.056.037.307,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.208.839.172,35	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	64.659.000,00		67.891.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	3 Orang	64.659.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.891.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	454.865.500,00		477.608.775,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.850.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.042.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.753.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.741.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	206.262.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.575.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	254.400.000,00		267.120.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	116.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.220.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	67.150.000,00		70.507.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.040.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.742.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.860.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.753.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.250.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.012.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		-	943.354.500,00		990.522.225,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		-	943.354.500,00		990.522.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	54.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	785 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4 Layanan	33.801.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.491.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	52.499.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.123.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	503.054.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.207.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA				24.320.660.947,00		25.536.693.994,35	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			24.320.660.947,00		25.536.693.994,35	
05.03	KEPEGAWAIAN			24.320.660.947,00		25.536.693.994,35	
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	21.995.257.010,00		23.095.019.860,50	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	21.406.907.510,00		22.477.252.885,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	413	21.377.567.510,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.446.445.885,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29.340.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.807.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	115.800.250,00		121.590.262,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.300.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.565.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	14.750.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.487.762,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	75.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.537.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	220.810.250,00		231.850.762,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.635.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.617.012,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.875.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.618.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	21.840.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.932.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	124.460.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.683.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	100.000.000,00		105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	96.200.000,00		101.010.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	43.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	53.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	55.539.000,00		58.315.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	34.999.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.748.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.540.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.017.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		-	2.325.403.937,00		2.441.674.133,85	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		-	474.667.187,00		498.400.546,35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	378.334.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.250.962,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	33.714.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.399.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	29.795.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.285.537,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.693.187,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.777.846,35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	11.130.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.686.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		-	159.849.750,00		167.842.237,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	31.000.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.550.525,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	43.558.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.735.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	85.291.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.555.812,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		-	1.614.343.250,00		1.695.060.412,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	357.167.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.025.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	57.175.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.034.537,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1.200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		-	76.543.750,00		80.370.937,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20.843.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.885.937,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	30 Orang	19.250.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.212.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	17.250.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.112.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	19.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			1.913.029.738,00		2.008.681.224,90	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.913.029.738,00		2.008.681.224,90	
05.06	PENGELOLAAN PERBATASAN			1.913.029.738,00		2.008.681.224,90	
05.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.619.831.738,00		1.700.823.324,90	
5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.002.411.738,00		1.052.532.324,90	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	997.411.738,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.047.282.324,90	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	326.000.000,00		342.300.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	125.000.000,00		131.250.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	96.000.000,00		100.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	96.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	70.420.000,00		73.941.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.300.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.215.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.850.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.120.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.876.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
05.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		-	293.198.000,00		307.857.900,00	
5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		-	88.000.000,00		92.400.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.150.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		-	136.000.000,00		142.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.250.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.050.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.02.0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	34.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.700.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan		-	69.198.000,00		72.657.900,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.150.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	6.198.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.507.900,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
INSPEKTORAT				7.969.012.340,00		8.367.462.957,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			7.969.012.340,00		8.367.462.957,00	
06.01	INSPEKTORAT DAERAH			7.969.012.340,00		8.367.462.957,00	
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	4.717.580.795,00	4.953.459.834,75	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	21.721.500,00		22.807.575,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.721.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.807.575,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.414.809.090,00		2.535.549.544,50	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	2.414.809.090,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.535.549.544,50	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	489.192.955,00		513.652.602,75	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang	489.192.955,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.652.602,75	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	941.857.250,00		988.950.112,50	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.875.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.318.750,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	158.036.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.938.062,50	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	219.898.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.893.425,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	555.047.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.799.875,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	350.000.000,00		367.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	350.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	200.000.000,00		210.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	300.000.000,00		315.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	INSPEKTORAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	150.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	INSPEKTORAT
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		-	2.337.084.795,00		2.453.939.034,75	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		-	2.336.661.000,00		2.453.494.050,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	223.237.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.399.375,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	273.955.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.653.275,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	284.256.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.469.325,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	192 Laporan	708.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	744.240.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	280.171.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.180.075,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	316.240.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.052.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		-	423.795,00		444.984,75	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	423.795,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.984,75	INSPEKTORAT
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		-	914.346.750,00		960.064.087,50	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		-	200.000.000,00		210.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomend asi	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		-	714.346.750,00		750.064.087,50	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	264.346.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.564.087,50	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	INSPEKTORAT
	KECAMATAN KEI KECIL			2.172.758.345,00		2.281.396.262,25	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.157.758.345,00		2.265.646.262,25	
07.01	KECAMATAN			2.157.758.345,00		2.265.646.262,25	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.810.338.095,00		1.900.854.999,75	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.556.161.595,00		1.633.969.674,75	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1.556.161.595,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	1.633.969.674,75	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	64.119.500,00		67.325.475,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	22.680.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.402.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	7.772.100,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	30.117.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	31.623.375,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	30.000.000,00		31.500.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	16.875.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	17.718.750,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	13.125.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	13.781.250,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	99.558.000,00		104.535.900,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	45.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	47.250.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.558.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	57.285.900,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	60.499.000,00		63.523.950,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.999.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	47.248.950,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	5.775.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	42.500.000,00		44.625.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	42.500.000,00		44.625.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	KECAMATAN KEI KECIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	13.125.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	224.309.000,00		235.524.450,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	24.309.000,00		25.524.450,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	14.309.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	15.024.450,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	200.000.000,00		210.000.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	149.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	156.450.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	51.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	53.550.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	27.111.250,00		28.466.812,50	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	27.111.250,00		28.466.812,50	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	27.111.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	28.466.812,50	KECAMATAN KEI KECIL
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	15.000.000,00		15.750.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	15.000.000,00		15.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	38.500.000,00		40.425.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	38.500.000,00		40.425.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	32.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	34.125.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	15.000.000,00		15.750.000,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	15.000.000,00		15.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL
KECAMATAN KEI KECIL BARAT				1.270.765.503,00		1.334.303.778,15	
UNSUR KEWILAYAHAN				1.270.765.503,00		1.334.303.778,15	
07.01 KECAMATAN				1.270.765.503,00		1.334.303.778,15	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.075.527.003,00		1.129.303.353,15	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	862.207.503,00		905.317.878,15	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	862.207.503,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	905.317.878,15	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	95.774.500,00		100.563.225,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	5.250.000,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.050.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	25.252.500,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.292.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	27.606.600,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.001.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	10.501.050,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.431.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	31.953.075,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	68.625.000,00		72.056.250,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	27.125.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	28.481.250,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	41.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	43.575.000,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	37.850.000,00		39.742.500,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	6.300.000,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.850.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	33.442.500,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	11.070.000,00		11.623.500,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.070.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	11.623.500,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	72.068.750,00		75.672.187,50	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	37.068.750,00		38.922.187,50	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	23.615.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	24.796.537,50	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13.453.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	14.125.650,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	35.000.000,00		36.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 dokumen Laporan	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	36.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	40.518.250,00		42.544.162,50	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	40.518.250,00		42.544.162,50	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	23.083.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	24.237.412,50	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	17.435.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	18.306.750,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	22.350.000,00		23.467.500,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	22.350.000,00		23.467.500,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14.350.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	15.067.500,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	8.400.000,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	28.824.000,00		30.265.200,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	28.824.000,00		30.265.200,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	15.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.824.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	14.515.200,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	31.477.500,00		33.051.375,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	31.477.500,00		33.051.375,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	7.987.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	8.386.875,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	23.490.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira	24.664.500,00	KECAMATAN KEI KECIL BARAT
	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR			1.470.766.612,00		1.544.304.942,60	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.470.766.612,00		1.544.304.942,60	
07.01	KECAMATAN			1.470.766.612,00		1.544.304.942,60	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.263.359.112,00		1.326.527.067,60	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	998.035.612,00		1.047.937.392,60	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	998.035.612,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	1.047.937.392,60	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	74.113.500,00		77.819.175,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.206.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	27.516.300,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.296.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	13.961.325,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	6.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25.611.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	26.891.550,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	80.000.000,00		84.000.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	65.000.000,00		68.250.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	46.210.000,00		48.520.500,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.210.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	6.520.500,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	62.000.000,00		65.100.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	62.000.000,00		65.100.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	28.350.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	56.357.250,00		59.175.112,50	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	56.357.250,00		59.175.112,50	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Ohoi Lembaga Ke masyarakata n	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13 Dokumen	31.357.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	32.925.112,50	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	18.551.750,00		19.479.337,50	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	18.551.750,00		19.479.337,50	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	18.551.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	19.479.337,50	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	22.000.000,00		23.100.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	22.000.000,00		23.100.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	23.100.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	48.498.500,00		50.923.425,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	48.498.500,00		50.923.425,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	33.498.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa	35.173.425,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR
KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR				1.193.099.476,00		1.252.754.449,80	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.193.099.476,00		1.252.754.449,80	
07.01	KECAMATAN			1.193.099.476,00		1.252.754.449,80	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.050.379.476,00		1.102.898.449,80	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	883.379.476,00		927.548.449,80	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	873.379.476,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	917.048.449,80	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	100.000.000,00		105.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	0,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	42.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	42.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	10.000.000,00		10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	22.000.000,00		23.100.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	0,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	12.600.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	35.000.000,00		36.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat	5.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	50.000.000,00		52.500.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	50.000.000,00		52.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	35.000.000,00		36.750.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	35.000.000,00		36.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	20.000.000,00		21.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	20.000.000,00		21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	20.000.000,00		21.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	20.000.000,00		21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	17.720.000,00		18.606.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	17.720.000,00		18.606.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	14.720.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa	15.456.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR
KECAMATAN KEI BESAR SELATAN				1.385.034.619,00		1.454.286.349,95	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.385.034.619,00		1.454.286.349,95	
07.01	KECAMATAN			1.385.034.619,00		1.454.286.349,95	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.246.477.869,00		1.308.801.762,45	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1.045.477.869,00		1.097.751.762,45	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	1.035.477.869,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	1.087.251.762,45	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	111.000.000,00		116.550.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	6.300.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	5.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	42.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	42.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	40.000.000,00		42.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	31.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	30.000.000,00		31.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	24.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	25.200.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	20.000.000,00		21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	45.000.000,00		47.250.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	45.000.000,00		47.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	35.000.000,00		36.750.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	35.000.000,00		36.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	35.000.000,00		36.750.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	35.000.000,00		36.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	10.000.000,00		10.500.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	10.000.000,00		10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	13.556.750,00		14.234.587,50	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	13.556.750,00		14.234.587,50	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	3.556.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar	3.734.587,50	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
	KECAMATAN MANYEUW			1.200.484.752,00		1.260.508.989,60	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.200.484.752,00		1.260.508.989,60	
07.01	KECAMATAN			1.200.484.752,00		1.260.508.989,60	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	1.062.301.502,00		1.115.416.577,10	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	877.072.502,00		920.926.127,10	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	877.072.502,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	920.926.127,10	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	70.791.000,00		74.330.550,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.755.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	30.192.750,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.425.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	16.196.250,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25.611.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	26.891.550,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	30.000.000,00		31.500.000,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	KECAMATAN MANYEUW

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	54.453.000,00		57.175.650,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	17.640.000,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	37.653.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	39.535.650,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	29.985.000,00		31.484.250,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.995.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	26.244.750,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.990.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	5.239.500,00	KECAMATAN MANYEUW
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	51.320.000,00		53.886.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	42.170.000,00		44.278.500,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.520.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	32.046.000,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.650.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	12.232.500,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-	9.150.000,00		9.607.500,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	9.150.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	9.607.500,00	KECAMATAN MANYEUW
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	28.226.250,00		29.637.562,50	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	28.226.250,00		29.637.562,50	KECAMATAN MANYEUW
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.520.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	12.096.000,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	16.706.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	17.541.562,50	KECAMATAN MANYEUW
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	16.670.000,00		17.503.500,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	16.670.000,00		17.503.500,00	KECAMATAN MANYEUW

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	16.670.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	17.503.500,00	KECAMATAN MANYEUW
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	14.820.000,00		15.561.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	14.820.000,00		15.561.000,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	14.820.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	15.561.000,00	KECAMATAN MANYEUW
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	27.147.000,00		28.504.350,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	27.147.000,00		28.504.350,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	9.167.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	9.625.350,00	KECAMATAN MANYEUW
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	17.980.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa	18.879.000,00	KECAMATAN MANYEUW
	KECAMATAN HOAT SORBAY			1.320.402.942,00		1.386.423.089,10	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.320.402.942,00		1.386.423.089,10	
07.01	KECAMATAN			1.320.402.942,00		1.386.423.089,10	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	861.616.442,00		904.697.264,10	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	861.616.442,00		904.697.264,10	KECAMATAN HOAT SORBAY
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	861.616.442,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	904.697.264,10	KECAMATAN HOAT SORBAY
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	310.000.000,00		325.500.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	150.000.000,00		157.500.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	160.000.000,00		168.000.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	60.000.000,00		63.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	60.000.000,00		63.000.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	88.786.500,00		93.225.825,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	88.786.500,00		93.225.825,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	88.786.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	93.225.825,00	KECAMATAN HOAT SORBAY
KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN				945.296.380,00		992.561.199,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			945.296.380,00		992.561.199,00	
07.01	KECAMATAN			945.296.380,00		992.561.199,00	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	778.999.130,00		817.949.086,50	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	561.433.630,00		589.505.311,50	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/Bulan Orang/bulan	561.433.630,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	589.505.311,50	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	82.325.500,00		86.441.775,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.458.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	28.831.425,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.821.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	17.662.050,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	33.046.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	34.698.300,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	57.250.000,00		60.112.500,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30.625.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	32.156.250,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26.625.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	27.956.250,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	58.000.000,00		60.900.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	3.780.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	54.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	57.120.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	19.990.000,00		20.989.500,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.990.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	20.989.500,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	47.540.250,00		49.917.262,50	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	47.540.250,00		49.917.262,50	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		-	32.421.500,00 -		34.042.575,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	15.118.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	15.874.687,50	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	35.524.500,00		37.300.725,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	35.524.500,00		37.300.725,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-	13.366.000,00 -		14.034.300,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	22.158.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	23.266.425,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	36.000.000,00		37.800.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	36.000.000,00		37.800.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	36.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	37.800.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	23.800.000,00		24.990.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	23.800.000,00		24.990.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	23.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	24.990.000,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	23.432.500,00		24.604.125,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	23.432.500,00		24.604.125,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	23.432.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa	24.604.125,00	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN
KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT				983.016.036,00		1.032.166.837,80	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			983.016.036,00		1.032.166.837,80	
07.01	KECAMATAN			983.016.036,00		1.032.166.837,80	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	772.953.786,00		811.601.475,30	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	614.652.036,00		645.384.637,80	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	614.652.036,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.384.637,80	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	80.576.750,00		84.605.587,50	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.718.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.754.687,50	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.147.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.954.350,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.999.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.748.950,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.712.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.147.600,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	30.000.000,00		31.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	47.725.000,00		50.111.250,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.080.000,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.125.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.031.250,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	79.034.750,00		82.986.487,50	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	51.882.750,00		54.476.887,50	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	32.801.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.441.575,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	19.081.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.035.312,50	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	27.152.000,00		28.509.600,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.152.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.509.600,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	64.967.500,00		68.215.875,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	64.967.500,00		68.215.875,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	40.492.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.517.125,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.475.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.698.750,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	34.250.000,00		35.962.500,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	34.250.000,00		35.962.500,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.250.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.962.500,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	31.810.000,00		33.400.500,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	31.810.000,00		33.400.500,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	31.810.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.400.500,00	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT
KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT				1.121.681.775,00		1.177.765.863,75	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.121.681.775,00		1.177.765.863,75	
07.01	KECAMATAN			1.121.681.775,00		1.177.765.863,75	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	949.347.775,00		996.815.163,75	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	764.290.775,00		802.505.313,75	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	729.707.525,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	766.192.901,25	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	34.583.250,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.312.412,50	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	101.105.000,00		106.160.250,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	44.740.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.977.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.749.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa	20.736.450,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	33.616.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.296.800,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	22.250.000,00		23.362.500,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	22.250.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.362.500,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	3.600.000,00		3.780.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.780.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	58.102.000,00		61.007.100,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	32.502.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.127.100,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.880.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	97.598.000,00		102.477.900,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	48.900.000,00		51.345.000,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	29.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.237.500,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	19.150.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.107.500,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	48.698.000,00		51.132.900,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	32.848.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.490.400,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	15.850.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.642.500,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	23.925.000,00		25.121.250,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	23.925.000,00		25.121.250,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	23.925.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.121.250,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	22.025.000,00		23.126.250,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	22.025.000,00		23.126.250,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.025.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.126.250,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	28.786.000,00		30.225.300,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	28.786.000,00		30.225.300,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	6.405.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.725.250,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25 Laporan	22.381.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.500.050,00	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT
	KECAMATAN KEI BESAR			1.243.346.426,00		1.305.513.747,30	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.243.346.426,00		1.305.513.747,30	
07.01	KECAMATAN			1.243.346.426,00		1.305.513.747,30	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	993.346.426,00		1.043.013.747,30	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	605.346.426,00		635.613.747,30	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	555.346.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	583.113.747,30	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	158.000.000,00		165.900.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	20.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	37.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	38.850.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	22.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	23.100.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	79.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	82.950.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	75.000.000,00		78.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	83.000.000,00		87.150.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	24.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	54.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	56.700.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	72.000.000,00		75.600.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	17.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	17.850.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	190.000.000,00		199.500.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	90.000.000,00		94.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	100.000.000,00		105.000.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	35.000.000,00		36.750.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	35.000.000,00		36.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga K emasyarakat an	35.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	25.000.000,00		26.250.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	25.000.000,00		26.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	25.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa	26.250.000,00	KECAMATAN KEI BESAR
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.787.263.996,00		3.976.627.195,80	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			3.781.783.996,00		3.970.873.195,80	
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.781.783.996,00		3.970.873.195,80	
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.512.601.746,00		2.638.231.833,30	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.184.959.746,00		2.294.207.733,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.184.959.746,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.294.207.733,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	151.879.000,00		159.472.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.270.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.433.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	22.500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.625.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	21.750.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.837.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	3.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	18.011.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.911.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	83.348.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.515.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	33.875.000,00		35.568.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	33.875.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.568.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	116.400.000,00		122.220.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	56.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.220.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	25.488.000,00		26.762.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	25.488.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.762.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		-	729.275.500,00		765.739.275,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		-	729.275.500,00		765.739.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	60 Orang	729.275.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.739.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		-	50.000.000,00		52.500.000,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		-	50.000.000,00		52.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		-	28.856.000,00		30.298.800,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		-	28.856.000,00		30.298.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	28.856.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.298.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		-	335.439.750,00		352.211.737,50	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		-	335.439.750,00		352.211.737,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31 Orang	335.439.750,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.211.737,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		-	125.611.000,00		131.891.550,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		-	125.611.000,00		131.891.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15 Orang	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Orang	25.611.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.891.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Laporan	50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	5.480.000,00		5.754.000,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	5.480.000,00		5.754.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.480.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.754.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H				771.741.159.119,42		2.168.078.021.542,00	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAKU HUKUM,
P. J. BUNGA, SH



